

Langkah Progresif Mewujudkan Kilang Kelas Dunia

Progressive Steps to Realize a World-Class Refinery



PT Kilang Pertamina Balikpapan

TENTANG LAPORAN TAHUNAN

About Annual Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Pertamina Kilang Balikpapan (KPB) dengan tema “Langkah Progresif Mewujudkan Kilang Kelas Dunia”. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan data dan perkembangan bisnis Perusahaan di sepanjang tahun 2021 serta masa depan keberlanjutan bisnis PT Kilang Pertamina Balikpapan.

Laporan Tahunan ini diterbitkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi dalam lingkup internal kepada pemegang saham serta para pemangku kepentingan dan kepatuhan terkait. Laporan Tahunan ini menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja PT Kilang Pertamina Balikpapan dalam setahun dan memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pada Laporan Tahunan ini memuat kata “KPB” dan “Perusahaan” yang didefinisikan sebagai PT Kilang Pertamina Balikpapan, adapun penyebutan satuan mata uang “Rupiah” atau “Rp” merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dolar Amerika Serikat” atau “USD” merujuk pada mata uang yang digunakan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Laporan Tahunan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik.

Welcome to the Annual Report of PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) with the theme “Progressive Steps to Realize a World-Class Refinery”. This theme was chosen based on an in depth analysis and study based on data and the Company’s business developments throughout 2021 and the future business sustainability of PT Kilang Pertamina Balikpapan.

This Annual Report is published to improve the disclosure of information with our shareholders and related stakeholders and for compliance. This Annual Report is a source of comprehensive documentation containing information on the performance of PT Kilang Pertamina Balikpapan during the year, and contains statements of the Company’s financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws and regulations, except for matters of a historical nature. These statements are subject to risks, uncertainties, and may result in actual developments that are materially different from those reported.

This Annual Report contains the words “KPB” and “Company” which are defined as PT Kilang Pertamina Balikpapan, while the currency unit “Rupiah” or “Rp” refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while “United States Dollars” or “USD” “ refers to the currency used in the Financial Statements in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards. This Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English using easy-to read type and font sizes and printed with good quality.

PENJELASAN TEMA

Theme Explanation

Langkah Progresif Mewujudkan Kilang Kelas Dunia

Progressive Steps to Realize a World-Class Refinery



Di tengah ketidakpastian akibat pandemi, PT Kilang Pertamina Balikpapan terus berupaya dalam memperkuat kinerja terbaiknya dengan komitmen untuk menjadi operator dan pemilik kilang kelas dunia yang menghasilkan produk-produk berkualitas sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan Perusahaan. Komitmen tersebut didukung dengan adanya rencana strategis yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh kekuatan dan memfokuskan diri mewujudkan ketahanan, kemandirian, & kedaulatan energi untuk Negeri.

During the uncertainties due to the pandemic, PT Kilang Pertamina Balikpapan continued to strengthen its best performance with a commitment to become a world-class refinery operator, and owner that produce quality products so as to increase the Company's growth. This commitment is supported by a strategic plan carried out by integrating all our strengths, focusing on realizing resilience, independence and energy sovereignty for the country.

KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuity

2020



PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) terus melanjutkan momentum pertumbuhan di tahun awal berdirinya untuk memacu progres fisik *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) *InSide Battery Limit–OutSide Battery Limit* (ISBL–OSBL), EPC Lawe–Lawe, dan 8 (delapan) proyek *Early Works*. Walaupun di tengah tantangan Pandemi COVID–19, KPB terus bergerak maju untuk beradaptasi dengan era “*new normal*” dalam mengatasi setiap tantangan sehingga dapat merealisasikan progres fisik proyek mencapai 46,95% dan realisasi *Project Cost* sebesar USD1,83 Miliar di tahun 2021.

PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) continued its growth momentum in the early years of its establishment to spur the physical progress of the *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) *InSide Battery Limit–OutSide Battery Limit* (ISBL–OSBL), Lawe–Lawe EPC, and 8 (eight) *Early Works* project. Even during the challenging COVID–19 pandemic, KPB continues to move forward to adapt to the “*new normal*” era in overcoming every challenge so that the physical progress of the project can reach 46.95%, at a cost of USD1.83 billion in 2021.

DAFTAR ISI

Table of Contents

2	Tentang Laporan Tahunan About Annual Report	63	Bidang Usaha Line of Business
3	Penjelasan Tema Theme Explanation	66	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan Vision, Mission and Corporate Culture
3	Kesinambungan Tema Continuity of Theme	68	Struktur Organisasi Organizational structure
4	Daftar Isi List of contents	69	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile
8	Sekilas Tentang KPB KPB at a Glance	74	Profil Direksi Board of Directors Profile
12	Pencapaian Tahun 2021 Achievements in 2021	78	Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition
KILAS KINERJA Performance Highlights		80	Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure
16	Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Data Highlights	80	Daftar Entitas Anak & Entitas Asosiasi List of Subsidiaries & Associates
19	Ikhtisar Operasional Operational Review	81	Kronologi Penerbitan/Pencatatan Saham & Efek Lainnya Chronology of Issuance/Listing of Shares & Other Securities
21	Ikhtisar Saham, Obligasi, dan Aksi Korporasi Stocks, Bonds and Corporate Actions Highlights	81	Nama dan Alamat Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Name and Address of Branch Office or Representative Office
22	Kilas Peristiwa 2021 Event Highlights 2021	82	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Supporting Institutions and/or Professionals
LAPORAN MANAJEMEN Management Report		ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis	
27	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	86	Tinjauan Perekonomian dan Industri Economic and Industry Overview
37	Laporan Direksi Directors' Report	89	Rencana Strategis 2021 2021 Strategic Plan
PROFIL PERUSAHAAN Company Profile		91	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Review Per Business Segment
48	Informasi Umum dan Identitas Perusahaan General Information and Company Identity	92	Tinjauan Keuangan Financial Review
50	Riwayat Singkat Perusahaan Brief Company History	103	Tinjauan Keuangan Lainnya Other Financial Review
62	Logo Perusahaan Company Logo		

FUNGSI PENUNJANG BISNIS Business Support Review

- 112 Sumber Daya Manusia
Human Resources
- 119 Pengembangan Teknologi Informasi
Information Technology Development

TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance

- 124 Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
Implementation of Good Corporate Governance
- 127 Struktur GCG Perusahaan
Company GCG Structure
- 128 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
- 131 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 139 Komisaris Independen
Independent Commissioner
- 140 Direksi
Board of Directors
- 147 Transparansi Informasi Organ Dewan Komisaris dan Direksi
Information Transparency of Board of Commissioners and Board of Directors Organ
- 160 Organ Pendukung Dewan Komisaris
Supporting Organs for the Board of Commissioners
- 174 Organ Pendukung Direksi
Supporting Organs of the Board of Directors
- 184 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data
- 185 Akuntan Publik
Public Accountant
- 186 Manajemen Risiko
Risk Management
- 191 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
- 192 Perkara Hukum dan Sanksi Administrasi
Legal Cases and Administrative Sanctions

- 192 Kode Etik Perusahaan
Company Code of Conduct
- 192 Mekanisme *Whistleblowing System*
Whistleblowing System Mechanism
- 193 Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa
Goods and Services Procurement Mechanism
- 194 Kebijakan Gratifikasi
Gratification Policy
- 196 Pedoman Perusahaan terkait Aktivitas Politik dan Sosial
Company Guidelines regarding Political and Social Activities
- 196 Kebijakan Anti Korupsi
Anti-Corruption Policy
- 197 Pakta Integritas
Integrity Pact
- 197 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
State Administrator Wealth Report (LHKPN)

TANGGUNG JAWAB SOSIAL Corporate Social Responsibility

- 200 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Social and Environmental Responsibility Governance
- 208 Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021 PT Kilang Pertamina Balikpapan
Statement of Accountability of 2021 Annual Report of PT Kilang Pertamina Balikpapan by The Board of Commissioners and Board of Directors

LAPORAN KEUANGAN Financial Statements



MILESTONE RDMP BALIKPAPAN TAHUN 2021

RDMP Balikpapan Milestone
in 2021

2021 >

FEBRUARY



- Delivery to Site 3 unit Boiler A-331-01C/D/E
- Delivery to Site Onshore 20" Pipe EPC Lawe-Lawe



MARCH

Delivery to Site Alkylation
Reactor C-065-03

AUGUST



- Delivery to Site RFCC Disengager/Stripper and Regenerator
- Erection Alkylation Reactor



JULY

- Delivery to Site C3 Splitter C-063-06
- Mechanical Completion RFCC Feed
Tank D-320-12



SEPTEMBER



- Commissioning RFCC Feed Tank D-320-12
- Erection Steam Turbine Generator A

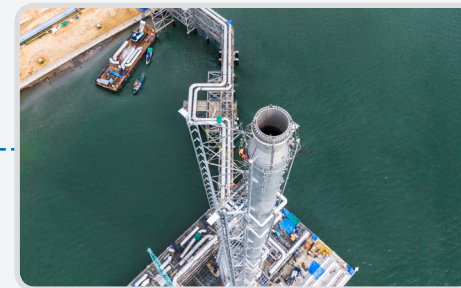


OCTOBER

- Completion Assembly
Ringer Crane 2800 ton
- Erection Propane/
Propylene Splitter



APRIL



Operational Acceptance Relocation Flare BPP-II & New HCC Flare



JUNE



Delivery to Site 5 unit Steam Turbine Generator A-331-03 A-E



DECEMBER



- Progres Fisik Overall per 31 Desember 2021 = 46,95% (vs plan 45,57%)
- Commissioning RFCC Feed Tank D-320-02B
- Erection RFCC 1st Regenerator C-052-10



2022



SEKILAS TENTANG KPB

KPB at a Glance

PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS

PT Kilang Pertamina Internasional
PT Pertamina Pedeve Indonesia

BIDANG USAHA LINE OF BUSINESS

1. Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi
 2. Industri Bahan Bakar dan Minyak Pelumas Hasil Pengilangan Minyak Bumi
 3. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara
 4. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk yang Berhubungan dengan Itu
1. Petroleum Refining Products Industry
 2. Fuel and Lubricating Oil Industry from Petroleum Refining
 3. Basic Organic Chemical Industry Sourced from Oil, Natural Gas, and Coal
 4. Wholesale of Solid, Liquid and Gas Fuels and Related Products

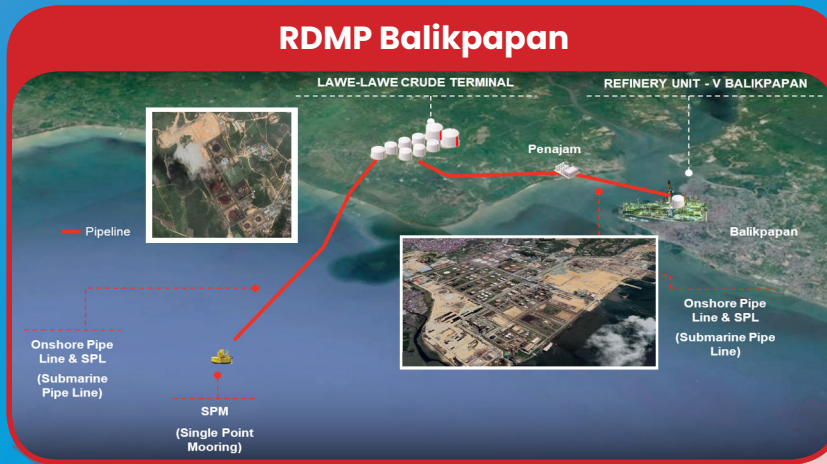
PRODUK DAN LAYANAN PRODUCTS AND SERVICES

- Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak Bumi
- Industri Kimia Dasar Organik
- Jasa Lainnya:
 - » Investasi pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam dan luar negeri;
 - » Perancangan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan kilang minyak.
 - » memproduksi produk-produk bahan bakar, minyak bumi dan petrokimia dari kilang minyak
- Petroleum Refining and Processing Business
- Basic Organic Chemical Industry
- Other Services:
 - » Investment in the construction and development of oil refineries at home and abroad;
 - » Design, construction, development, operation and management of oil refineries.
 - » Producing fuel, petroleum and petrochemical products from the oil refinery

WILAYAH OPERASI OPERATIONAL AREA



WILAYAH OPERASI OPERATIONAL AREA



Kontribusi Pembangunan bagi Kemajuan Negeri

Dalam upaya mendukung Kemandirian Energi Nasional, PT Kilang Pertamina Balikpapan berkontribusi pada salah satu Proyek Strategis Nasional, yaitu *Refinery Development Master Plan* yang dibangun untuk meningkatkan kapasitas pengolahan Kilang Balikpapan yang semula 260 ribu bph (kbph) menjadi 360 ribu bph (kbph) dengan peningkatan kualitas produk dari yang sebelumnya EURO II menjadi EURO V.

Proyek ini memiliki target TKDN sebesar 30%-35% dengan perkiraan tenaga kerja kurang lebih 17-20 Ribu pada bulan Juni hingga September 2022.

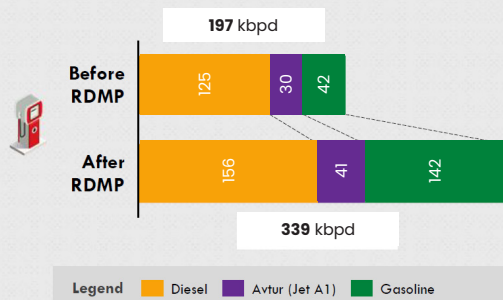
Contribution of Development for the Progress of the Country

In an effort to support National Energy Independence, PT Kilang Pertamina Balikpapan contributed to one of the National Strategic Projects, namely the *Refinery Development Master Plan* which was built to increase processing capacity from 260 thousand bph (kbph) to 360 thousand bph (kbph) by increasing production quality from the previous EURO II to EURO V.

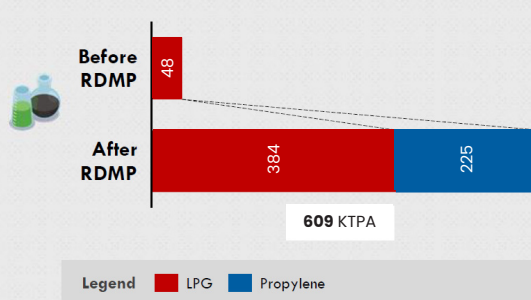
This project has a TKDN target of 30%-35% with an estimated workforce of approximately 17-20 thousand from June to September 2022.

Peningkatan Produksi Fuel dan Non-Fuel Increased Production of Fuel and Non-Fuel

Fuel Product, in kbpd



Non Fuel Product, in KTPA



Kapasitas Pengolahan Processing Capacity

Dari 260 ribu bph meningkat menjadi 360 ribu bph.
From 260 thousand bpd increased to 360 thousand bpd.

Kompleksitas Complexity

Peningkatan Kompleksitas Nelson Complexity Index (NCI) Kilang dari 3,7 menjadi 8,0.
Refinery Nelson Complexity Index (NCI) Improvement from 3.7 to 8.0.

Kualitas Produk Product Quality

Dari EURO II meningkat menjadi EURO V
From EURO II increased to EURO V

Target Penyerapan TKDN

TKDN Absorption Target

30-35%

Penyerapan Tenaga Kerja

Employment Absorption

- 15.000 pekerja pada puncak Konstruksi
- 600-800 pekerja saat operasional
- 15,000 workers at the peak of Construction
- 600-800 workers during operation

Lingkup Proyek RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe

Scope of the Balikpapan and Lawe-Lawe RDMP Projects

EPC ISBL-OSBL

Pekerjaan *revamping* unit eksisting dan pembangunan unit proses, *offsite & utilities* baru yang dijalankan oleh JO SHRP, yang terdiri dari SK E&C, Hyundai Engineering, PT Rekayasa Industri, dan PT Pembangunan Perumahan.

Revamping the existing units and construction of process units, off-site & new utilities carried out by JO SHRP, which consists of SK E&C, Hyundai Engineering, PT Rekayasa Industri, and PT Pembangunan Perumahan.

KONTRAKTOR | CONTRACTOR RDMP Balikpapan JO

Joint Operation yang terdiri dari SK E&C, Hyundai Engineering, PT Rekayasa Industri, & PT Pembangunan Perumahan

Joint Operation consisting of SK E&C, Hyundai Engineering, PT Rekayasa Industri, & PT Pembangunan Perumahan



EPC LAWE-LAWE

Pembangunan unit baru SPL & SPM dan Fasilitas dua Tanki Crude dengan kapasitas @1 juta barel yang dijalankan oleh JO CPPHK, yang terdiri dari China Petroleum Pipeline dan PT Hutama Karya.

Construction of a new SPL & SPM unit, and Facilities of two Crude Tanks with a capacity of @ 1 million Barrel run by JO CPPHK, which consists of China Petroleum Pipeline and PT Hutama Karya.

KONTRAKTOR | CONTRACTOR JO CPP HK

Joint Operation China Petroleum Pipeline & PT Hutama Karya

Joint Operation China Petroleum Pipeline & PT Hutama Karya



EARLY WORK

KONTRAKTOR | CONTRACTOR

EARLY WORK PHASE 1

1. Relocation of Flare BPP-1
2. EPCI Sheet Pile
3. Site Development 1 & New Jetty Construction

1. PT JGC Indonesia
2. PT Waskita Beton Precast Tbk
3. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

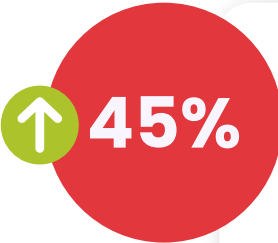
EARLY WORK PHASE 2

1. Tank Modification
2. New Site Office, HSSE Office & Lab
3. Re-route Jalan Yos Sudarso
4. New Workshop & Warehouse
5. Relocation Flare BPP-2 & HCC Flare
6. Site Development 2A
7. New Jetty Sulfur & Dredging
8. Bendali/Polder of Apartment
9. Site Development Lawe-Lawe
10. Refinery Flood Prevention
11. Procurement of Stone Column Aggregate

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
2. PT Adhi Karya (Persero)
3. PT Bahana Cipta Internusa
4. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
5. KSO PT Adhi Karya (Persero) – PT Rekayasa Industri
6. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
7. PT Adhi Karya (Persero)
8. PT Bahana Cipta Internusa
9. PT Nindya Karya (Persero)
10. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
11. PT Balikpapan Ready Mix

PENCAPAIAN TAHUN 2021

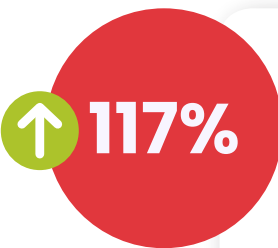
Achievements in 2021



Total Aset: USD2,20 Miliar
Total Assets: USD2.20 Billion
(vs last year USD1,52 Miliar/Billion)

Sejalan dengan progres pengembangan proyek RDMP di tahun 2021 dimana secara *overall progress* fisik telah mencapai 46,95% (*cut off date* 31 Desember 2021 dan Realisasi *Project Cost* mencapai USD1.83 Miliar).

In line with the progress of the RDMP project development in 2021 where overall physical progress has reached 46.95% (cut-off date December 31, 2021 and Capex Realization reached USD1.83 billion).



Total Ekuitas: USD1.671,10 Juta
Total Equity : USD1,671.10 Million
(vs last year USD768 Juta/Million)

Total ekuitas meningkat sejalan dengan realisasi Penyertaan Modal Pertamina (PMP) dari PT Kilang Pertamina Internasional selaku Pemegang Saham Mayoritas, dengan dana yang berasal dari PT Pertamina (Persero).

Total equity increased in line with the realization of Pertamina's Equity Participation (PMP) from PT Kilang Pertamina Internasional as the Majority Shareholder, with funds from PT Pertamina (Persero).



Keselamatan Migas Oil and Gas Safety

**Kategori:
Tanpa Kehilangan Jam Kerja
Sebagai Akibat Kecelakaan Selama
3 (tiga) Tahun Hingga Mencapai
27.369.267 Jam Kerja**

Category: Without Loss of Working Hours As A Result of Accidents For 3 (three) Years Up To 27.369.267 Working Hours

Dari
Kementerian ESDM RI
From Ministry of ESDM RI

(Agustus/August 2021)



ZERO ACCIDENT AWARD

**Pelaksanaan Program K3
dengan Pencapaian
17.911.002 Jam Kerja
Aman tanpa Kecelakaan Kerja**
Implementation of OHS Program with
Achievements of 17.911.002
Safe Working Hours without Work
Accidents.

Dari
Kementerian Ketenagakerjaan RI
From Indonesian Ministry of Manpower

(Agustus/August 2021)



Menjalankan Kegiatan Sosial Conducting Social Activities

PT Kilang Pertamina Balikpapan melaksanakan proyek pengembangan kilang RDMP Balikpapan & Lawe-Lawe. Meski masih menjalankan kegiatan dalam bentuk aktivitas proyek, KPB telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL"). TJSL adalah komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Adapun kegiatan TJSL berfokus pada kegiatan jangka pendek dan panjang, baik dalam bentuk donasi serta perbaikan sarana dan prasarana sosial, serta dalam bentuk program yang sifatnya berkelanjutan dalam upaya mendorong kemandirian masyarakat di sekitar area ring 1 operasional Perusahaan. Program-program TJSL mengacu pada pilar kemandirian dan lingkungan hidup.

KPB sampai dengan saat ini masih dalam tahapan penyelesaian proyek, sehingga belum mencatatkan *revenue*. Mengingat pemahaman bahwa alokasi dana CSR merupakan bagian dari Profit, maka KPB belum melaksanakan program CSR dan yang bersifat *sustainable*, namun saat ini telah melaksanakan program yang bersifat bantuan/*charity*/donasi, khususnya yang ditujukan kepada para *stakeholder* di wilayah Ring 1 Proyek.

Kegiatan yang dilakukan di tahun 2021 terdiri dari: 6 bantuan donasi langsung kepada masyarakat, 1 kegiatan dukungan logistik bagi kegiatan Kodam VI/Mulawarman Kaltim, dan 1 kegiatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga.

PT Kilang Pertamina Balikpapan carried out the Balikpapan & Lawe-Lawe RDMP refinery development project. Although still carrying out activities in the form of project activities, KPB has carried out social and environmental responsibility activities that refer to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in Article 74 concerning Social and Environmental Responsibility ("SER"). SER is a commitment by Limited Liability Companies to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and for the benefit of the environment, both for the Company itself, the local community, and society in general.

The SER activities focus on short- and long-term activities, including donations and improvement of social facilities and infrastructure, and sustainable programs to encourage community independence around the company's operational ring 1 area. SER programs refer to the independence and the environment pillars.

KPB is still in the stage of project completion, so there is no revenue yet. Considering that the allocation of SER funds comes from profits, KPB has not implemented sustainable SER programs, but currently has implemented aid/*charity*/donation programs, especially those aimed at stakeholders in the Ring-1 Project area.

Some of the activities carried out in 2021 include: 6 direct donations to the community, 1 logistical support activity for Kodam VI/ Mulawarman Kaltim activities, and 1 activity in the form of free health checks for residents.





KILAS KINERJA

Performance Highlight

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Financial Data Highlights

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income Statement

Dalam USD | In USD

URAIAN DESCRIPTION	2021	2020	2019
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(1.112.464)	(495.651)	(4.367)
Rugi Usaha Operating Loss	(1.112.464)	(495.651)	(4.367)
Pendapatan Keuangan Financial Revenue	2.147.020	445.671	716
Pendapatan/(Beban) Lain-Lain – Neto Other Income/(Expenses) – Net	1.561.704	(1.599.488)	15.484
Laba/(Rugi) Usaha Sebelum Pajak Penghasilan Profit/(Loss) Before Income Tax	2.596.260	(1.649.468)	11.833
Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax Benefits	125.768	66.409	-
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Profit/(Loss) for the year	2.722.028	(1.583.059)	11.833
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak Penghasilan Other Comprehensive Income After Income Tax	44.975	23.903	-
Total Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year	2.767.003	(1.559.156)	11.833

Laporan Posisi Keuangan Financial Statement

Dalam USD | In USD

URAIAN DESCRIPTION	2021	2020	2019
ASET ASSET			
Aset Lancar Current Assets	360.083.250	693.289.613	84.697.357
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	1.840.580.017	823.435.003	23.168
Total Aset Total Assets	2.200.663.267	1.516.724.616	84.720.525
LIABILITAS LIABILITY			
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	528.418.221	748.023.062	18.307
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	1.144.169	367.680	-
Total Liabilitas Total Liabilities	529.562.390	748.390.742	18.307

Dalam USD | In USD

URAIAN DESCRIPTION	2021	2020	2019
EKUITAS EQUITY			
Modal Saham Share Capital	84.690.385	84.690.385	69.911
Saldo (Rugi)/Laba Retained earnings			
Ditetapkan Penggunaannya Appropriated	-	-	-
Belum Ditetapkan Penggunaannya Unappropriated	1.150.802	(1.571.226)	11.833
Uang Muka untuk Modal Saham *) Advance for share capital *)	1.585.190.812	685.190.812	84.620.474
Komponen Ekuitas Lainnya Other equity component	68.878	23.903	-
Total Ekuitas Total Equity	1.671.100.877	768.333.874	84.702.218
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	2.200.663.267	1.516.724.616	84.720.525

*) Hingga 31 Desember 2021, total ekuitas Perusahaan tercatat sebesar USD1,67 miliar, meningkat USD902,76 juta atau 117,50% jika dibanding tahun 2020 sebesar USD768,33 juta. Hal tersebut disebabkan oleh telah terlaksananya Rencana Penyertaan Modal Pertamina ke KPI yang dilanjutkan ke KPB.

*) As of December 31, 2021, the Company's total equity stood at USD1.67 billion, an increase of USD902.76 million or 117.50% compared to USD768.33 million in 2020. This was due to the implementation of Pertamina's Equity Participation Plan in KPI, which was continued by KPB.

Laporan Arus Kas Cash flow Statement

Dalam USD | In USD

URAIAN DESCRIPTION	2021	2020	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	2.168.946	129.405	251
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(1.273.783.285)	(245.222.385)	(9.085)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Funding Activities	898.621.371	685.190.812	84.690.385
Kenaikan Neto Kas dan Kas di Bank Net Increase in Cash and Cash in the Bank	(372.992.968)	440.097.832	84.696.949
Dampak Perubahan Valuta Asing terhadap Kas dan Setara Kas Impact of Changes in Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalents	(2.733.894)	1.891.129	15.398
Kas dan Kas di Bank pada Awal Tahun Cash and Cash in the Bank at the Beginning of the Year	526.685.910	84.696.949	-
Kas dan Kas di Bank pada Akhir Tahun Cash and Cash in the Bank at the End of the Year	150.959.048	526.685.910	84.696.949

Rasio-Rasio Keuangan Financial Ratios

Dalam % | In %

URAIAN DESCRIPTION	2021	2020	2019
Rasio Laba terhadap Aset Profit to Asset Ratio	0,12	(0,10)	0,01
Rasio Laba terhadap Ekuitas Profit to Equity Ratio	0,16	(0,21)	0,01
Rasio Kas Cash Ratio	28,57	70,41	462.647,89
Rasio Lancar Current Ratio	68,14	92,68	462.650,12
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liability to Equity Ratio	31,69	97,40	0,02
Rasio Liabilitas terhadap Aset Liability to Asset Ratio	24,06	49,34	0,02



IKHTISAR OPERASIONAL

Operational Highlights

NAMA KONTRAK CONTRACT NAME	NAMA KONTRAKTOR CONTRACTOR NAME	NILAI KONTRAK (EKV. JUTA USD) CONTRACT VALUE (EQUAL TO MILLION USD)	JANGKA WAKTU PROYEK TIMELINE PROJECT								
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Main EPC Works											
EPC ISBL-OSBL	RDMP Balikpapan JO (JO SK E&C, Hyundai Engineering, PT Rekayasa Industri & PT PP)	4.588,5									Nov '24: Start Production Gasoline Block Mar '24: Start Production RFCC
EPC Lawe-Lawe	JO CPP-HK (JO China Petroleum Pipeline & PT Hutama Karya)	266,2									Feb '23
Early Works Phase-2											
EPC Relokasi Flare BPP2 & HCC Flare	KSO Adhi – Rekayasa Industri	93,5									Apr '21
New Workshop & Warehouse	PT. PP (Persero)	70,1									Jun '21
EPC Re-Route Jl. Minyak	PT. Bahana Cipta Internusa	7,8									Aug '21
New Site Office, HSSE Office & Lab	PT. Adhi Karya (Persero)	43,4									Des '21
EPC Modification Tanks	PT. Wijaya Karya (Persero)	48,6									Nov '23
Kontrak Pendukung Support Contract											
New Warehouse TPS B3	PT. Nindya Karya (Persero)	3,7									JUN '22
TOTAL NILAI KONTRAK PROYEK BERJALAN TH. 2021		5.122,1									1 usd: Rp14.000
TOTAL CONTRACT VALUE IN 2021											



In Progress



Proyek telah mencapai *Operational Acceptance*, namun belum selesai *Final Acceptance*/Masa Pemeliharaan
The project has reached *Operational Acceptance*, but not yet completed the *Final Acceptance*/Maintenance Period

Di tahun 2021, terdapat 8 kontrak pekerjaan yang berjalan di lingkungan Proyek RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe, yang terbagi dalam 3 kategori: Main *Engineering-Procurement-Construction* (EPC) Works, *Early Works Phase-2*, dan Kontrak Pendukung. Total nilai kontrak dari seluruh pekerjaan yang sedang berjalan di tahun 2021 mencapai sekitar USD5.122,1 juta.

In 2021, there were 8 work contracts running in Balikpapan and Lawe-Lawe RDMP Projects divided into 3 categories: Main *Engineering-Procurement-Construction* (EPC) Works, *Early Works Phase-2*, and Supporting Contracts. The total contract value of all ongoing work in 2021 was USD5,122.1 million.

Main EPC Works terdiri dari:

1. *EPC Inside Battery Limit (ISBL) – Outside Battery Limit (OSBL)*
Pekerjaan ini ditangani oleh JO SHRP (SK E&C, Hyundai Engineering, PT Rekayasa Industri, dan PT Pembangunan Perumahan), dengan nilai kontrak sekitar USD4.588,5 juta. Pekerjaan dimulai sejak tahun 2019 dengan target *start production* RFCC di Maret 2024 dan target *start production Gasoline Block* di November 2024.
2. *EPC Lawe-Lawe*
Pekerjaan ini ditangani oleh JO CPPHK (China Petroleum Pipeline, PT Hutama Karya), dengan nilai kontrak sekitar USD266,2 juta. Pekerjaan dimulai sejak tahun 2019 dengan target, selesai di Februari 2023.

Early Works Phase-2 terdiri dari:

1. *EPC Relokasi Flare Balikpapan-2 dan HCC Flare*
Pekerjaan ini ditangani oleh Kerja Sama Operasi (KSO) Adhi – Rekind (PT Adhi Karya & PT Rekayasa Industri), dengan nilai kontrak sekitar USD93,5 juta. Pekerjaan dimulai sejak tahun 2019 dan sudah berhasil diselesaikan di April 2022.
2. *New Workshop & Warehouse*
Pekerjaan ini ditangani oleh PT Pembangunan Perumahan, dengan nilai kontrak sekitar USD70,1 juta. Pekerjaan dimulai sejak akhir 2018 dan sudah berhasil diselesaikan di Januari 2021.
3. *EPC Re-Route Jalan Minyak*
Pekerjaan ini ditangani oleh PT Bahana Cipta Internusa yang merupakan salah satu kontraktor lokal dari Balikpapan, dengan nilai kontrak sekitar USD7,8 juta. Pekerjaan dimulai sejak tahun 2019 dan sudah berhasil diselesaikan di Agustus 2021.
4. *New Site Office, HSSE office & Lab*
Pekerjaan ini ditangani oleh PT Adhi Karya, dengan nilai kontrak sekitar USD43,4 juta. Pekerjaan dimulai sejak tahun 2019 dan sudah berhasil diselesaikan di Desember 2021.
5. *EPC Modification Tanks*
Pekerjaan ini ditangani oleh PT Wijaya Karya, dengan nilai kontrak sekitar USD48,6 juta. Pekerjaan dimulai sejak tahun 2019 dan ditargetkan untuk dapat diselesaikan di November 2023.

Kontrak Pendukung hanya terdiri dari 1 pekerjaan yaitu *New Warehouse* Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS B3), yang ditangani oleh PT Nindya Karya dengan nilai kontrak sekitar USD3,7 juta.

Main EPC Works consist of:

1. *EPC Inside Battery Limit (ISBL) – Outside Battery Limit (OSBL)*
This work is handled by JO SHRP (SK E&C, Hyundai Engineering, PT Rekayasa Industri, and PT Pembangunan Perumahan), with a contract value of approximately USD4,588.5 million. The work started in 2019 with the target of starting production of the RFCC in March 2024, and the target of starting production of the Gasoline Block in November 2024.
2. *Lawe-Lawe EPC*
This work is handled by JO CPPHK (China Petroleum Pipeline, PT Hutama Karya), with a contract value of approximately USD266.2 million. The work started in 2019 with a target to finish in February 2023.

Early Works Phase-2 consists of:

1. *EPC Flare Relocation Balikpapan-2 and HCC Flare*
This work is handled by the Joint Operations (KSO) Adhi – Rekind (PT Adhi Karya & PT Rekayasa Industri), with a contract value of around USD 93.5 million. The work started in 2019 and was successfully completed in April 2022.
2. *New Workshop & Warehouse*
This work is handled by PT Pembangunan Perumahan, with a contract value of around USD 70.1 million. The work started at the end of 2018 and was successfully completed in January 2021.
3. *Oil Road Re-Route EPC*
This work is handled by PT Bahana Cipta Internusa, a local contractor from Balikpapan, with a contract value of around USD7.8 million. The work started in 2019 and was successfully completed in August 2021.
4. *New Site Office, HSSE office & Lab*
This work is handled by PT Adhi Karya, with a contract value of around USD 43.4 million. The work started in 2019 and was successfully completed in December 2021.
5. *EPC Modification Tanks*
This work is handled by PT Wijaya Karya, with a contract value of around USD 48.6 million. The work started in 2019 and is targeted to be completed in November 2023.

The Supporting Contract only consists of 1 work, namely the New Warehouse for Temporary Storage of Hazardous and Toxic Waste (TPS B3), handled by PT Nindya Karya with a contract value of around USD3.7 million.

IKHTISAR SAHAM, OBLIGASI, DAN AKSI KORPORASI

Overview of Stock, Bond and Corporate Action

Sampai dengan 31 Desember 2021, PT Kilang Pertamina Balikpapan tidak menerbitkan sahamnya kepada publik, tidak mencatatkan atau memperdagangkan sahamnya di bursa efek manapun, dan tidak pernah menerbitkan obligasi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai ikhtisar saham, aksi korporasi, dan pencatatan obligasi yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2021, PT Kilang Pertamina Balikpapan has not issued any shares to the public, has not listed or traded its shares on any stock exchange, and has never issued bonds. Thus, there is no information to report regarding the summary of stocks, corporate actions, and listing of bonds in this Annual Report.



KILAS PERISTIWA 2021

Event Highlights 2021

Februari February

4-5 FEBRUARI 2021

Direksi KPB melakukan kunjungan kerja ke area Lawe-Lawe & Balikpapan

February 4-5, 2021

The Board of Directors of KPB made a working visit to Lawe-Lawe & Balikpapan.



26-28 FEBRUARI 2021

Direktur Operasi serta Direktur Keuangan KPI melakukan site visit ke lokasi Kilang RU V dan proyek RDMP Kilang Balikpapan di Balikpapan dan Lawe-Lawe.

February 26-28, 2021

KPI Director of Operations and Director of Finance conducted a site visit to the location of the RU V Refinery and the Balikpapan Refinery RDMP project in Balikpapan and Lawe-Lawe.



April April

14 APR 2021

Sponsor Meeting & MWT Dewan Komisaris KPI, Dewan Komisaris dan Direksi KPB.

April 14, 2021

Sponsor Meeting & MWT of KPI's Board of Commissioners, KPB's Board of Commissioners and Board of Directors.



Mei May

19-22 MEI 2021

Kunjungan kerja Komisaris Utama dan Direksi KPI, serta Direksi KPB.

May 19-22, 2021

Working visit of KPI President Commissioner and Board of Directors, as well as the Board of Directors of KPB.



Juni June

4-5 JUNI 2021

SVP Infrastructure Integration & Optimization PT Pertamina (Persero) beserta rombongan melakukan kunjungan ke proyek RDMP Kilang Balikpapan.

June 4-5, 2021

PT Pertamina (Persero) SVP Infrastructure Integration & Optimization and entourage visit the Balikpapan Refinery RDMP project.



September September

15 SEPTEMBER 2021

Kunjungan kerja Direktur Operasi serta Direktur Pengembangan KPB bersama JO RDMP.

September 15, 2021

Working visit by KPB Director of Operations and Director of Development with JO RDMP.



27 SEPTEMBER 2021

Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama beserta Anggota Komite PT Pertamina (Persero), Direktur Utama KPI melakukan kunjungan ke proyek RDMP Kilang Balikpapan.

September 2,7 2021

The President Commissioner and Deputy President Commissioner with Committee Members of PT Pertamina (Persero), KPI President Director paid a visit to the Balikpapan Refinery RDMP project.



Oktober October

7-8 OKTOBER 2021

Kunjungan kerja Direktur Integrated Logistic & Infrastructure PT Pertamina (Persero) beserta rombongan ke proyek RDMP Kilang Balikpapan.

October 7-8, 2021

Working visit of the PT Pertamina (Persero) Director of Integrated Logistics & Infrastructure and entourage to the Balikpapan Refinery RDMP project.

14-15 OKTOBER 2021

Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) beserta rombongan melakukan kunjungan ke proyek RDMP Kilang Balikpapan.

October 14-15, 2021

The PT Pertamina (Persero) Director of Business Support Director and entourage visit the Balikpapan Refinery RDMP project.



November November

4-5 NOVEMBER 2021

Kunjungan Direktur Proyek Infrastruktur KPI & Tim Media (Editor) ke proyek RDMP Kilang Balikpapan.

November 4-5, 2021

Visit of KPI's PI Director & Media Team (Editor) to the Balikpapan Refinery RDMP project.

15-17 NOVEMBER 2021

Tim Kementerian Perindustrian melakukan kunjungan ke proyek RDMP Kilang Balikpapan.

November 15-17, 2021

The Ministry of Industry team visit to the Balikpapan Refinery RDMP project.



Desember December

2-3 DESEMBER 2021

Direktur SPPU PT Pertamina (Persero) & Tim Manajemen berkunjung ke proyek RDMP Kilang Balikpapan.

December 2-3, 2021

PT Pertamina (Persero) SPPU Director & Management Team visit to the Balikpapan Refinery RDMP project.

4 DESEMBER 2021

Direktur Proyek Infrastruktur & Tim Manajemen KPI melakukan kunjungan ke proyek RDMP Kilang Balikpapan.

December 4, 2021

PI Director & KPI Management Team visit to the Balikpapan Refinery RDMP project.

27-28 DESEMBER 2021

SVP Corporate Finance PT Pertamina (Persero), Direktur Keuangan, Direktur Proyek Infrastruktur, VP Financing & Treasury KPI, Direksi KPB, serta Grup Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang terdiri dari perwakilan BRI, Mandiri, BNI, BTN, & BSI, berkunjung ke proyek RDMP Kilang Balikpapan.

December 27-28, 2021

PT Pertamina (Persero) SVP Corporate Finance, Director of Finance, Director of PI, VP of Financing & Treasury of KPI, Directors of KPB, and the Himbara Group (State-Owned Bank Association) consisting of representatives of BRI, Mandiri, BNI, BTN, & BSI, visit the Balikpapan Refinery RDMP project.



4-5 DESEMBER 2021

Corporate Secretary KPI dan Tim Media berkunjung ke proyek RDMP Kilang Balikpapan.

December 4-5, 2021

KPI Corporate Secretary and Media Team visit to the Balikpapan Refinery RDMP project.

7-8 DESEMBER 2021

Tim Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan kunjungan ke proyek RDMP Kilang Balikpapan.

December 7-8, 2021

Coordinating Ministry for Economic Affairs team visit to the Balikpapan Refinery RDMP project.







LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

Suwahyanto

Komisaris Utama
President Commissioner



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, izinkan saya mewakili segenap jajaran Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas jalannya kepengurusan PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) di tahun 2021 sebagaimana tersaji dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 ini. Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris menggunakan berbagai mekanisme, di antaranya melalui Rapat Gabungan serta pemberian persetujuan dan rekomendasi atas usulan Direksi, dengan senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Tinjauan Kondisi Perekonomian

Dewan Komisaris menyadari bahwa kinerja KPB cukup dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global maupun nasional, terlebih dengan munculnya varian baru *Corona Virus Disease* 2019 atau COVID-19 yakni varian Delta pada pertengahan tahun 2021, yang cukup menghambat laju pemulihan perekonomian dan industri. Sebelumnya, perekonomian global maupun nasional berangsur membaik sejak awal tahun 2021 yang ditopang dengan adanya program vaksinasi massal. Namun, kemunculan varian baru Delta di pertengahan tahun 2021 kembali memberikan ketidakpastian ekonomi. Memasuki triwulan III-2021, perekonomian kembali terkoreksi setelah pada triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan yang cukup baik.

Beruntung, pandemi COVID-19 varian Delta berhasil diredam dengan program percepatan vaksinasi yang terus ditingkatkan oleh sejumlah negara yang terdampak termasuk Indonesia. Hasilnya, pada triwulan IV-2021, sejumlah negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi, di mana Indonesia sendiri

Dear Distinguished shareholders and Stakeholders,

With praise and gratitude to God Almighty, allow me on behalf of the entire Board of Commissioners to present the Board of Commissioners' Report on carrying out its supervisory and advisory function on the management of PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) in 2021 through this Annual Report for the Fiscal Year 2021. In carrying out its supervisory and advisory duties to the Board of Directors, the Board of Commissioners uses various mechanisms, including through Joint Meetings as well as providing approval and recommendations on the Board of Directors proposals, always guided by the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations based on Good Corporate Governance principles (GCG).

Economic Conditions Review

The Board of Commissioners realizes that the performance of KPB was influenced by the global and national economic conditions, especially with the emergence of a new variant of COVID-19 namely the Delta variant in mid-2021, which hampered the pace of economic and industrial recovery. Previously, the global and national economy was gradually improving in early 2021, supported by the mass vaccination program. However, the emergence of the new Delta variant in mid-2021 again provided economic uncertainty. Entering the third quarter of 2021, the economy corrected again after growing quite well in the second quarter of 2021.

Luckily, the Delta variant of COVID-19 was successfully suppressed with accelerated vaccination programs being increased in a number of affected countries, including Indonesia. As a result, in quarter IV-2021, a number of countries recorded economic growth, with Indonesia growing

mengalami pertumbuhan yang mencapai 5,02% *year-on-year* (yoy). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia secara keseluruhan untuk tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,69% (yoy), jauh meningkat dari tahun sebelumnya yang berkontraksi 2,07% (yoy).

Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya kondusif akibat pandemi COVID-19 yang masih berlanjut di tahun 2021, cukup menghambat pembangunan proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) *Refinery Unit* (RU) V Balikpapan yang tengah dikerjakan oleh KPB. Salah satunya adalah, terjadinya keterlambatan beberapa peralatan yang didatangkan dari berbagai negara untuk mendukung pembangunan proyek. Di tengah kondisi tersebut, Dewan Komisaris cukup mengapresiasi kinerja optimal yang ditunjukkan oleh KPB di sepanjang tahun 2021, dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan.

Penilaian atas Kinerja Direksi

KPB merupakan perusahaan yang dibentuk oleh PT Pertamina (Persero) pada tahun 2019, dalam rangka meningkatkan kapasitas kilang melalui pembangunan proyek RDMP RU V Balikpapan, dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus mengalami peningkatan seiring dengan terus meningkatnya populasi di Indonesia. Dengan selesainya proyek ini, diharapkan dapat menambah kapasitas kilang Balikpapan dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari, atau meningkat sebesar 100 ribu barel per hari, dan dapat menghasilkan produk-produk berkualitas dari yang semula standar Euro II meningkat menjadi Euro V, yaitu produk minyak yang lebih ramah lingkungan dan berkualitas dengan tingkat konsumsi yang lebih hemat.

Sementara itu, terdapat juga pengembangan sejumlah fasilitas pendukung yang dilakukan Perusahaan di Terminal Minyak Lawe-Lawe, yaitu pembangunan dua tangki penyimpanan minyak mentah berkapasitas masing-masing 1 juta barel. RDMP RU V Balikpapan dan Terminal Lawe-Lawe merupakan bagian dari proyek terbesar Pertamina yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan *project cost* ekuivalen USD7,2 miliar. Proyek RDMP RU V Balikpapan yang tengah dikerjakan KPB, merupakan salah satu strategi Pertamina dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia di 2030.

by 5.02% year-on-year (yoy). The Central Statistics Agency (BPS) stated that Indonesia's economy as a whole in 2021 grew by 3.69% (yoy), a significant increase from the previous year's contraction of 2.07% (yoy).

The economic conditions, which were not fully conducive due to the COVID-19 pandemic that continued into 2021, hampered the construction of the Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) V Balikpapan project, which is still being worked on by KPB. One of the delays was for equipment imported from other countries to support the project development. Despite these conditions, the Board of Commissioners appreciates the optimal performance shown by KPB throughout 2021, and their efforts to meet the targets that have been set.

Board of Directors' Performance Assessment

KPB is a company established by PT Pertamina (Persero) in 2019, to increase refinery capacity through the construction of the RU V Balikpapan RDMP project, to meet the continually increasing national energy needs, along with the increasing population in Indonesia. The completion of this project is expected to increase the capacity of the Balikpapan refinery from 260 thousand barrels per day to 360 thousand barrels per day, an increase of 100 thousand barrels per day, and produce quality products by increasing the original Euro II standard to Euro V, for oil products that are more environmentally friendly and of high quality. with a lower level of consumption.

Meanwhile, the Company has also developed a number of supporting facilities at the Lawe-Lawe Oil Terminal, namely the construction of two crude oil storage tanks each with a capacity of 1 million barrels. RDMP RU V Balikpapan and Lawe-Lawe Terminal are part of Pertamina's largest project and is designated as a National Strategic Project (PSN) with a project cost equivalent to USD 7.2 billion. The ongoing RU V Balikpapan RDMP project carried out by KPB, is one of Pertamina's strategies in realizing Indonesia's economic independence by 2030.

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi Perusahaan terus berupaya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, baik target Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Secara umum, kinerja Direksi dalam rangka memenuhi target RKAP 2021 telah berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari kinerja operasional atas pengerjaan proyek RDMP RU V Balikpapan, yang sampai dengan akhir tahun 2021, progres pekerjaan fisik keseluruhan mencapai 46,95% atau lebih baik sebesar 1,38% terhadap target yang telah ditetapkan yakni sebesar 45,57%. Selain itu, Direksi juga berhasil menyelesaikan sejumlah hal penting seperti *Delivery-to-Site* dan Instalasi beberapa unit besar yang sangat signifikan bagi perkembangan progres proyek.

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi atas usaha-usaha *extraordinary* yang dilakukan Direksi di tahun 2021, di tengah kondisi yang belum kondusif akibat masih berlanjutnya pandemi COVID-19, dimana terdapat keterbatasan ruang gerak, keterbatasan mobilisasi manusia dan mobilisasi barang. Pandemi COVID-19 juga cukup menghambat proses penyertaan modal dari Pertamina untuk KPB yang disalurkan melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) selaku *Subholding Refining & Petrochemical* Pertamina. Akhirnya, atas usaha-usaha *extraordinary* dari Direksi, pada tanggal 21 Desember 2021, Perusahaan berhasil memperoleh dana sebesar US\$900.000.000 dari Pertamina melalui KPI, yang merupakan uang muka untuk modal saham. Selain untuk mendukung pembangunan proyek, dana tersebut juga digunakan untuk membayarkan kewajiban Perusahaan kepada mitra kontraktor pelaksana proyek, sehingga tidak terdapat *default* kepada kontraktor pelaksana. Di tahun 2021, Direksi juga telah berhasil membebaskan Perusahaan dari biaya bea masuk impor, mendapatkan fasilitas *tax holiday*, dan terbebas dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Fasilitas ini tentunya layak untuk didapatkan KPB mengingat proyek pembangunan kilang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap kinerja dan hasilnya, serta komitmen dan dedikasi yang telah diperlihatkan Direksi di sepanjang tahun 2021, meski terdapat banyak tantangan di tahun 2021, namun Direksi KPB berhasil mencapai *Key Performance Indicator (KeyPI)* sesuai dengan yang disepakati di awal tahun 2021. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan serta telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsi dan perannya masing-masing.

The Board of Commissioners' opinion is that the Board of Directors of the Company has continued to strive to meet the targets that have been set, both the targets for the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP). In general, the Board of Directors performance to meet the 2021 RKAP target has gone well. This is reflected in the operational performance of the RU V Balikpapan RDMP project, where by the end of 2021, the overall physical work progress had reached 46.95%, or 1.38% above the set target of 45.57%. In addition, the Board of Directors also succeeded in completing a number of important matters such as *Delivery-to-Site* and the installation of several large units which were very significant for the progress of the project development.

The Board of Commissioners would like to express its appreciation for the extraordinary efforts made by the Board of Directors in 2021 during the uncondusive conditions due to the ongoing COVID-19 pandemic, with the limited space for moving, limited human mobilization and mobilization of goods. The COVID-19 pandemic also hampered the capital participation from Pertamina for KPB, which was channeled through PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), as Pertamina's *Subholding Refining & Petrochemical*. Finally, thanks to the extraordinary efforts of the Board of Directors, on December 21, 2021, the Company succeeded in obtaining funds of US\$900,000,000 from Pertamina through KPI, which is an advance for share capital. In addition to supporting the project development, these funds will be also used to pay the Company's obligations to the project contractor partners, so there will be no defaults to the contractors. In 2021, the Board of Directors succeeded in obtaining Company exemption from import duty fees, received tax holiday facilities, and relieve from the collection of Article 22 Import Income Tax. These facilities were feasible for KPB considering the refinery construction project is included in the National Strategic Project to meet national energy needs.

The Board of Commissioners appreciates the performance and results, as well as the commitment and dedication shown by the Board of Directors throughout 2021, despite the many challenges in 2021, the KPB Board of Directors succeeded in achieving the *Key Performance Indicators (KeyPI)* as agreed in early 2021. The Board of Commissioners is of the opinion that the Board of Directors has demonstrated its commitment to advancing the interests of the Company and has carried out its duties and responsibilities according to their respective functions and roles.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi dan Kebijakan Perusahaan serta Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat kepada Direksi

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun dengan saling menghormati antar fungsi keduanya. Terdapat batasan dari tanggung jawab dan peran yang dijalankan baik oleh Dewan Komisaris maupun Direksi. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perusahaan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa KPB telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Salah satu fungsi Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap implementasi strategi serta kebijakan yang dijalankan oleh Direksi. Dalam merumuskan target kinerja di awal tahun, Dewan Komisaris berperan memberikan arahan dan masukan sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya, termasuk arahan dan masukan untuk rencana kerja strategis yang dirumuskan Direksi. Untuk itu, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab agar implementasi rencana strategis tersebut dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan Dewan Komisaris difokuskan terhadap perkembangan proyek RDMP RU V Balikpapan.

Dewan Komisaris selalu berupaya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan arahan, saran dan rekomendasi yang konstruktif dan solutif kepada Direksi. Satu hal yang selalu ditekankan Dewan Komisaris kepada Direksi adalah untuk senantiasa mengedepankan aspek kepatuhan dan prinsip-prinsip GCG. Di tengah segala keterbatasan, Dewan Komisaris berhasil melakukan komunikasi secara baik dan intens dengan Direksi, khususnya terkait dengan pemenuhan aspek *governance*.

Di samping itu, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas penerapan strategi dan kebijakan yang dijalankan Direksi, yang salah satunya adalah melalui mekanisme rapat-rapat yang diselenggarakan. Dewan Komisaris secara rutin mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dalam forum rapat gabungan. Dalam forum tersebut Dewan Komisaris senantiasa meminta penjelasan

Supervision of the Implementation of Company Strategies and Policies as well as the Frequency and Method of Providing Advice to the Board of Directors

The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is built based on mutual respect between the two functions. There are limits to the responsibilities and roles carried out by both the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners is in charge of supervising the management of the Company by the Board of Directors, providing advice to the Board of Directors, and ensuring that KPB applies the principles of Good Corporate Governance (GCG).

One of the Board of Commissioners' functions is to supervise the implementation of strategies and policies carried out by the Board of Directors. In formulating the performance targets at the beginning of the year, the Board of Commissioners' role was to provide direction and input according to its capacity and capabilities, including direction and input for the strategic work plan formulated by the Board of Directors. For this reason, the Board of Commissioners is responsible for ensuring the implementation of the strategic plan is carried out properly. The Board of Commissioners' supervision is focused on the development of the RU V Balikpapan RDMP project.

The Board of Commissioners strives to carry out its function by providing constructive and solution directions, suggestions and recommendations to the Board of Directors. One matter emphasized by the Board of Commissioners to the Board of Directors is to always prioritize the compliance and GCG principles aspects. Despite all the limitations, the Board of Commissioners managed to communicate well and intensely with the Board of Directors, particularly regarding the fulfillment of governance aspects.

In addition, the Board of Commissioners supervised the implementation of strategies and policies carried out by the Board of Directors, through the meetings held. The Board of Commissioners regularly held meetings with the Board of Directors to discuss various matters related to the management of the Company carried out by the Board of Directors in a joint meeting forum. In this forum, the Board of Commissioners requested explanations from the Board of Directors regarding

dari Direksi mengenai strategi dan kebijakan yang dijalankan serta pencapaian atas implementasi strategi yang telah diterapkan Direksi berikut dengan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris senantiasa menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat berupa arahan atau rekomendasi kepada Direksi mengenai hal tersebut.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat gabungan dengan mengundang Direksi. Selain forum rapat gabungan dengan Direksi, Dewan Komisaris juga senantiasa melakukan pertemuan berupa rapat dengan organ pendukung Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Investasi, serta Komite Remunerasi, untuk membahas hasil pengawasan yang dilakukan komite sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing Komite.

Pandangan atas Prospek Perkembangan Proyek di Tahun 2022

Memasuki tahun 2022, dunia kembali dibayangkan oleh kemunculan varian baru COVID-19 yakni Omicron yang berpotensi dilakukannya kembali kebijakan pembatasan sosial yang akan berdampak terhadap perekonomian global maupun nasional. Meskipun dibayangkan kondisi ketidakpastian akibat virus varian baru COVID-19, berbagai lembaga optimis perekonomian Indonesia di tahun 2022 akan menguat pada kisaran 5,0% hingga 6,5%. Optimisme ini tak lepas dari keberhasilan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 di tahun 2021.

Seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022, Dewan Komisaris menyambut baik proyeksi perkembangan proyek RDMP RU V Balikpapan di tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam RKAP 2022. Dewan Komisaris memandang, proyeksi perkembangan proyek RDMP RU V Balikpapan yang ditargetkan dapat mencapai 55-60% cukup realistis. Hal tersebut berdasarkan pada capaian progres pembangunan proyek di tahun 2021, di tengah kondisi yang cukup menantang.

Dewan Komisaris berharap, tahun 2022 akan menjadi tahun dimulainya kegiatan *commissioning/start-up* beberapa peralatan utama, untuk memastikan target *Mechanical Completion* RFCC di Desember 2023 dan akan mulai memproduksi di Maret 2024.

the strategies and policies implemented as well as the achievements of implementing the strategies by the Board of Directors along with the various obstacles faced. The Board of Commissioners expressed its view, and provided advice in the form of directions or recommendations to the Board of Directors regarding these matters.

Throughout 2021, the Board of Commissioners held 9 (nine) joint meetings by inviting the Board of Directors. In addition to the joint meeting forum with the Board of Directors, the Board of Commissioners also regularly held meetings with its supporting organs, the Audit Committee, Investment Committee, and Remuneration Committee, to discuss the results of the committee's supervision in accordance with the functions and responsibilities of each Committee.

Outlook on Project Development Prospects in 2022

At the start of 2022, the world was again overshadowed by the emergence of the new Omicron variant of COVID-19, which has the potential of reintroduced social restriction policies that will have an impact on the global and national economy. Although overshadowed by these uncertainty conditions due to the new variant of the COVID-19 virus, a number of institutions are optimistic that the Indonesian economy in 2022 will strengthen in the range of 5.0% to 6.5%. This optimism is thanks to the success of handling and controlling the COVID-19 pandemic in 2021.

Along with the optimism of national economic growth in 2022, the Board of Commissioners welcomes the projected development of the RU V Balikpapan RDMP project in 2022, as set out in the 2022 RKAP. The Board of Commissioners view is that the projected RU V Balikpapan RDMP project development target of 55-60% is quite realistic. This is based on the achievement of project development progress in 2021, in the midst of quite challenging conditions.

The Board of Commissioners hopes that 2022 will be the year for the *commissioning/start-up* of key equipment, to ensure the RFCC Mechanical Completion target by December 2023, and production start in March 2024.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Direksi, Dewan Komisaris memandang implementasi GCG di lingkup Perusahaan telah berjalan dengan cukup baik. Di tahun 2021, Direksi telah menyesuaikan struktur organisasi dengan perkembangan proyek di lapangan yang disertai upaya pemenuhan tenaga kerja yang handal.

Sementara itu, untuk mendukung kegiatan operasional Direksi, di tahun 2021 Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Investasi, dan Komite Remunerasi, serta telah mengangkat Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Investasi, guna membantu fungsinya dalam melakukan analisis yang lebih baik terhadap pengelolaan Perusahaan. Kehadiran komite-komite pendukung tersebut akan berdampak positif pada kinerja Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional oleh Direksi.

Adapun dalam rangka mengantisipasi setiap tantangan, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi, yang mampu mendukung pencapaian target atas pembangunan proyek. KPB memiliki sistem manajemen risiko yang berfokus pada pembangunan dan perkembangan proyek. Pertama adalah fokus pada medikasi-medikasi terhadap identifikasi risiko yang berpotensi memundurkan jadwal penyelesaian proyek. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan manajemen risiko atas *budget* proyek agar sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan dan dilakukan identifikasi-identifikasi risiko terhadap potensi bila ada pembengkakan biaya proyek karena berbagai hal. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi risiko terhadap spesifikasi dan kualitas terhadap barang atau peralatan pendukung yang didatangkan dari berbagai negara, baik kualitas maupun kuantitas harus memenuhi spesifikasi yang telah dicantumkan dalam dokumen proyek.

Selain itu, terdapat manajemen risiko aspek operasional, dimana saat kilang sudah mulai beroperasi secara keseluruhan dan sudah mulai efektif, maka pengelolaan risiko operasionalnya adalah menjamin pengadaan minyak mentah baik jumlah, waktu, maupun harga, agar sesuai dengan yang direncanakan.

View on the Implementation of Good Corporate Governance

As the body in charge of supervising the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) by the Board of Directors, the Board of Commissioners' view is that the implementation of GCG within the Company has been going well. In 2021, the Board of Directors adjusted the organizational structure for the project developments in the field together with efforts to fulfill a reliable workforce.

Meanwhile, to support the Board of Directors' operational activities, in 2021, the Board of Commissioners established the Audit Committee, Investment Committee, and Remuneration Committee, and appointed Members to the Audit Committee and the Investment Committee, to assist in their function in conducting a better analysis of Company management. The presence of these supporting committees will have a positive impact on the Board of Commissioners' performance in supervising the implementation of operational activities by the Board of Directors.

In order to anticipate every challenge, an effective and integrated risk management system is required, to support the achievement of the project development targets. KPB has a risk management system that focuses on project construction and development. The first is to focus on medications to identify risks that have the potential to delay the project completion schedule. The second is the management of risk management of the project budget so that it is in accordance with the predetermined value, and identification of potential risks if there is an overrun of project costs due to various matters. The third is the identification of risks to the specifications and quality of goods or supporting equipment imported from various countries, so that the quality and quantity meets the specifications included in the project document.

In addition, there is operational risk management, when the refinery has started operating as a whole and has begun to be effective, where the operational risk management is to ensure that the procurement of crude oil in terms of quantity, time, and price, is in accordance with the plan.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan di tahun 2021 telah berjalan dengan baik. Dalam pandangan Dewan Komisaris, Perusahaan telah memiliki kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor risiko yang mungkin terjadi.

Pandangan atas Penerapan dan Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) Bank dan Peran Dewan Komisaris dalam Sistem tersebut

Whistleblowing System (WBS) Perusahaan, sepenuhnya meratifikasi kebijakan dari Pertamina, yang menerapkan sistem satu grup Pertamina. Sistem ini sangat membantu efektivitas dari penerapan maupun evaluasi dari WBS tersebut. Karena menggunakan sistem yang sama, semua laporan-laporan terkait WBS didapatkan dari Pertamina selaku *holding*. Sampai dengan akhir tahun 2021, tidak terdapat laporan terkait WBS yang dialamatkan pada Perusahaan. Dewan Komisaris memandang bahwa penerapan WBS secara tersentral di Pertamina sangat efektif dan memiliki birokrasi yang sederhana karena tidak melibatkan pihak ketiga.

Peran Dewan Komisaris dalam pengelolaan WBS antara lain untuk melakukan pengawasan guna memastikan terselenggaranya WBS dengan dibantu oleh Komite Audit. Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan WBS di lingkup Perusahaan telah berjalan dengan baik. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi agar sosialisasi penerapan WBS terus menerus dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian segenap Insan KPB dalam melaporkan tindak pelanggaran, sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit dan Komite Investasi telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan baik, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya atas kinerja dan pelaksanaan tugas yang telah ditunjukkan oleh seluruh komite. Dukungan dari komite menjadi dasar bagi Dewan Komisaris untuk dapat memberikan masukan secara formal kepada Direksi.

The Board of Commissioners is of the opinion that the implementation of the Company's risk management in 2021 has gone well. The Board of Commissioners' view is that the Company has the adequate processes in place for ongoing identification, measurement, monitoring and risk control for all risk factors that may occur.

View on the Implementation and Management of the Bank's Whistleblowing System (WBS) and the Role of the Board of Commissioners in the System

The Company's Whistleblowing System (WBS) is fully ratified through the policy of Pertamina, which implements the one Pertamina group system. This system helps the effectiveness and evaluation of the WBS implementation. As it uses the same system, all reports related to WBS are obtained from Pertamina as the holding company. Until the end of 2021, there were no WBS reports addressed to the Company. The Board of Commissioners view is that the centralized implementation of WBS in Pertamina is very effective and has a simple bureaucracy as it does not involve third parties.

The Board of Commissioners' role in WBS management is one of supervision, to ensure the WBS is implemented with the assistance of the Audit Committee. The Board of Commissioners is of the opinion that the implementation of WBS within the Company has progresses well. The Board of Commissioners has directed the Board of Directors continuously socialize WBS to increase the understanding and concern of all KPB Personnel in reporting violations, so as to create a clean and integrity work environment.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners

In 2021, the Board of Commissioners' opinion is that the Audit Committee and Investment Committee have carried out their functions, duties and responsibilities properly, the Board of Commissioners would like to express its appreciation for the performance and implementation of duties by all committees. The support from the committee forms the basis for the Board of Commissioners to provide formal input to the Board of Directors.

Perubahan Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris di Tahun 2021

Dalam tahun 2021 terdapat perubahan komposisi dan susunan Dewan Komisaris sebagaimana terlampir berikut ini:

Changes in the Board of Commissioners' Structure and Composition in 2021

In 2021 there were changes in the Board of Commissioners' structure and composition as shown below:

KRONOLOGIS PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DI SEPANJANG TAHUN 2021 CHRONOLOGY OF CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION IN 2021

PERIODE 1 JANUARI – 19 JANUARI 2021 PERIOD JANUARY 1 – 19 JANUARY 2021	PERIODE 19 JANUARI – 31 DESEMBER 2021 PERIOD JANUARY 19 – 31 DECEMBER 2021	KETERANGAN DESCRIPTION
Suwahyanto (Komisaris)	Suwahyanto (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Suwahyanto menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 19 Januari 2021. Suwahyanto served as President Commissioner since January 19, 2021.
	Saifullah Ma'shum (Komisaris) (Commissioner)	Saifullah Ma'shum diangkat sebagai Komisaris sejak 19 Januari 2021. Saifullah Ma'shum was appointed as Commissioner on January 19, 2021.

Sementara komposisi dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

While, the Board of Commissioners' structure and composition as of December 31, 2021 was as follows:

KOMPOSISI DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2021 COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AS OF DECEMBER 31, 2021

NAMA NAME	JABATAN POSITION	DASAR PENGANGKATAN BASIS OF APPOINTMENT
Suwahyanto	Komisaris Utama President Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> KPSSS tanggal 20 Maret 2020 yang dinyatakan dalam Akta No.21 Tanggal 14 April 2020 KPSSS tanggal 19 Januari 2021 yang dinyatakan dalam Akta No.07 Tanggal 11 Februari 2021 KPSSS dated March 20, 2020 ratified through Deed No.21 dated April 14, 2020 KPSSS dated January 19, 2021 ratified through Deed No.07 dated February 11, 2021
Saifulloh Ma'shum	Komisaris Commissioner	KPSSS tanggal 19 Januari 2021 yang dinyatakan dalam Akta No.07 Tanggal 11 Februari 2021 KPSSS dated January 19, 2021 ratified through Deed No.07 dated February 11, 2021

Penutup

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Direksi atas seluruh kontribusi positif yang telah diberikan untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan, dan berupaya sebaik mungkin untuk memenuhi target operasional dan finansial di tahun 2021. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Pemangku Kepentingan, baik di Pusat maupun di Daerah, serta khususnya bagi para Pemegang Saham, dalam hal ini PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina Pedeve Indonesia, atas seluruh dukungan yang telah diberikan bagi kemajuan Perusahaan.

Tantangan ke depannya akan semakin berat, KPB tetap harus berupaya mencapai target pelaksanaan proyek dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan menerapkan Protokol Kesehatan yang disiplin & ketat. Bersama kita wujudkan pembangunan proyek sesuai dengan target dan mendukung Ketahanan Energi Nasional.

Closing

The Board of Commissioners would like to express its appreciation and gratitude to the Board of Directors for all their positive contributions to realizing the Company's vision and mission, and their best efforts to achieve the operational and financial targets in 2021. Our thanks also go out to all the Stakeholders, both in Central and Regional, and especially the Shareholders, PT Kilang Pertamina Internasional and PT Pertamina Pedeve Indonesia, for all the support given for the progress of the Company.

The future challenges will be more severe, and KPB still has to strive to achieve the project implementation targets while still paying attention to the GCG principles, and implementing disciplined & strict Health Protocols. Together we will realize the project development target, and support the National Energy Security.

Jakarta, Mei 2022

Jakarta, May 2022

Atas nama Dewan Komisaris PT Kilang Pertamina Balikpapan,
On behalf of the Board of Commissioners of PT Kilang Pertamina Balikpapan,



Suwahyanto
Komisaris Utama
President Commissioner



Feri Yani
Direktur Utama
President Director

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini kami atas nama Direksi dapat menyampaikan Laporan Tahunan 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan mengenai pengelolaan PT Kilang Pertamina Balikpapan, disebut juga KPB atau Perusahaan, selama satu periode tahun buku.

Di tengah situasi yang cukup menantang akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Kami senantiasa berpegang teguh pada komitmen Kami, terutama dalam menyelesaikan mega proyek *Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) V Balikpapan* agar sesuai target yang dicanangkan. Kami sangat menyadari peran penting RU V Balikpapan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Oleh karena itu, hal-hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan RDMP RU V Balikpapan, kami segera mitigasi, menentukan strategi serta langkah-langkah strategis yang komprehensif guna meminimalisir risiko yang berpotensi mempengaruhi progresivitas RDMP RU V Balikpapan. Penting bagi Kami untuk melaksanakan proyek sesuai target, tepat waktu, tepat budget, serta senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Latar Belakang Perkembangan Perusahaan

KPB didirikan pada 7 Mei 2019 oleh Pemegang Saham dalam rangka mendukung program Pertamina Group dan Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah produk kilang, mengurangi impor produk, serta meningkatkan kapasitas produksi kilang Nasional. Salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan kapasitas tersebut adalah melakukan pengembangan atau *upgrade* terhadap kilang eksisting yang disebut dengan istilah *Refinery Development Master Plan* atau RDMP. Kilang minyak atau *Refinery Unit (RU) Balikpapan* menjadi salah satu kilang yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan RDMP.

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

With praise and gratitude to God Almighty, on this occasion, on behalf of the Board of Directors, we would like to submit the 2021 Annual Report as a form of our accountability to the Shareholders and all stakeholders regarding the management of PT Kilang Pertamina Balikpapan, known as KPB or the Company, for the fiscal year.

During challenging situation due to the *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pandemic, we always held fast to our commitments, especially in completing the *Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) V Balikpapan* mega project to achieve the targets set. We are very aware that RU V Balikpapan will play a role in supporting the fulfillment of the increasing national energy needs. Therefore, for any challenges in the implementation of the RU V Balikpapan RDMP, we immediately mitigate, determine strategies and comprehensive strategic steps to minimize any potential risks that may affect the progress of the RU V Balikpapan RDMP. It is important for us to carry out projects on target, on time, on budget, and always comply with applicable laws and regulations.

Background of Company Development

KPB was established on May 7, 2019 by the Shareholders to support the Pertamina Group and the Government of the Republic of Indonesia program in increasing the added value of its refinery products, reducing product imports, and increasing the production capacity of national refineries. One way to increase this capacity was to develop or upgrade existing refineries, known as the refinery development master plan or RDMP. The Balikpapan oil refinery or refinery unit (RU) is one of the refineries prioritized for RDMP implementation.

Melalui RDMP RU V Balikpapan, kapasitas produksi pengolahan minyak mentah ditargetkan meningkat dari 260 ribu barel per hari (bph) menjadi 360 ribu bph dan kualitas produk dari EURO II menjadi EURO V, yaitu produk minyak yang lebih ramah lingkungan dan berkualitas dengan tingkat konsumsi yang lebih hemat, serta menghasilkan produk yang lebih bernilai (*valuable product*).

Hingga akhir tahun 2021, KPB berhasil menyelesaikan proyek pembangunan RDMP RU V Balikpapan secara fisik mencapai 46,95%, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan *progress* sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 19,22%. Dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis sesuai standar industri kelas dunia dan berpengalaman selama puluhan tahun di industri pengolahan minyak bumi, KPB optimistis mampu menyelesaikan seluruh amanat Pemegang Saham dengan baik dan tepat waktu, sehingga dapat mendukung Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi Nasional melalui peningkatan daya saing Kilang Balikpapan dan Lawe Lawe. Perusahaan optimis dapat berperan besar membantu mengatasi tantangan energi di Indonesia dan mewujudkan kemandirian energi melalui peningkatan kemampuan dan keandalan Kilang Balikpapan.

Ke depannya, selain sebagai pelaksana megaprojek RDMP *Refinery Unit* (RU) V Balikpapan, KPB juga akan mengakomodir potensi adanya kerja sama dengan *partner strategis* serta melaksanakan *Project Financing (Trustee Borrowing Scheme)* RDMP RU V Balikpapan.

KPB juga akan menjalankan, mengendalikan, melakukan pengelolaan aset serta kegiatan usaha bisnis di RU V Balikpapan yang tentunya dilakukan secara profesional berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Through RDMP RU V Balikpapan, crude oil processing production capacity is targeted to increase from 260 thousand barrels per day (bpd) to 360 thousand bpd, and produce product quality from EURO II to Euro V, namely oil products that are more environmentally friendly and of high quality with more efficient consumption levels, and produce a more valuable product.

By the end of 2021, KPB succeeded in physically completing 46.95% of the RDMP RU V Balikpapan construction project, an increase of more than 2 times the progress until December 31, 2020 of 19.22%. With the support of technical expert human resources, working to world-class industry standards, with decades of experience in the petroleum processing industry, KPB is optimistic that it will complete all the mandates of its Shareholders properly and on time, to support the Government in realizing national energy independence by increasing the competitiveness of the Balikpapan and Lawe Lawe refineries. The Company is optimistic it can play a major role in helping to overcome energy challenges in Indonesia and realizing energy independence by increasing the capability and reliability of the Balikpapan refinery.

In the future, apart from being the executor of the RDMP Refinery Unit (RU) V Balikpapan mega project, KPB will also accommodate the potential for collaboration with strategic partners and implement a RDMP RU V Balikpapan Project Financing (Trustee Borrowing Scheme).

KPB will also run, control, manage assets and business activities at RU V Balikpapan in a professional manner based on the principles of corporate governance in order to provide maximum added value for all stakeholders.

Mengelola Tantangan dalam Mewujudkan Kilang Berkelas Dunia

Secara kontraktual, RDMP RU V Balikpapan ditandatangani pada tahun 2018 dan ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada Juli 2023.

Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan RDMP RU V Balikpapan menghadapi kejadian yang luar biasa yang berdampak secara signifikan terhadap progresivitas RDMP RU V Balikpapan, yaitu Pandemi COVID-19 di awal tahun 2020.

Sebagaimana kita ketahui, Pandemi COVID-19 telah meluluhlantakkan berbagai aspek kehidupan manusia, terutama aspek kesehatan dan perekonomian. Demi memutus penyebaran virus tersebut, kegiatan masyarakat di berbagai belahan dunia dibatasi. Di KPB sendiri, Tidak sedikit pekerja yang terpapar COVID-19 dan mengakibatkan produktivitas proyek terpengaruh. Selain itu, terdapat bahan baku pembangunan kilang diproduksi di negara lain, di mana negara tersebut pun mengalami hal yang sama, sehingga progres manufaktur bahan baku tersebut pun terkendala. Menghadapi hal ini, kami merevisi target penyelesaian proyek yang awalnya pada Juli 2023, direvisi menjadi akhir tahun 2024.

Untuk penanganan COVID-19 di area proyek, Kami sebagai bagian dari Pertamina Group, mengacu pada kebijakan Pertamina. Sementara itu, Kami juga merancang sistem yang memfilter pekerja-pekerja termasuk keluarga yang terpapar. Secara periodik Kami melakukan pemeriksaan atau tes. Bagi yang terpapar, kami menyediakan *safehouse* atau kamar hotel untuk karantina. Semua kami monitor dengan baik. Kami juga meninjau *time schedule* pekerjaan yang menjadi prioritas.

Sementara itu, terkait dengan bahan baku dari luar negeri, Kami secara intens berkomunikasi dengan mitra dan meyakinkan mereka bahwa Kami pun memiliki protokol COVID-19 yang sangat memadai. Karena itu, Kami mendorong mereka untuk melakukan *overtime* agar target penyelesaian bahan baku pembangunan kilang tersebut tidak terlalu banyak bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan.

Managing the Challenges of Creating a World Class Refinery

Contractually, the RDMP RU V Balikpapan was signed in 2018 and is targeted to be completed and start operating in July 2023.

However, along the way, the implementation of the RU V Balikpapan RDMP faced an extraordinary event that significantly impacted the progress of the RU V Balikpapan RDMP, namely the COVID-19 Pandemic in early 2020.

As we know, the COVID pandemic has devastated many aspects of human life, especially the health and economic aspects. In order to stop the spread of the virus, people's activities in many parts of the world were restricted. At KPB itself, a few workers were exposed to COVID-19 and this affected project productivity. Apart from this, raw material supplies for the construction of the refineries produced in other countries were affected, especially in countries going through the same experience, where the manufacturing of these raw materials was also hampered. In response to this, we revised the project completion target from originally in July 2023, to the end of 2024.

For handling COVID-19 in the project area, as part of the Pertamina Group, we referred to Pertamina's policies. Meanwhile, we also designed a system that filtered exposed workers including their families, and carried out periodic inspections or tests. For those exposed, we provided a safehouse as well as hotel rooms for quarantine. All monitoring was carried out properly. We also reviewed the time schedules for priority work.

Meanwhile, regarding raw materials from overseas, we intensively communicated with our partners there, and assured them that we also have very adequate COVID-19 protocols. We also encouraged them to do overtime so that the target for completion of the raw materials for the construction of the refinery did not shift too much from the schedule already set.

Pencapaian Target 2021

Sebagai Perusahaan yang baru berdiri di tahun 2019 dengan kegiatan utamanya adalah melaksanakan mega proyek RDMP RU V Balikpapan serta Terminal Minyak Lawe-Lawe, maka pencapaian kinerja Kami dapat dilihat terutama dari perkembangan pelaksanaan proyek RDMP RU V Balikpapan dan Terminal Minyak Lawe-Lawe.

Hingga akhir tahun 2021, kinerja proyek RDMP RU V Balikpapan telah mencapai 46,95%, atau 1,38% di atas yang ditargetkan, yaitu sebesar 45,57%.

Sementara itu, realisasi progress pekerjaan EPC ISBL OSBL per 30 Desember 2021, mencapai 49,32% atau sekitar 0,65% dari target yaitu sebesar 49,97%,. Realisasi pekerjaan *EPC Lawe-Lawe* mencapai 30,27% atau sekitar 26,84% dari yang ditargetkan yaitu sebesar 57,11%..

Dari aspek *Health, Safety, Security, and Environment* (HSSE) atau Kesehatan, Keselamatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan (K3L), KPB berhasil mencatat pencapaian, antara lain:

1. Total jumlah jam kerja aman Proyek RDMP RU V Balikpapan dan Lawe-Lawe sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 46.403.808 jam.
2. *Number of Accident (NOA)* sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar 0.
3. *Loss Time Injury Rate (LTIR)* kumulatif sampai dengan Bulan Desember 2021 sebesar 0.

Semua pencapaian ini tidak ada artinya apabila terjadi kecelakaan kerja berat atau bahkan *fatality*, untuk itu KPB secara ketat dan konsisten memprioritaskan aspek HSSE dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Penerapan aspek HSSE dengan ketat dan konsisten membuat KPB mendapatkan 2 Penghargaan di bidang HSSE dalam tahun 2021, yaitu Penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident Award*) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI pada bulan Agustus 2021 atas prestasi dalam melaksanakan Program K3L dengan mencapai 17.911.002 jam kerja orang aman tanpa kecelakaan kerja, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2020.

Achieving 2021 Target

As a company established in 2019 with the main activity to implement the Balikpapan RU V RDMP mega project and the Lawe-Lawe Oil Terminal, our performance achievements can be seen in the progress of the RU V Balikpapan RDMP project implementation and the Lawe-Lawe Oil Terminal.

By the end of 2021, the RU V Kalimantan RDMP project progress reached 46.92%, or 1.38% above the target of 45.54%.

Meanwhile, as of December 30, 2021, the ISBL OSBL EPC work progress reached 49.32%, or 0.65% below the target of 49.97%. The Lawe-Lawe EPC work progress reached 30.27% or 26.84% of the target of 57.11%.

For the aspects of Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), KPB recorded the following achievements:

1. Total safe working hours for the RDMP RU V Balikpapan and Lawe-Lawe Projects up to December 31, 2021 was 46,403,808 hours.
2. Number of Accidents (NOA) until December 2021 was 0.
3. The cumulative Loss Time Injury Rate (LTIR) until December 2021 was 0.

All of these achievements mean nothing if there is a serious work accident or even a fatality, so KPB strictly and consistently prioritizes the HSSE aspects in its operational activities. The strict and consistent application of the HSSE aspect earned KPB 2 awards in the field of safety in 2021, namely the Zero Accident Award from the Indonesian Ministry of Manpower in August 2021 for achievements in implementing the Occupational Safety and Health (OHS) Program by achieving 17,911,002 working hours for safe people without work accidents, from July 25, 2018 until December 31, 2020.

Yang kedua adalah Penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama Keselamatan Migas yang Kami terima pada September 2021 dari Kementerian ESDM RI, dengan kategori tanpa kehilangan jam kerja aman akibat kecelakaan selama 3 (tiga) tahun (periode 26 Juli 2018 – 30 April 2021) mencapai 27.369.267 jam kerja aman. Pencapaian ini terus dijaga sehingga per tanggal 31 Desember 2021 mampu mencapai 46.403.808 jam kerja aman.

Target Operasional 2022

Di tahun 2022, Perusahaan memiliki target penyelesaian proyek EPC ISBL-OSBL RDMP Balikpapan untuk mencapai target *Mechanical Completion* RFCC di Desember 2023 dan akan mulai berproduksi di Maret 2024. Tentunya hal ini menjadi sebuah target yang harus dicapai. Ketidakpastian ekonomi dan penerapan “*new normal*” masih menjadi tantangan di tahun 2022. KPB senantiasa mengawasi kondisi eksternal dan beradaptasi dengan melakukan sejumlah langkah-langkah serta upaya adaptif untuk mengatasi dampak eksternal terhadap kinerja usaha. Perusahaan akan terus menggunakan mekanisme pendanaan eksternal yang lebih aman dan baik bagi perusahaan, dengan tetap memprioritaskan aspek *safety* dan menerapkan protokol COVID-19 dengan ketat & konsisten.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Meski baru beroperasi secara resmi pada tahun 2019, namun KPB berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap kegiatan operasionalnya secara konsisten. Sebagai bagian dari Pertamina Group, KPB juga memiliki kewajiban untuk dapat membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya membangun hubungan yang harmonis ini kemudian tertuang dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG), dengan 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan dilakukan mulai dari pemenuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku melalui perangkat kebijakan serta pembentukan organ-organ GCG, pengelolaan hubungan kerja antara organ GCG yang tertuang dalam prosedur dan mekanisme GCG, hingga internalisasi dan evaluasi atas kemajuan penerapan prinsip GCG di lingkup Perusahaan.

The second was the Patra Nirbhaya Karya Utama Oil and Gas Safety Award received in September 2021 from the Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources, in the category without lost working hours due to an accident for 3 (three) years, in 27,369,267 working hours. As of December 31, 2021, we reached 46,403,808 safe working hours.

2022 Operational Target

In 2022, the Company has set a target of completing the EPC ISBL-OSBL RDMP Balikpapan project to achieve the Mechanical Completion RFCC target in December 2023 and start production in March 2024. Of course, this is a target that must be achieved. Economic uncertainty and the implementation of the “*new normal*” will still be a challenge in 2022. KPB always monitors external conditions and adapts by instigating a number of steps and adaptive efforts to overcome external impacts on business performance. The Company will continue to use external funding mechanisms that are safer and better for the company, while prioritizing safety aspects and implementing the Covid-19 protocol strictly & consistently.

Development of Corporate Governance Implementation

Although its only started officially operating in 2019, KPB has consistently applied GCG principles in all operational activities. As part of the Pertamina Group, KPB also has an obligation to build harmonious relationships with all stakeholders, an effort that is contained in Good Corporate Governance (GCG), with 5 (five) basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Implementation is carried out starting with compliance with applicable laws and regulations through policy instruments and the establishment of GCG organs, managing working relationships between GCG organs as contained in GCG procedures and mechanisms, to internalization and evaluation of progress in implementing GCG principles within the Company.

Keberadaan 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Anggaran Dasar Perusahaan. Kemitraan strategis melalui pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan seluruh organ pendukungnya berdampak positif pada pengelolaan Perusahaan hingga menjadi lebih berimbang. RUPS yang memberikan forum bagi pemegang saham untuk dapat mengambil keputusan strategis juga turut mendorong praktik penerapan prinsip GCG yang berlandaskan pada pemenuhan hak para Pemegang Saham sebagai salah satu pemangku kepentingan Perusahaan.

KPB terus berupaya melengkapi struktur GCG. Pada tahun 2021 telah diupayakan untuk membentuk Unit Internal Audit, yang kemudian telah diangkat Head of Internal Audit pada tahun 2022. Sementara itu pada bulan Agustus 2021 Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Investasi, dan Komite Remunerasi. Sekaligus menetapkan Piagam masing-masing Komite. Ini dilanjutkan dengan pengangkatan Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Investasi, sedangkan untuk Anggota Komite Remunerasi masih dalam proses.

Selain itu, Perusahaan akan terus menjalankan komitmen yang telah ada mulai dari pelaporan gratifikasi, kepatuhan *Code of Conduct* (CoC) yang masih menggunakan sistem yang disediakan oleh PT Pertamina (Persero), dan pelaporan LHKPN (bagi level Manager ke atas) melalui sistem *online*. Direksi menilai bahwa ini merupakan hal yang baik bagi Perusahaan dan akan terus berupaya memenuhi kelengkapan struktur GCG ke depannya mulai dari *Board Manual*, *Code of Conduct* (COC) khusus milik KPB & *Code of Corporate Governance* (CoCG).

Transparansi informasi juga menjadi perhatian manajemen. Transparansi informasi dilakukan melalui penyajian Laporan Keuangan Teraudit, yang telah melalui proses audit independen oleh akuntan publik yang ditunjuk dengan rangkaian mekanisme berjenjang yang melibatkan Pemegang Saham melalui RUPS. Hal ini dilakukan untuk menjaga independensi akuntan publik, yang pada akhirnya akan memberikan opini yang sesuai

The existence of 3 (three) main bodies, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, has been adjusted to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as well as the Company's Articles of Association. Strategic partnerships through supervision carried out by the Board of Commissioners and all supporting organs has had a positive impact on the management of the Company so that it has become more balanced. The GMS provides a forum for shareholders to make strategic decisions, and also encourages the practice of implementing GCG principles based on the fulfillment of the rights of shareholders as one of the Company's stakeholders.

KPB continues to strive to complete the GCG structure. In 2021, efforts were made to establish an Internal Audit Unit, with a Head of Internal Audit appointed in 2022. Meanwhile, in August 2021, the Board of Commissioners established the Audit Committee, Investment Committee, and Remuneration Committee. At the same time a Charter was established for each Committee. This was followed by the appointment of members of the Audit Committee and members of the Investment Committee, while the appointment of members of the Remuneration Committee is still in process.

In addition, the Company will continue to carry out existing commitments starting from gratification reporting, compliance with the Code of Conduct (CoC) that still uses the system provided by PT Pertamina (Persero), and LHKPN reporting (for Manager level and above) through an online system. The Board of Directors considers that this is the correct way for the Company and will continue to strive to fulfill the completeness of the GCG structure in the future starting with the Board Manual, a Code of Conduct (COC) specifically owned by KPB, and a Code of Corporate Governance (CoCG).

Information transparency is also a concern of management. Transparency of information is carried out through the presentation of the Audited Financial Statements, which have been independently audited by a designated public accountant following a series of tiered mechanisms involving shareholders through to the GMS. This is done to maintain the independence of the public accountants, who will provide an

dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Selain itu, transparansi informasi yang komprehensif juga dilakukan melalui penyusunan laporan tahunan yang memberikan gambaran tentang faktor eksternal, insiatif strategis, dan pencapaian kinerja Perusahaan.

Mewujudkan Keberlanjutan Melalui Program TJSL

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) memberikan jalan bagi Perusahaan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang berada di ring I wilayah operasional Perusahaan. Sebagai perusahaan yang tengah melaksanakan proyek pengembangan kilang *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Balikpapan & Lawe-Lawe, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional yang dijalankan. Sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*), KPB berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui program TJSL dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional Perusahaan.

Meski masih menjalankan kegiatan dalam bentuk aktivitas proyek, KPB telah melaksanakan kegiatan TJSL yang mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dimana TJSL adalah komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

opinion in accordance with the provisions of the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. In addition, comprehensive information transparency is also carried out through the preparation of an annual report that provides an overview of the external, strategic initiatives, and achievement of the Company's performance factors.

Realizing Sustainability Through the SER Program

Social and Environmental Responsibility (SER) provides a way for the Company to build harmonious relationships with all stakeholders, especially the community in the first ring of the Company's operational areas. As a company currently implementing the Balikpapan & Lawe-Lawe Refinery Development Master Plan (RDMP) refinery development project, PT Pertamina Balikpapan Refinery (KPB) is fully aware that the Social and Environmental Responsibility (SER) program activities are an integral part of operational activities. As a good corporate citizen, KPB is committed to contributing to realizing the Sustainable Development Goals (SDG) through the SER program in order to provide the maximum benefit to stakeholders, especially the community and the environment around the Company's operational areas.

Although still carrying out project activities, KPB has carried out SER activities that refer to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, where Article 74 relates to Social and Environmental Responsibility (SER). Where SER is a limited liability company's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the company itself, the local community, and society in general.

Adapun kegiatan program TJSL Perusahaan mengacu pada pilar kemandirian dan lingkungan hidup yang berfokus pada kegiatan jangka pendek dan jangka panjang, baik dalam bentuk donasi serta perbaikan sarana dan prasarana sosial, serta dalam bentuk program yang sifatnya berkelanjutan dalam upaya mendorong kemandirian masyarakat di sekitar area Ring-1 operasional Perusahaan.

The Company's SER program activities refer to the independence and environment pillars that focus on short-term and long-term activities, both in the form of donations and improvement of social facilities and infrastructure, as well as in the form of programs that are sustainable in nature in an effort to encourage community independence around the Ring 1 Company operational area.

Perubahan Susunan Direksi

Di tahun 2021, Perusahaan melakukan perubahan susunan Direksi. Komposisi Direksi KPB per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Changes to the Board of Directors Composition

In 2021, the Company changed the Board of Directors' composition. The Board of Directors composition as of December 31, 2021 KPB was as follows:

PERIODE PERIOD	NAMA NAME	JABATAN POSITION	DASAR PENGANGKATAN APPOINTMENT BASIS
1 Januari – 15 Maret January 1 – March 15	Narendra Widjajanto	Direktur Utama President Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
	Narendra Widjajanto	PTH Direktur Keuangan Acting Finance Director	Akta No.56 Tanggal 27 Mei 2019 Deed No.56 dated May 27, 2019
	Djoko Koen Soewito	Direktur Pengembangan Development Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
	Mulyono	Direktur Operasi Operation Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
15 Maret – 25 Oktober March 15 – October 25	Feri Yani	Direktur Utama President Director	KPSSS tanggal 15 Maret 2021 yang dinyatakan dalam Akta No.05 Tanggal 7 April 2021 KPSSS dated March 15, 2021 stated in Deed No. 05 Dated April 7, 2021
	Djoko Koen Soewito	Direktur Pengembangan Development Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
	Mulyono	Direktur Operasi Operation Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
25 Oktober – 31 Desember October 25 – December 31	Feri Yani	Direktur Utama President Director	KPSSS tanggal 15 Maret 2021 yang dinyatakan dalam Akta No.05 Tanggal 7 April 2021 KPSSS dated March 15, 2021 stated in Deed No. 05 Dated April 7, 2021
	Djoko Koen Soewito	Direktur Pengembangan Development Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
	Mulyono	Direktur Operasi Operation Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
	Sigit Hanggoro	Direktur Keuangan Finance Director	KPSSS tanggal 25 Oktober 2021 yang dinyatakan dalam Akta No.18 Tanggal 23 November 2021 KPSSS dated October 25, 2021 as stated in Deed No.18 Dated November 23, 2021

Akhir Kata dan Apresiasi

Dengan kolaborasi dan kebersamaan dalam menghadapi kondisi penuh tantangan di sepanjang tahun 2021, izinkan Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham yang telah memberikan pandangan, evaluasi, dan arahan atas pengembangan Perusahaan. Direksi juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh pemegang saham. Terima kasih juga diucapkan kepada regulator, pelanggan, pemasok, mitra usaha, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerjasama yang telah tercipta. Kepada seluruh Insan KPB, Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas seluruh upaya yang telah ditunjukkan untuk dapat tetap menjaga semangat dalam melaksanakan mega proyek RDMP RU V Balikpapan di saat menghadapi tantangan yang luar biasa. Semoga perjalanan tahun 2021 akan menjadi momentum bagi Perusahaan untuk dapat merumuskan langkah yang tepat untuk dapat mewujudkan pertumbuhan hingga ke masa-masa yang akan datang.

Final Words and Appreciation

For the collaboration and togetherness in facing the challenging conditions throughout 2021, the Board of Directors would like to express its respect and gratitude to the Board of Commissioners, as well as the Shareholders who have provided views, evaluations, and directions for the development of the Company. The Board of Directors would like to express its gratitude for the trust given by all shareholders. We would also like to thank the regulators, customers, suppliers, business partners, and all stakeholders for the cooperation created. To all KPB Personnel, the Board of Directors would like to express its highest appreciation for all the efforts shown, and the enthusiasm shown in implementing the RU V Balikpapan RDMP mega project whilst facing extraordinary challenges. Hopefully the 2021 journey will become a momentum for the Company to formulate the right steps to realize growth into the future.

Jakarta, Mei 2022

Jakarta, May 2022

Atas nama Direksi PT Kilang Pertamina Balikpapan,

On behalf of the Board of Directors of PT Refinery Pertamina Balikpapan,



Feri Yani

Direktur Utama
President Director





PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

General Information and Company Identity



Nama Perusahaan Company Name	: PT Kilang Pertamina Balikpapan
Status Perusahaan Company Status	: Perseroan Terbatas Limited Liability Company
Tanggal Pendirian dan Beroperasi Komersial Date of Establishment and Commercial Operation	: 7 Mei 2019 May 7, 2019
Dasar Hukum Pembentukan Legal Basis of Establishment	: Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta, yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0025280.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 18 Mei 2019. Deed of Establishment Number 12 dated May 7, 2019, made before Marianne Vincentia Hamdani, SH., Notary in Jakarta, which approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree Number AHU-0025280.AH.01.01 of 2019 dated May 18, 2019.
Bidang Usaha Business Fields	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri produk pengilangan minyak bumi 2. Industri bahan bakar dan minyak pelumas hasil pengilangan minyak bumi 3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara 4. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu <ol style="list-style-type: none"> 1. Petroleum refining products industry 2. Fuel and lubricating oil industry from petroleum refineries 3. Organic basic chemical industry sourced from petroleum, natural gas, and coal 4. Wholesale trade in solid, liquid and gas and all related products
Kepemilikan Saham Shares Ownership	: PT Kilang Pertamina Internasional 99,90% PT Pertamina Pedeve Indonesia 0,10%



Modal Dasar Authorized Capital	: Rp1.176.501.500.000 terbagi atas 11.765.015 lembar saham, masing-masing saham senilai Rp100.000. Rp1,176,501,500,000 divided into 11,765,015 shares, each with Rp100,000 in value.
Modal Ditempatkan/Disetor Penuh Issued/Fully Paid-In Capital	: Rp1.176.501.500.000, 100% dari modal dasar, yang terbagi atas 11.765.015 lembar saham, masing-masing saham senilai Rp100.000. Rp1,176,501,500,000 or 100% of the authorized capital, which divided into 11,765,015 shares, each with Rp100,000 in value.
Total Aset Total Assets	: USD2,20 miliar USD2.20 billion
Jumlah Karyawan Total Employees	: 225 orang pekerja KPB employees at KPB 461 orang mitra kerja work partners (TKJP & TKPP)
Kantor Kedudukan Hukum Perusahaan Kantor Kedudukan Hukum Perusahaan	: Jakarta Gedung Pertamina Lantai 14 Jalan Medan Merdeka Timur 1A, Gambir, Kode Pos 10110 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia Tel.: (021) 1500000
<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Domisili/Korespondensi • Domicile/ Correspondence Office 	: Jakarta Patra Jasa Office Tower Lantai 2 Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 32-34, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia, Kode Pos 12950
<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Operasional • Operational Office 	: Balikpapan Jalan Kom. L Yos Sudarso 148, Karang Jati Balikpapan Tengah, Kode Pos 76123 Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia Tel.: (0542) 731988, 7362001
Kontak Perusahaan Corporate Secretary	: Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Reno Marina Shahputri reno.shahputri@pertamina.com

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Brief History of The Company



PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), disebut juga KPB atau Perusahaan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 12 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU0025280.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 18 Mei 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas KPB.

Saham KPB sebesar 99,90% dimiliki oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang dibentuk sebagai *strategic holding company* dalam bidang investasi dan usaha bisnis Pertamina terkait megaprojek kilang pengolahan dan petrokimia, terutama dalam menjalankan skema kerja sama dan untuk strategi pendanaan proyek. Sementara sebesar 0,10% saham dimiliki oleh PT Pertamina

PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), also known as KPB or Company, was established based on the Deed of Establishment for a Limited Liability Company made before Notary Marianne Vincentia Hamdani, SH. The Deed of Establishment was ratified by the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights through their Decree No. AHU0025280.AH.01.01. 2019 dated May 18, 2019 concerning the Legalization of the Establishment of the Legal Entity of the KPB Limited Liability Company.

KPB's shares are 99.90% owned by PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), a subsidiary of PT Pertamina (Persero) which was formed as a strategic holding company in Pertamina's investment and business ventures related to the refinery and petrochemical mega-projects, especially in implementing the cooperation scheme. and for project funding strategies. Also, 0.10% of the shares are owned by PT Pertamina Pedeve Indonesia, which is also a

Pedeeve Indonesia, yang juga Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang penyertaan modal anak perusahaan atau afiliasi PT Pertamina (Persero).

Pendirian KPB merupakan aspirasi Pemegang Saham dalam rangka mendukung program Pertamina Group dan Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah produk kilang, mengurangi impor produk dan meningkatkan kapasitas produksi kilang Nasional. KPB didirikan untuk melaksanakan pengembangan proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) dan menjalankan bisnis pengolahan kilang *Refinery Unit* (RU) V Balikpapan, Kalimantan Timur. Pendirian KPB juga ditujukan untuk mengakomodir potensi adanya kerja sama dengan *partner* strategis serta melaksanakan *Project Financing* (*Trustee Borrowing Scheme*) yang mensyaratkan pemisahan *cash flow* KPB secara penuh dari PT Pertamina (Persero).

Kelak KPB akan menjalankan, mengendalikan, mengelola aset, dan mengelola kegiatan usaha bisnis kilang pengolahan proyek RDMP RU V Balikpapan yang dilakukan secara profesional berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan tata kelola perusahaan secara efektif dan efisien agar dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Di samping itu, tujuan lainnya dari Pemegang Saham dalam mendirikan KPB, yaitu:

1. Mengelola Novasi Kontrak EPC ISBL-OSBL dan *Project Management Consultant* (PMC).
2. Melakukan pengawasan proyek Pembangunan EPC Lawe-Lawe dan *Revamping* unit eksisting, serta pekerjaan *Early Works* yang asetnya dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan kontrak tidak dinovasikan ke KPB.
3. Menjalankan bisnis kilang pengolahan di Balikpapan berbasis pada integrasi kilang *existing* dan unit baru (*new unit*) hasil proyek RDMP Balikpapan, dalam bentuk kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dengan skema *Tolling Fee* dan *Operational and Maintenance* (O&M).
4. Mendapatkan pendanaan eksternal (*project financing*) mempertimbangkan keterbatasan sumber berpendanaan dari pemegang saham dan batasan *covenant* keuangan PT Pertamina (Persero).

subsidiary of PT Pertamina (Persero) engaged in equity participation in subsidiaries or affiliates of PT Pertamina (Persero).

The establishment of KPB was the shareholder's aspiration to support the Pertamina Group and the Government of the Republic of Indonesia program in increasing the added value of refinery products, reducing product imports and increasing the production capacity of national refineries. KPB was established to carry out the development of the Refinery Development Master Plan (RDMP) project and run the Refinery Unit (RU) V refinery processing business in Balikpapan, East Kalimantan. The establishment of KPB was also aimed at accommodating the potential for cooperation with strategic partners and implementing Project Financing (Trustee Borrowing Scheme), which requires full separation of KPB cash flows from PT Pertamina (Persero).

In the future, KPB will run, control, manage the assets, and manage the business activities of the RDMP RU V Balikpapan project processing refinery in a professional manner, based on the principles of corporate management and corporate governance, effectively and efficiently to provide maximum added value for all stakeholders.

In addition, other Shareholders' goals for establishing a KPB are:

1. Manage the ISBL-OSBL EPC Contract Novation and Project Management Consultant (PMC).
2. Supervise the Lawe-Lawe EPC Development project and Revamping existing units, as well as Early Works work whose assets are owned by PT Pertamina (Persero) and the contract is not novated to KPB.
3. Operate a refinery business in Balikpapan based on the integration of existing refineries and new units resulting from the Balikpapan RDMP project, in collaboration with PT Pertamina (Persero) with the Tolling Fee and Operational and Maintenance (O&M) scheme.
4. Obtain external funding (project financing) considering the limited funding sources from shareholders and the limitations of PT Pertamina (Persero)'s financial covenants.

5. Melaksanakan mekanisme *project financing* (sistem *Trustee Borrowing Scheme*) pada proyek RDMP Balikpapan. KPB akan memiliki *cash flow* terpisah secara penuh dari PT Pertamina (Persero), yang didapatkan dari pengoperasian Kilang Balikpapan, dan berguna sebagai dasar bagi *Lender* untuk meyakini bahwa pengembalian dana pendanaan dapat dilakukan.

Proyek RDMP RU V Balikpapan dan *New Grass Root Refinery* (NGRR) sendiri merupakan salah satu strategi PT Pertamina (Persero) dalam rangka mencapai target Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2030 untuk mewujudkan kemandirian ekonomi Indonesia, terutama dari sisi produksi minyak domestik. Melalui RDMP RU V Balikpapan, ditargetkan peningkatan kapasitas produksi dari 260 ribu barel per hari (bph) menjadi 360 ribu bph dan menghasilkan produk kualitas Euro V, yaitu produk minyak yang lebih ramah lingkungan dan berkualitas dengan tingkat konsumsi yang lebih hemat.

Hingga akhir tahun 2021, KPB berhasil menyelesaikan proyek pembangunan RDMP RU V Balikpapan secara fisik mencapai 46,95%, atau sebesar 1,38% di atas target. Dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis sesuai standar industri kelas dunia dan berpengalaman selama puluhan tahun di industri pengolahan minyak bumi, KPB optimis mampu menyelesaikan seluruh amanat Pemegang Saham dengan baik dan tepat waktu, sehingga dapat mendukung Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi Nasional melalui peningkatan daya saing Kilang Balikpapan dan Lawe-Lawe. KPB juga optimis dapat berperan besar membantu mengatasi tantangan energi di Indonesia dan mewujudkan kemandirian energi melalui peningkatan kemampuan dan keandalan Kilang Balikpapan.

5. Implement a project financing mechanism (Trustee Borrowing Scheme system) for the Balikpapan RDMP project. KPB will have a completely separate cash flow from PT Pertamina (Persero), which is obtained from the operation of the Balikpapan refinery, and will be used as a basis for lenders to believe that a repayment of funding can be made.

The RDMP RU V Balikpapan and *New Grass Root Refinery* (NGRR) projects are PT Pertamina (Persero)'s strategies to achieve the 2030 RJPP target to realize Indonesia's economic independence, especially in terms of domestic oil production. Through the RDMP RU V Balikpapan, it is targeted to increase production capacity from 260 thousand barrels per day (bpd) to 360 thousand bpd and produce Euro V quality products, namely oil products that are more environmentally friendly and of higher quality with more efficient consumption levels.

By the end of 2021, KPB completing the RDMP RU V Balikpapan physical construction project reaching 46.92%, or 1.38% above the target set. With the support of human resources with technical expertise to world-class industry standards and with decades of experience in the petroleum processing industry, KPB is optimistic that it will complete all the mandates of its Shareholders properly and on time, so that it can support the Government in realizing national energy independence through increasing the competitiveness of the Balikpapan and Lawe Lawe refineries. The Company is optimistic that it can play a major role in helping to overcome energy challenges in Indonesia and realize energy independence by increasing the capability and reliability of the Kilang Balikpapan.

LANDASAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Company Foundation



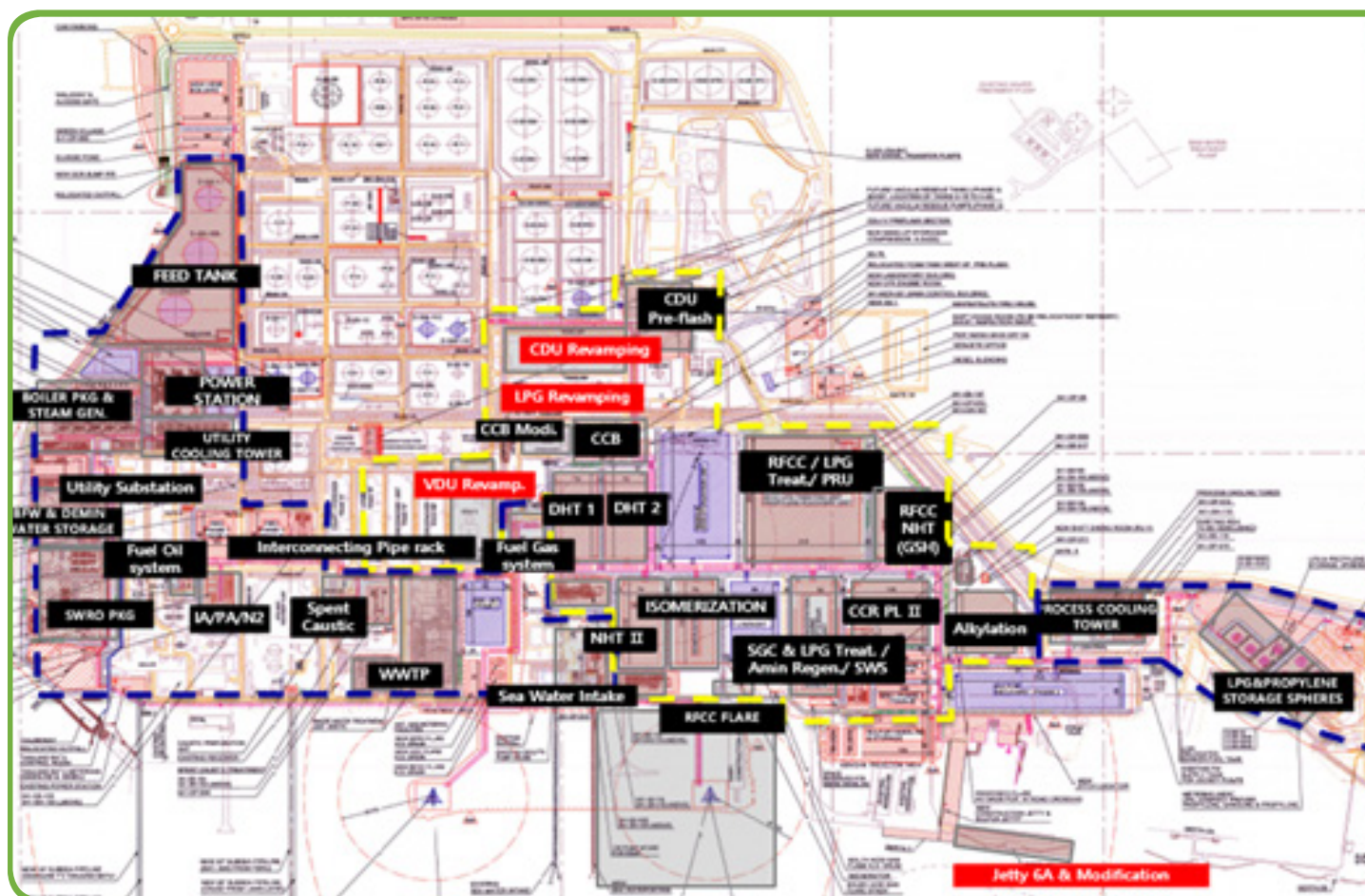
1. Peraturan Presiden RI No.146 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri;
 2. Peraturan Presiden RI No.109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No.3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 3. Keputusan Menteri ESDM RI No.1001 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) dalam Pengembangan Kilang di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 4. Izin Usaha Sementara Pengolahan PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) No.27/A.8/MIGAS/2020 tanggal 5 Juni 2020;
 5. Akta Pendirian Perusahaan No.12 tanggal 7 Mei 2019.
1. RI Presidential Decree No. 146 of 2015 concerning Implementation of Domestic Oil Refinery Development and Development;
 2. RI Presidential Regulation No.109 of 2020 concerning the Third Amendment to Presidential Regulation No.3 of 2016 concerning Acceleration of Implementation of National Strategic Projects;
 3. Republic of Indonesia Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 1001 K/12/MEM/2016 concerning the Assignment of PT Pertamina (Persero) in Refinery Development in Balikpapan, East Kalimantan Province;
 4. PT Pertamina Balikpapan Refinery (KPB) Temporary Business Permit for Processing No. 27/A.8/MIGAS/2020 dated June 5, 2020;
 5. Deed of Establishment No. 12 dated May 7, 2019.

PROFIL PROYEK RDMP RU V BALIKPAPAN & TERMINAL LAWE-LAWE

Project Profile of RDMP RU V Balikpapan & Lawe-Lawe Terminal

RDMP RU V Balikpapan dan Terminal Lawe-Lawe merupakan bagian dari proyek terbesar Pertamina Group yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek RDMP RU V Balikpapan akan meningkatkan kapasitas produksi Kilang Balikpapan dari 260 ribu barel per hari (kbph) menjadi 360 ribu bph dan meningkatkan kualitas produk dari standar EURO II menjadi standar EURO V. Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) berstandar EURO V memiliki keunggulan yang utama yaitu lebih ramah lingkungan, dan yang lebih berkualitas dengan tingkat konsumsi yang lebih hemat.

RDMP RU V Balikpapan and Lawe-Lawe Terminal are part of the largest Pertamina Group project and has been designated as a National Strategic Project (PSN). The RU V Balikpapan RDMP project consists of two phases. In phase I, which is targeted for completion in 2024, RDMP RU V Balikpapan will increase the production capacity of the RU V Balikpapan Refinery from 260 kilo barrels per day/kbpd (thousand barrels per day) to 360 kbpd and produce quality products that meet Euro V standards. The Euro V product standard's main advantage it is more environmentally friendly with higher quality fuel oil with a more efficient consumption level.

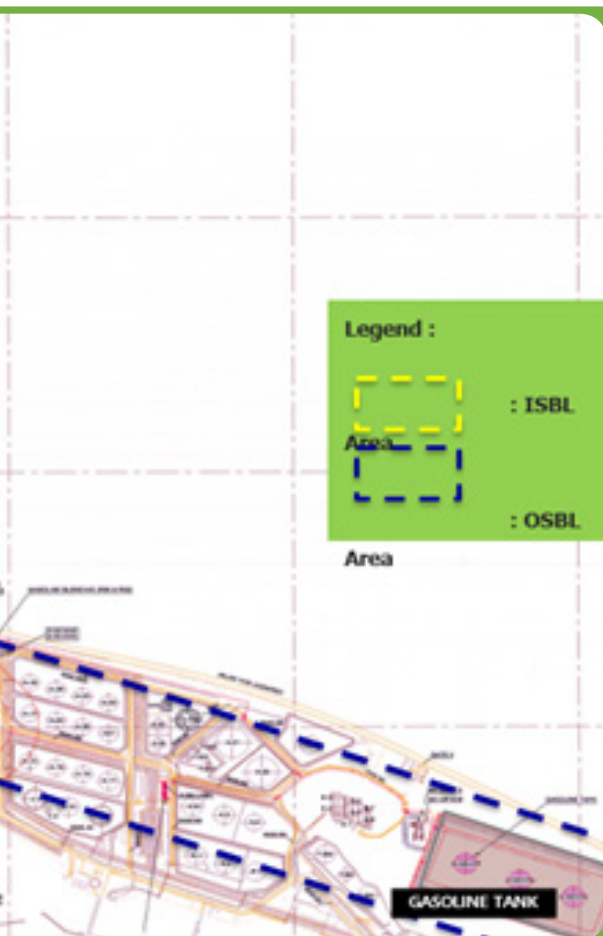


Dalam proyek ini, terdapat juga pengembangan sejumlah fasilitas pendukung di Terminal Lawe-Lawe, yaitu pembangunan dua tangki penyimpanan minyak mentah berkapasitas masing-masing 1 juta barel, pembangunan fasilitas penerimaan pasokan minyak mentah dari kapal tanker yang disebut *Single Point Mooring* (SPM) 320.000 DWT, serta pembangunan fasilitas pipa darat dan lepas pantai dari SPM ke Terminal Lawe-Lawe dan dari Terminal Lawe-Lawe ke Kilang Balikpapan.

Rencana pengembangan RU V Balikpapan melalui RDMP dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

In this project, there is also the development of a number of supporting facilities at the Lawe-Lawe Terminal, namely the construction of two crude oil storage tanks with a capacity of 1 million barrels each, the construction of a crude oil supply receiving facility from the tanker ships called Single Point Mooring (SPM) with a capacity of 320,000 deadweight tonnage, as well as the construction of onshore and offshore pipeline facilities from SPM to Lawe-Lawe Terminal and from Lawe-Lawe Terminal to the Balikpapan Refinery.

The RU V Balikpapan development plan through the RDMP can be seen in the following picture:



Keterangan gambar | Caption :

Total Area of RDMP	: 80,64 Ha
Total Area Overall RDMP & Existing RU V	: 313,64 Ha
New Unit Process	: 20 Unit (Incl. RFCC + HMU + SRU)
Revamp Unit	: 5 Unit (Incl. HCU Revamp)
New Unit Utilities & Offsite	: 13 Unit Units

Peningkatan Kapasita Pengolahan

Dari 260 ribu bph (kbph) menjadi 360 ribu bph (kbph)

Processing Capacity Improvement

From 260 thousand bpd (kbph) to 360 thousand bpd (kbph)

Peningkatan Produksi dan Kualitas BBM

1. Peningkatan Gasoline dari 42 ribu bph menjadi 142 ribu bph
2. Peningkatan Diesel dari 125 ribu bph menjadi 156 ribu bph
3. Peningkatan Avtur dari 30 ribu bph menjadi 41 ribu bph
4. Peningkatan LPG dari 0,8 ribu bph menjadi 12 ribu bph
5. Peningkatan kualitas produk dari EURO II menjadi EURO V

Improved Fuel Production and Quality

1. Gasoline increase from 42 kbpd to 142 kbpd
2. Diesel upgrade from 125 kbpd to 156 kbpd
3. Avtur increase from 30 kbpd to 41 kbpd
4. LPG increase from 0.8 kbpd to 12 kbpd
5. Product quality improvement from EURO II to EURO V

Nilai Investasi

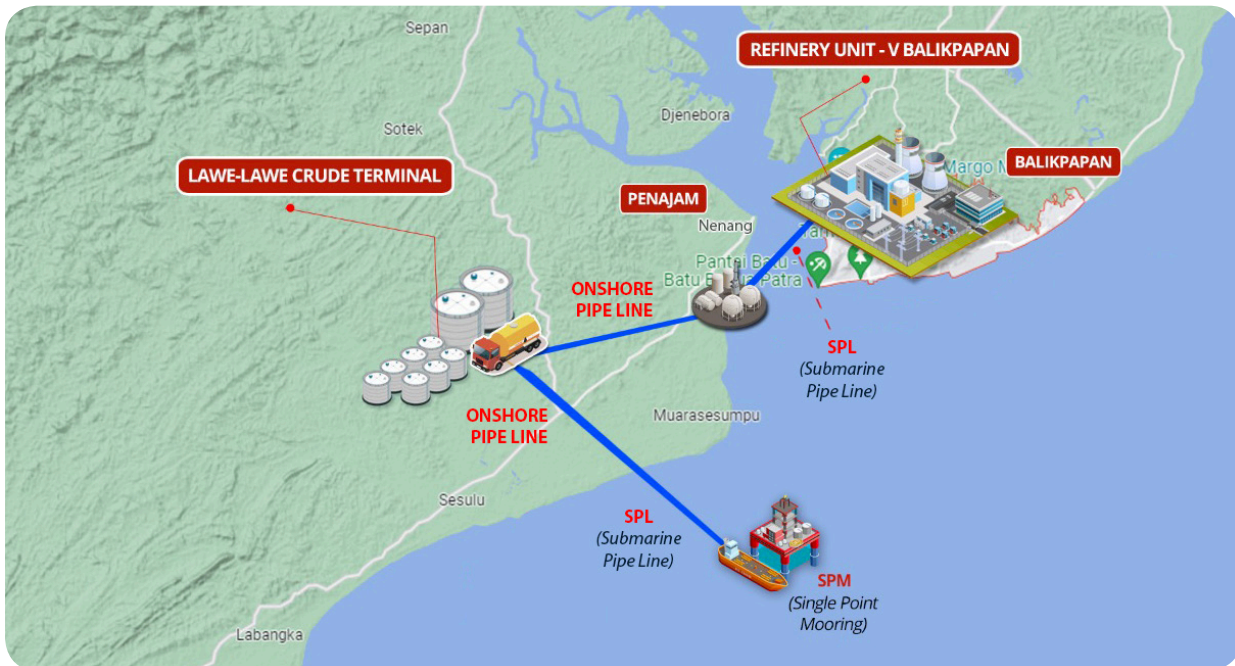
Estimasi *Project Cost* mencapai USD7,2 Miliar

Investment Value

Estimated *Project Cost* reached USD 7.2 Billion

Sementara rencana pengembangan Terminal Minyak Mentah Lawe-Lawe, Kabupaten Panajam, Paser Utara, Kalimantan Timur, dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Meanwhile, the development plan for the Lawe-Lawe Crude Oil Terminal, Penajam Regency, North Paser, East Kalimantan, can be seen in the following picture:



Rencana pengembangan Terminal Lawe-Lawe atau Proyek EPC Lawe-Lawe meliputi pembangunan unit baru SPL & SPM dan fasilitas dua tangki *crude* dengan kapasitas 1.000.000 barel:

- Pembangunan 3 buah tangki baru terdiri dari 2 buah *Crude Tank* kapasitas masing-masing 1.000.000 Barrel dan 1 *Fire Tank*.
- Pembangunan *Offshore & Onshore Pipeline* 52" dari SPM ke Terminal Lawe-Lawe sepanjang +/- 21 km.
- Pembangunan *Onshore & Offshore Pipeline* 20" dari Terminal Lawe-Lawe, Penajam ke kilang RU V sepanjang +/- 18.5 km.
- Pembangunan New SPM (*Single Point Mooring*) dengan kapasitas 320.000 DWT.
- Pembangunan *Utilities* dan *supporting* lainnya di dalam area Lawe-Lawe Terminal.

The Lawe-Lawe Terminal development plan, or the Lawe-Lawe EPC project, includes the construction of a new SPL & SPM unit and 2 (two) crude tanks with a capacity of 1,000,000 barrels:

- Construction of 3 new tanks consisting of 2 Crude Tanks with a capacity of 1,000,000 Barrel and 1 Fire Tank
- Construction of Onshore & Offshore Pipeline 52" from SPM to Lawe-Lawe Terminal along +/- 21 km
- Construction of Onshore & Offshore Pipeline 20" from Lawe-Lawe Terminal, Penajam to RU V refinery along +/- 18.5 km
- Construction of New SPM (*Single Point Mooring*) with a capacity of 320,000 DWT
- Construction of *Utilities* and other supporting facilities in the Lawe-Lawe Terminal area.

Tujuan Pembangunan RDMP Balikpapan & Lawe-Lawe:

- Meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi standar EURO V.
- Meningkatkan kuantitas produk.
- Meningkatkan kompleksitas kilang dengan menambah unit konversi untuk menghasilkan lebih banyak *higher value products*.
- Meningkatkan fleksibilitas pengolahan *crude* agar mampu mengolah *crude* yang lebih *sour*.

Nilai Positif RDMP RU V Balikpapan & Lawe-Lawe

RDMP merupakan proyek yang cukup penting bagi ketahanan dan kemandirian energi Indonesia. Di samping itu, proyek RDMP juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar kilang, karena proyek ini akan banyak menyerap tenaga kerja. Adapun nilai positif dari proyek RDMP RU V Balikpapan, dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Nilai Positif

Kapasitas Pengolahan Processing Capacity

Meningkat menjadi 360 bph
Increases to 360 bpd

Kompleksitas Complexity

Peningkatan kompleksitas
Nelson Complexity Index
(NCI) Kilang dari 3,7
menjadi 8,0
Refinery Nelson Complexity
Index (NCI) Improvement from
3.7 to 8.0.

Kualitas Produk Product quality

Peningkatan Kualitas Produk
dari EURO II menjadi EURO V
Product quality improvement
from EURO II to EURO V

Target
Penyerapan
TKDN
TKDN Absorption
Target

30-35%

Penyerapan Tenaga Kerja

- 18.000 pekerja pada puncak Konstruksi
- 600 pekerja saat operasional

Employment

- 18,000 workers at the peak of Construction
- 600 workers during operation

Balikpapan & Lawe-Lawe RDMP Development Goals:

- Improve product quality to meet EURO V standards.
- Increase product quantity.
- Increase refinery complexity by adding unit conversions to produce more higher value products.
- Increase the flexibility of crude processing to be able to process more sour crude (to be carried out at the Balikpapan RDMP Phase 2).

Positive Value of RDMP RU V Balikpapan & Lawe-Lawe

RDMP is a project that is important for Indonesia's energy security and independence. In addition, the RDMP project will also encourage economic growth in the area around the refinery, as this project will absorb a lot of workers. The positive values of the RU V Balikpapan RDMP project can be seen in the following table:

Positive Value

AREA LAYDOWN PEMBANGUNAN RDMP RU V BALIKPAPAN

Terdapat 2 area pendukung (*Laydown*) untuk Proyek RDMP Balikpapan yang berlokasi di area Kariangau atau sekitar 15 km dari Kilang RDMP Balikpapan dengan luasan masing-masing sebesar 37 Ha dan 75 Ha.

Tujuan area pendukung (*laydown*) Kariangau, yaitu:

- Mendukung pekerjaan utama fabrikasi *spool piece* pipa proyek yang direncanakan jumlahnya sebanyak 2,1 juta *Dia-inch*;
- Menyimpan *bulk & tagged* material proyek.

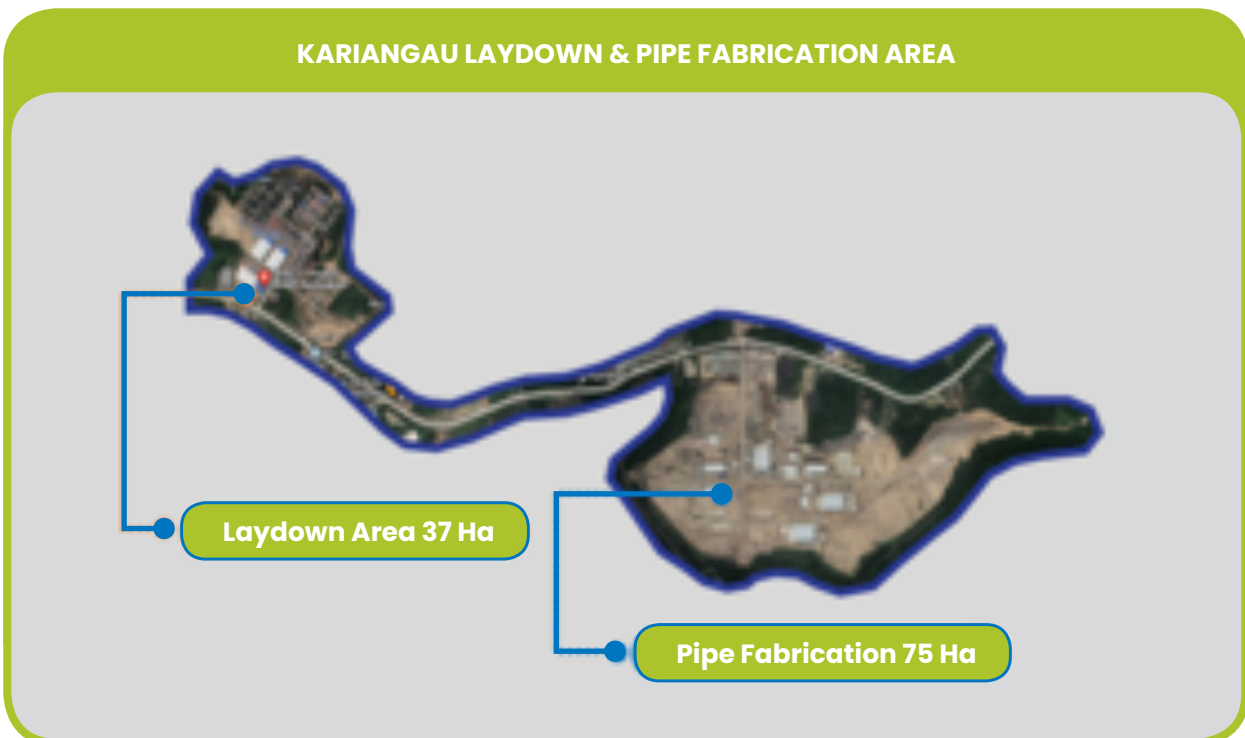
LAYDOWN AREA FOR THE DEVELOPMENT OF RDMP RU V BALIKPAPAN

There are 2 support areas (*laydown*) for the Balikpapan RDMP Project located in the Kariangau area, about 15 km from Kilang RDMP Balikpapan with an area of 37 Ha and 75 Ha.

The objectives of the Kariangau laydown area are:

- To support the main work of spool piece pipe fabrication project which is planned for a total of 2.1 million *Dia-inch*;
- To store *bulk & tagged* project materials.

KARIANGAU LAYDOWN & PIPE FABRICATION AREA



Laydown Area 37 Ha



Pipe Fabrication 75 Ha



FASILITAS FACILITIES

- Open Space Laydown
- 3 Indoor Warehouses
- 4 Pipe Workshops
- 6 Painting Workshops
- Welding School
- Offices

TENAGA KERJA MANPOWER

- Pipe Fabrication Manpower
- Painting Shop Manpower
- Material Control Manpower

Tahapan Investasi Kilang Pertamina Balikpapan

1. Pertimbangan Penggunaan Dana Eksternal Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan

Nilai *Project Cost* RDMP RU V Balikpapan, sesuai *Re-Final Investment Decision (Re-FID)*, membutuhkan dana sebesar USD7,2 miliar. Pendanaan eksternal dipertimbangkan sebagai salah satu sumber pendanaan mengingat kebutuhan investasi yang besar dan keterbatasan pendanaan internal.

- *Negative Pledge* dari World Bank Pemerintah, dalam hal ini Pertamina, tidak dapat mengagunkan aset atau memberikan jaminan dalam melakukan pinjaman eksternal sehingga menempuh skema pendanaan *Trustee Borrowing Scheme*. Skema ini mengakibatkan aset baru yang dibangun menjadi agunan bagi *Trustee* sebagai pihak penjamin perusahaan terhadap *Lender*.
- Pemisahan *Cash Flow* dan *Revenue Stream*
Trustee Borrowing Scheme dan pemisahan aset berguna untuk pemisahan *Cash Flow* atau *Revenue Stream* antara Proyek dan Pertamina terkait *Project Financing*. Pemisahan ini membuat pengembangan Kilang Eksisting RU V Balikpapan dilakukan Pertamina dan terpisah dari proyek pembangunan *New Unit* Kilang.
- Pembentukan Badan Usaha Baru untuk Membangun dan Mengoperasikan *New Unit* RU V Balikpapan
Project Financing yang melibatkan *Lender* dalam *Trustee Borrowing Scheme* mensyaratkan pemisahan pembukuan antara *cash flow* Proyek dan Pertamina untuk mendapatkan akuntabilitas proyek dan memastikan pengembalian dana pendanaan kepada *Lender*. Pertamina harus membentuk Badan Usaha baru, yang bertindak sebagai *Special Purpose Vehicle (SPV)* Pertamina, sebagai pemilik proyek pembangunan dan pengelola *New Unit* RDMP RU V Balikpapan.

Kilang Pertamina Balikpapan Investment Stages

1. Consideration for Using External Funds as a Source of Funding

The investment capex value of RDMP RU V Balikpapan, based on the Final Investment Decision, requires funds of USD6.51 billion which will be implemented in two stages. External funding was considered as a source of funding given the large investment requirements and limited internal funding.

- *Negative Pledge* from the World Bank The Government, in this case Pertamina, cannot pledge assets or provide guarantees in making external loans so they adopted the *Trustee Borrowing Scheme* funding scheme. This scheme means the new assets that are built become collateral for the *Trustee* as the company's guarantor against the lender.
- Separation of *Cash Flow* and *Revenue Stream*
Trustee Borrowing Scheme and asset separation are useful for separating *Cash Flow* or *Revenue Stream* between the Project and Pertamina related to *Project Financing*. This separation makes the development of the Existing RU V Balikpapan Refinery by Pertamina separate from the *New Unit* Refinery development project.
- Establishment of a New Business Entity to Build and Operate *New Unit* RU V Balikpapan
Project Financing involving *Lenders* in the *Trustee Borrowing Scheme* requires segregation of books between Project cash flows and Pertamina to obtain project accountability and ensure the return of funding funds to *Lenders*. Pertamina must form a new Business Entity, which acts as Pertamina's *Special Purpose Vehicle (SPV)*, as the owner of the development project and manager of the *New RDMP RU V Balikpapan Unit*.

2. Lingkup Pelaksanaan RDMP RU V Balikpapan Dalam RJPP 2030 Pertamina

- Lingkup pengembangan RU V Balikpapan eksisting, selanjutnya disebut “*revamp*”, dan pembangunan Terminal Lawe-Lawe dan *Jetty* yang akan dilakukan oleh Pertamina menggunakan pendanaan internal dan/atau *corporate loan*.
- Lingkup pembangunan *New Unit* RU V Balikpapan, selanjutnya disebut “*expansion*” yang akan dilakukan oleh SPV Pertamina menggunakan pendanaan dari mekanisme *Project Financing*. Pembentukan SPV Pertamina untuk lingkup *expansion* dipenuhi dengan pendirian PT Kilang Pertamina Balikpapan.

2. Scope of Implementation of RDMP RU V Balikpapan in Pertamina’s 2030 RJPP

- The scope of development of the existing Balikpapan RU V, hereinafter referred to as “*revamp*”, and the construction of the Lawe-Lawe Terminal and *Jetty*, which will be carried out by Pertamina using internal funding and/or corporate loans.
- The scope of the construction of the *New Unit* RU V Balikpapan, hereinafter referred to as “*expansion*”, will be carried out by SPV Pertamina using funding from the project financing mechanism. The establishment of Pertamina’s SPV for the scope of expansion was fulfilled by the establishment of PT Kilang Pertamina Balikpapan.



LOGO PERUSAHAAN

Company Logo



Sebagai Anak Perusahaan dari PT Kilang Pertamina Internasional, yang merupakan bagian dari Grup Pertamina, logo KPB mengacu kepada logo PT Pertamina (Persero). Terdapat kalimat “Kilang Pertamina Balikpapan” di bawah logo Pertamina yang menandakan identitas KPB dan Kilang Balikpapan yang dikelola.

As a Subsidiary of PT Kilang Pertamina International, which is part of the Pertamina Group, the KPB logo refers to the PT Pertamina (Persero) logo. It includes the phrase “Kilang Pertamina Balikpapan” under the Pertamina logo, which indicates the identity of the KPB, and Kilang Balikpapan management.



BIDANG USAHA

Line of Business



Berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Anggaran Dasar KPB yang disahkan melalui Akta Pendirian No.12 tanggal 7 Mei 2019, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha seperti yang dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Based on Article 3 Paragraph 2 of the KPB Articles of Association that were ratified through the Deed of Establishment No. 12 dated May 7, 2019, the Company can carry out business activities as described in the table below:

KEGIATAN USAHA BUSINESS ACTIVITIES	KETERANGAN INFORMATION
Bidang Jasa Service Sector	Produk/Jasa yang dihasilkan Products/Services produced
<p>a. Menjalankan usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti Avgas, Avtur, Gasoline, minyak tanah atau kerosin, minyak gas, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, solvent/pelarut, termasuk LPG yang dihasilkan dari kilang minyak, dan produk lainnya yang dimurnikan serta bidang energi baru dan terbarukan, baik di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>Running a petroleum refining and refining business that produces fuels such as Avgas, Avtur, Gasoline, kerosene or kerosene, gas oil, diesel oil, fuel oil or gasoline, solvents/solvents, including LPG produced from oil refineries, and products other purified and new and renewable energy fields, both at home and abroad.</p>	<p>Avgas, Avtur, Gasoline, minyak tanah atau kerosin, minyak gas, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, solvent/pelarut, termasuk LPG yang dihasilkan dari kilang minyak, dan produk lainnya yang dimurnikan.</p> <p>Avgas, Avtur, Gasoline, kerosene or kerosene, gas oil, diesel oil, fuel oil or gasoline, solvents, including LPG produced from oil refineries, and other purified products.</p>
<p>b. Menjalankan usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia (menggunakan bahan baku dari minyak dan gas bumi) seperti propylene, benzene, toluena dan produk petrokimia lainnya.</p> <p>Running an organic basic chemical industry that produces chemicals (using raw materials from oil and gas) such as propylene, benzene, toluene and other petrochemical products.</p>	<p>Propylene, benzene, toluena dan produk petrokimia lainnya.</p> <p>Propylene, benzene, toluene and other petrochemical products.</p>

KEGIATAN USAHA BUSINESS ACTIVITIES		KETERANGAN INFORMATION
Bidang Jasa Service Sector		Produk/Jasa yang dihasilkan Products/Services produced
<p>c. Menjalankan investasi pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri maupun di luar negeri. Carry out investment in the construction and development of oil refineries both domestically and abroad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Investasi pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam dan luar negeri. Perancangan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan kilang minyak. Investment in the construction and development of oil refineries at home and abroad. Design, construction, development, operation and management of oil refineries. 	
<p>d. Menjalankan usaha di bidang energi baru dan terbarukan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan huruf c di atas. Running a business in the field of new and renewable energy, either directly or indirectly related to letter c above.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Investasi pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam dan luar negeri. Perancangan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan kilang minyak. Investment in the construction and development of oil refineries at home and abroad. Design, construction, development, operation and management of oil refineries. 	
<p>e. Melakukan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pengelolaan kilang minyak. Carry out the design, construction, development, operation and management of oil refineries.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Investasi pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam dan luar negeri. Perancangan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan kilang minyak. Investment in the construction and development of oil refineries at home and abroad. Design, construction, development, operation and management of oil refineries. 	
<p>f. Membeli atau memperoleh bahan baku untuk kilang minyak. Purchase or acquire raw materials for oil refineries.</p>		
<p>g. Memproduksi produk-produk bahan bakar, minyak bumi dan petrokimia dari kilang minyak tersebut. Producing fuel, petroleum and petrochemical products from the oil refinery.</p>	<p>Tercover dalam kegiatan di huruf a & b. Covered in the activities in letters a & b.</p>	
<p>h. Mendistribusikan, memasarkan dan menjual produk-produk yang dihasilkan oleh kilang minyak tersebut. Distributing, marketing and selling the products produced by the oil refinery.</p>		
<p>i. Menjalankan kegiatan usaha lain yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang kegiatan usaha sebagaimana tersebut pada : huruf c, huruf d dan huruf e di atas; Carrying out other business activities that directly or indirectly support business activities as referred to in: letter c, letter d and letter e above.</p>		

Produk dan Jasa Layanan

Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak Bumi Avgas, Avtur, *Gasoline*, minyak tanah atau kerosin, minyak gas, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, *solvent* atau pelarut, termasuk LPG yang dihasilkan dari kilang minyak dan produk lainnya yang dimurnikan.

Industri Kimia Dasar Organik

Bahan kimia *propylene*, *benzene*, *toluene*, dan produk petrokimia lainnya.

Jasa Lainnya

- Investasi pembangunan dan pengembangan kilang minyak di dalam dan luar negeri.
- Perancangan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pengelolaan kilang minyak.

Strategi Bisnis Kilang Pertamina Balikpapan

- Menghasilkan produk-produk dengan kualitas tinggi dan menjadi kebutuhan masyarakat dengan menekankan kaidah-kaidah budaya *Health, Safety, Security, Environment* (HSSE).
- Memperkuat kemampuan kompetisi dan efisiensi bisnis dengan menghasilkan produk-produk yang kompetitif dan bervariasi.
- Meningkatkan hasil produksi ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar dalam negeri maupun ekspor.
- Memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia di dalam negeri maupun *offshore* yang dapat mendukung kinerja proyek dengan tetap memperhatikan *risk exposure* bisnis KPB terhadap PT Pertamina (Persero) (*Ring Fencing*).
- Partisipasi dalam program kemandirian energi nasional yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Products and Services

Petroleum Refining and Processing Business Avgas, avtur, gasoline, kerosene or kerosene, gas oil, diesel oil, fuel oil or gasoline, solvents or solvents, including LPG produced from oil refineries and other refined products.

Basic Organic Chemical Industry

Chemicals propylene, benzene, toluene, and other petrochemical products.

Other Services

- Investment in the construction and development of oil refineries at home and abroad.
- Design, construction, development, operation and management of oil refineries.

Kilang Pertamina Balikpapan Business Strategy

- Produce products with high quality and become the needs of the community by emphasizing the cultural principles of HSSE (Health, Safety, Security, Environment).
- Strengthen competitiveness and business efficiency by producing competitive and varied products.
- Increase environmentally friendly production to increase domestic and export market share.
- Utilize various sources of funding available domestically and offshore that can support project performance while taking into account the risk exposure of the KPB business to PT Pertamina (Persero) (*Ring Fencing*).
- Participate in the national energy independence program launched by the Government of Indonesia.

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Vision, Mission and Corporate Culture

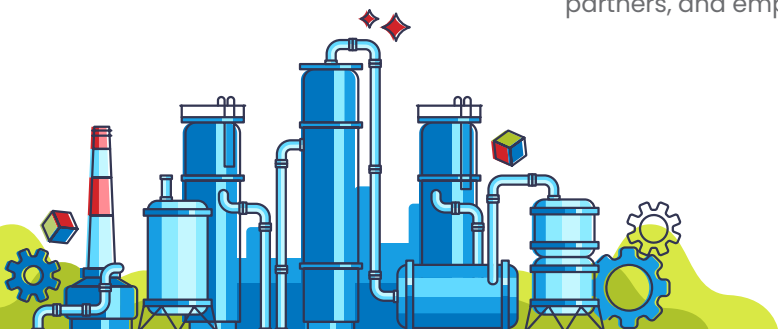


“Visi Perusahaan adalah menjadi operator dan pemilik kilang kelas dunia yang menghasilkan kinerja Perusahaan yang *Excellent* dalam menghasilkan produk berkualitas yang ramah lingkungan dan profit optimal dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis Perusahaan.”

“The Company’s vision is to become a world-class refinery operator and owner that results in excellent Company performance in producing quality products that are environmentally friendly and optimal profit in increasing the Company’s business growth.”



- Mendukung program Pertamina Group dan Pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah produk kilang, mengurangi impor produk dan meningkatkan kapasitas produksi kilang nasional.
- Mendukung pertumbuhan korporasi melalui pengembangan kilang, pemanfaatan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan potensi portofolio pendanaan konvensional dan alternatif lainnya serta mampu bekerja sama dengan berbagai mitra terpilih, dan melakukan pemberdayaan lingkungan sekitar.
- Support the Pertamina Group and Government programs in increasing the added value of refinery products, reducing product imports and increasing national refinery production capacity.
- Supporting corporate growth through refinery development, utilization of technology and Human Resources (HR), utilizing the potential of conventional and other alternative funding portfolios as well as being able to collaborate with selected partners, and empowering the surrounding environment.



Budaya Perusahaan

Sebagai salah satu bagian dari PT Pertamina (Persero), yang merupakan BUMN di bidang energi, KPB memiliki kewajiban untuk menanamkan pedoman budaya kerja AKHLAK. Sejak tanggal 1 Juli 2020, nilai-nilai AKHLAK BUMN telah diadopsi dan diterapkan seutuhnya dan menjadi kerangka acuan umum bagi seluruh insan KPB dalam memaknai dan memegang teguh nilai-nilai yang telah ditanamkan. Dengan mentransformasi nilai AKHLAK ke dalam Budaya Perusahaan diharapkan dapat menuntun segenap insan KPB untuk lebih optimal dan berjalan lebih terarah di masa depan.

- A Amanah:**
Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- K Kompeten:**
Terus belajar & mengembangkan kapabilitas.
- H Harmonis:**
Saling membantu dan menghargai perbedaan.
- L Loyal:**
Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- A Adaptif:**
Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan perubahan.
- K Kolaboratif:**
Membangun semangat kerja yang sinergis.

Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perusahaan

KPB senantiasa melaksanakan program sosialisasi dan internalisasi Nilai Inti Perusahaan dalam rangka memberikan pengetahuan (*knowing*) dan menanamkan serta meningkatkan pemahaman (*understanding*) seluruh insan Perusahaan mengenai nilai inti Perusahaan. Agar Budaya Perusahaan menyatu dengan perilaku Insan Perusahaan dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka Perusahaan melakukan sosialisasi dan internalisasi Budaya Perusahaan dengan antara lain melalui *broadcast email*, *online workshop*.

Corporate Culture

As a part of PT Pertamina (Persero), which is a BUMN in the energy sector, KPB has an obligation to instill the AKHLAK work culture guidelines. Since July 1, 2020, the SOE's AKHLAK values have been fully adopted and implemented and have become a general frame of reference for all Company personnel in interpreting and upholding the values that have been instilled. By transforming the AKHLAK values into the Corporate Culture, it is hoped that it can guide all Company personnel to be more optimal and more directed in the future.

- A Amanah (Trustworthy):**
Hold fast to the trust given.
- K Kompeten (Competent):**
Continue to learn and develop capabilities.
- H Harmonis (Harmonious):**
Caring for each other and respecting differences.
- L Loyal:**
Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State.
- A Adaptive:**
Continue to innovate and be enthusiastic in moving or facing change.
- K Kolaboratif (Collaborative):**
Build synergistic cooperation.

Corporate Culture Socialization and Internalization

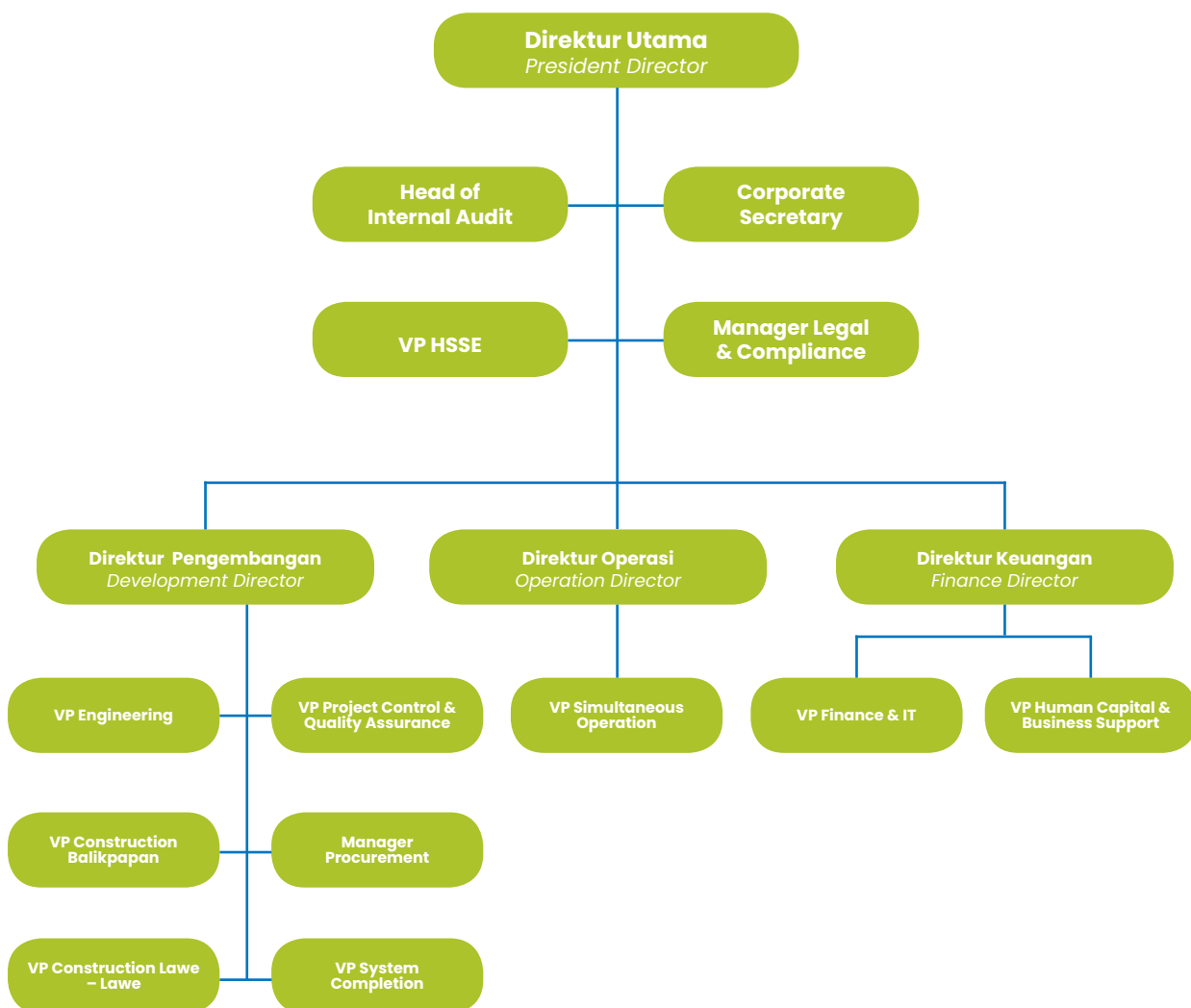
The Company continues to carry out socialization programs and internalization of the Company's Core Values in order to provide knowing, and instill and improve the understanding of all Company personnel regarding the Company's core values. For the Corporate Culture to be integrated with the behavior of the Company's Personnel in their daily business activities, the Company conducts socialization and internalization of the Corporate Culture by broadcast emails, and online workshops.

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

Struktur organisasi Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Balikpapan No.Kpts-008/KPB0000/2021-S0 tanggal 22 April 2021.

The Company's organizational structure is based on the PT Kilang Pertamina Balikpapan President Director Decree No. Kpts-008/ KPB0000/2021-S0 dated April 22, 2021.



PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Profile



Suwahyanto

Komisaris Utama President Commissioner

Periode jabatan s.d. 31 Desember 2021:

Term of office until December 31, 2021:

Pertama: Komisaris Utama pada tanggal 7 Mei 2019 – 20 Maret 2020.

Kedua: Komisaris pada 20 Maret 2020 – 19 Januari 2021.

Ketiga: Komisaris Utama pada 19 Januari 2021 – 31 Desember 2021.

First: President Commissioner on May 7, 2019 – March 20, 2020.

Second: Commissioner on March 29, 2020 – January 19, 2021.

Third: President Commissioner on January 19, 2021 – December 31, 2021.



DATA PRIBADI

Warga Negara Indonesia

Usia 56 tahun per Desember 2021

Kelahiran Surabaya, 25 Maret 1965

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENUNJUKAN

1. Keputusan Pemegang Saham KPI Secara Sirkuler yang tertuang dalam Akta Nomor 11 tentang Pernyataan Pemegang Saham KPI tentang Penempatan Wakil Perseroan sebagai Calon Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan PT Kilang Pertamina Balikpapan. Berdasarkan Akta Perusahaan No. 12 Tanggal 7 Mei 2019, Beliau diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Keputusan Pemegang Saham KPI Secara Sirkuler tanggal 20 Maret 2020 yang dinyatakan dalam Akta Perusahaan Nomor 21 Tanggal 14 April 2020 tentang Pemberhentian Komisaris, Beliau menjabat sebagai Komisaris.
3. Keputusan Pemegang Saham KPI Secara Sirkuler tanggal 19 Januari 2021 yang dinyatakan dalam Akta Perusahaan Nomor 07 Tanggal 11 Februari 2021 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama hingga 31 Desember 2021 Beliau masih menjabat sebagai Komisaris Utama.

PERSONAL DATA

Indonesian citizen

56 years old as of December 2021

Born in Surabaya, March 25, 1965

DOMICILE

Jakarta

APPOINTMENT HISTORY

1. Circular Decision of the Shareholders of KPI as stipulated in Deed Number 11 concerning Statement of Shareholders of KPI regarding the Placement of Company Representatives as Candidates for the Board of Commissioners and Directors in the Context of Establishing a Subsidiary of PT Kilang Pertamina Balikpapan. Based on the Company Deed No. 12 dated May 7, 2019, was appointed as the President Commissioner.
2. Circular Decision of the Shareholders of KPI dated March 20, 2020 ratified through the Company Deed Number 21 dated April 14, 2020 regarding the Dismissal of the Commissioner, served as Commissioner.
3. Circular Decision of the Shareholders of KPI dated January 19, 2021 ratified through Company Deed Number 07 dated February 11, 2021 concerning Appointment of Members of the Board of Commissioners, He served as President Commissioner. As of December 31, 2021, was still President Commissioner.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1989)

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (November 2019-Februari 2020)
- Presiden Komisaris PT Badak NGL (Februari 2019-Desember 2019)
- Senior Vice President (SVP) Project Development PT Pertamina (Persero) (Juli 2018-Juni 2020)
- Project Coordinator RDMP RU V Balikpapan PT Pertamina (Persero) (Agustus 2016-Juli 2018)
- Manager Process Technology PT Pertamina (Persero) (Maret 2015-Juli 2016)

INFORMASI RANGKAP JABATAN

Direktur Proyek Infrastruktur di PT Kilang Pertamina Internasional (Juni 2020-sekarang)

HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.
- Tidak memiliki saham Perusahaan.

EDUCATIONAL BACKGROUND

Bachelor's degree in Chemical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1989)

WORK EXPERIENCE

- Commissioner at PT Pertamina Hulu Energi (November 2019-February 2020)
- President Commissioner of PT Badak NGL (February 2019-December 2019)
- Senior Vice President (SVP) Project Development at PT Pertamina (Persero) (July 2018-June 2020)
- Project Coordinator RDMP RU V Balikpapan at PT Pertamina (Persero) (August 2016-July 2018)
- Process Technology Manager at PT Pertamina (Persero) (March 2015-July 2016)

CONCURRENT POSITION INFORMATION

Director of Infrastructure Projects at PT Kilang Pertamina International (June 2020-present)

AFFILIATE RELATIONSHIP AND COMPANY SHARE OWNERSHIP

- Has no affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and majority and controlling shareholders.
- Does not own the Company's shares.

Saifullah Ma'shum

Komisaris Commissioner

Periode jabatan s.d. 31 Desember 2021:

Term of office until December
31, 2021:

Pertama: Komisaris Utama pada
tanggal 7 Mei 2019 – 20 Maret
2020.

First: Commissioner on January
19, 2021 – December 31, 2021.



DATA PRIBADI

Warga Negara Indonesia
Usia 61 tahun per Desember 2021
Kelahiran Malang, 25 November 1960.

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENUNJUKAN

Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal
19 Januari 2021 yang dinyatakan dalam Akta Perusahaan
No.07 Tanggal 11 Februari 2021 tentang Pengangkatan
Anggota Dewan Komisaris, Beliau menjabat sebagai
Komisaris Utama. Sampai dengan 31 Desember 2021
Beliau masih menjabat sebagai Komisaris.

RIWAYAT PENDIDIKAN

S2 Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Jurusan Kesejahteraan Sosial, konsentrasi
bidang Otonomi dan Pembangunan Lokal, tahun
2014-2017.

PERSONAL DATA

Indonesian citizen
61 years old as of December 2021
Born in Malang, November 25, 1960.

DOMICILE

Jakarta

APPOINTMENT HISTORY

Circular Decision of the Shareholders dated January
19, 2021 ratified through Company Deed No.07 dated
February 11, 2021 regarding the Appointment of
Members of the Board of Commissioners, he served as
President Commissioner. As of December 31, 2021, is still
Commissioner.

EDUCATIONAL BACKGROUND

Master's Degree from Universitas Indonesia, Faculty
of Social and Political Sciences, Department of Social
Welfare, concentration in Autonomy and Local
Development, 2014-2017.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Tim Ahli Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (2017 - 2020).
- Dosen pada Institut Ilmu Al-Qurán (IIQ) Jakarta (2014-2017).
- Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur V/ Malang Raya (2004-2009).

INFORMASI RANGKAP JABATAN

-

HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham utama dan pengendali. Tidak memiliki saham Perusahaan.

WORK EXPERIENCE

- Expert Team of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration of the Republic of Indonesia (2017 - 2020).
- Lecturer at the Institute of Al-Quran Science (IIQ) Jakarta (2014-2017).
- Member of the DPR RI for the Electoral District of East Java V/ Malang Raya (2004-2009).

CONCURRENT POSITION INFORMATION

-

AFFILIATE RELATIONSHIP AND COMPANY SHARE OWNERSHIP

Has no affiliation with other members of the Board of Directors. Do not own the Company's shares.

PROFIL DIREKSI

Board of Directors' Profile

Feri Yani

Direktur Utama
President Director

Periode jabatan s.d. 31 Desember 2021:
Term of office until December 31, 2021:

Pertama Direktur Utama pada tanggal
15 Maret 2021 – 31 Desember 2021.
First: President Director on March 15, 2021
– December 31, 2021.



DATA PRIBADI

Warga Negara Indonesia
Usia 55 tahun per Desember 2021
Kelahiran Pematang Siantar, 14 April 1966.

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENUNJUKAN

Keputusan Pemegang Saham KPI Secara Sirkuler tanggal 15 Maret 2021 yang dinyatakan dalam Akta Perusahaan Nomor 05 Tanggal 7 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama, Beliau menjabat sebagai Direktur Utama hingga 31 Desember 2021 Beliau masih menjabat sebagai Direktur Utama.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1989).

RIWAYAT PEKERJAAN

- Project Expert PT Pertamina (Persero) (November 2020 – Maret 2021).
- VP Refining Performance Excellence PT Pertamina (Persero) (Januari 2020 – Oktober 2020).
- VP Refining Business Development PT Pertamina (Persero) (Juli 2019 – Desember 2019).
- GM Refinery Unit V Balikpapan PT Pertamina (Persero) (Mei 2018 – Juni 2019).
- VP Performance Support PT Pertamina (Persero) (Juli 2017 – Mei 2018).
- Manager Budget Planning & Monitoring PT Pertamina (Persero) (Oktober 2013 – Juni 2017).

INFORMASI RANGKAP JABATAN

-

HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham utama dan pengendali.
- Tidak memiliki saham Perusahaan.

PERSONAL DATA

Indonesian citizen
55 years old as at December 2021
Born in Pematang Siantar, April 14, 1966.

DOMICILE

Jakarta

APPOINTMENT HISTORY

Circular Decision of Shareholders of KPI dated March 15, 2021 as stipulated in Company Deed Number 05 dated April 7, 2021 regarding the Dismissal and Appointment of the President Director, Served as the President Director. As of December 31, 2021, is still President Director.

EDUCATIONAL BACKGROUND

Bachelor's degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung (1989).

WORK EXPERIENCE

- Project Expert at PT Pertamina (Persero) (November 2020 – March 2021).
- VP of Refining Performance Excellence at PT Pertamina (Persero) (January 2020 – October 2020).
- VP of Refining Business Development at PT Pertamina (Persero) (July 2019 – December 2019).
- GM of Refinery Unit V Balikpapan at PT Pertamina (Persero) (May 2018 – June 2019).
- VP of Performance Support at PT Pertamina (Persero) (July 2017 – May 2018).
- Manager of Budget Planning & Monitoring at PT Pertamina (Persero) (October 2013 – June 2017).

CONCURRENT POSITION INFORMATION

-

AFFILIATE RELATIONSHIP AND COMPANY SHARE OWNERSHIP

- Has no affiliation with other members of the Board
Has no affiliated relationships with other members of the Board of Directors.
- Does not own the Company's shares.

Djoko Koen Soewito

Direktur Pengembangan
Development Director

**Periode Jabatan: 7 Mei 2019 – 2022,
Periode Pertama**

Term of Office: May 7, 2019 – 2022, First
Period



DATA PRIBADI

Warga Negara Indonesia
Usia 57 tahun per Desember 2021
Kelahiran Madiun, 10 Desember 1964

DOMISILI

Bandung

RIWAYAT PENUNJUKAN

Keputusan Pemegang Saham KPI Secara Sirkuler yang tertuang dalam Akta Nomor 11 tentang Pernyataan Pemegang Saham KPI tentang Penempatan Wakil Perseroan sebagai Calon Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan PT Kilang Pertamina Balikpapan. Posisi Beliau disahkan berdasarkan Akta Perusahaan No.12 Tanggal 7 Mei 2019.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1989)

RIWAYAT PEKERJAAN

- Project Coordinator RDMP RU V Balikpapan & Lawe-Lawe (2018- 2020)
- VP Contracting and Procurement Service di PT Pertamina (Persero) (2017-2018)
- Site VP Start-Up and Commissioning di RDMP RU VI Balongan (Juli- November 2017)
- Manager Project Engineering di PT Pertamina (Persero) (2016-2017)
- Senior Manager Operation & manufacturing RU VI Balongan (2014-2016)

INFORMASI RANGKAP JABATAN

Project Coordinator RDMP RU V Balikpapan & Lawe-Lawe (2019-2020)

HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham utama dan pengendali.
- Tidak memiliki saham Perusahaan.

PERSONAL DATA

Indonesian citizen
57 years old as of December 2021
Born in Madiun, December 10, 1964

DOMICILE

Bandung

APPOINTMENT HISTORY

Decision of the Shareholders of KPI Circularly contained in Deed Number 11 concerning the Statement of Shareholders of KPI regarding the Placement of Company Representatives as Candidates for the Board of Commissioners and Directors in the Context of Establishing a Subsidiary of PT Kilang Pertamina Balikpapan. The position was ratified based on the Company Deed No. 12 dated May 7, 2019.

EDUCATIONAL BACKGROUND

Bachelor degree in Engineering Physics from Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1989)

WORK EXPERIENCE

- Project Coordinator at RDMP RU V Balikpapan & Lawe-Lawe (2018- 2020)
- VP Contracting and Procurement Service at RDMP RU VI Balongan PT Pertamina (Persero) (2017-2018)
- Site VP Start Up and Commissioning at PT Pertamina (Persero) (July-November 2017)
- Project Engineering Manager at PT Pertamina (Persero) (2016-2017)
- Senior Manager Operation & manufacturing at RU VI Balongan (2014-2016)

CONCURRENT POSITION INFORMATION

Project Coordinator at RDMP RU V Balikpapan & Lawe-Lawe (2019-2020)

AFFILIATE RELATIONSHIP AND COMPANY SHARE OWNERSHIP

- Has no affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and majority and controlling shareholders.
- Does not own the Company's shares.

Mulyono

Direktur Operasi Operations Director

**Periode Jabatan: 7 Mei 2019 – 2022,
Periode Pertama**

Term of Office: May 7, 2019 – 2022, First
Period



DATA PRIBADI

Warga Negara Indonesia
Usia 56 tahun per Desember 2021
Kelahiran Yogyakarta, 22 Februari 1965

DOMISILI

Bogor

RIWAYAT PENUNJUKAN

Keputusan Pemegang Saham KPI Secara Sirkuler yang tertuang dalam Akta Nomor 11 tentang Pernyataan Pemegang Saham KPI tentang Penempatan Wakil Perseroan sebagai Calon Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rangka Pendirian Anak Perusahaan PT Kilang Pertamina Balikpapan. Posisi Beliau disahkan berdasarkan Akta Perusahaan No.12 Tanggal 7 Mei 2019.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada (1989)

RIWAYAT PEKERJAAN

- VP Commercial & Optimization PT Kilang Pertamina Internasional (November 2020–Februari 2021)
- VP Performance Support Direktorat Pengolahan (Juni 2020–Oktober 2020)
- General Manager RU V Balikpapan Direktorat Pengolahan (Juli 2019–Mei 2020)
- Senior Manager Operation Manufacturing RU V Balikpapan (Februari 2019–Juni 2019)

INFORMASI RANGKAP JABATAN

–

HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham utama dan pengendali.
- Tidak memiliki saham Perusahaan.

PERSONAL DATA

Indonesian citizen
56 years old as of December 2021
Born in Yogyakarta, February 22, 1965

DOMICILE

Bogor

APPOINTMENT HISTORY

Decision of the Shareholders of KPI Circularly contained in Deed Number 11 concerning the Statement of Shareholders of KPI regarding the Placement of Company Representatives as Candidates for the Board of Commissioners and Directors in the Context of Establishing a Subsidiary of PT Kilang Pertamina Balikpapan. The position was ratified based on the Company Deed No. 12 dated May 7, 2019.

EDUCATIONAL BACKGROUND

Bachelor degree in Chemical Engineering from Universitas Gadjah Mada (1989)

WORK EXPERIENCE

- VP Commercial & Optimization at PT Kilang Pertamina International (November 2020–February 2021)
- VP Performance Support at Directorate of Processing (June 2020–October 2020)
- General Manager at RU V Balikpapan, Directorate of Processing (July 2019–May 2020)
- Senior Manager Operation Manufacturing at RU V Balikpapan (February 2019–June 2019)

CONCURRENT POSITION INFORMATION

–

AFFILIATE RELATIONSHIP AND COMPANY SHARE OWNERSHIP

- Has no affiliated relationships with members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and majority and controlling shareholders.
- Does not own the Company's shares.

Sigit Hanggoro

Direktur Keuangan Finance Director

**Periode Jabatan: 25 Oktober 2021 –
31 Desember 2021, Periode Pertama**

Term of Office: October 25, 2021 –
December 31 2022, First Period



DATA PRIBADI

Warga Negara Indonesia
Usia 56 tahun per Desember 2021
Kelahiran Yogyakarta, 16 November 1965.

DOMISILI

Jakarta

RIWAYAT PENUNJUKAN

Keputusan Pemegang Saham KPI Secara Sirkuler tanggal 25 Oktober 2021 yang dinyatakan dalam Akta Perusahaan Nomor 18 Tanggal 23 November 2021 tentang Pengangkatan Direktur Keuangan hingga 31 Desember 2021 Beliau masih menjabat sebagai Direktur Keuangan.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (1991)

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Keuangan PT Kilang Pertamina Balikpapan (November 2021- Desember 2021)
- VP Policy & Risk Management PT Kilang Pertamina Internasional (September 2021 - Oktober 2021)
- VP Policy & Risk Management R&P PT Pertamina (Persero) (Oktober 2020 - Agustus 2021)
- Corporate Secretary PT Badak NGL (Desember 2017 - September 2020)
- Finance Coordinator PT Badak NGL (Oktober 2016 - November 2017)

INFORMASI RANGKAP JABATAN

Tidak ada

HUBUNGAN AFILIASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham utama dan pengendali.
- Tidak memiliki saham Perusahaan.

PERSONAL DATA

Indonesian citizen
56 years old as of December 2021
Born in Yogyakarta, 16 November 1965.

DOMICILE

Jakarta

APPOINTMENT HISTORY

Circular Decision of the Shareholders of KPI dated October 25, 2021 ratified through the Company Deed Number 18 dated November 23, 2021 regarding the Appointment of the Director of Finance. As of December 31, 2021, is still President Director.

EDUCATIONAL BACKGROUND

Bachelor degree in Economics from Universitas Gadjah Mada (1991)

WORK EXPERIENCE

- Finance Director at PT Kilang Pertamina Balikpapan (November 2021-December 2021)
- VP of Policy & Risk Management at PT Pertamina International Refinery (September 2021 - October 2021)
- VP of Policy & Risk Management R&P at PT Pertamina (Persero) (October 2020 - August 2021)
- Corporate Secretary at PT Badak NGL (December 2017-September 2020)
- Finance Coordinator at PT Badak NGL (October 2016 - November 2017)

CONCURRENT POSITION INFORMATION

None

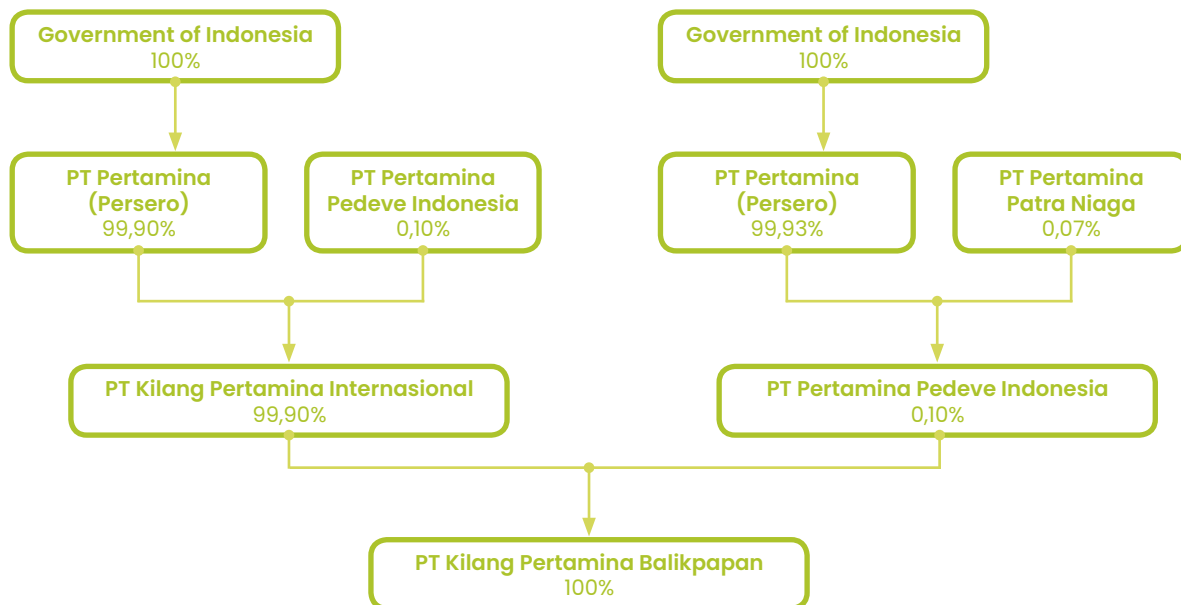
AFFILIATE RELATIONSHIP AND COMPANY SHARE OWNERSHIP

- Has no affiliated relationships with other members of the Board of Directors.
- Do not own the Company's shares.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Composition of Shareholders

PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS	JUMLAH SAHAM (LEMBAR) NUMBER OF SHARES	MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH ISSUED AND FULLY PAID CAPITAL (RP)	PERSENTASE PERCENTAGE (%)
PT Kilang Pertamina Internasional	11.753.215	1.175.321.500.000,-	99,90
PT Pertamina Pedeve Indonesia	11.800	1.180.000.000,-	0,10
Jumlah Amount	11.765.015	1.176.501.500.000,-	100



Susunan Kepemilikan Saham KPB:

- PT Kilang Pertamina Internasional (KPI): 99,90% atau sejumlah 11.753.215 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.175.321.500.000,- (satu triliun seratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah).
- PT Pertamina Pedeve Indonesia: 0,10% atau sejumlah 11.800 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.180.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh juta Rupiah).

Dengan adanya Penyertaan Modal dari Pemegang Saham KPB pada tahun 2020 dan 2021, maka akan terjadi perubahan struktur kepemilikan saham yang saat ini masih dalam proses mendapatkan Persetujuan dari RUPS KPB. Apabila persetujuan RUPS tersebut telah terbit maka struktur kepemilikan saham KPB akan disesuaikan menjadi sebagai berikut :

- PT Kilang Pertamina Internasional sebesar 99,995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima persen) atau sejumlah 238.209.720 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp23.820.972.000.000 (dua puluh tiga triliun delapan ratus dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta Rupiah).
- PT Pertamina Pedeve Indonesia sebesar 0,005% (nol koma nol nol lima persen) atau sejumlah 11.810 (sebelas ribu delapan ratus sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.181.000.000 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta Rupiah).

Composition of Share Ownership of KPB:

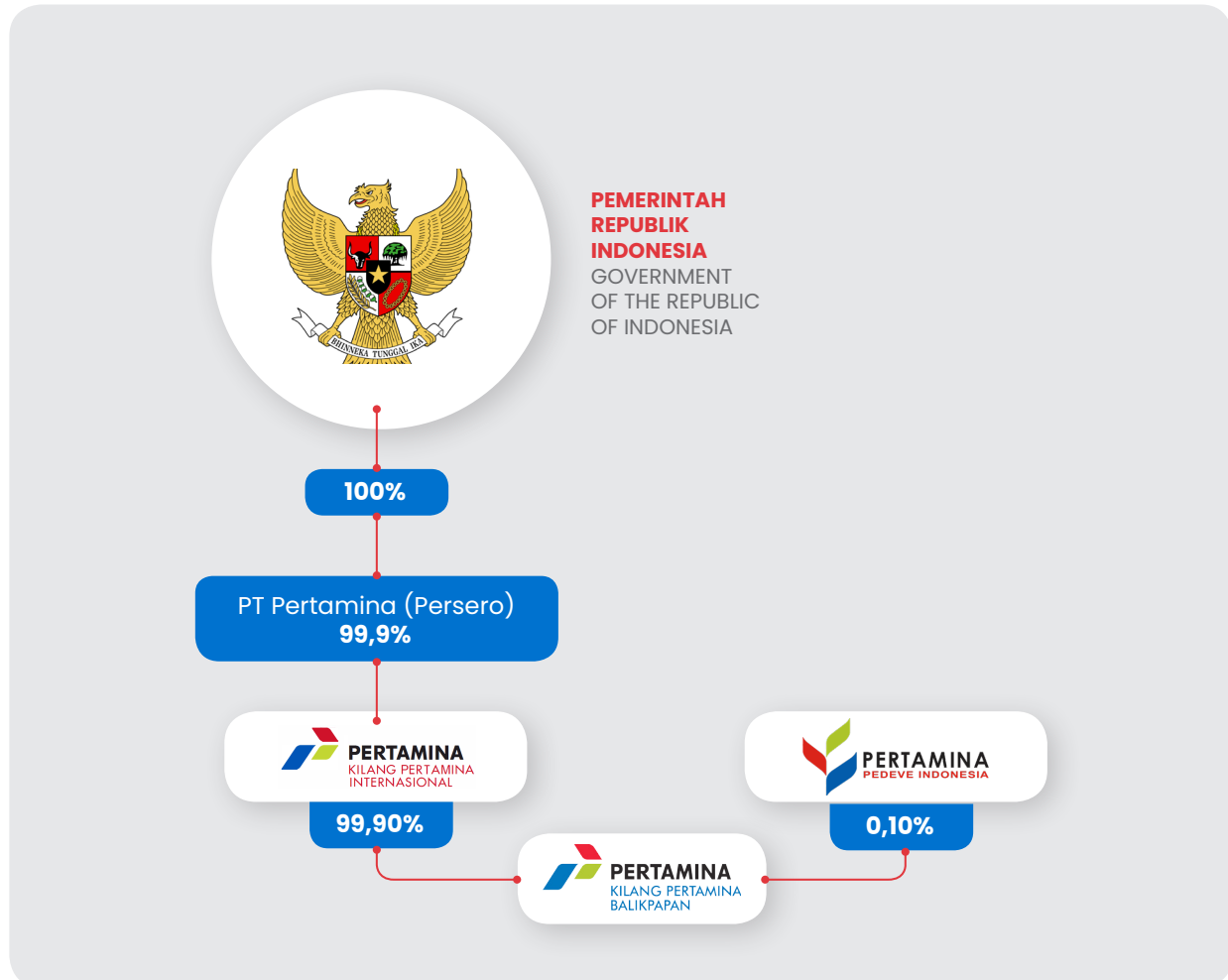
- PT Kilang Pertamina Internasional (KPI): 99.90% or 11,753,215 shares with a total nominal value of Rp1,175,321,500,000,- (one trillion one hundred seventy five billion three hundred twenty one million five hundred thousand rupiah).
- PT Pertamina Pedeve Indonesia : 0.10% or a total of 11,800 shares with a total par value of Rp1,180,000,000 (one billion one hundred and eighty million rupiah).

With the Equity Participation from KPB Shareholders in 2020 and 2021, there will be a change in the share ownership structure, which is currently still in the process of obtaining approval from the KPB GMS. After the approval of the GMS, the share ownership structure of KPB will be adjusted to be as follows:

- PT Kilang Pertamina Internasional 99.995% (ninety nine point nine nine five percent) or a total of 238,921,810 (two hundred thirty eight million nine hundred twenty one thousand eight hundred ten) shares with a total nominal value of Rp23,892,181 .000,000 (twenty three trillion eight hundred ninety two billion one hundred and eighty one million Rupiah).
- PT Pertamina Pedeve Indonesia of 0.005% (zero point zero zero five percent) or a total of 11,810 (eleven thousand eight hundred ten) shares with a total nominal value of Rp1,181,000,000 (one billion one hundred and eighty one million Rupiah).

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Company Group Structure



DAFTAR ENTITAS ANAK PERUSAHAAN & ENTITAS ASOSIASI

List of Subsidiaries & Associated Entities

Sampai dengan 31 Desember 2021, Perusahaan tidak memiliki Entitas Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi.

As of December 31, 2021, the Company did not have any Subsidiaries or Associated Entities.

KRONOLOGI PENERBITAN/ PENCATATAN SAHAM & EFEK LAINNYA

Chronology of Issuance/ Listing of Shares and Other Securities

Perusahaan tidak menerbitkan sahamnya untuk dimiliki oleh publik maupun oleh manajemen atau karyawan. Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan juga tidak menerbitkan obligasi ataupun melakukan pencatatan efek lainnya.

The Company has issue any shares to the public or to the management or employees. Until the end of 2021, the Company has not issued bonds or other securities.

NAMA DAN ALAMAT KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN

Name and Address of Branch Offices or Representative Office

KANTOR KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN COMPANY LEGAL OFFICE

Jakarta

Gedung Pertamina Lantai 14
Jalan Medan Merdeka Timur 1A,
Gambir, Kode Pos 10110
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Tel.: (021) 1500000

Jakarta

Gedung Pertamina Lantai 14
Jalan Medan Merdeka Timur 1A,
Gambir, Kode Pos 10110
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Tel.: (021) 1500000

KANTOR DOMISILI/KORESPONDENSI OFFICE OF DOMICILE/CORRESPONDENCE

Jakarta

Patra Jasa Office Tower Lantai 2
Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 32-34,
Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia, Kode
Pos 12950

Jakarta

Patra Jasa Office Tower Lantai 2
Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 32-34,
Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia, Kode
Pos 12950

KANTOR OPERASIONAL OPERATIONAL OFFICE

Balikpapan

Jalan Kom. L Yos Sudarso 148,
Karang Jati Balikpapan Tengah,
Kode Pos 76123 Balikpapan,
Kalimantan Timur, Indonesia

Balikpapan

Kom Street. L Yos Sudarso 148,
Karang Jati, Central Balikpapan,
Postal Code 76123 Balikpapan,
East Kalimantan, Indonesia

Sampai dengan 31 Desember 2021, Perusahaan tidak memiliki Entitas Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi.

As of December 31, 2021, the Company did not have any Subsidiaries and Associated Entities.

LEMBAGA DAN/ATAU PROFESI PENUNJANG

Supporting Institutions and/or Professionals

Pada tahun 2021, Perusahaan tidak menggunakan lembaga dan profesional penunjang pasar modal, namun Perusahaan menggunakan lembaga dan profesional penunjang aktivitas bisnis Perusahaan yaitu:

In 2021, the Company did not use capital market supporting institutions and professionals, but to support the Company's business activities the Company used the following institutions and professionals:

LEMBAGA INSTITUTION	NAMA & ALAMAT NAME & ADDRESS	JENIS & BENTUK JASA SERVICE TYPE & FORM
Kantor Akuntan Publik Public accounting firm	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited)	Audit Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Audit of Financial Statements for the year ended December 31, 2021.
Financial Advisor/ Consultant	ERM Indonesia	Lenders' Environmental and Social Advisor
Financial Advisor/ Consultant	Nexant Asia Limited	Lender's Technical Advisor
Financial Advisor/ Consultant	Greengate LLC	Lender's Financial Model Advisor
Financial Advisor/ Consultant	Sumitomo Mitsui banking Corporation	Lender's ECA Coordinator (ECA : Export Credit Agency)
Financial Advisor/ Consultant	EY Corporate Advisors Pte.Ltd.	Lender's Model Auditor
Financial Advisor/ Consultant	AON	Jasa Konsultasi Insurance Insurance Consulting Services
Legal Counsel	Allen & Overy LLP	Lender Legal Services
Konsultan Hukum (Law Office)	Latham & Watkins LLP	Lender Legal Services





S
000
sarens

sarens

sarens

Three workers in blue and red uniforms, wearing hard hats and face masks, are standing in front of the container.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion
and Analysis

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Economy and Industry Review

Kondisi pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2021 masih membayangi pertumbuhan perekonomian global. Berbagai tekanan dan kondisi yang penuh ketidakpastian turut membuat pertumbuhan ekonomi global mengalami fluktuasi meskipun secara umum telah bergerak ke arah yang sangat baik.

Merebaknya COVID-19 varian Delta pada April 2021 di sejumlah negara membuat *International Monetary Fund* (IMF) dalam laporan *World Economic Outlook* yang dikeluarkan pada bulan Oktober memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mengalami koreksi sebesar 0,1% menjadi 5,9% di tahun 2021.

Sementara itu, tahun 2021 menjadi tahun yang penuh optimisme bagi pertumbuhan ekonomi nasional meski masih dibayangi kondisi pandemi COVID-19. Pemerintah senantiasa menerapkan kebijakan yang berkelanjutan sejak awal pandemi untuk mengendalikan kondisi pandemi di dalam negeri, salah satunya dengan mempercepat program vaksinasi sejak awal tahun 2021. Hal tersebut terlihat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar minus 0,74% (yoy) pada Triwulan I-2021 menjadi tumbuh cukup tinggi hingga 7,07% (yoy) pada Triwulan II-2021.

Meski demikian, pemulihan ekonomi di dalam negeri juga masih mengalami sejumlah tantangan yang terjadi seperti merebaknya virus COVID-19 varian Delta pada bulan April hingga mencapai puncaknya di bulan Juli 2021. Pemerintah kemudian menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mengendalikan laju penyebaran COVID-19 sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang terkoreksi hingga menjadi 3,51% (yoy) pada Triwulan III-2021.

Untuk memperbaiki kondisi pada periode tersebut, Bank Indonesia dalam Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV-2021 menyebutkan Pemerintah berupaya untuk memberikan stimulus ekonomi dengan mempertahankan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di angka 3,50%, suku bunga *deposit facility* 2,75%, dan suku bunga *lending facility* 4,25%. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2021 berhasil mengalami perbaikan

The COVID-19 pandemic condition, which continued throughout 2021, still overshadowed global economic growth. The many pressures and uncertain conditions contributed to fluctuations in global economic growth, although in general it has moved in a very good direction.

Due to the outbreak of the Delta variant of COVID-19 in April 2021 in a number of countries, the International Monetary Fund (IMF) in its World Economic Outlook report issued in October projected that global economic growth would experience a correction of 0.1% to 5.9% in 2021.

Meanwhile, 2021 was a year full of optimism for national economic growth even though it is still overshadowed by the COVID-19 pandemic. The Government has implemented sustainable policies since the beginning of the pandemic to control pandemic conditions in the country, one being by accelerating the vaccination program in early 2021. This can be seen based on data from the Central Statistics Agency (BPS) Indonesia's economic growth of minus 0.74% (yoy) in quarter I-2021 that grew to 7.07% (yoy) in quarter II-2021.

However, the domestic economic recovery was also still experiencing a number of challenges, such as the outbreak of the Delta variant of the COVID-19 virus in April that peaked in July 2021. The Government then implemented an Emergency Community Activity Restriction (PPKM) to control the spread of COVID-19, and this had an impact on the national economic growth that corrected to 3.51% (yoy) in the third quarter of 2021.

To improve conditions during this period, Bank Indonesia in its Quarter IV-2021 Monetary Policy Report stated that the Government would provide an economic stimulus by maintaining the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) at 3.50%, the deposit facility interest rate at 2.75%, and the lending facility interest rate at 4.25%. Through these policies, Indonesia's economic growth in the fourth quarter of 2021 managed to improve to 5.02% (yoy) in line with the start of a booster vaccination program

menjadi sebesar 5,02% (yoy) seiring dengan mulai dilakukan program vaksinasi *booster* pada akhir tahun 2021 yang diharapkan dapat mendukung perbaikan ekonomi nasional di tahun berikutnya.

Adapun sektor energi selama tahun 2021 masih dibayangi dengan tantangan yang cukup berat di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Berdasarkan laporan *Energy Information Administration* (EIA) yang dikeluarkan bulan Desember 2021 menyebutkan bahwa rata-rata permintaan minyak global mengalami penurunan sebesar 100.000 barel per hari. Penurunan ini terutama disebabkan adanya peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi pada tahun 2021 dan berdampak pada penurunan aktivitas penerbangan dan konsumsi bahan bakar jet.

Di samping itu, *Organization of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC) juga melaporkan adanya penurunan permintaan minyak pada Triwulan IV-2021. Tercatat, permintaan minyak dunia di tahun 2021 adalah sebesar 96,63 juta barel per hari secara tahunan yang disebabkan oleh adanya langkah-langkah penahanan COVID-19 di Eropa dan potensi dampaknya terhadap bahan bakar transportasi, terlebih munculnya virus COVID-19 varian baru Omicron.

Tangguh di Tengah Tantangan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional, Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) melakukan berbagai langkah strategis, di antaranya melakukan upgrade kilang yang berfungsi sebagai tempat pengolahan atau pemurnian minyak mentah (*crude oil*) menjadi berbagai macam produk yang digunakan orang setiap hari seperti minyak tanah, bensin, solar, avtur, dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui, tren produksi minyak mentah Indonesia cenderung menurun karena faktor-faktor alami dan belum ditemukannya ladang-ladang penemuan minyak baru yang cukup signifikan, sehingga Pertamina, sebagai salah satu perusahaan energi milik Negara menjadi net importir untuk minyak mentah pada tahun 2004. Tren impor minyak mentah terus meningkat seiring dengan penurunan produksi minyak mentah Indonesia, sehingga berdampak pada konfigurasi kilang-kilang yang dimiliki

at the end of 2021 that is expected to support an improvement of the national economy in the following year.

The energy sector during 2021 was still overshadowed by the formidable challenges during the COVID-19 pandemic that was still not over. Based on the Energy Information Administration (IEA) report issued in December 2021, it stated that the average global oil demand decreased by 100,000 barrels per day. This decline was mainly due to an increase in COVID-19 cases occurring in 2021 and the resulting decrease in flight activity and jet fuel consumption.

In addition, the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) also reported a decline in oil demand in the fourth quarter of 2021. It was noted that world oil demand in 2021 was 96.63 million barrels per day on an annual basis due to the COVID-19 containment measures in Europe and the potential impact on transportation fuels, especially the emergence of the new Omicron variant of the COVID-19 virus.

Toughness in the Middle of Challenges

To meet the national energy needs, the Government through PT Pertamina (Persero) instigated a number of strategic steps, including upgrading refineries that functions as a place for processing or refining crude oil, to produce various products that people use every day, such as kerosene, gasoline, diesel, aviation fuel, and others.

As is known, the trend of Indonesian crude oil production tends to decline due to natural factors and significant new oil discovery fields that have not been discovered, so Pertamina, as one of the state-owned energy companies, became a net importer of crude oil in 2004. Crude oil import trends continued to increase in line with the decline in Indonesia's crude oil production, which impacted the configuration of Pertamina's refineries. The refineries that were originally focused on processing Indonesian crude oil have

Pertamina. Kilang-kilang yang semula difokuskan untuk mengolah minyak mentah produksi Indonesia berubah menjadi kilang minyak yang harus mempunyai tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi untuk bisa mengolah dan memproses minyak mentah-minyak mentah impor.

Sementara itu, Indonesia mengalami peningkatan populasi penduduk yang cukup signifikan, sehingga *demand* terhadap bahan bakar juga ikut meningkat. Sedangkan kilang yang dimiliki Pertamina yang saat ini cukup besar adalah 5 kilang, di antaranya Kilang RU V Balikpapan, dengan kapasitas sekitar 1 juta barel per hari, yang kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pertamina, di mana terdapat peningkatan kapasitas pengolahan kilang menjadi sekitar 1,4 juta barel per hari.

Khusus untuk Kilang RU V Balikpapan, Pertamina melalui entitas anak Perusahaan PT Kilang Pertamina Internasional, membentuk satu perusahaan khusus pada tahun 2019, yaitu KPB yang bertugas antara lain, meningkatkan kapasitas kilang melalui program RDMP RU V Balikpapan.

Di tahun 2021, KPB tetap fokus pada pelaksanaan progres proyek untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yang tercermin dari kegiatan konstruksi yang mengalami peningkatan signifikan. Pencapaian ini terlihat dari semakin gencarnya pengiriman (*delivery-to-site*) dan instalasi beberapa unit besar yang termasuk kategori *Long Lead Item* (LLI), yaitu unit yang sejak pembuatan (*manufacturing*) hingga pengiriman ke site dapat memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2 (dua) tahun.

Dengan telah terpasangnya beberapa unit besar, seperti *Boiler*, *Steam Turbine Generator* (STG), *Alkylation Reactor*, *Propane/Propylene Splitter*, *RFCC 1st Regenerator*, dan juga telah berhasilnya kegiatan relokasi *Flare* Balikpapan-II, mendorong realisasi progres fisik proyek yang dilakukan KPB secara signifikan.

turned into oil refineries that must have a higher degree of flexibility to be able to handle and process imported crude oil.

Meanwhile, Indonesia experienced a significant increase in population, so the demand for fuel also increased. Meanwhile, the refineries owned by Pertamina that are currently large enough include 5 refineries, the RU V Balikpapan Refinery, with a capacity of around 1 million barrels per day, which was later included in Pertamina's Long Term Plan, in which there is an increase in refinery processing capacity to around 1.4 million barrels per day.

Specifically for the RU V Balikpapan Refinery, Pertamina through its subsidiary PT Kilang Pertamina Internasional, established a special company in 2019, called KPB whose task is to increase the capacity of the refinery through the RU V Balikpapan RDMP program.

In 2021, KPB remained focused on progressing the project to meet the targets set, as reflected in the construction activities significantly increased. This achievement can be seen from the increasingly intensive delivery-to-site and installation of several large units that were included in the Long Lead Item (LLI) category, namely units that from manufacturing to delivery to site can take a long time, which is approx. 2 (two) years.

With the installation of several large units, such as Boiler, Steam Turbine Generator (STG), Alkylation Reactor, Propane/Propylene Splitter, RFCC 1st Regenerator, as well as the successful relocation of the Balikpapan-II Flare, has pushed the realization of the physical progress of the project carried out by KPB significantly

RENCANA STRATEGIS 2021

2021 Strategic Plan



Strategi Perusahaan

Menghadapi tahun 2021, KPB telah menyusun dan menetapkan rencana strategis dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mendukung program Pertamina Group dan Pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah produk kilang, mengurangi impor produk, dan meningkatkan kapasitas produksi kilang nasional. Untuk itu, KPB selaku Anak Perusahaan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) berkomitmen mewujudkan visi untuk menjadi operator dan pemilik kilang kelas dunia yang menghasilkan kinerja perusahaan yang *excellent* dalam menghasilkan produk berkualitas yang ramah lingkungan dengan *profit* optimal dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis Perusahaan.

Corporate Strategy

In early 2021, KPB prepared and established a strategic plan for carrying out its operational activities by allocating resources to support the Pertamina Group and Government programs to increase the added value of refinery products, reduce product imports, and increase national refinery production capacity. To that end, the Company as a Subsidiary of PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) was committed to realizing its vision to become a world-class refinery operator and owner that produces excellent company performance in producing quality products that are environmentally friendly with optimal profit in increasing the Company's business growth.

Dalam menyusun dan merapkan rencana strategis di tahun 2021, Perusahaan memiliki asumsi dan dasar perhitungan berupa:

- Kurs USD pada tahun 2021 sebesar Rp14.600/USD;
- ICP di tahun 2021 sebesar USD45,00/barel.

Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan telah menyusun sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RKAP 2021, antara lain:

1. Target pencapaian pelaksanaan EPC ISBL-OSBL sebesar 47,08%;
2. Merekrut pekerja baru (*fresh intake*) sebanyak 77 orang calon operator dan pekerja berpengalaman sebanyak 264 orang, serta melaksanakan *training classroom* dan *on the job training* untuk para calon operator;
3. *Delivery to Site Alkylation Reactor C-065-03* di Triwulan I dan *delivery to Site Wet Gas Compressor K-052-03* di Triwulan III;
4. *Closing project finance phase-1*.

Dengan selesainya *Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP)*, diharapkan dapat mencapai:

- Kapasitas pengolahan kilang meningkat 100 ribu bph menjadi 360 ribu bph;
- Kompleksitas kilang yang sebelumnya 3,7 skala *Nelson Complexity Index (NCI)* akan mencapai 8,0 skala NCI;
- Kualitas produk yang semula kategori Euro II meningkat menjadi Euro V.

For preparing and implementing the strategic plan in 2021, the Company's assumptions and basic calculations were:

- USD exchange rate in 2021 at Rp14,600/US Dollar;
- ICP in 2021 at USD45.00/bbl.

Based on these, the Company compiled and set the strategic targets in the 2021 RKAP, including:

1. Achieving the progress of the ISBL/OSBL EPC implementation at 78%;
2. Recruiting new workers (*fresh intake*) as many as 77 prospective operators and 264 experience workers, as well as conducting classroom training and on the job training for prospective operators;
3. *Delivery to Site Alkylation Reactor C-065-03* in the first quarter and *delivery to Site Wet Gas Compressor K-052-03* in the third quarter;
4. *Closing project finance phase-1*.

The completion of the *Refinery Development Master Plan (RDMP)* Project is expected to achieve:

- Refinery processing capacity increased by 100 thousand bpd to 360 thousand bpd;
- The complexity of the refinery from 3.7 on the *Nelson Complexity Index (NCI)* scale to 8,0 on the NCI;
- Product quality that was originally in the Euro II category to increase to Euro V.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Operations Per Business Segment Review

Per 31 Desember 2021, Perusahaan belum memiliki segmen usaha sebagaimana yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.5 (Penyesuaian Tahun 2015) tentang Segmen Operasi. Meski demikian, Perusahaan melakukan sejumlah kegiatan operasional yang didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh KPB dalam rangka mempersiapkan tambahan unit baru maupun pendukung lainnya dalam mewujudkan diri sebagai *World Class Refinery* yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan operasional kilang dan menerapkan teknologi terbaru.

Adapun kegiatan operasional yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2021, antara lain:

1. Melanjutkan pekerjaan EPC ISBL-OSBL *New Unit include additional* SRU dan HMU;
2. Pekerjaan pengadaan *reformer* (novasi kontrak ke KPB di tahun 2020);
3. Pekerjaan konsultansi oleh PMC (Worley Parsons/PT WorleySEA Indonesia);
4. Pengelolaan dan pengawasan pekerjaan *Early Works* dan EPC Lawe-Lawe;
5. Pembayaran *invoice Asset Under Construction* (AUC) dari Pertamina;
6. Pembayaran *land lease* di tahun 2021;
7. *Project finance loan* dan *equity financing capital drawdown*;
8. *Risk mitigation* mendapatkan pinjaman jangka pendek dari eksternal (*corporate loan*) maupun internal grup Pertamina (*notional pooling*) sebesar USD500.000.000;
9. Pinjaman jangka panjang untuk *project financing* sebesar USD2,772 juta refer surat KPB ke Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) No.086/KPB0000/2020-S0;
10. Pelaksanaan BED dan seleksi *Licensor* EPC Phase 2; dan
11. Biaya operasional proyek dan *general administrative* lingkup KPB.

As of December 31, 2021, the Company has not yet segmented its business as stipulated in PSAK No. 5 (2015 Adjustment) regarding Operating Segments. However, the Company carries out a number of operational activities that are defined as activities carried out by KPB in order to prepare additional new units and other support to build itself into an effective and efficient World Class Refinery by optimizing refinery operations and applying the latest technology.

The operational activities carried out by the Company in 2021, included:

1. Continuing work on the EPC ISBL OSBL *New Unit* including additional SRU and HMU;
2. Reformer procurement work (contracted to KPB in 2020);
3. PMC consulting work (Worley Parsons/PT WorleySEA Indonesia);
4. Management and supervision of the Pertamina *Early Works* and EPC Lawe-Lawe;
5. Payment of *Asset Under Construction* (AUC) invoice from Pertamina;
6. Payment of *land lease* in 2021;
7. *Project finance loan* and *equity financing capital drawdown*;
8. *Risk mitigation* by obtaining external short-term loans (*corporate loan*), and internal Pertamina group (*notional pooling*) amounting to USD 500,000,000;
9. Long-term loan for project financing of USD2.772 million. Refer to KPB's letter to PKLN No. 086/KPB0000/2020-S0;
10. Implementation of BED and selection of *Licensor* for EPC Phase 2; and
11. Project operational and general administrative costs at KPB.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review

Analisa dan pembahasan kinerja keuangan yang disusun dalam Laporan Tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan PT Kilang Pertamina Balikpapan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dengan opini wajar dalam semua hal yang material untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

The analysis and discussion of financial performance prepared in this Annual Report refers to the Financial Statements of PT Kilang Pertamina Balikpapan as audited by the Purwanto, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm with an opinion of fair in all material respects for the years ended December 31, 2021 and 2020. The Company's Financial Statements were prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia, including the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants (DSAK) - IAI).

Laporan Posisi Keuangan

Financial Statement

ASET ASSETS				
URAIAN DESCRIPTION	2021 (USD)	2020 USD)	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL (USD) NOMINAL (USD)	PERSENTASE (%) PERCENTAGE (%)
Aset Lancar Current Assets	360.083.250	693.289.613	(333.206.363)	(48,06)
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	1.840.580.017	823.435.003	1.017.145.014	123,52
Total Aset Total Assets	2.200.663.267	1.516.724.616	683.938.651	45,09

Per 31 Desember 2021, Perusahaan membukukan total aset sebesar USD2,20 miliar, mengalami peningkatan USD683,94 juta atau 45,09% jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar USD1,52 miliar. Hal tersebut disebabkan kenaikan realisasi *Project Cost* sebesar USD1,35 miliar jika dibandingkan tahun 2020 sebesar USD475,9 juta.

As of December 31, 2021, the Company's total assets stood at USD2.20 billion, an increase of USD683.94 million or 45.09% compared to USD1.52 billion in 2020. This was due to an increase in the Project Cost of USD1.35 billion compared to USD475.9 million in 2020.

ASET LANCAR
CURRENT ASSETS

URAIAN DESCRIPTION	2021 (USD)	2020 (USD)	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL (USD) NOMINAL (USD)	PERSENTASE (%) PERCENTAGE (%)
Kas dan Kas di Bank Cash and Cash in the Bank	150.959.048	526.685.910	(375.726.862)	(71,34)
Pajak Dibayar di Muka Prepaid taxes	209.114.880	54.166.025	154.948.855	286,06
Biaya Dibayar di Muka Prepaid expenses	9.322	112.437.678	(112.428.356)	(99,99)
Total Aset Lancar Total Current Assets	360.083.250	693.289.613	(333.206.363)	(48,06)

Total aset lancar Perusahaan di tahun 2021 tercatat penurunan USD333,21 juta atau 48,06% dari tahun sebelumnya sebesar USD693,29 juta menjadi USD360,08 juta. Hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya penurunan pada biaya dibayar di muka dikarenakan telah dilunasinya uang muka kepada pihak ketiga atas pekerjaan *Engineering, Procurement, Construction Inside Battery Limit-Outside Battery Limit* atau EPC ISBL-OSBL.

The Company's total current assets in 2021 recorded a decrease of USD333.21 million or 48.06% from the previous year's USD693.29 million to reach USD360.08 million. This was mainly due to a decrease in prepaid expenses due to the payment of advances to third parties for Engineering, Procurement, Construction Inside Battery Limit-Outside Battery Limit or EPC ISBL-OSBL work.

ASET TIDAK LANCAR
NON-CURRENT ASSETS

URAIAN DESCRIPTION	2021 (USD)	2020 (USD)	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL (USD) NOMINAL (USD)	PERSENTASE (%) PERCENTAGE (%)
Aset Pajak Tangguhan Deferred tax assets	172.750	60.433	112.317	185,85
Aset Tetap Fixed assets	1.839.058.054	823.374.570	1.015.683.484	123,36
Aset Hak Guna Right of Use Assets	1.349.213	-	1.349.213	-
Total Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	1.840.580.017	823.435.003	1.017.145.014	123,52

Di tahun 2021, Perusahaan berhasil membukukan total aset tidak lancar sebesar USD1,84 miliar meningkat USD1,02 miliar atau 123,52% dibanding tahun 2020 sebesar USD823,44 juta. Hal tersebut disebabkan kenaikan realisasi *Project Cost* sebesar USD1,35 miliar jika dibandingkan tahun 2020 sebesar USD475,9 juta dan progres fisik sudah mencapai 46,95%.

In 2021, the Company's total non-current assets stood at USD1.84 billion, an increase of USD1.02 billion or 123.52% compared to USD823.44 million in 2020. This was due to an increase in the Project Cost to reach USD1.35 billion compared to USD475.9 million in 2020 and the physical progress reaching 46.95%.

LIABILITAS LIABILITIES				
URAIAN DESCRIPTION	2021 (USD)	2020 (USD)	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL (USD) NOMINAL (USD)	PERSENTASE (%) PERCENTAGE (%)
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities	528.418.221	748.023.062	(219.604.841)	(29,36)
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	1.144.169	367.680	776.489	211,19
Total Liabilitas Total Liabilities	529.562.390	748.390.742	(218.828.352)	(29,24)

Sampai dengan akhir tahun 2021, Perusahaan mencatatkan total liabilitas sebesar USD529,56 juta, mengalami penurunan USD218,83 juta atau 29,24% jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar USD748,39 juta. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada liabilitas jangka pendek.

As of the end of 2021, the Company' total liabilities stood at USD529.56 million, a decrease of USD218.83 million or 29.24% compared to USD748.39 million in 2020, due to a decrease in current liabilities.

LIABILITAS JANGKA PENDEK SHORT-TERM LIABILITIES				
URAIAN DESCRIPTION	2021 (USD)	2020 (USD)	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL (USD) NOMINAL (USD)	PERSENTASE (%) PERCENTAGE (%)
Utang Usaha Accounts payable				
Pihak Berelasi Related Parties	349.920.733	569.627.526	(219.706.793)	(38,57)
Pihak Ketiga Third party	171.764.606	177.448.096	(5.683.490)	(3,20)
Utang Pajak Tax debt	5.593.614	944.214	4.649.400	492,41
Beban Akrua Accrued Expenses	-	3.226	(3.226)	(100,00)
Utang Sewa – Bagian Lancar Rent Payable – Current Part	1.139.268	-	1.139.268	-
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities	528.418.221	748.023.062	(219.604.841)	(29,36)

Di tahun 2021, total liabilitas jangka pendek Perusahaan tercatat sebesar USD528,42 juta, mengalami penurunan USD219,60 juta atau 29,36% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar USD748,02 juta. Hal ini dikarenakan menurunnya utang usaha Perusahaan baik kepada pihak berelasi maupun kepada pihak ketiga.

In 2021, the Company's total current liabilities were at USD528.42 million, a decrease of USD219.60 million or 29.36% compared to USD748.02 million in 2020, due to a decrease in the Company's trade payables both to related parties and to third parties.

LIABILITAS JANGKA PANJANG
LONG-TERM LIABILITIES

URAIAN DESCRIPTION	2021 (USD)	2020 (USD)	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL (USD) NOMINAL (USD)	PERSENTASE (%) PERCENTAGE (%)
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Employee Benefits Liabilities	943.966	367.680	576.286	156,74
Utang Sewa – Dikurangi Bagian Lancar Rent Payable – Less Current Part	200.203	-	200.203	-
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities	1.144.169	367.680	776.489	211,19

Liabilitas jangka panjang Perusahaan tercatat sebesar USD1,14 juta di tahun 2021, meningkat USD776 ribu atau 211,19% dibanding tahun sebelumnya sebesar USD368 ribu. Hal ini dikarenakan meningkatnya liabilitas kerja kepada karyawan Pertamina yang diperbantukan di KP. B.

The Company's long-term liabilities in 2021 were recorded USD1.14 million, an increase of USD776 thousand or 211.19% compared to USD368 thousand the previous year, due to an increase in work liabilities to Pertamina employees seconded to KP. B.

EKUITAS
EQUITY

URAIAN DESCRIPTION	2021 (USD)	2020 (USD)	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL (USD) NOMINAL (USD)	PERSENTASE (%) PERCENTAGE (%)
Modal Saham Capital stock	84.690.385	84.690.385	-	-
Saldo (Rugi)/Laba Balance (Loss)/Profit				
Ditentukan Penggunaannya Determined Use	-	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya Usage has not been determined	1.150.802	(1.571.226)	2.722.028	173,24
Uang Muka untuk Modal Saham Advance for Share Capital	1.585.190.812	685.190.812	900.000.000	131,35
Komponen Ekuitas Lainnya Other equity components	68.878	23.903	44.975	188,16
Total Ekuitas Total Equity	1.671.100.877	768.333.874	902.767.003	117,50

Hingga 31 Desember 2021, total ekuitas Perusahaan tercatat sebesar USD1,67 miliar, meningkat USD902,76 juta atau 117,50% jika dibanding tahun 2020 sebesar USD768,33 juta. Hal tersebut disebabkan oleh telah terlaksananya Rencana Penyertaan Modal Pertamina ke KPI yang dilanjutkan ke KP. B.

As of December 31, 2021, the Company's total equity was USD1.67 billion, an increase of USD902.76 million or 117.50% compared to USD768.33 million in 2020, of due to the implementation of Pertamina's Equity Participation Plan from KPI to KP. B.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT

URAIAN DESCRIPTION	2021 (USD)	2020 (USD)	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL (USD) NOMINAL (USD)	PERSENTASE (%) PERCENTAGE (%)
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(1.112.464)	(495.651)	(616.813)	124,45
Rugi Usaha Operating Loss	(1.112.464)	(495.651)	(616.813)	124,45
Pendapatan Keuangan Financial Income	2.147.020	445.671	1.701.349	381,75
Pendapatan/(Beban) Lain-Lain – Neto Other Income/(Expenses) – Net	1.561.704	(1.599.488)	3.161.192	197,64
Laba/(Rugi) Usaha Sebelum Pajak Penghasilan Profit/(Loss) Before Income Tax	2.596.260	(1.649.468)	4.245.728	257,40
Manfaat Pajak Penghasilan Income Tax Benefits	125.768	66.409	59.359	89,38
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Profit/(Loss) for the year	2.722.028	(1.583.059)	4.305.087	271,95
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income				
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi dalam Periode Berikutnya (Neto Setelah Pajak): Items That Will Not Be Reclassified to Profit and Loss in the Next Period (Net After Tax):				
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Pasti Neto Remeasurement of Net Defined Benefit Liability	44.975	23.903	21.072	88,16
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak Penghasilan Other Comprehensive Income After Income Tax	44.975	23.903	21.072	88,16
Total Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income/(Loss) for the Year	2.767.003	(1.559.156)	4.326.159	277,47

Per 31 Desember 2021, Perusahaan belum membukukan pendapatan usaha mengingat masih dalam tahap konstruksi dan belum beroperasi secara komersial. Meski demikian, Perusahaan membukukan pendapatan keuangan sebesar USD2,15 juta meningkat USD1,70 juta atau 381,75% jika dibanding tahun 2020 yang sebesar USD446 ribu. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan bunga bank.

As of December 31, 2021, the Company has not yet recorded operating income as it is still in the construction stage and has not yet started commercial operations. However, the Company recorded financial income of USD2.15million, an increase of USD1.70 million or 381.75% compared to USD446 thousand in 2020. This was due to an increase in bank interest income.

Di samping itu, Perusahaan membukukan laba tahun berjalan sebesar USD2,72 juta di tahun 2021, meningkat USD4,31 juta atau 271,95% dibanding tahun sebelumnya yang membukukan rugi sebesar USD1,58 juta. Peningkatan tersebut lebih disebabkan karena peningkatan yang cukup signifikan atas pendapatan keuangan dan pendapatan lain-lain yang berasal dari selisih kurs.

In addition, the Company posted a profit for the year of USD2.72 million in 2021, an increase of USD4.31 million or 271.95% compared to the loss of USD1.58 million the previous year. This increase was mainly due to a significant increase in financial income and other income from foreign exchange differences.

Perusahaan juga membukukan total penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar USD2,77 juta atau mengalami peningkatan sebesar USD4,33 juta atau setara dengan 277,47% dibanding tahun 2020 yang mencatatkan rugi komprehensif sebesar USD1,56 juta. Hal ini karena adanya perolehan laba tahun berjalan di tahun 2021 yang berasal dari pendapatan keuangan, pendapatan lain-lain, dan manfaat pajak penghasilan yang mengalami peningkatan.

The Company also posted total comprehensive income for the year of USD2.77 million, an increase of USD4.33 million, or 277.47% compared to the comprehensive loss of USD1.56 million in 2020. This was due to the profit for the year in 2021 derived from the increased financial income, other income, and income tax benefits.

LAPORAN ARUS KAS
CASH FLOW STATEMENT

URAIAN DESCRIPTION	2021 (USD)	2020 (USD)	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL (USD) NOMINAL (USD)	PERSENTASE (%) PERCENTAGE (%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES				
Penerimaan Bunga Interest Receipts	2.147.020	445.671	1.701.349	381,75
Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi Lainnya Cash Receipts from Other Operating Activities	36.025	100.343	(64.318)	(64,10)
Pembayaran Premi Asuransi dan Klaim Lainnya Payment of Insurance Premiums and Other Claims	(14.099)	(416.609)	(402.510)	(96,62)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows From Operating Activities	2.168.946	129.405	2.039.541	1.576,09
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	(1.273.783.285)	(245.222.385)	1.028.560.900	419,44
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Flow Used for Investing Activities	(1.273.783.285)	(245.222.385)	1.028.560.900	419,44
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOW FROM FUNDING ACTIVITIES				
Penerimaan Uang Muka Modal Saham Receipt of Advances for Share Capital	900.000.000	685.190.812	214.809.188	31,35%
Penerimaan Pinjaman Jangka Pendek Short Term Loan Acceptance	301.626.926	-	301.626.926	-
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek Short Term Loan Payment	(303.005.555)	-	(303.005.555)	-

URAIAN DESCRIPTION	2021 (USD)	2020 (USD)	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL (USD) NOMINAL (USD)	PERSENTASE (%) PERCENTAGE (%)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows Retrieved from Financing Activities	898.621.371	685.190.812	213.430.559	31,15
Kenaikan Neto Kas dan Kas di Bank Net Increase in Cash and Cash in the Bank	(372.992.968)	440.097.832	(813.090.800)	(184,75)
Dampak Perubahan Valuta Asing terhadap Kas dan Setara Kas Impact of Changes in Foreign Exchange on Cash and Cash Equivalents	(2.733.894)	1.891.129	(4.625.023)	(244,56)
Kas dan Kas di Bank pada Awal Tahun Cash and Cash in the Bank at the Beginning of the Year	526.685.910	84.696.949	441.988.961	521,85
Kas dan Kas di Bank pada Akhir Tahun Cash and Cash in the Bank at the End of the Year	150.959.048	526.685.910	(375.726.862)	(71,34)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan membukukan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD2,17 juta, mengalami peningkatan USD2,04 juta atau 1.576,09% dibanding tahun sebelumnya sebesar USD129 ribu. Hal tersebut dikarenakan peningkatan yang cukup signifikan pada penerimaan atas bunga bank di tahun 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi tercatat sebesar USD1,27 miliar, meningkat USD1,03 miliar atau 419,44% dibanding tahun 2020 sebesar USD245,22 juta. Hal ini dikarenakan meningkatnya nilai aset tetap yang merupakan biaya konstruksi yang dikeluarkan setelah adanya novasi kontrak dan *bipartite agreement* yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan KPI.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Sementara, kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan tercatat sebesar USD898,62 juta, naik USD213,43 juta atau 31,15% dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar USD685,19 juta. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan penerimaan uang muka modal saham.

Kas dan Kas di Bank pada Akhir Tahun

Di samping itu, kas dan kas di bank pada akhir tahun tercatat sebesar USD150,96 juta, mengalami penurunan USD375,73 juta atau 71,34% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai USD526,68 juta. Hal ini disebabkan kenaikan aktivitas investasi atas perolehan aset tetap dan sejalan dengan kenaikan realisasi *Project Cost*.

Cash Flow from Operating Activities

At the end of 2021, the Company's net cash obtained from operating activities was USD2.17 million, an increase of USD2.04 million, or 1,576.09% compared to USD129 thousand the previous year. This was due to a significant increase in receipts from bank interest in 2021.

Cash Flow from Investing Activities

Net cash used for investing activities was USD1.27 billion, an increase of USD1.03 billion, or 419.44% compared to USD245.22 million in 2020. This was due to an increase in the value of fixed assets from construction costs incurred after the novation of contracts and bipartite agreements made between PT Pertamina (Persero) and KPI.

Cash Flow from Funding Activities

Meanwhile, net cash from financing activities was USD898.62 million, an increase of USD213.43 million, or 31.15% compared to USD685.19 million the previous year. This was due to an increase in the receipt of advances for share capital.

Cash and Cash in the Bank at the End of the Year

In addition, cash and cash in banks at the end of the year was USD150.96 million, a decrease of USD375.73 million, or 71.34% compared to USD526.68 million in 2020. This was due to an increase in investment activity for the acquisition of fixed assets, in line with the increase in *Project Cost*.

Kemampuan Membayar Utang

Perusahaan mengukur kemampuan dalam membayar memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki, baik jangka pendek maupun jangka panjang melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek melalui rasio kas dan rasio lancar. Sementara, Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan KPB dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang melalui rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap ekuitas.

Dalam menjalankan usahanya, manajemen senantiasa memperhatikan kewajiban jangka pendek yang dimiliki serta menjaga tingkat kas dan setara kas yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban jangka pendek Perusahaan. Selain itu, manajemen juga memastikan ketersediaan aset lancar yang produktif untuk dapat melunasi setiap kewajiban jangka pendeknya.

Adapun kemampuan membayar utang Perusahaan melalui rasio likuiditas dan rasio solvabilitas dalam dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

URAIAN DESCRIPTION	2021 (%)	2020 (%)	KENAIKAN (PENURUNAN) INCREASE (DECREASE) (%)
Rasio Kas Cash Ratio	28,57	70,41	(59,42)
Rasio Lancar Current Ratio	68,14	92,68	(26,48)
Rasio Utang terhadap Aset Debt to Asset Ratio	24,06	49,34	(51,24)
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	31,69	97,40	(67,46)

Rasio likuiditas Perusahaan di tahun 2021 berdasarkan rasio kas tercatat sebesar 28,57%, menurun 59,42% dari tahun sebelumnya sebesar 70,41%. Rasio lancar juga tercatat mengalami penurunan 26,48% dari tahun 2020 yang sebesar 92,68% menjadi 68,14% pada tahun 2021. Kemudian, rasio solvabilitas Perusahaan berdasarkan rasio utang terhadap aset tercatat sebesar 24,06%, menurun 51,24% dibanding tahun 2020 yang sebesar 49,34%. Sementara, rasio utang terhadap ekuitas di tahun 2021 sebesar 31,69%, menurun 67,46% dibanding tahun 2020 sebesar 97,40%. Perolehan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Ability to Pay Debt

The Company measures its ability to pay all of its obligations, both short term and long term, through liquidity ratios and solvency ratios. The liquidity ratio is used to measure the Company's ability to pay off its short-term obligations using the cash ratios and current ratios. Meanwhile, the solvency ratio is used to measure the ability of KPB to pay off all of its obligations, both short-term and long-term using the debt-to-asset ratio and debt-to-equity ratio.

In running its business, management always pays attention to its short-term obligations and maintains a level of cash and cash equivalents held to meet the Company's short-term obligations. In addition, management also ensures the availability of productive current assets to be able to pay off any short-term obligations.

The Company's ability to pay debts through the liquidity ratios and solvency ratios in the last two years was as follows:

The Company's liquidity ratio in 2021 based on cash ratio was 28.57%, a decrease of 59.42% from the previous year's 70.41%. The current ratio also decreased by 26.48% from 92.68% in 2020 to 68.14% in 2021. The Company's solvency ratio based on the debt to assets ratio was 24.06%, a decrease of 51.24% compared to 49.34% in 2020. Meanwhile, the debt-to-equity ratio in 2021 was 31.69%, a decrease of 67.46% compared to 97.40% in 2020. The liquidity ratios and solvency ratios indicate that the Company has the ability to meet its obligations, both short term and long term.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Sampai dengan 31 Desember 2021, Perusahaan masih dalam tahap konstruksi dan belum beroperasi secara komersial sehingga belum membukukan pendapatan usaha dan tidak memiliki piutang dari pelanggan dan pihak lainnya. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai tingkat kolektibilitas piutang yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Kebijakan Struktur Modal

Perusahaan berupaya untuk menyusun struktur modal secara optimal melalui liabilitas dan ekuitas. Dalam menjalankan kegiatannya, Perusahaan mendapatkan utang usaha dari pihak berelasi dan pihak ketiga dalam jangka waktu pendek, sedangkan ekuitas Perusahaan sebagian besar terdiri dari uang muka untuk modal saham.

Melalui porsi struktur modal yang optimal antara liabilitas dan ekuitas, Perusahaan berupaya untuk menjaga komposisi struktur modal yang dimiliki tetap berada di kondisi yang sehat. Manajemen Perusahaan juga memantau struktur modal secara berkala untuk memastikan keberlangsungan usaha Perusahaan dalam rangka pencapaian operasi komersial sesuai rencana sehingga Perusahaan dapat memperoleh pendapatan dan memenuhi seluruh kewajibannya.

Rincian Struktur Modal

Sampai dengan akhir tahun 2021, struktur modal Perusahaan berasal dari liabilitas sebesar 24,06% dan ekuitas sebesar 75,94%. Komposisi struktur modal ini mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2020 dengan menurunnya komposisi modal pada liabilitas. Adapun rincian struktur modal Perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE	2021 (USD)	KOMPOSISI COMPOSITION (%)	2020 (USD)	KOMPOSISI COMPOSITION (%)	PERTUMBUHAN GROWTH	
					NOMINAL NOMINAL (USD)	PERSENTASE PERCENTAGE (%)
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities	528.418.221	24,01	748.023.062	49,32	(219.604.841)	(29,36)
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	1.144.169	0,05	367.680	0,02	776.489	211,19
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	529.562.390	24,06	748.390.742	49,34	(218.828.352)	(29,24)
Ekuitas Equity	1.671.100.877	75,94	768.333.874	50,66	902.767.003	117,50
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	2.200.663.267	100,00	1.516.724.616	100,00	683.938.651	45,09

Accounts Receivables Collectibility Level

As of December 31, 2021, the Company is still in the construction stage and has not yet started its commercial operations, so it has not recorded operating revenues, and has no receivables from customers and other parties. Therefore, there is no information to report on the collectibility level of receivables in this Annual Report.

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Capital Structure Policy

The Company strives to develop an optimal capital structure through liabilities and equity. In carrying out its activities, the Company obtains short-term trade payables from related parties and third parties, while the Company's equity mostly consists of advances for share capital.

Through the optimal proportion of capital structure between liabilities and equity, the Company strives to maintain the composition of its capital structure in a healthy condition. The Company's management also monitors the capital structure on a regular basis to ensure the Company's business continuity in order to achieve the planned commercial operations so that the Company can earn revenue and fulfill all its obligations.

Capital Structure Details

At the end of 2021, the Company's capital structure came from liabilities at 24.06%, and equity at 75.94%. The capital structure composition has changed compared to 2020 with a decrease in the liabilities composition of capital. Details of the Company's capital structure can be seen as follows:

Berikut disampaikan ikatan yang material yang dilakukan Perusahaan untuk investasi barang modal yang bukan merupakan ikatan pendanaan di tahun 2021.

Perbandingan antara Target dan Realisasi 2021 serta Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Sampai dengan akhir tahun 2021, KPB telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2021 dengan tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan kondisi yang terjadi secara global maupun di dalam negeri. Di tengah kondisi Perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan proyek di tahun 2021, realisasi fisik target KeyPI 2021 mencapai 103,03% dengan budget sampai dengan akhir tahun sebesar 87,5% untuk pembayaran progres November.

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Perusahaan tidak memiliki informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan pada 31 Desember 2021 hingga tanggal laporan akuntan tanggal 10 Maret 2022. Dengan demikian, tidak terdapat informasi dan fakta material setelah tanggal laporan akuntan yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Prospek Usaha

Dalam menentukan langkah ke depan guna mempertahankan kelangsungan usahanya, PT Kilang Pertamina Balikpapan berkomitmen untuk mewujudkan visi dan berkontribusi nyata dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi, baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi dinamika usaha di bidang energi, di antaranya tren penggunaan produk substitusi Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti listrik dan energi baru terbarukan, serta pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

IMF dalam laporan *World Economic Outlook* yang dikeluarkan pada Januari 2022 menyebutkan bahwa mulai menyebarnya virus COVID-19 varian Omicron pada akhir tahun 2021 dapat memberikan dampak bagi kondisi ekonomi global, salah satunya berpengaruh terhadap peningkatan harga energi dan tingkat inflasi. Meski secara umum tahun 2022 menjadi tahun yang penuh optimisme, namun bagi sektor energi sendiri harga energi fosil meningkat sebanyak dua kali lipat dalam setahun terakhir sehingga mengakibatkan tingginya tingkat inflasi.

The following describes the material commitments made by the Company for capital goods investments, which were not funding commitments in 2021.

Comparison between Target and Realization of 2021 and Projection One Year Ahead

At the end of 2021, KPB set a number of targets to be achieved in the 2021 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) while still considering and adjusting to conditions occurring globally and domestically. In the midst of the Company's condition that is still in the project development stage in 2021, the physical realization of the KeyPI 2021 target reached 103.03% with the budget until the end of the year of 87.5% for November progress payments.

Material Information and Facts Occurring After the Date of the Accountant's Report

The Company did not have any material information and facts that occurred after the end of the reporting period on December 31, 2021 until the date of the accountant's report on March 10, 2022. Therefore, there is no material information and facts to report in this Annual Report.

Business Prospects

In determining the future steps to maintain its business continuity, PT Kilang Pertamina Balikpapan is committed to realizing its vision and making a real contribution by taking into account the factors that occur, both internal and external that can affect the business dynamics in the energy sector, including the trend of using fuel substitute products (BBM), such as electricity and new and renewable energy, as well as the ongoing COVID-19 pandemic in countries around the world, including Indonesia.

The IMF in its *World Economic Outlook* report issued in January 2022 stated that the spread of the Omicron variant of the COVID-19 virus at the end of 2021 could have an impact on global economic conditions, one of which will affect the increase in energy prices and inflation rates. Although 2022 is generally a year full of optimism, for the energy sector itself, fossil energy prices have doubled in the past year, resulting in high inflation rates.

Naiknya harga minyak dunia juga menjadi perhatian di dalam negeri yang berdampak pada naiknya harga BBM non subsidi pada Triwulan I-2022. Mengingat banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi industri di bidang energi, Pemerintah melalui Laporan Informasi APBN 2022 telah menetapkan program pengelolaan subsidi yang dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga produsen dalam negeri tetap dapat menghasilkan barang dan jasa. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah melalui APBN tersebut juga telah menyesuaikan kondisi yang terjadi, seperti adanya fluktuasi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, dan volume konsumsi barang bersubsidi.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya untuk mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemanfaatan gas domestik, pembangunan infrastruktur kendaraan listrik, penurunan emisi, pemanfaatan reklamasi bekas tambang, dan mitigasi bencana geologi. Melalui upaya tersebut, realisasi investasi sektor ESDM tercatat mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2021 sebesar USD28,2 miliar atau 107% dibanding tahun sebelumnya dan diproyeksikan akan terus membaik di tahun 2022 seiring dengan mulai membaiknya kondisi COVID-19 di dunia meskipun masih dibayangi fluktuasi harga di bidang energi.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran

Sampai dengan akhir 31 Desember 2021, Perusahaan masih melakukan penyelesaian proyek EPC ISBL-OSBL RDMP Balikpapan sehingga belum beroperasi secara komersial dan belum membukukan pendapatan usaha. Dengan demikian Perusahaan belum menetapkan strategi pemasaran.

Pangsa Pasar

Perusahaan senantiasa mempercepat proyek konstruksi yang dilakukan dalam penyelesaian proyek EPC ISBL-OSBL RDMP Balikpapan agar dapat mengoptimalkan tujuan usaha dalam membangun dan mengelola unit baru pada proyek RDMP Balikpapan dan menjalankan bisnis kilang pengolahan di Balikpapan yang terintegrasi dalam bentuk kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) selaku Entitas Induk.

Rising energy prices, such as world oil, have also become a domestic concern in line with the increase in non-subsidized fuel prices in the first quarter of 2022. Given the many factors that affect the condition of the industry in the energy sector, the Government through the 2022 State Budget Information Report established a subsidy management program that is allocated to ease the burden on the community while protecting producers of goods and services. The incentives provided by the Government through the APBN have also been adjusted to the existing conditions, such as fluctuations in world crude oil prices, the rupiah exchange rate, and the volume of consumption of subsidized goods.

In addition, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) sought to encourage an increase in Non-Tax State Revenue (PNBP), the use of domestic gas, the development of electric vehicle infrastructure, emission reductions, the use of ex-mining reclamation, and geological disaster mitigation. Through these efforts, investment in the ESDM sector recorded a significant increase in 2021 of USD28.2 billion, or 107% compared to the previous year, and is projected to continue to improve in 2022 in line with the improving conditions for COVID-19 in the world although it is still overshadowed by price fluctuations in the energy sector.

Marketing Aspect

Marketing Strategy

As of the end of December 31, 2021, the Company is still completing the EPC ISBL-OSBL RDMP Balikpapan project so it has not yet started operating commercially and has not recorded operating revenues. Therefore, the Company has not yet established a marketing strategy.

Market Share

The Company continues to accelerate its construction projects for the completion of the EPC ISBL-OSBL RDMP Balikpapan project in order to optimize business objectives in building and managing new units in the Balikpapan RDMP project and running an integrated processing refinery business in Balikpapan in the form of cooperation with PT Pertamina (Persero) as the Parent Entity.

TINJAUAN KEUANGAN LAINNYA

Other Financial Review

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Perusahaan menerapkan kebijakan pembagian dividen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang pembagian dividen dilakukan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dengan tetap mempertimbangkan kondisi Perusahaan. Sampai dengan akhir tahun 2021, Perusahaan masih dalam tahap konstruksi dan belum beroperasi secara komersial sehingga tidak memiliki pendapatan usaha dan tidak melakukan pembagian dividen untuk Pemegang Saham.

Program Kepemilikan Saham oleh Pekerja dan/atau Manajemen (*Employee Stock Option Program-ESOP/Management Stock Option Program- MSOP*)

Perusahaan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Pekerja (ESOP) dan/atau Manajemen (MSOP). Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai ESOP/MSOP yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

PT Kilang Pertamina Balikpapan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) dan bukan merupakan perusahaan publik. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal

Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan tidak melakukan aktivitas investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal. Dengan demikian, tidak terdapat informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, dan/atau restrukturisasi utang/modal serta tujuan dan nilai transaksi dalam Laporan Tahunan ini.

Dividend Policy and Distribution

The Company has a dividend distribution policy as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies that regulates the distribution of dividends based on the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions after taking into account the condition of the Company. By the end of 2021, the Company was still in the construction stage, and has not yet started its commercial operations, so it has no operating revenue and has not distributed dividends to shareholders.

Employee and/or Management Share Ownership Program (*Employee Stock Option Program-ESOP/ Management Stock Option Program- MSOP*)

The Company does not have an Employee Share Ownership Program (ESOP) and/or Management (MSOP). Therefore, there is no information to report regarding ESOP/MSOP in this Annual Report.

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

PT Kilang Pertamina Balikpapan has never conducted an Initial Public Offering (IPO) and is not a public company. Therefore, there is no information related to the realization of the use of proceeds from the public offering to report in this Annual Report.

Material Information Regarding Investments, Expansions, Divestments, Business Mergers/Consolidations, Acquisitions, and/or Debt/Capital Restructuring

Until the end of 2021, the Company did not carry out any investments, expansions, divestments, business mergers/consolidations, acquisitions, and/or debt/capital restructuring activities. Therefore, there is no material information to report in this Annual Report.

Informasi Transaksi dengan Pihak Berelasi

Kebijakan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai dengan penerapan PSAK No.7 (Revisi Tahun 2015) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi yang mengatur terkait pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen yang muncul. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Pada tahun 2021, Perusahaan telah mengungkapkan seluruh sifat dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2021 yang terlampir dalam Laporan Tahunan ini.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

PIHAK-PIHAK YANG BERELASI RELATED PARTIES	HUBUNGAN RELATIONSHIP	SIFAT TRANSAKSI NATURE OF TRANSACTION
PT Pertamina (Persero)	Pemegang saham Shareholders	Modal saham Share Capital
PT Kilang Pertamina Internasional	Pemegang saham Shareholders	Modal saham Share Capital
PT Pertamina Pedeve Indonesia	Pemegang saham Shareholders	Modal saham Share Capital
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan pemerintah Entities related to the government	Penempatan kas di bank Placement of cash in the bank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan pemerintah Entities related to the government	Penempatan kas di bank Placement of cash in the bank
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan pemerintah Entities related to the government	Penempatan kas di bank Placement of cash in the bank
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Entitas berelasi dengan pemerintah Entities related to the government	Penempatan kas di bank Placement of cash in the bank
PT Patra Badak Arun Solusi	Entitas asosiasi Associate entity	Pengadaan tenaga kerja jasa penunjang Procurement of supporting service workers
PT Pertamina Training & Consulting	Entitas asosiasi Associate entity	Pengadaan tenaga kerja jasa penunjang Procurement of supporting service workers
PT Mitra Tours & Travel	Entitas asosiasi Associate entity	Pengadaan jasa travel Procurement of travel services
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	Entitas asosiasi Associate entity	Pembayaran asuransi jiwa Life insurance payments
PT Patra Jasa	Entitas asosiasi Associate entity	Sewa gedung kantor Office building rental

Information on Transactions with Related Parties

Transaction Policy with Related Parties

In carrying out its business activities, the Company conducts transactions with related parties in accordance with PSAK No. 7 (Revised 2015) regarding Disclosures of Related Parties, which regulates the disclosure of related party relationships, transactions and balances, including commitments that arise. These transactions are carried out based on terms agreed by both parties, which may not be the same as other transactions made with unrelated parties.

In 2021, the Company disclosed the nature and transactions with related parties in the Company's 2021 Financial Statements, which is attached to this Annual Report.

Transactions with Related Parties

PIHAK-PIHAK YANG BERELASI RELATED PARTIES	HUBUNGAN RELATIONSHIP	SIFAT TRANSAKSI NATURE OF TRANSACTION
PT Prima Armada Raya	Entitas asosiasi Associate entity	Sewa kendaraan Vehicle rent
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	Entitas asosiasi Associate entity	Pembayaran asuransi aset Asset insurance payments

Realisasi Transaksi dengan Pihak Berelasi

Realization of Transactions with Related Parties

URAIAN DESCRIPTION	2021 USD	2020 USD
KAS DAN KAS DI BANK CASH AND CASH IN THE BANK		
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	40.267.910	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.610.486	1.989.990
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	169.810	-
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	245.993	180.713.432
Subjumlah	57.294.199	182.703.422
Dolar AS US Dollar		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	88.426.007	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.190.128	5.533.351
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	48.714	313.449.137
Subjumlah	93.664.849	318.982.488
Jumlah Total	150.959.048	501.685.910
UTANG USAHA ACCOUNTS PAYABLE		
PT Kilang Pertamina Internasional	346.224.271	-
PT Pertamina Training & Consulting	2.155.686	2.322.031
PT Prima Armada Raya	544.628	118.532
PT Patra Jasa	383.056	-
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	287.819	-
PT Mitra Tours & Travel	122.322	-
PT Pertamina (Persero)	72.282	561.261.220
Lain-lain (masing-masing di bawah USD70.000) Others (under USD70,000 each)	130.669	5.925.743
Jumlah Total	349.920.733	569.627.526

Kontribusi terhadap Negara

Perusahaan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkontribusi terhadap negara dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya dengan berkontribusi melalui pembayaran pajak. Sampai dengan akhir tahun 2021, Perusahaan telah mengeluarkan kewajiban pajak sebesar Rp3,37 triliun dalam rangka memenuhi kontribusi terhadap negara yang dapat diuraikan sebagai berikut:

JENIS PAJAK TAX TYPE	2021 (RP)	2020 (RP)	PERTUMBUHAN GROWTH	
			NOMINAL (RP)	PERSENTASE PERCENTAGE (%)
PPh 21	21.900.600.604	7.678.906.898	14.221.693.706	185%
PPh 22 Impor	49.186.741.000	-	49.186.741.000	100%
PPh 23/26	2.816.838.523	1.050.329.941	1.766.508.582	168%
PPh 4 (2)	472.808.632.092	103.946.332.383	368.862.299.709	355%
Beban PPh Final 4 (2) Final Income Tax Expense 4 (2)	6.621.594.975	899.863.213	5.721.731.762	636%
Prepaid PPN	2.817.829.726.363	482.665.167.396	2.335.164.558.967	484%
Jumlah Total	3.371.164.133.557	596.240.599.831	2.774.923.533.726	465%

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan

Pada tahun 2021, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perusahaan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Perusahaan telah menyusun kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021. Adapun perubahan-perubahan kebijakan akuntansi, penjelasan, serta dampaknya terhadap Perusahaan adalah sebagai berikut.

Contribution to the Country

The Company is fully committed to complying with all applicable laws and regulations and to contributing to the state when carrying out all its business activities through tax payments. Until the end of 2021, the Company has issued a tax liability of Rp3.37 trillion to fulfill its contribution to the state as described below:

Changes in Laws and Regulations that Have a Significant Impact on the Company

In 2021, there were no changes to laws and regulations that had a significant effect on the Company. Therefore, there is no information to report in this Annual Report.

Changes in Accounting Policies and Their Impact on the Company

The Company has prepared its accounting policy in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) issued by the Financial Accounting Standards Board-Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI), which was effective for the fiscal year starting on January 1, 2021 until December 31, 2021. The changes in accounting policies, explanations, and their impact on the Company are as follows.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES	PENJELASAN EXPLANATION	DAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN IMPACT ON COMPANY
<p>Amandemen PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71 dan PSAK 73: Reformasi Acuan Suku Bunga (Tahap 2)</p> <p>Amendments to PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71 and PSAK 73: Reform of Interest Rate Reference (Phase 2)</p>	<p>Amandemen ini memberikan kelonggaran sementara yang membahas dampak pelaporan keuangan ketika suku bunga penawaran antarbank (Interbank Offered Rate) diganti dengan acuan suku bunga alternatif yang hampir bebas risiko (SBB). Amandemen tersebut mencakup cara praktis berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cara praktis untuk syarat perubahan kontrak, atau perubahan arus kas yang secara langsung disyaratkan oleh reformasi (suku bunga acuan), untuk dipelakukan sebagai perubahan suku bunga mengambang, setara dengan pergerakan suku bunga pasar. • Mengizinkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi suku bunga acuan terhadap penetapan dan dokumentasi lindung nilai tanpa penghentian hubungan lindung nilai. • Memberikan kelonggaran sementara kepada entitas dari keharusan memenuhi persyaratan yang dapat diidentifikasi secara terpisah ketika instrumen SBB ditetapkan sebagai lindung nilai dari suatu komponen risiko. <p>This amendment provides a temporary leeway that addresses the impact of financial reporting when the interbank Offered Rate is replaced with an almost risk-free alternative reference rate (SBB). The amendment includes the following practical means:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A practical way for a change in contract terms, or a change in cash flow that is directly required by the reform (the benchmark interest rate), to be treated as a floating rate change, equivalent to a movement in market interest rates. • Allows changes required by benchmark interest rate reforms to hedge designation and documentation without terminating the hedging relationship. • Provide temporary relief to the entity from having to meet separately identifiable requirements when the SBB instrument is designated as a hedge of a risk component. 	<p>Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan Perusahaan. Perusahaan bermaksud untuk menggunakan cara praktis di periode mendatang jika dapat diterapkan.</p> <p>This amendment has no impact on the Company's financial statements. The company intends to use practical means in future periods if applicable.</p>
<p>Amandemen PSAK 73: Sewa – Konsesi Sewa terkait COVID-19</p> <p>Amendment to PSAK 73: Leases – Lease Concessions related to COVID-19</p>	<p>Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang terus berlangsung, amandemen tambahan diterbitkan pada bulan Maret 2021 dimana memperpanjang cakupan periode konsesi sewa, yang merupakan salah satu syarat penerapan cara praktis, dari tanggal 30 Juni 2021 dalam amandemen PSAK 73 Sewa tentang Konsesi Sewa terkait COVID-19 yang diterbitkan di bulan Mei 2020, menjadi 30 Juni 2022.</p> <p>Jika penyewa telah menerapkan cara praktis dalam amandemen di bulan Mei 2020, maka diharuskan untuk terus menerapkannya secara konsisten, untuk semua kontrak sewa dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa, menggunakan amandemen tersebut. Jika penyewa tidak menerapkan cara praktis dalam amandemen di bulan Mei 2020 untuk konsesi sewa yang memenuhi syarat, maka penyewa tidak dapat menerapkan cara praktis dalam amandemen di bulan Maret 2021.</p> <p>Amandemen Maret 2021 diterapkan secara retrospektif, dengan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amandemen tersebut sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba pada awal periode pelaporan tahunan di mana penyewa pertama kali menerapkan amandemen tersebut.</p> <p>Due to the ongoing COVID-19 pandemic, an additional amendment was issued in March 2021 which extends the scope of the lease concession period, which is one of the requirements for implementing the practical method, from June 30, 2021 in the amendments to PSAK 73 Leases regarding Lease Concessions related to COVID-19 published in May 2020, to June 30, 2022.</p> <p>If the lessee has applied the practical means of the amendment in May 2020, it is required to continue to apply it consistently, for all lease contracts with similar characteristics and under similar circumstances, using the amendment. If the lessee does not apply the practical means of the amendment in May 2020 for the eligible lease concessions, then the lessee cannot apply the practical means of the amendment in March 2021.</p> <p>The March 2021 amendments are applied retrospectively, recognizing the cumulative effect of initial application of the amendments as an adjustment to opening retained earnings at the beginning of the annual reporting period in which the lessee first applies the amendments.</p>	<p>Dalam penerapan amandemen PSAK 73 Perusahaan belum menerima konsesi sewa terkait COVID-19, tetapi berencana untuk menerapkan cara praktis jika berlaku dalam periode penerapan.</p> <p>In implementing the PSAK 73 amendments, the Company has not received any lease concessions related to COVID-19, but plans to implement practical methods if applicable within the implementation period.</p>

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sepanjang tahun 2021 menjadi tantangan tersendiri bagi KPB dalam menjalankan kegiatan operasionalnya mengingat Perusahaan masih dalam tahap konstruksi dan belum beroperasi secara komersial. Meski demikian, Perusahaan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu menjaga eksistensinya di tengah kondisi yang penuh tantangan.

Assessment Manajemen atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan, Perusahaan telah menetapkan sistem manajemen risiko yang baik untuk memitigasi dan menangani risiko usaha yang dapat dihadapi di kemudian hari. Manajemen juga melakukan evaluasi dan assessment terkait hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan secara berkala.

Manajemen melakukan evaluasi dengan menggunakan analisis PESTLE yang terdiri dari Politik (*Politic*), Ekonomi (*Economic*), Sosial (*Social*), Teknologi (*Technology*), Hukum (*Legal*), dan Lingkungan (*Environment*). Analisis PESTLE digunakan Perusahaan untuk mengukur kondisi eksternal perusahaan melalui berbagai sudut pandang tersebut sehingga Manajemen dapat menentukan tantangan dan memitigasi risiko yang mungkin timbul.

Selain itu, Manajemen juga melakukan *assessment* dengan menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) untuk melihat faktor internal, serta Kesempatan (*Opportunity*) dan Ancaman (*Treat*) untuk mengidentifikasi faktor eksternal. Analisis yang dilakukan tersebut berfungsi sebagai asumsi dasar bagi kelangsungan usaha Perusahaan dalam menghadapi dampak atas perubahan kondisi perekonomian maupun industri yang berlangsung sepanjang tahun 2021.

Business Continuity Information

Matters that have the potential to have a significant impact on business continuity

The COVID-19 pandemic that was still ongoing throughout 2021 is a challenge for KPB in carrying out its operational activities, considering that the Company is still in the construction stage and has not yet operated commercially. However, the Company optimizes its resources so that it is able to maintain its existence during these challenging conditions.

Management Assessment on Matters That Have a Significant Influence on Business Continuity

In carrying out its activities, the Company has established a good risk management system to mitigate and handle business risks that may be encountered in the future. Management also conducts evaluations and assessments related to matters that have a significant impact on the Company's business continuity on a regular basis.

Management evaluations use the PESTLE analysis consisting of Politics, Economics, Social, Technology, Legal, and Environment. PESTLE analysis is used by the Company to measure the Company's external conditions using these various perspectives so that Management can determine the challenges and mitigate risks that may arise.

In addition, Management also conducts an assessment using a SWOT analysis consisting of Strengths and Weaknesses of internal factors, as well as Opportunities and Threats of external factors. The analysis carried out serves as a basic assumption for the Company's business continuity in dealing with the impact of changes in economic and industrial conditions that will take place throughout 2021.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment

Dalam melaksanakan penilaian atas kemampuan Perusahaan dalam melanjutkan usahanya di masa mendatang, Manajemen menggunakan beberapa asumsi dan pertimbangan. Asumsi dan pertimbangan yang digunakan Perusahaan, antara lain analisis PESTLE, analisis SWOT, kinerja keuangan, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, permasalahan internal, perekrutan hukum yang dihadapi, serta kondisi makro dan mikro ekonomi yang dihadapi saat ini maupun masa mendatang. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, Manajemen menilai bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang optimal untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dan tidak terdapat ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya sesuai dengan arah strategi pengembangan bisnis ke depan.

Assumptions Used by Management in Conducting Assessments

In carrying out an assessment of the Company's business continuity, the Management used several assumptions and considerations. The assumptions and considerations used by the Company include the PESTLE analysis, SWOT analysis, financial performance, liquidity, solvency, profitability, internal problems, legal cases faced, as well as macro and micro economic conditions faced now and in the future. Based on these assumptions, Management considers that the Company has optimal resources to maintain its business continuity and there is no material uncertainty that could raise significant doubts about the Company's ability to maintain its business continuity in accordance with the direction of future business development strategies.





FUNGSI PENUNJANG BISNIS

Business Support
Overview

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Sebagai upaya PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) dalam mencapai tujuan yang telah tercantum di dalam visi dan misinya, maka Perusahaan memerlukan dukungan penuh dari seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. Perusahaan memandang bahwa karyawan sebagai salah satu aset utama untuk mendukung pencapaian usaha KPB, untuk itu, Perusahaan melakukan pengelolaan SDM secara berkesinambungan dengan efektif dan efisien, guna memastikan bahwa karyawan KPB memiliki kapabilitas yang unggul.

Pengelolaan SDM dilaksanakan oleh VP Human Capital & Business Support yang berada di bawah Direktur Keuangan. VP Human Capital & Business Support melalui Departemen Human Capital, menjalankan pengelolaan dan pengembangan sistem SDM yang meliputi beberapa aspek namun tidak terbatas pada:

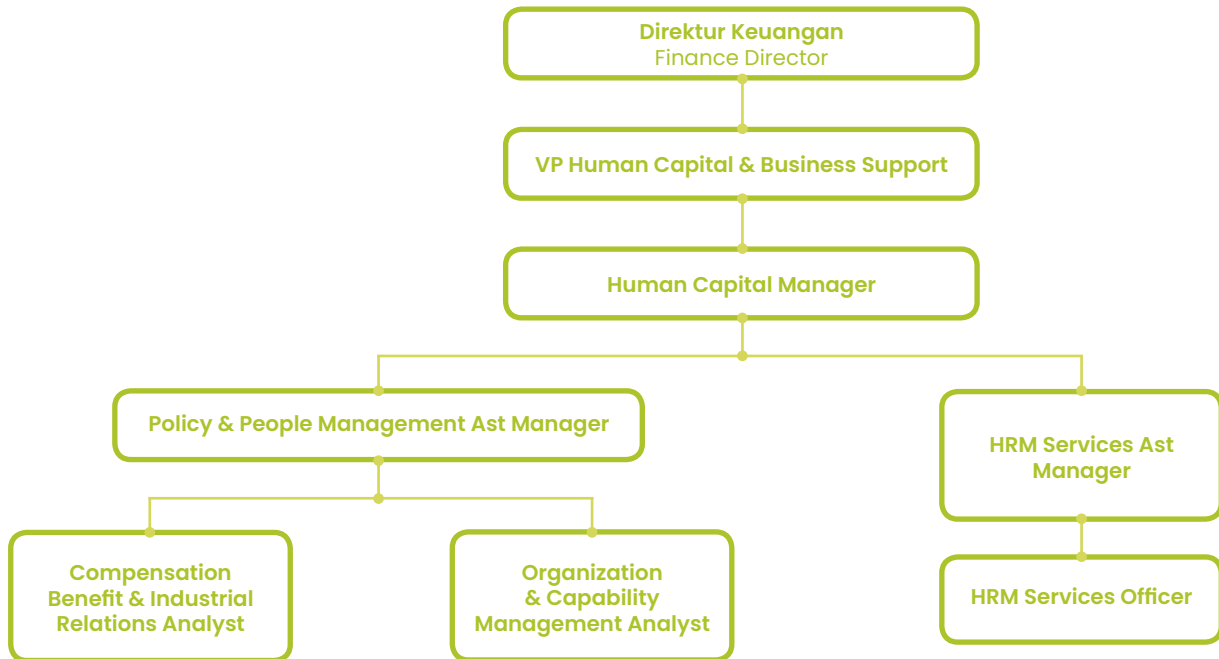
- Perencanaan, desain dan kajian organisasi;
- Pengisian formasi organisasi melalui rekrutmen dan pergerakan pekerja;
- Penilaian, pengembangan dan pembinaan pekerja;
- Pelaksanaan sistem remunerasi;
- Layanan lainnya terkait *human capital*.

As an effort by PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) to achieve the goals stated in its vision and mission, the Company requires full support from all its Human Capital (HC). The Company views its employees as one of its main assets to support the achievement of KPB's business, for this reason, the Company conducts HC management in an effective and efficient manner, to ensure KPB's employees have superior capabilities.

HC management is the responsibility of the VP Human Capital & Business Support, under the Director of Finance. The VP Human Capital & Business Support through the Human Capital Division manages and develops the Company's HC in KPB through the following monitoring aspects:

- Organization planning, design and review;
- Filling the organization through recruitment and movement of employees;
- Assessing, developing and guiding the employees;
- Implementing a remuneration system;
- Other services related to human capital.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA HUMAN CAPITAL PERUSAHAAN
COMPANY HUMAN CAPITAL MANAGEMENT ORGANIZATION STRUCTURE



Strategi Pengelolaan SDM

Di tahun 2021, Perusahaan telah mempersiapkan strategi pengelolaan SDM sebagaimana terlampir berikut ini:

- Revisi organisasi untuk mengakomodasi kebutuhan Perusahaan seiring peningkatan aktivitas proyek RDMP RU V Balikpapan dan Lawe-Lawe.
- Mempersiapkan infrastruktur dari sistem tata kelola organisasi sebagai dasar pelaksanaan proses bisnis yang efektif, efisien, dan sesuai tata kelola organisasi yang baik (*Good Corporate Governance*).
- Rekrutmen pekerja secara selektif dan bertahap untuk mengisi formasi organisasi sesuai perkembangan proyek.

HC Management Strategy

In 2021, the Company has prepared the following HC management strategy:

- Revise the organization to accommodate the Company's needs in line with the increase in RDMP RU V Balikpapan and Lawe-Lawe project activities.
- Prepare the infrastructure of the organization governance system as the basis for the implementation of business processes that are effective, efficient, and in accordance with good corporate governance.
- Carry out selective and gradual recruitment of employees to fill the organization according to project developments.

Kebijakan Kesetaraan

Perusahaan mengelola aspek ketenagakerjaan dengan menjamin adanya kesetaraan dan kesempatan yang sama. Jaminan ini berlaku bagi para calon pekerja untuk bekerja di KPB dan juga para karyawan, dalam hal pengembangan karier dan penerimaan hak. Tidak terdapat adanya perbedaan dalam hal ras, kepercayaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, keturunan, usia, ataupun hal-hal lainnya yang mempengaruhi latar belakang seseorang.

Demografi SDM

Hingga akhir tahun 2021, jumlah karyawan tercatat sebanyak 207 orang yang berasal dari Pertamina Group dan internal KPB. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 71% dibandingkan tahun sebelumnya.

Equality Policy

The Company manages its employment aspect by ensuring equality and equal opportunities. This guarantee applies to prospective employees at KPB as well as current employees, in terms of career development and acceptance of rights. There is no discrimination in terms of race, creed, skin color, religion, gender, ancestry, age, or other matters that affect a person's background.

HC Demographics

At the end of 2021, there were 207 employees from Pertamina Group and internally from KPB. This number has increased by 71% compared to the previous year.

KARYAWAN BERDASARKAN JABATAN EMPLOYEES BY POSITION

JABATAN POSITION	2021		2020	
	JUMLAH (ORANG) NUMBER (PEOPLE)	KOMPOSISI (%) COMPOSITION (%)	JUMLAH (ORANG) NUMBER (PEOPLE)	KOMPOSISI (%) COMPOSITION (%)
Senior Executive	2	0,97%	1	0,83%
Executive	24	11,59%	21	17,36%
Senior Staff	28	13,53%	22	18,18%
Staff	36	17,39%	37	30,58%
Junior Staff	117	56,52%	40	33,06%
Jumlah Total Total	207	100,00%	121	100,00%

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN STATUS NUMBER OF EMPLOYEES BY STATUS

STATUS	2021		2020	
	JUMLAH (ORANG) NUMBER (PEOPLE)	KOMPOSISI (%) COMPOSITION (%)	JUMLAH (ORANG) NUMBER (PEOPLE)	KOMPOSISI (%) COMPOSITION (%)
Pekerja Waktu Tidak Tentu (PWTT): -Perbantuan Pertamina Group -Direct Hire Indefinite Time Worker (PWTT): -Pertamina Group Assistance -Direct Hire	200	96,62%	117	96,69%
Pegawai Waktu Tertentu (PWT) Definite Time Employee (PWT)	7	3,38%	4	3,31%
Jumlah Total	207	100,00%	121	100,00%

Selain itu, Perusahaan juga memiliki tenaga kerja yang termasuk Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) & Tenaga Kerja Penunjang Proyek (TKPP). Tenaga kerja penunjang tersebut berasal dari mitra kerja KPB. Tercatat hingga akhir tahun 2021, jumlah pekerja TKJP dan TKPP sebanyak 461 orang.

In addition to internal employees from internal KPB, the Company also has a workforce that includes Support Service Workers (TKJP) & Project Support Workers (TKPP). At the end of 2021, the number of TKJP and TKPP workers was 461 people.

TENAGA KERJA JASA PENUNJANG (TKJP) & TENAGA KERJA PENUNJANG PROYEK (TKPP) TAHUN 2021
SUPPORT SERVICE WORKERS (TKJP) & PROJECT SUPPORT WORKERS (TKPP) IN 2021

MITRA KERJA PARTNER	TKJP (ORANG PEOPLE)	TKPP (ORANG PEOPLE)	TOTAL (ORANG PEOPLE)
PT Pertamina Training & Consulting MPS	26	265	291
PT Pertamina Training & Consulting Security	12	67	79
PT Prima Armada Raya	49	0	49
PT Karya Murni Nusantara	17	0	17
PT Patra Utama Mandiri	19	0	19
PT Patra Badak Arun Solusi	0	6	6
Jumlah Total	123	338	461

Adapun jumlah Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) & Tenaga Kerja Penunjang Proyek (TKPP) berdasarkan jenis kelamin atau gender di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The number of Supporting Service Workers (TKJP) & Project Support Workers (TKPP) based on gender in 2021 was as follows:

JUMLAH TKJP & TKPP BERDASARKAN JENIS KELAMIN (GENDER) TAHUN 2021
TOTAL SUPPORTING SERVICE WORKERS (TKJP) & PROJECT SUPPORT WORKERS (TKPP) BY GENDER IN 2021

JENIS KELAMIN (GENDER) GENDER	TKJP		TKPP	
	JUMLAH (ORANG) NUMBER (PEOPLE)	KOMPOSISI (%) COMPOSITION (%)	JUMLAH (ORANG) NUMBER (PEOPLE)	KOMPOSISI (%) COMPOSITION (%)
Laki-laki Male	110	89,43	279	82,54
Perempuan Female	13	10,57	59	17,46
Jumlah Total	123	100,00	338	100,00

Sementara itu, jumlah Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) berdasarkan posisi dan tingkat pendidikan di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the number of Supporting Service Workers (TKJP) based on position and level of education in 2021 was as follows:

JUMLAH TKJP BERDASARKAN POSISI TAHUN 2021 TOTAL TKJP BY POSITION IN 2021		
POSISI POSITION	JUMLAH (ORANG) NUMBER (PEOPLE)	KOMPOSISI (%) COMPOSITION (%)
Administrasi	14	11,38
IT Support	2	1,63
General Support	5	4,07
Helper QS	2	1,63
Helper Tim 19	19	15,45
HSSE Support	17	13,82
Security	12	9,76
Driver	49	39,84
Cleaning	3	2,44
Jumlah Total	123	100,00

JUMLAH TKJP BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN NUMBER OF TKJP BY EDUCATION LEVEL		
TAHUN 2021 IN 2021	JUMLAH (ORANG) NUMBER (PEOPLE)	KOMPOSISI (%) COMPOSITION (%)
S1 Bachelor	12	9,76
D3 Diploma	5	4,07
SMA atau Sederajat High school or equivalent	106	86,18
Jumlah Total	123	100,00

Pengisian Formasi Organisasi

Perusahaan melakukan rekrutmen SDM yang ditujukan dalam rangka pengisian formasi organisasi untuk mengelola aktivitas bisnis Perusahaan. Sistem rekrutmen ini juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi guna mendukung bisnis Perusahaan secara berkesinambungan.

Pengisian formasi organisasi dilakukan melalui rekrutmen *fresh intake* dan *experienced hired*, serta perbantuan dari Pertamina Group.

Organization Formation Filling

The Company conducts HC recruitment aimed at filling the organization to manage the Company's business activities. This recruitment system is also adapted to the needs of the organization in order to support the Company's business on an ongoing basis.

Filling the organization is achieved through the recruitment of fresh intake and experienced hires, as well as assistance from the Pertamina Group.

Penilaian Kinerja

Perusahaan memiliki sistem penilaian kinerja dalam upaya untuk menjalankan sistem pengelolaan SDM yang berbasis kinerja dan dilakukan secara profesional. KPB yang merupakan bagian dari Pertamina Group menerapkan sistem penilaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina. Pada tahun 2021, KPB telah melaksanakan penilaian kinerja berbasis *online* (*People Review*).

Kebijakan Remunerasi

Sesuai dengan SK Dirut No.Kpts-02/KPB0000/2020-S0 19 April 2020 yang telah disesuaikan dengan regulasi dan ketentuan industri yang berlaku, Perusahaan menetapkan remunerasi yang dapat meningkatkan motivasi karyawan dan juga disesuaikan dengan kondisi Perusahaan. Komponen remunerasi yang dapat dinikmati oleh karyawan KPB adalah sebagai berikut:

STRUKTUR REMUNERASI KARYAWAN EMPLOYEE REMUNERATION STRUCTURE	
KOMPONEN COMPONENTS	PEKERJA KPB KPB EMPLOYEE
Gaji Pokok Basic salary	√
Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap Fixed and Non-Fixed Benefits	√
Bonus	√
Tunjangan Cuti Leave Allowance	√
Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	√

Kesejahteraan Pekerja

Agar dapat menciptakan hubungan yang baik dengan para pekerjanya, Perusahaan senantiasa memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya mencakup hal materi dan non-material lainnya. Kesejahteraan materi telah diungkapkan dalam pembahasan mengenai remunerasi. Sedangkan kesejahteraan non-material mencakup kesehatan pekerja, perlindungan terhadap kecelakaan kerja, serta kebijakan pensiun.

Performance Assessment

The Company has a performance assessment system in an effort to implement a performance-based and professional HC management system. KPB, as part of the Pertamina Group, applies a performance assessment system in accordance with the applicable regulations at Pertamina. In 2021, KPB carried out online-based performance assessments (*People Review*).

Remuneration Policy

In accordance with the President Director Decree No.Kpts-02/KPB0000/2020-S0 dated April 19, 2020 as adjusted to the prevailing industry regulations and provisions, the Company determines remuneration to increase employee motivation and also adjusts it to the Company's conditions. The remuneration components received by KPB employees are as follows:

Employee Welfare

To create a good relationship with its employees, the Company pays attention to the welfare of its employees, including material and other non-material matters. Material welfare has been disclosed in the discussion on remuneration. Meanwhile, non-material welfare includes employee health, protection against work accidents, and pension policies.

Terkait hal kesehatan, KPB memiliki fasilitas asuransi kesehatan dan juga pemeriksaan kesehatan rutin, selain itu juga Perusahaan pengecekan kesehatan (Tes Swab/PCR) terkait COVID-19 serta Perusahaan juga mengikutsertakan seluruh pekerjanya dalam program Pemerintah yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mana di dalamnya juga termasuk pemberian program pensiun berupa iuran pasti bagi pekerja.

Hubungan Industrial

Perusahaan senantiasa menjaga hubungan industrial yang harmonis dengan para pekerja KPB, hal ini juga sebagai bentuk implementasi kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hubungan ini dilandasi pada asas saling menghormati untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban.

Regarding health, KPB has health insurance facilities as well as routine health checks, in addition the company also checks the health (Swab Test / PCR) related to Covid-19 and the Company also includes all of its employees in Government programs, namely BPJS Health and BPJS Employment, which also includes the provision of a pension plan in the form of defined contributions for employees.

Industrial Relations

The Company maintains harmonious industrial relations with KPB employees, this is also a form of the Company's compliance with applicable laws and regulations. This relationship is based on the principle of mutual respect to create a balance between the fulfillment of rights and the implementation of obligations.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Development

Hingga saat ini KPB telah mengimplementasikan sistem MySAP yaitu merupakan *software Enterprise Resources Planning (ERP)* yang terdiri modul-modul FICO, PS, MM *Non-Hydro*, dan HC yang mendukung semua transaksi operasional perusahaan dimana tiap modul dapat terintegrasi dengan modul lainnya. Sejak tahun 2019 Perusahaan telah menjalankan aktivitas laporan keuangan menggunakan SAP.

Pada tahun 2021 KPB telah melakukan *Go Live* SSC ICT dalam rangka optimalisasi operasional untuk menunjang kinerja perusahaan. Dengan keikutsertaan dalam SSC ICT, diharapkan layanan ICT bisa lebih terukur dan semakin *service excellence*. Sebagai contoh dari layanan yang dimaksud adalah, layanan *Seat Management* dan *Manage Printing Service*. Kedua layanan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada aspek penyediaan perangkat pendukung pekerjaan namun juga menjaga sisi keamanan data perusahaan.

Seiring dengan program digitalisasi, maka KPB sudah ikut serta dalam implementasi *roll-out* aplikasi, antara lain Jojonomic dan I-Am. Aplikasi Jojonomic berfungsi sebagai pendukung *end-to-end* proses terkait uang muka kerja atau *cashcard*. Sedangkan aplikasi I-Am berfungsi sebagai *tools* untuk hal-hal yang mencakup terkait *Human Capital*.

Pengelolaan TI di Tengah Pandemi

Seperti halnya SDM, teknologi informasi Perusahaan juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi di 2021. Pada saat masa pandemi, peran TI semakin besar untuk memastikan konektivitas antar karyawan dan pekerjaannya ketika harus bekerja secara *remote* dari rumah (WFH). Selama masa pandemi, Perusahaan telah melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem TI dapat mendukung pola kerja baru. Perusahaan telah melakukan sejumlah langkah yang diperlukan untuk mendukung aktivitas kerja pekerja secara keseluruhan.

KPB has implemented the MySAP system, an Enterprise Resources Planning (ERP) software consisting of FICO, PS, MM Non Hydro, and HC modules that support all Company operational transactions where each module is integrated with other modules. Since 2019 the Company has carrying out its financial reporting activities using SAP.

In 2021 KPB carried out Go Live SSC ICT in order to optimize operations to support the Company performance. By participating in SSC ICT, it is hoped that ICT services can be more scalable and provide more service excellence. Examples of the services in question include Seat Management and Manage Printing Services. The two services not only focus on the aspect of providing work support tools but also maintaining the security side of company data.

With the digitization program, KPB has participated in application roll-outs, including Jojonomic and i-Am. The Jojonomic application functions as an end-to-end support for work advances or cashcard processes. Meanwhile, the i-Am application functions as a tool for matters related to Human Capital.

IT Management During the Pandemic

Like HC, the Company's information technology was also affected by the pandemic conditions in 2021. During the pandemic, IT's role became even greater as they ensured connectivity between employees and their work when they have to work remotely from home (WFH). During the pandemic, the Company made the necessary adjustments to ensure that the IT system supported the new work patterns. The Company took a number of necessary steps to support the work activities of the employees as a whole.

Tata Kelola TI

Perusahaan menyadari pentingnya menjaga tata kelola dalam keseluruhan proses bisnis, termasuk dalam hal teknologi informasi. Tata kelola TI diterapkan untuk mengawasi jalannya proses perkembangan TI dan juga aplikasinya sehari-hari di aktivitas operasional. Keamanan TI harus menjadi hal utama yang ada di benak setiap pekerja ketika menggunakan fasilitas TI Perusahaan.

Perusahaan terus menekankan pentingnya menjaga alur informasi antara pihak internal dan eksternal agar tidak terjadi kebocoran informasi yang dapat merugikan Perusahaan dan berdampak terhadap pemangku kepentingan. Pengelolaan dan pengembangan TI yang dilakukan oleh pihak ketiga juga senantiasa diawasi dan dimonitor secara ketat untuk menjaga kerahasiaan data Perusahaan.

Rencana Pengembangan TI 2022

Perusahaan di tahun 2022 telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung pengelolaan TI, seperti di antaranya:

- Perbaikan Jaringan Internet Kantor Balikpapan dengan melakukan *Upgrade Bandwidth* yang direncanakan menjadi 100 Mbps. Didukung dengan *Bandwidth Management*.
- Perbaikan Jaringan Seluler di Kantor Balikpapan. Akan dilakukan survei lokasi penguat sinyal.
- Implementasi *P-Office*: *go-live* 28 Februari 2022.

IT Governance

The Company understands the importance of maintaining good governance in all business processes, including in information technology. IT governance is applied to oversee the course of the IT development process as well as its daily application in operational activities. IT security should be the main concern on every employee's mind when using the Company's IT facilities.

The Company continues to emphasize the importance of maintaining the flow of information between internal and external parties so that information leaks do not occur that can harm the Company and have an impact on stakeholders. IT management and development, carried out by third parties, are also closely supervised and monitored to maintain the confidentiality of Company data.

IT Development Plan for 2022

The Company for 2022 has prepared various programs to support IT management, including:

- Balikpapan Office Internet Network Repair by upgrading the planned bandwidth to 100 Mbps. Supported with Bandwidth Management.
- Cellular Network at Balikpapan Office: currently surveying the location of the signal booster. Will coordinate with Construction Function & HSSE Function.
- P-Office implementation: *go-live* February 28, 2022.





**Corporate
Governance**



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate
Governance

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Good Corporate Governance Implementation

Komitmen dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan aspek penting untuk memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen dan meyakini bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan serta penerapan yang dilakukan di setiap aktivitas usaha sesuai dengan *best practice* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memperkuat kepercayaan investor, meningkatkan nilai bagi Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya dalam mendukung pertumbuhan usaha yang berkesinambungan dalam jangka panjang.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

KPB adalah anak perusahaan dari PT Kilang Pertamina Internasional, dan berada di bawah grup PT Pertamina (Persero) yang berstatus BUMN. Dalam menerapkan GCG, KPB mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

KPB meyakini bahwa pengelolaan Perusahaan yang sesuai dengan kaidah GCG akan memastikan manajemen usaha yang efektif, sesuai tujuan usaha, dan pengambilan keputusan yang adil dan transparan, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Commitment in the Implementation of Good Corporate Governance

The Company is fully aware that the implementation of Good Corporate Governance is an important aspect to ensure sustainable business growth in the long term. Therefore, the Company is committed and believes that the consistent and continuous application of GCG principles as well as the implementation carried out in every business activity in accordance with best practices and applicable laws and regulations will strengthen investor confidence, increase value for Shareholders and Stakeholders by supporting sustainable business growth in the long term.

Fundamentals of Good Corporate Governance Implementation

KPB is a subsidiary of PT Kilang Pertamina International and is under the PT Pertamina (Persero) group, which has the status of a BUMN. For implementing GCG, KPB refers to the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, and the Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

Purpose of Good Corporate Governance Implementation

KPB believes that the management of the Company in accordance with GCG principles will ensure effective business management, based on business objectives, and fair and transparent decision making, in accordance with applicable rules and regulations.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan secara Berkelanjutan

Standar Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Komitmen Perusahaan dalam menjadikan GCG sebagai budaya kerja diwujudkan dengan upaya peningkatan implementasi GCG di setiap level organisasi. Upaya ini dilakukan guna memastikan tercapainya lima nilai utama GCG sebagai berikut:

Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

Quality Standards for Good Corporate Governance Implementation

The Company's commitment to making GCG a work culture is realized by improving GCG implementation at every level of the organization. This effort is made to ensure the achievement of the five main values of GCG as follows:

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

Transparansi Transparency	<p>Menjamin keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lain secara memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Ensure transparency in the decision-making process and disclosure of material and relevant information regarding performance, financial condition and other information that is adequate, clear, accurate, comparable and timely and easily accessible by stakeholders in accordance with their rights under the provisions of the law.</p>
Akuntabilitas Accountability	<p>Menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban seluruh Insan KPB yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban insan KPB atau fungsi kerja Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Perusahaan kepadanya.</p> <p>Ensure clarity of function, implementation, and accountability of all KPB Personnel which enables the management of the Company to be carried out effectively. Accountability refers to the obligations of KPB personnel or the Company's work functions related to the implementation of the authority they have and/or the implementation of the responsibilities entrusted by the Company to them.</p>
Independensi Independence	<p>Mengelola secara independen dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.</p> <p>Manage independently and professionally and free from conflicts of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and GCG principles.</p>
Responsibilitas Responsibility	<p>Menjamin aktivitas bisnis terlaksana sesuai prinsip-prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban ke Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan kerja sama secara aktif untuk manfaat bersama, dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.</p> <p>Ensure business activities are carried out in accordance with sound corporate principles, fulfilling obligations to the Government in accordance with applicable laws and regulations, actively cooperating for mutual benefits, and trying to make a real contribution to society.</p>
Kewajaran Fairness	<p>Menjamin kesetaraan dan keadilan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan, perjanjian, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Ensure equality and fairness in fulfilling the rights of stakeholders based on the provisions, agreements, and applicable laws and regulations.</p>



Monitoring Penerapan

Sebagai tindak lanjut dan komitmen tinggi terhadap penerapan GCG di lingkup Perusahaan, KPB yang sebagai bagian dari Pertamina Group, melakukan monitoring Penerapan GCG menggunakan sistem yang telah disediakan oleh PT Pertamina (Persero), antara lain melalui Pengisian CoC, CoCG, dan Pelaporan Gratifikasi bagi seluruh pekerja, serta tambahan Laporan Harta Kekayaan Pengelola Negara (LHKPN) bagi pekerja level Manager ke atas.

Implementation Monitoring

As a follow-up and high commitment to the implementation of GCG within the Company, KPB, as part of the Pertamina Group, monitors GCG implementation using a system provided by PT Pertamina (Persero), and by all employees Completing the CoC, CoCG, and Gratification Reporting, as well as the State Management Wealth Reports (LHKPN) for Manager level employees and above.

STRUKTUR GCG PERUSAHAAN

Company GCG Structure

Dalam menjalankan aktivitas usahanya Perusahaan memiliki struktur tata kelola yang terdiri dari 3 (tiga) organ utama yang saling bersinergi dan terintegrasi yaitu sebagai berikut:

In carrying out its business activities, the Company has a governance structure consisting of 3 (three) main organs that are synergized and integrated, as follows:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)	Organ Perusahaan dengan wewenang yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Company organ with authority not delegated to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	Bertanggung jawab mengawasi dan memberikan nasihat atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi. Responsible for supervising and providing advice on the management of the Company by the Board of Directors.
DIREKSI DIRECTORS	Bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan sesuai amanah yang diberikan. Responsible for the management of the Company in accordance with the mandate given.

Soft Structure Tata Kelola Perusahaan

Untuk mendukung implementasi GCG, Perusahaan memiliki *soft structure* yang telah dilakukan penyusunan berupa *draft Board Manual* KPB, yang saat ini dalam proses finalisasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Corporate Governance Soft Structure

To support GCG implementation,, the Company has a soft structure that has been prepared in the form of a draft of the KPB Board Manual, which is currently in the process of being finalized by the Board of Commissioners and Board of Directors.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

RUPS menjadi wadah bagi para pemegang saham untuk memperoleh keterangan mengenai kegiatan bisnis dan operasional usaha serta kinerja Perusahaan di tahun buku. Pemegang Saham juga dapat menggunakan wewenangnya untuk membuat sejumlah keputusan yang tidak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Jenis RUPS

RUPS terdiri dari:

1. RUPS Tahunan (RUPST) untuk menyetujui Laporan Tahunan, mengesahkan perhitungan tahunan serta mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan untuk kepentingan Perusahaan.
3. Selain RUPS yang diselenggarakan secara fisik, sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pemegang Saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS (Keputusan Pemegang Saham Sirkuler) yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan RUPS secara fisik. Keputusan Pemegang Saham Sirkuler berkekuatan hukum setara keputusan RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan tersebut.

Wewenang RUPS

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Hak Pemegang Saham

Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

The GMS is a forum where shareholders obtain information regarding the business activities and business operations as well as the Company's performance in the fiscal year. Shareholders can also use their authority to make decisions that are not delegated to the Board of Commissioners and Directors.

Type of GMS

GMS consists of:

1. Annual GMS (AGMS) to approve the Annual Report, ratify the annual results and ratify the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
2. Extraordinary GMS (EGMS), namely GMS which are held from time to time based on the needs and interests of the Company.
3. In addition to the GMS held physically, in accordance with Article 91 of Law No. 40 of 2007 concerning PT, Shareholders can make decisions outside the GMS (Circular Shareholder Decisions) that have the same binding legal force as a physical GMS. Circular Shareholders' decisions have the same legal effect as the GMS resolutions provided all shareholders with voting rights agree in writing by signing the decision.

GMS Authority

The GMS has powers that are not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits specified in this Law and/or the articles of association.

Shareholders' Rights

Through the GMS forum, shareholders are entitled to obtain information related to the Company from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as long as it relates to the agenda of the meeting and does not conflict with the interests of the Company.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2021

Pada tahun 2021, Perusahaan menyelenggarakan sejumlah RUPS, baik secara fisik dan sirkuler, untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSSS) tentang Persetujuan RKAP Revisi tahun 2020, yang dinyatakan dalam Akta No. 08 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021.
2. Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSSS) tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan dalam Akta No. 07 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021.
3. Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSSS) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama, yang dinyatakan dalam Akta No. 05 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021.
4. Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSSS) tentang RKAP Tahun 2021, yang dinyatakan dalam Akta No.14 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021.
5. Keputusan tentang Pengangkatan Wakil Perseroan sebagai Direktur Keuangan PT Kilang Pertamina Balikpapan tanggal 25 Oktober 2021 yang dinyatakan dalam Akta Notaris No. 18 tanggal 23 Nov 21 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KPB tentang Pengangkatan Wakil Perseroan sebagai Direktur Keuangan.
6. RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 (fisik), yang diselenggarakan tanggal 29 Juni 2021.

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2020

Pada tahun 2020, Perusahaan menyelenggarakan 4 (empat) kali RUPS yang telah dituangkan dalam dengan rincian sebagai berikut:

1. Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSSS) tentang Persetujuan RKAP tahun 2020, yang dinyatakan dalam Akta No.17 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020.
2. Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSSS) tentang Pemberhentian Komisaris Perusahaan, yang dinyatakan dalam Akta No.21 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020.

Holding of the 2021 GMS

In 2021, the Company held a number of GMS, both physically and circularly, to make the following decisions:

1. Circular Shareholders' Decision (KPSSS) concerning the Approval of the 2020 Revised RKAP, which was ratified through Deed No. 08 of 2021 on February 11, 2021.
2. Circular Shareholders' Decision (KPSSS) concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners, which was ratified through Deed No. 07 of 2021 on February 11, 2021.
3. Circular Shareholders' Decision (KPSSS) concerning the Dismissal and Appointment of the President Director, which was ratified through Deed No. 05 of 2021 on April 7, 2021.
4. Circular Shareholders' Decision (KPSSS) concerning the 2021 RKAP, which was ratified through Deed No. 14 of 2021 dated September 13, 2021.
5. Decision on the Appointment of the Company's Representative as Director of Finance of PT Kilang Pertamina Balikpapan dated October 25, 2021 which was stipulated in the Notary Deed No. 18 dated November 23, 2021, Decision Statement of KPB Shareholders regarding the Appointment of Company Representatives as Director of Finance.
6. Annual GMS for Fiscal Year 2020 (physical), which will be held on June 29, 2021.

Implementation of the 2020 GMS

In 2020, the Company held 4 (four) GMS as In 2020, with details as follows:

1. Circular Shareholders' Decision (KPSSS) concerning the 2020 RKAP Approval, which was ratified through Deed No. 17 of 2020 dated April 13, 2020.
2. Circular Shareholders' Decision (KPSSS) concerning the Dismissal of the Company's Commissioners, which was ratified through Deed No. 21 of 2020 dated April 14, 2020.

- Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSSS) tentang Penambahan Penyertaan Modal, yang dinyatakan dalam Akta No.09 Tahun 2020 tanggal 26 Mei 2020.
- RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 (fisik), yang dinyatakan dalam Akta No.15 Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020.

Rekapitulasi Kehadiran

Dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2021, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi hadir secara fisik.

Penggunaan Pihak Independen dalam Pelaksanaan RUPS untuk Melakukan Perhitungan Suara

Perusahaan tidak menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan Perhitungan Suara.

- Circular Shareholders' Decision (KPSSS) concerning Additional Equity Participation, which was ratified through Deed No. 09 of 2020 dated 26 May 2020.
- Annual GMS for Fiscal Year 2019 (physical), which was ratified through Deed No. 15 of 2020 dated August 12, 2020.

Attendance Recapitulation

In the 2021 Fiscal Year Annual GMS, all Board of Commissioners and Board of Directors were physically present.

Use of Independent Parties in the Implementation of the GMS to Count the Votes

The Company does not use an independent party in the GMS to count the votes.



DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana diminta atau ketika diperlukan dalam rangka untuk memastikan Perusahaan dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris telah diatur sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Dewan Komisaris dilakukan melalui mekanisme RUPS. Pedoman/Tata Tertib Dewan Komisaris ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris KPB No.Kpts-005/DK-KPB/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Tata Kelola di Lingkungan Dewan Komisaris KPB.

Kriteria Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- Dinyatakan pailit;
- Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
- Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

The Board of Commissioners is the Company's organ in charge of conducting general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors as requested or when necessary in order to ensure that the Company is managed in accordance with the purposes and objectives of the Company. The Board of Commissioners must act in good faith and with full responsibility carry out their duties for the benefit of the Company.

Board of Commissioners' Guidelines and Work Rules

The Board of Commissioners is the Company's organ in charge of supervising the management of the Company by the Board of Directors. The Board of Commissioners has the authority to provide advice to the Board of Directors for the benefit of the Company. The appointment and dismissal of the Board of Commissioners is regulated in accordance with the Company's Articles of Association. The appointment and dismissal of the membership of the Board of Commissioners is carried out through the GMS mechanism. The Board of Commissioners' Guidelines/Ordinances are stipulated in the KPB Board of Commissioners Decree No.Kpts-005/DK-KPB/2021 dated August 23, 2021 concerning Governance within the Board of Commissioners of KPB.

Board of Commissioners Criteria

Those who can be appointed as members of the Board of Commissioners are individuals who can carry out legal acts, unless within the previous 5 (five) years:

- Were declared bankrupt;
- Were a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was declared to have caused a company or Perum to be declared bankrupt; or
- Was sentenced for committing a crime that was detrimental to state finances and/or related to the financial sector.

Selain itu, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris di Sepanjang Tahun 2021

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan dan persyaratan Dewan Komisaris Perusahaan mengacu pada UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Adapun komposisi Dewan Komisaris dalam tahun 2021 sebagai berikut:

PERIODE PERIOD	NAMA NAME	JABATAN POSITION	DASAR PENGANGKATAN BASIS OF APPOINTMENT
1 Jan – 19 Jan 1 Jan – 19 Jan	Suwahyanto	Komisaris Commissioner	KPSS tanggal 20 Maret 2020 yang dinyatakan dalam Akta No.21 Tanggal 14 April 2020 KPSS dated March 20, 2020 ratified through Deed No.21 dated April 14, 2020
19 Jan – 31 Des 19 Jan – 31 Dec	Suwahyanto Saifullah Ma'shum	Komisaris Utama Komisaris President Commissioner Commissioner	KPSS tanggal 19 Januari 2021 yang dinyatakan dalam Akta No.07 Tanggal 11 Februari 2021 KPSS dated January 19, 2021 ratified through Deed No.07 dated February 11, 2021

Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan

Penilaian kemampuan & kepatuhan Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham.

In addition, the appointment of the Board of Commissioners is carried out by considering integrity, dedication, understanding management issues related to adequate management, and providing sufficient time to carry out management tasks and fulfilling them according to management laws and regulations.

Term of Office

The term of office for members of the Board of Commissioners is set for 3 (three) years and they can be reappointed for 1 (one) term of office.

Structure, Number, Composition and Basis of Appointment of Members of the Board of Commissioners in 2021

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. The appointment and requirements of the Company's Board of Commissioners refers to the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association. The Board of Commissioners composition in 2021 was as follows:

Capability and Compliance Assessment

A fit and proper test of the Board of Commissioners is carried out by the Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS
SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

NAMA NAME	JABATAN POSITION	KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN COMPANY SHARE OWNERSHIP
Suwahyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak ada None
Saifullah Ma'shum	Komisaris Commissioner	Tidak ada None

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Concurrent Positions of Board of Commissioners

NAMA NAME	JABATAN POSITION	RANGKAP JABATAN CONCURRENT POSITIONS
Suwahyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Direktur Proyek Infrastruktur di KPI Director of Infrastructure Projects at KPI
Saifullah Ma'shum	Komisaris Commissioner	Tidak ada None

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Affiliated Relationships

NAMA NAME	JABATAN POSITION	HUBUNGAN AFILIASI DENGAN KOMISARIS AFFILIATED RELATIONSHIPS WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS	HUBUNGAN AFILIASI DENGAN DIREKSI AFFILIATED RELATIONSHIPS WITH THE BOARD OF DIRECTORS
Suwahyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None
Saifullah Ma'shum	Komisaris Commissioner	Tidak ada None	Tidak ada None

Tanggung Jawab

Tugas Dewan Komisaris, berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 16 ayat 1, menyatakan bahwa :

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Duties and Responsibilities

The duties of the Board of Commissioners, based on the Company's Articles of Association article 16 paragraph 1, state that:

The Board of Commissioners supervises the management policies, general management of both the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and provides advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the RJPP, RKAP and the provisions of the Articles of Association and Decisions, as well as applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.

Tanggung Jawab (Kewajiban) Dewan Komisaris, berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 16 Ayat 4 adalah:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
- c. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
- d. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
- e. Membentuk Komite Audit.
- f. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.
- g. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di pemegang saham mayoritas/pengendali yang dinyatakan berlaku bagi Perseroan melalui keputusan RUPS Perseroan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan Wewenang

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 16 ayat 3, hak dan wewenang Dewan Komisaris sebagai berikut:

- a. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.
- b. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
- c. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
- d. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
- e. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.

Responsibilities (Obligations) of the Board of Commissioners, based on the Company's Articles of Association Article 16 Paragraph 4 are:

- a. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the RJPP and RKAP proposed by the Board of Directors.
- b. Follow the development of the Company's activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important to the management of the Company.
- c. Report immediately to the GMS if there are symptoms of a decline in the Company's performance.
- d. Research and review the periodic reports and Annual Reports that are prepared as well as the Annual Reports.
- e. Establish an Audit Committee.
- f. Implement other obligations in the context of supervisory duties and provide advice as long as it does not conflict with the laws and regulations, Articles of Association, and/or Decisions.
- g. Comply with the provisions applicable to the majority/controlling shareholders which are declared applicable to the Company through the resolutions of the Company's GMS, as well as in accordance with the prevailing laws and regulations.

Rights and Authorities

In accordance with the Company's Articles of Association article 16 paragraph 3, the rights and authorities of the Board of Commissioners are as follows:

- a. View books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other securities and examine the Company's assets.
- b. Enter the yards, buildings, and offices used by the Company.
- c. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company.
- d. Understand all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.
- e. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors attend the Board of Commissioners meeting.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">f. Mengangkat sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu.g. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.h. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.i. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.j. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.k. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.l. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS. | <ul style="list-style-type: none">f. Appoint a secretary to the Board of Commissioners, if deemed necessary.g. Temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Limited Liability Company Law.h. Establish other Committees other than the Audit Committee, if deemed necessary by taking into account the capabilities of the Company.i. Use experts for certain matters and for a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary.j. Carry out management actions of the Company under certain conditions for a certain period of time in accordance with the provisions of this Articles of Association.k. Attend Board of Directors meetings and provide views on the matters discussed.l. Carry out other supervisory powers as long as they do not conflict with the laws and regulations, the Articles of Association, and/ or the resolutions of the GMS. |
|---|---|

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Di tahun 2021, secara khusus Dewan Komisaris belum menetapkan pembagian tugas di antara Anggota Dewan Komisaris.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 12 Ayat 6, menyatakan bahwa keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pinjaman jangka pendek, kecuali pinjaman dari pemegang saham mayoritas.
- b. Memberikan pinjaman jangka pendek.
- c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek.
- d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- e. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati.
- f. Mengadakan kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerja sama operasi dan perjanjian kerja sama lainnya dalam bidang usaha Perseroan sebagaimana

Division of Duties of the Board of Commissioners

In 2021, the Board of Commissioners has not determined a division of duties among the members of the Board of Commissioners.

Decisions Requiring Approval of the Board of Commissioners

Based on the Company's Articles of Association article 12 paragraph 6, it is stated that the decisions that need to be approved by the Board of Commissioners are as follows:

- a. Receive short-term loans, except for loans from majority shareholders.
- b. Provide short term loans.
- c. Collateralize fixed assets needed to carry out short-term credit withdrawals.
- d. Release and write off movable fixed assets with an economic life that is generally applicable in the industry up to 5 (five) years.
- e. Write off from the books bad debts and expired goods inventory.
- f. Conduct licensing cooperation, management contracts, lease assets, joint operations and other cooperation agreements in the Company's line of business as stipulated in the

ketentuan Anggaran Dasar yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

- g. Mengadakan kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerja sama operasi dan kerja sama lainnya yang tidak dalam bidang usaha Perseroan sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- h. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Aktivitas Utama Dewan Komisaris Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Aktivitas-aktivitas tersebut mencakup rapat berkala dengan Direksi, memberikan saran dan dukungan setiap minggu melalui Rapat Koordinasi Direktorat Proyek Infrastruktur, pengawasan kinerja Perusahaan dari laporan kinerja yang diterima secara berkala, hingga sejumlah keputusan dan rekomendasi lainnya yang telah dibuat selama tahun 2021. Adapun informasi terkait hal-hal penting yang menjadi perhatian Dewan Komisaris di tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pengembangan struktur organisasi dan upaya Perusahaan dalam memenuhi setiap fungsi yang ada untuk menjalankan bisnis dengan baik. Disertai dengan pemenuhan *manpower* yang mendukung pengembangan struktur organisasi tersebut sesuai dengan pencapaian progress proyek.
2. Pendanaan Proyek, antara lain melalui *Project Financing*, *notional pooling*, maupun penyertaan modal Pertamina melalui KPI.
3. Realisasi progres fisik pelaksanaan kontrak Proyek EPC ISBL-OSBL yang mencapai 46,95% pada akhir tahun 2021.
4. Penyelesaian novasi kontrak EPC ISBL-OSBL ke JO SHRP (*Joint Operation*).
5. Persiapan *Black Start-Up* (BSU) dan *Turn Around* (TA) di Tahun 2022.
6. Peningkatan aset yang cukup tinggi akibat penyelesaian instalasi beberapa unit utama yang cukup signifikan.

Articles of Association that exceeds a certain value set by the Board of Commissioners.

- g. Conduct licensing cooperation, management contracts, lease assets, joint operations and other collaborations that are not within the Company's line of business as stipulated in the Articles of Association for a period of not more than 1 (one) year or exceeding a certain value determined by the Board of Commissioners.
- h. Establish and adjust the organizational structure up to 1 (one) level below the Board of Directors.

Main Activities of the Board of Commissioners in 2021

Throughout 2021, the Board of Commissioners carried out its duties and responsibilities that were realized through various activities in order to supervise the policies and management of the Company carried out by the Board of Directors. These activities included regular meetings with the Board of Directors, providing advice and support every week through the Infrastructure Project Directorate Coordination Meetings, monitoring the Company's performance from performance reports received periodically, as well as decisions and other recommendations made during 2021. Information related to important matters that the Board of Commissioners paid attention to in 2021 included:

1. Development of the organizational structure and the Company's efforts to fulfill every existing function to run the business properly. Accompanied by the fulfillment of manpower that supports the development of the organizational structure in accordance with the achievement of project progress.
2. Project funding, through project financing, notional pooling, and Pertamina's equity participation through KPI.
3. Realization of the physical progress of the ISBL-OSBL EPC Project contract that reached 46.95% at the end of 2021.
4. Completion of the novation of the EPC ISBL - OSBL contract to JO SHRP (*Joint Operation*).
5. Preparation for *Black Start-Up* (BSU) and *Turn Around* (TA) in 2022.
6. The significant increase in assets due to the completion of the installation of several major units that were quite significant.

7. Pembebasan bea masuk impor, *tax holiday*, pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
8. Memberikan saran dan dukungan setiap minggu melalui Rapat Koordinasi Direktorat Proyek Infrastruktur.

Program Pengenalan Perusahaan bagi Komisaris Baru dan Peningkatan Kompetensi bagi Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai Program Pengenalan Perusahaan bagi Komisaris yang baru pertama kali diangkat dan Kebijakan Pelatihan tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.Kpts-005/DK-KPB/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Tata Kelola di Lingkungan Dewan Komisaris KPB.

Dalam tahun 2021 diangkat 1 (satu) orang Komisaris baru yaitu Bapak Saifullah Ma'shum pada bulan Januari 2021. Bagi Beliau tidak dilaksanakan Sesi Khusus Program Pengenalan dimaksud, namun Program Pengenalan Perusahaan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Rapat Dewan Komisaris – Direksi dan kegiatan *Management Walk Through* (MWT) ke lokasi Proyek.

Dalam tahun 2021, Komisaris Saifulloh Mashum menjadi Narasumber dalam beberapa workshop, antara lain:

- *Workshop* dan seminar Kelas Akademi *Management* dan *Leadership* tingkat Nasional, diselenggarakan oleh pimpinan Pusat Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia, di Jakarta.
- *Workshop* Transformasi Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ), diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Pusat), di Jakarta.
- Seminar Nasional Pemenuhan Hak Konstitusional Komunitas Adat dan Kelompok Minoritas, diselenggarakan oleh Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), di Jakarta.
- *Workshop* dan seminar nasional Penulisan Ensiklopedi Metode Pembelajaran Al-Qur'an di Tanah Air, diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Pusat), di Jakarta.
- *Workshop* dan Seminar Strategi Revitalisasi UMKM di Tengah Pandemi COVID-19, diselenggarakan oleh Paguyuban UMKM Malang Raya, di Malang

7. Exemption of import duty, *tax holiday*, exemption from collection of Article 22 Import Income Tax.
8. Provided advice and support every week through the Infrastructure Project Directorate Coordination Meeting.

Company Introduction Program for New Commissioners

The policy regarding the Company Introduction Program for newly appointed Commissioners and the Training Policy are stated in the Board of Commissioners Decree No.Kpts-005/DK-KPB/2021 dated August 23, 2021 concerning Governance within the Board of Commissioners of KPB.

In 2021, 1 (one) new Commissioner was appointed, namely Saifullah Ma'shum in January 2021. A Special Session of the Introduction Program was not held, but the Company Introduction Program was held in conjunction with the Board of Commissioners – Directors Meeting and Management Walk Through (MWT) activities at the Project site.

In 2021, Commissioner Saifulloh Mashum was a resource person in several workshops, among others:

- Workshops and seminars for Management and Leadership Academy Classes at the National level, organized by the leadership of the Indonesian Interpretation of Hadith Student Communication Forum Center, in Jakarta.
- Workshop on the Transformation of Al-Qur'an Educational Institutions (LPQ), organized by the Ministry of Religion (Center), in Jakarta.
- National Seminar on Fulfillment of Constitutional Rights of Indigenous Communities and Minority Groups, organized by the Indonesian Citizenship Institute (IKI) in collaboration with the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN), in Jakarta.
- National workshops and seminars on Writing an Encyclopedia of Al-Qur'an Learning Methods in the country, organized by the Ministry of Religious Affairs (Central), in Jakarta.
- Workshop and Seminar on MSME Revitalization Strategies in the Middle of the Covid-19 Pandemic, organized by the Greater Malang MSME Association, in Malang

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15 Ayat 10 jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Masa jabatannya berakhir.
- c. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
- d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- e. Diberhentikan berdasarkan RUPS dengan alasan:
 - 1) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - 2) Tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau, melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara;
 - 4) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 5) Terjadinya keadaan dimana ybs memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan semenda (menantu atau ipar) di antara anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, RUPS berwenang memberhentikan salah satu diantara mereka.
 - 6) Alasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.

Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Komite Lainnya

Dewan Komisaris memiliki organ pendukung yang terdiri dari 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit dan Komite Investasi, dan Komite Remunerasi. Organ tersebut dibentuk dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan.

Mechanism for Resignation and Dismissal of the Board of Commissioners

Based on the Company's Articles of Association Article 15 Paragraph 10, the position as a member of the Board of Commissioners ends when:

- a. They Pass Away.
- b. Their term of office ends.
- c. They lose their Indonesian citizenship.
- d. They resign with written notification to Shareholders and copies to other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors no later than 30 (thirty) days prior to the date of his resignation.
- e. They are dismissed based on the GMS for the following reasons:
 - 1) Unable to carry out their duties properly;
 - 2) No longer fulfills the requirements and/or violates the provisions of the Articles of Association and/or applicable laws and regulations;
 - 3) Have engaged in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
 - 4) Have been declared guilty by a court decision that has permanent legal force;
 - 5) A situation has arisen where the person concerned has a familial relationship up to the third degree, either in a straight line or a side line, including a marriage relationship (son-in-law or brother-in-law) with members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors, and the GMS has the authority to dismiss one of them.
 - 6) Other reasons determined by the GMS.

Supporting Organs for the Board of Commissioners and Other Committees

The Board of Commissioners has 3 (three) supporting committees, namely the Audit Committee, Investment Committee, and Remuneration Committee. These were formed in order to assist the Board of Commissioners in carrying out supervision over the management of the Company.

KOMISARIS INDEPENDEN Independent Commissioner

Pada tahun 2021, Perusahaan belum menetapkan Komisaris Independen di KPB. Namun terdapat 1 (satu) orang Komisaris yang dapat dianggap sebagai Komisaris Independen yaitu Bapak Saifullah Ma'shum mengingat bahwa beliau tidak memiliki jabatan rangkap dengan entitas perusahaan di Pertamina Group.

In 2021, the Company has not appointed an Independent Commissioner at KPB. However, there is 1 (one) Commissioner who can be considered as an Independent Commissioner, namely Saifullah Ma'shum as he does not have any concurrent positions with the corporate entities in the Pertamina Group.

DIREKSI

Board of Directors

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan berdasarkan dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian atas tujuan Perusahaan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang berpedoman pada seluruh peraturan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Perusahaan tidak menetapkan secara tersendiri mengenai Pedoman Kerja/Piagam Direksi. Pelaksanaan pekerjaan operasional mengacu pada masing-masing TKO/TKI yang terkait.

Kriteria Direksi

Pengangkatan dan persyaratan Direksi Perusahaan mengacu pada UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Anggota Direksi telah diseleksi dan dipilih berdasarkan persyaratan yang terkandung dalam Anggaran Dasar Perusahaan seperti persyaratan formal, kapabilitas dan rekam jejak. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 11 ayat 2 & 3, yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, berperilaku baik, dan berdedikasi tinggi untuk

The Board of Directors is the Company's organ authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the provisions of the Articles of Association. In carrying out their duties, the Board of Directors is required to devote full energy, thought, attention and dedication to their duties, obligations and achievement of the Company's goals. In carrying out their duties, the Board of Directors is given clear authority and responsibility in accordance with the Company's Articles of Association and is guided by all applicable regulations.

Board of Directors Guidelines and Code of Conduct

The Company does not separately stipulate the Work Guidelines/Charter of the Board of Directors. The implementation of operational work refers to each related TKO/TKI.

Board of Directors Criteria

The appointment and requirements of the Company's Board of Directors refer to the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association. Members of the Board of Directors are chosen and selected based on the requirements contained in the Company's Articles of Association including their formal requirements, capabilities and track record. Based on the Company's Articles of Association article 11 paragraphs 2 & 3, those who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who are capable of carrying out legal actions, unless within 5 (five) years prior to their appointment they:

- a. Were declared bankrupt;
- b. Were a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners or a member of the Supervisory Board found guilty of causing a Company or Public Corporation to be declared bankrupt; or
- c. Were sentenced for committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.

In addition to meeting the requirements referred to in paragraph 2 of this article, the appointment of members of the Board of Directors is carried out based on considerations of expertise, integrity, leadership, honesty, good behavior, and high

memajukan dan mengembangkan Perseroan serta persyaratan lainnya berdasarkan peraturan perundangan.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Direksi di Sepanjang Tahun 2021

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan dan persyaratan Direksi Perusahaan mengacu pada UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Adapun komposisi Direksi per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

dedication to advancing and developing the Company as well as other requirements based on laws and regulations.

Term of Office

The term of office for members of the Board of Directors is 3 (three) years and they may be reappointed for 1 (one) term of office.

Structure, Number, Composition and Basis of Appointment of Members of the Board of Directors in 2021

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. The appointment and requirements of the Company's Board of Directors refers to the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association. The Board of Directors composition as of December 31, 2021 was as follows:

PERIODE PERIOD	NAMA NAME	JABATAN POSITION	DASAR PENGANGKATAN APPOINTMENT BASIS
1 Januari – 15 Maret January 1 – March 15	Narendra Widjajanto	Direktur Utama President Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
	Narendra Widjajanto	PTH Direktur Keuangan Acting Finance Director	Akta No.56 Tanggal 27 Mei 2019 Deed No.56 dated May 27, 2019
	Djoko Koen Soewito	Direktur Pengembangan Development Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
	Mulyono	Direktur Operasi Operation Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
15 Maret – 25 Oktober March 15 – October 25	Feri Yani	Direktur Utama President Director	KPSSS tanggal 15 Maret 2021 yang dinyatakan dalam Akta No.05 Tanggal 7 April 2021 KPSSS dated March 15, 2021 stated in Deed No.05 Dated April 7, 2021
	Djoko Koen Soewito	Direktur Pengembangan Development Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
	Mulyono	Direktur Operasi Operation Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
25 Oktober – 31 Desember October 25 – December 31	Feri Yani	Direktur Utama President Director	KPSSS tanggal 15 Maret 2021 yang dinyatakan dalam Akta No.05 Tanggal 7 April 2021 KPSSS dated March 15, 2021 stated in Deed No.05 Dated April 7, 2021
	Djoko Koen Soewito	Direktur Pengembangan Development Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
	Mulyono	Direktur Operasi Operation Director	Akta Pendirian No.12 Tanggal 7 Mei 2019 Deed of Establishment No.12 Dated May 7, 2019
	Sigit Hanggoro	Direktur Keuangan Finance Director	KPSSS tanggal 25 Oktober 2021 yang dinyatakan dalam Akta No.18 Tanggal 23 November 2021 KPSSS dated October 25, 2021 as stated in Deed No.18 Dated November 23, 2021

Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan

Penilaian kemampuan & kepatuhan Direksi dilakukan oleh Pemegang Saham.

Fit and Proper Test

The Board of Directors fit and proper test is carried out by the Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP

NAMA NAME	JABATAN POSITION	KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN COMPANY SHARE OWNERSHIP
Feri Yani	Direktur Utama President Director	Tidak ada None
Djoko Koen Soewito	Direktur Pengembangan Development Director	Tidak ada None
Mulyono	Direktur Operasi Operations Director	Tidak ada None
Sigit Hanggoro	Direktur Keuangan Finance Director	Tidak ada None

RANGKAP JABATAN DIREKSI

CONCURRENT POSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

NAMA NAME	JABATAN POSITION	RANGKAP JABATAN CONCURRENT POSITIONS
Feri Yani	Direktur Utama President Director	Tidak ada None
Djoko Koen Soewito	Direktur Pengembangan Development Director	Tidak ada None
Mulyono	Direktur Operasi Operations Director	Tidak ada None
Sigit Hanggoro	Direktur Keuangan Finance Director	Tidak ada None

HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS AFFILIATED RELATIONSHIPS

NAMA NAME	JABATAN POSITION	HUBUNGAN AFILIASI DENGAN KOMISARIS AFFILIATED RELATIONSHIPS WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS	HUBUNGAN AFILIASI DENGAN DIREKSI AFFILIATED RELATIONSHIPS WITH THE BOARD OF DIRECTORS
Feri Yani	Direktur Utama President Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Djoko Koen Soewito	Direktur Pengembangan Development Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Mulyono	Direktur Operasi Operations Director	Tidak ada None	Tidak ada None
Sigit Hanggoro	Direktur Keuangan Finance Director	Tidak ada None	Tidak ada None

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Direksi, berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 12 ayat 1, menyatakan bahwa Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Hak dan Wewenang Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 12 ayat 2, hak dan wewenang Direksi sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan Perseroan.
- b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk pembinaan pegawai, penetapan upah dan penghasilan lain, pesangon dan/atau penghargaan atas pengabdian serta manfaat pensiun bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS.
- c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk atau kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri mau bersama-sama atau kepada pihak lain.
- e. Direksi dapat mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan.
- f. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan, kekayaan Perseroan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Duties and responsibilities

The Board of Directors duties, based on the Company's Articles of Association article 12 paragraph 1, state that the Board of Directors is in charge of carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and representing the Company both inside and outside the Court regarding all matters and all events, with the restrictions as stipulated in the laws and regulations, the Articles of Association and/or the resolutions of the GMS.

Board of Directors Rights and Authorities

In accordance with the Company's Articles of Association article 12 paragraph 2, the Board of Directors rights and authorities are as follows:

- a. Establish policies for leading the management of the Company.
- b. Regulate the provisions regarding the Company's employment including employee development, determination of wages and other income, severance pay and/or rewards for service and pension benefits for the Company's employees based on the prevailing laws and regulations and/or the resolutions of the GMS.
- c. Appoint and dismiss the Company's employees based on the employment regulations and applicable laws and regulations.
- d. Regulate the transfer of power of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to one or several members of the Board of Directors who are specifically appointed, or to one or several employees of the Company, either individually or jointly with other parties.
- e. The Board of Directors can appoint and dismiss the Corporate Secretary.
- f. Carry out other actions regarding management and ownership of the Company assets, in accordance with the provisions stipulated in this Articles of Association and determined by the GMS based on the prevailing laws and regulations.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan dan persyaratan Direksi Perusahaan mengacu pada UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Adapun komposisi Direksi per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

NAMA NAME	JABATAN POSITION	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DUTIES AND RESPONSIBILITIES
Feri Yani	Direktur Utama President Director	Memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola, mengembangkan, menumbuhkan usaha Perusahaan sesuai dengan visi, misi, rencana strategis. Has the main responsibility of managing, developing, and growing the Company's business in accordance with the vision, mission, strategic plan.
Djoko Koen Soewito	Direktur Pengembangan Development Director	Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi perusahaan Perusahaan di bidang usaha pengembangan kilang. Carry out all actions related to the management and development of the Company's business functions in the refinery development business field.
Mulyono	Direktur Operasi Operations Director	Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi perusahaan Perusahaan di bidang operasional. Carry out all actions related to the management and development of the Company's business functions in the operational field.
Sigit Hanggoro	Direktur Keuangan Finance Director	Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pembinaan fungsi Perusahaan di bidang keuangan. Carry out all actions related to the management and development of the Company's functions in the financial sector.

Duties and Responsibilities of Each Board of Directors

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. The appointment and requirements of the Company's Board of Directors refer to the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association. The Board of Directors composition as of December 31, 2021 was as follows:

Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru

Dalam tahun 2021 diangkat 2 (dua) orang Direksi baru yaitu Bapak Feri Yani sebagai Direktur Utama dan Bapak Sigit Hanggoro sebagai Direktur Keuangan pada bulan Oktober 2021. Bagi beliau tidak dilaksanakan Sesi Khusus Program Pengenalan dimaksud, namun Program Pengenalan Perusahaan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Rapat Dewan Komisaris – Direksi dan kegiatan *Management Walk Through* (MWT) ke lokasi Proyek.

Company Introduction Program for New Directors

In 2021, 2 (two) new Directors were appointed, namely Feri Yani as President Director and Sigit Hanggoro as Director of Finance in October 2021. A Special Session of the Introduction Program was not held, but the Company's Introduction Program was held in conjunction with the Board of Commissioners – Board of Directors Meeting activities and Management Walk Through (MWT) at the Project site.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pasal 11 ayat 9 jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- Masa jabatannya berakhir.
- Mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pemegang saham dengan tembusan

Mechanism for Resignation and Dismissal of Directors

Based on the Company's Articles of Association article 11 paragraph 9, the position as a member of the Board of Commissioners ends when:

- Their term of office ends.
- They resign by notifying in writing their intention to the shareholders with a copy to the Board of Commissioners and other members of the

kepada Dewan Komisaris dan, anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta atau dengan lewatnya waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal surat pengunduran diri.

- c. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
- d. Meninggal dunia.
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS berdasarkan alasan :
 - 1) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
 - 2) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - 3) Tidak lagi memenuhi persyaratan dan/ atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara.
 - 5) Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - 6) Terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, RUPS berwenang memberhentikan salah satu diantara mereka.
 - 7) Alasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.

Aktivitas Utama Direksi Tahun 2021

Selama tahun 2021, Direksi telah menjalankan tanggungjawabnya atas pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas yang meliputi pengadaaan rapat secara berkala serta pembuatan keputusan penting yang terkait dengan jalannya Perusahaan selama tahun 2021. Adapun informasi terkait hal-hal penting yang menjadi perhatian Direksi di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan struktur organisasi dan upaya Perusahaan dalam memenuhi setiap fungsi yang ada untuk menjalankan bisnis dengan baik. Disertai dengan pemenuhan manpower yang mendukung pengembangan struktur organisasi tersebut sesuai dengan pencapaian progress proyek.

Board of Directors of the Company no later than 30 (thirty) days before the date of his resignation. In the event that the effective date of resignation is not stated, and there is no decision from the GMS, then the member of the Board of Directors automatically resigns on the requested date or after a lapse of 30 (thirty) days from the date of the resignation letter.

- c. They lose their Indonesian citizenship.
- d. They Pass Away.
- e. They are dismissed based on the decision of the GMS for the following reasons:
 - 1) Unable to fulfill its obligations agreed upon in the management contract.
 - 2) Unable to carry out their duties properly.
 - 3) No longer fulfills the requirements and/ or violates the provisions of the Articles of Association and/ or applicable laws and regulations.
 - 4) Has engaged in actions that are detrimental to the Company and/ or the State.
 - 5) Have been found guilty by a court decision that has permanent legal force.
 - 6) The occurrence of conditions referred to in paragraph 4 of this article, the GMS has the authority to dismiss one of them.
 - 7) Other reasons determined by the GMS.

Main Activities of the Board of Directors in 2021

During 2021, the Board of Directors carried out its responsibilities for the management of the Company in accordance with the aims and objectives set out in the Articles of Association of the Company, which were realized through various activities including holding regular meetings and making important decisions related to the running of the Company during 2021. The information related to important matters of concern to the Board of Directors in 2021 included:

1. Development of the organizational structure and the Company's efforts to fulfill all functions in order to run the business properly. Together with the fulfillment of manpower to support the development of the organizational structure in accordance with the achievement of project progress.

2. Pendanaan Proyek, antara lain melalui project financing, *notional pooling*, maupun penyertaan modal Pertamina melalui KPI.
3. Realisasi progres fisik pelaksanaan kontrak Proyek EPC ISBL-OSBL.
4. Penyelesaian novasi kontrak EPC ISBL-OSBL ke JO SHRP (Joint Operation).
5. Persiapan *Black Start-Up* (BSU) dan *Turn Around* (TA) di Tahun 2022.
6. Peningkatan aset yang cukup tinggi akibat penyelesaian instalasi beberapa unit utama yang cukup signifikan.
7. Pembebasan bea masuk impor, *tax holiday*, pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

Organ Pendukung Direksi dan Komite Lainnya

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, Direksi memiliki organ pendukung yaitu Sekretaris Perusahaan. Selain itu, Direksi juga dibantu oleh sejumlah pejabat Perusahaan yang setingkat di bawah Direksi yakni para VP dan *Manager*.

2. Project funding, through project financing, *notional pooling*, and Pertamina's equity participation through KPI.
3. Realization of the physical progress of the ISBL-OSBL.
4. Completion of the novation of the EPC ISBL-OSBL contract to JO SHRP (Joint Operation).
5. Preparation for Black Start-Up (BSU) and Turn Around (TA) in 2022.
6. The significant increase in assets was due to the completed installation of several major units that were quite significant.
7. Exemption of import duty, tax holiday, exemption from collection of Article 22 Import Income Tax.

Supporting Organs of the Board of Directors and Other Committees

In carrying out the Company's operational activities, the Board of Directors' supporting organs include the Corporate Secretary. The Board of Directors is also assisted by a number of Company officials at the same level as the Board of Directors, namely VPs and Managers.



TRANSPARANSI INFORMASI ORGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Transparency of Information on Board of Commissioners and Board of Directors Organs

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan sebagaimana diperlukan. Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya, termasuk dalam hal menghadiri rapat.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan 9 (sembilan) kali rapat gabungan bersama Direksi. Sedangkan Direksi telah melaksanakan 47 (empat puluh tujuh) kali rapat internal dengan mengundang seluruh fungsi. Adapun rincian mengenai Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Board of Commissioners and Board of Directors Meetings

Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors are held as required. The Board of Commissioners and the Board of Directors must make time to carry out their duties, including attending meetings.

During 2021, the Board of Commissioners 9 (nine) joint meetings with the Board of Directors. Meanwhile, the Board of Directors held 47 (forty seven) internal meetings by inviting all functions. Details of the Board of Commissioners and the Board of Directors meetings can be seen in the table below:

RAPAT DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

	TANGGAL DATE	AGENDA	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS		DIREKSI DIRECTORS				
			SUW	SM	NW	FY	DKS	MUL	SH
1	29 Januari 2021 January 29, 2021	<ol style="list-style-type: none"> HSSE Pencapaian Kinerja Tahun 2020 Rencana Kerja Tahun 2021 Status Tindak Lanjut Rekomendasi Audit 	V		V		V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> HSSE Performance Achievements in 2020 2021 Work Plan Status of Follow-up on Audit Recommendations 							
2	25 Februari 2021 February 25, 2021	<ol style="list-style-type: none"> HSSE Update Progress RDMP Balikpapan Laporan Keuangan KPB Tahun 2021 Key Performance indicator (KeyPI) Tahun 2021 	V	V			V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> HSSE Update RDMP Balikpapan Progress KPB Financial Report 2021 Key Performance indicators (KPI) in 2021 							

	TANGGAL DATE	AGENDA	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS		DIREKSI DIRECTORS				
			SUW	SM	NW	FY	DKS	MUL	SH
3	2 Juni 2021 June 2, 2021	<ol style="list-style-type: none"> L3 Schedule RFCC Maintenance & Operation Management System / Process Information System Factory Acceptance Test (FAT) Distributed Control System (DCS) Integrated Control and Safety System (ICSS) di Korea 	V	V		V	V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> L3 Schedule RFCC Maintenance & Operation Management System / Process Information System Factory Acceptance Test (FAT) Distributed Control System (DCS) Integrated Control and Safety System (ICSS) in Korea 							
4	9 Juli 2021 July 9, 2021	<ol style="list-style-type: none"> HSSE Update Progress EPCC Proyek Interest Rate Swap KPB Tahun Keterisian Formasi Organisasi KPB 	V	V		V	V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> HSSE Update Project EPCC Progress Interest Rate Swap KPB Year Filling KPB Organization Formation 							
5	27 Juli 2021 July 27, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Update Realisasi Investasi Cashflow Update Progress RDMP 	V	V		V	V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Investment Realization Update Cashflow Update RDMP Progress 							
6	27 Agustus 2021 August 27, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Notional Pooling Penyertaan Modal dan/atau Project Financing Tahun 2022 Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Keuangan Perubahan Struktur Organisasi 	V	V		V	V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Notional Pooling Equity Participation and/or Project Financing in 2022 Appointment of the Acting Director of Finance Changes in Organizational Structure 							
7	3 September 2021 September 3, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Progress Engineering-Procurement-Construction (EPC) Inside Battery Limit (ISBL) dan Outside Battery Limit (OSBL); Progress EPC Lawe-Lawe; Lanjutan Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022; Lanjutan Pembahasan Penyertaan Modal dan/atau Project Financing Tahun 2022; Lanjutan Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi. 	V	V		V	V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Engineering-Procurement-Construction (EPC) Inside Battery Limit (ISBL) and Outside Battery Limit (OSBL); Lawe-Lawe EPC Progress; Continuation of the discussion on the 2022 Company Budget Work Plan (RKAP); Continuation of discussion on Equity Participation and/or Project Financing in 2022; Continuation of Discussion on Changes in Organizational Structure. 							

	TANGGAL DATE	AGENDA	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS		DIREKSI DIRECTORS				
			SUW	SM	NW	FY	DKS	MUL	SH
8	1 Oktober 2021 October 1, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Perkenalan Anggota Komite Review Implementasi GCG Cash Flow Perusahaan Prognosa Progress Fisik <ol style="list-style-type: none"> Introducing Committee Members Review of GCG Implementation Company Cash Flow Prognosis of Physical Progress 	V	V		V	V	V	
9	27 Desember 2021 December 27, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Progress Update <ol style="list-style-type: none"> Progress Fisik Cash Flow Penyertaan Modal Pertamina (PMP) Project Financing Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP Rencana Workshop GCG Struktur Organisasi <ol style="list-style-type: none"> Progress Updates <ol style="list-style-type: none"> Physical Progress Cash Flow Pertamina Equity Participation (PMP) Project Financing Follow Up on BPKP Recommendations GCG Workshop Plan Organizational Structure 	V	V		V	V	V	V
Total Kehadiran Total Attendance			9	8	1	7	9	9	1

Keterangan:

SUW = Suwahyanto (1 Januari – 19 Januari : sebagai Komisaris ; 19 Januari – 31 Desember : sebagai Komisaris Utama)
 SM = Saifullah Ma'shum (19 Januari – 31 Desember: sebagai Komisaris)
 NW = Narendra Widjajanto (1 Januari – 12 Maret : sebagai Direktur Utama merangkap PTH Direktur Keuangan)
 FY = Feri Yani (12 Maret – 31 Desember: sebagai Direktur Utama)
 DKS = Djoko Koen Soewito (1 Januari – 31 Desember: sebagai Direktur Pengembangan)
 MUL = Mulyono (1 Januari – 31 Desember: sebagai Direktur Operasi)
 SH = Sigit Hanggoro (25 Oktober – 31 Desember: sebagai Direktur Keuangan)

Information:

SUW = Suwahyanto (January , – January 19: as Commissioner; January 19 – December 31: as President Commissioner)
 SM = Saefulloh Mashum (January 19 – December 31: as Commissioner)
 NW = Narendra Widjajanto (January 1 – March 12: as President Director concurrently PTH Finance Director)
 FY = Feri Yani (March 12 – December 31: as President Director)
 DKS = Djoko Koen Soewito (January 1 – December 31: as Development Director)
 MUL = Mulyono (January 1 – December 31: as Operations Director)
 SH = Sigit Hanggoro (October 25 – December 31: as Finance Director)

RAPAT DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS MEETING

	TANGGAL DATE	AGENDA	DIREKSI DIRECTORS				
			NW	FY	DKS	MUL	SH
1	5 Januari 2021 January 5, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Tindak lanjut Internal Audit Tindak lanjut arahan Komisaris Utama KPI : <i>Review 3D, Crane, Shop Erection</i> Pendanaan pinjaman <i>Export Credit Agency</i> (ECA) Pengurusan ijin operasi kilang minyak dan gas Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Penyertaan Modal Upaya dan langkah HSE mitigasi COVID-19 	V		V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Follow-up Internal Audit Follow-up on KPI Komut directives: 3D Review, Crane, Shop Erection Export Credit Agency (ECA) loan financing Management of oil and gas refinery operating permits Investment Activity Report (LKPM) Equity Participation HSE efforts and steps to mitigate COVID-19 					
2	12 Januari 2021 January 12, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 	V		V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					
3	19 Januari 2021 January 19, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 	V		V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					
4	26 Januari 2021 January 26, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 	V		V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					
5	2 Februari 2021 February 2, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 	V		V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					
6	5 Februari 2021 February 5, 2021	GCG	V		V	V	
7	9 Februari 2021 February 9, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 	V		V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					
8	16 Februari 2021 February 16, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 	V		V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					
9	23 Februari 2021 February 23, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 	V		V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					

	TANGGAL DATE	AGENDA	DIREKSI DIRECTORS				
			NW	FY	DKS	MUL	SH
10	2 Maret 2021 March 2, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors	V		V	V	
11	9 Maret 2021 March 9, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors	V		V	V	
12	26 Maret 2021 March 26, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
13	30 Maret 2021 March 30, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
14	6 April 2021 April 6, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
15	14 April 2021 April 14, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
16	21 April 2021 April 21, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
17	27 April 2021 April 27, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
18	4 Mei 2021 May 4, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
19	11 Mei 2021 May 11, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
20	18 Mei 2021 May 18, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	X)	
21	8 Juni 2021 June 8, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	

	TANGGAL DATE	AGENDA	DIREKSI DIRECTORS				
			NW	FY	DKS	MUL	SH
22	15 Juni 2021 June 15, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
23	22 Juni 2021 June 22, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
24	29 Juni 2021 June 29, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	X **)	V	
25	6 Juli 2021 July 6, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
26	13 Juli 2021 July 13, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
27	21 Juli 2021 July 21, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 3. <i>Schedule Supervisi/Quality Control Workshop & Pipa 52" Manufacture</i> 4. Change Order (CO) Status 5. Bipartit Amandemen Status 6. L3 Reforecast Status All Area 7. <i>Quality Assurance Quality Control (QAQC) Pipa 52 inch</i> 8. Rekomendasi Perindustrian, Stat. Lampiran 9. Status Barang Tiba 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors 3. Schedule Supervision/Quality Control Workshop & 52" Pipe Manufacturing 4. Change Order (CO) Status 5. Bipartite Status Amendment 6. L3 Reforecast Status All Area 7. Quality Assurance Quality Control (QAQC) 52 inch pipe 8. Industry Recommendations, Stat. Attachment 9. Item Arrived Status		V	V	V	
28	27 Juli 2021 July 27, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 3. Materi BoC BoD Meeting KPB 4. Supervisi Workshop incl KP dan DSAW, BSU sd RFCC 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors 3. Materials for the BoC BoD Meeting of KPB 4. Supervision of workshops including KP and DSAW, BSU to RFCC		V	V	V	

	TANGGAL DATE	AGENDA	DIREKSI DIRECTORS				
			NW	FY	DKS	MUL	SH
29	3 Agustus 2021 August 3, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
30	10 Agustus 2021 August 10, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	
31	18 Agustus 2021 August 18, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 3. <i>Dashboard productivity & resource</i> 4. Progress Lawe-Lawe 5. Klarifikasi Tanah Terkontaminasi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors 3. Productivity & resource dashboards 4. Progress Lawe-Lawe 5. Clarification of Contaminated Soil		V	V	V	
32	26 Agustus 2021 August 26, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 3. <i>Dashboard Manpower Supervisi/QAQC Workshop</i> 4. Klarifikasi <i>Sample Lab Test Soil</i> 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors 3. Dashboard of Manpower Supervision/QAQC Workshop 4. Clarification of Lab Test Soil Samples		V	V	V	
33	1 September 2021 September 1, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 3. <i>Dashboard Manpower Supervisi/QAQC Workshop</i> 4. Status <i>Soil Disposal</i> 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors 3. Dashboard of Manpower Supervision/QAQC Workshop 4. Soil Disposal Status		V	V	V	
34	8 September 2021 September 8, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 3. Status <i>Soil Disposal</i> 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors 3. Soil Disposal Status		V	V	V	
35	15 September 2021 September 15, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 3. Status CO 4. <i>Manpower PMC</i> 5. <i>BSU Sequence</i> 6. <i>Readiness Infrastruktur</i> 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors 3. CO . Status 4. Manpower PMC 5. BSU Sequence 6. Infrastructure Readiness		V	V	V	

	TANGGAL DATE	AGENDA	DIREKSI DIRECTORS				
			NW	FY	DKS	MUL	SH
36	22 September 2021 September 22, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing fungsi, Hal hal yang memerlukan dukungan Direksi Status CO, Amandmend tripartit, Amandmend novasi <i>realign milestone</i>. 		V	V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Progress reports of each function, Matters that require the support of the Board of Directors CO status, The tripartite amendment, Amendment of <i>realign milestone</i> novation. 					
37	7 Oktober 2021 October 7, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 		V	V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					
38	13 Oktober 2021 October 13, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 		V	V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					
39	22 Oktober 2021 October 22, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 		V	V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					
40	27 Oktober 2021 October 27, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing fungsi, Hal hal yang memerlukan dukungan Direksi Dashboard komitmen OSBL Data <i>kelendering piling</i> yang pecah 		V	V	V	
		<ol style="list-style-type: none"> Progress reports of each function, Matters that require the support of the Board of Directors OSBL commitment dashboard Broken <i>piling</i> calendar data 					
41	3 November 2021 November 3, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 		V	V	V	V
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					
42	10 November 2021 November 10, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 		V	V	V	V
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					
43	26 November 2021 November 26, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 		V	V	V	V
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					
44	8 Desember 2021 December 8, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 		V	V	V	V
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					
45	15 Desember 2021 December 15, 2021	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Progress masing-masing Fungsi Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 		V	V	V	V
		<ol style="list-style-type: none"> Progress Report of each Function Matters that require the support of the Board of Directors 					

	TANGGAL DATE	AGENDA	DIREKSI DIRECTORS				
			NW	FY	DKS	MUL	SH
46	22 Desember 2021 December 22, 2021	1. Laporan Progress masing-masing Fungsi 2. Hal-hal yang memerlukan dukungan Direksi 1. Progress Report of each Function 2. Matters that require the support of the Board of Directors		V	V	V	V
47	29 Desember 2021 December 29, 2021	1. Laporan Progress masing-masing fungsi, 2. Hal hal yang memerlukan dukungan Direksi 3. Proyeksi Progress 2021 & Penyebab Tidak Tercapainya 1. Progress reports of each function, 2. Matters that require the support of the Board of Directors 3. Projected Progress 2021 & Causes of Not Achieving		V	V	V	V
Total Kehadiran Total Attendance			1	7	9	9	1

Keterangan:

- NW = Narendra Widjajanto (1 Januari – 12 Maret : sebagai Direktur Utama merangkap PTH Direktur Keuangan)
 FY = Feri Yani (12 Maret – 31 Desember: sebagai Direktur Utama)
 DKS = Djoko Koen Soewito (1 Januari – 31 Desember: sebagai Direktur Pengembangan)
 MUL = Mulyono (1 Januari – 31 Desember: sebagai Direktur Operasi)
 SH = Sigit Hanggoro (25 Oktober – 31 Desember: sebagai Direktur Keuangan)
 *) = Tidak Hadir Karena dalam Penerbangan menuju Balikpapan
 **) = Tidak Hadir Karena sedang Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Cilegon

Information:

- NW = Narendra Widjajanto (January 1 – March 12: as President Director concurrently PTH Finance Director)
 FY = Feri Yani (March 12 – December 31: as President Director)
 DKS = Djoko Koen Soewito (January 1 – December 31: as Development Director)
 MUL = Mulyono (January 1 – December 31: as Operations Director)
 SH = Sigit Hanggoro (October 25 – December 31: as Finance Director)
 *) = Not Present Due to Flight to Balikpapan
 **) = Not Present Due to a Working Visit to Cilegon

Independensi dan Afiliasi

Sebelum mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi terpilih, Perusahaan telah memastikan bahwa setiap anggota terbebas dari benturan kepentingan saat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terkait dengan Dewan Komisaris, Perusahaan memang belum mengangkat Komisaris Independen.

Namun, KPB bukan merupakan perusahaan terbuka yang memperdagangkan sahamnya kepada publik sehingga tidak terdapat kewajiban untuk mengangkat Komisaris Independen.

Independence and Affiliations

Prior to appointing the elected members of the Board of Commissioners and Board of Directors, the Company ensures that all members are free from conflicts of interest when carrying out their duties and responsibilities. Regarding the Board of Commissioners, the Company has not appointed an Independent Commissioner.

However, KPB is not a public company that trades its shares to the public so there is no obligation to appoint an Independent Commissioner.

INFORMASI HUBUNGAN AFILIASI DAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
INFORMATION ON AFFILIATED RELATIONSHIPS AND CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
AND THE BOARD OF DIRECTORS

NAMA NAME	JABATAN POSITION	HUBUNGAN KELUARGA DENGAN ORGAN PERUSAHAAN FAMILIAL RELATIONSHIPS WITH COMPANY ORGANS			HUBUNGAN KEPENGURUSAN DI PERUSAHAAN LAIN MANAGEMENT RELATIONSHIPS WITH OTHER COMPANIES		
		DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS
Suwahyanto	Komisaris (Periode 1 – 19 Januari 2021) Komisaris Utama (Periode 19 Januari – 31 Desember 2021) Commissioner (Period 1 – 19 January 2021) President Commissioner (Period January 19 – December 31, 2021)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Ya *) Yes *)	Tidak No
Saifullah Ma'shum	Komisaris (Periode 19 Januari – 31 Desember 2021) Commissioner (Period January 19 – December 31, 2021)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Feri Yani	Direktur Utama (Periode 15 Maret – 31 Desember 2021) President Director concurrently PTH Finance Director (Period January 1 – March 12, 2021)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Djoko Koen Soewito	Direktur Pengembangan Development Director	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Mulyono	Direktur Operasi Operations Director	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No
Sigit Hanggoro	Direktur Keuangan (Periode 25 Oktober – 31 Desember 2021) Finance Director (Period October 25 – December 31, 2021)	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No	Tidak No

*) Suwahyanto memiliki rangkap jabatan sebagai Direktur Proyek Infrastruktur di KPI

*) Suwahyanto has concurrent positions as Director of Infrastructure Projects at KPI

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan menyadari pentingnya keberagaman latar belakang Dewan Komisaris dan Direksi dalam memberikan pandangan yang luas dalam menyusun langkah-langkah strategis bagi Perusahaan. Hingga akhir tahun 2021, Perusahaan belum memiliki kebijakan khusus yang mengatur keberagaman anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan untuk mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan merupakan hak Pemegang Saham sepenuhnya melalui RUPS.

Namun demikian, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dibuat sedemikian rupa agar proses pengambilan keputusan dapat diperkaya melalui berbagai sudut pandang dan latar belakang serta pengalaman dan keahlian.

Diversity in the Board of Commissioners and the Board of Directors Composition

The Company understands the importance of the diversity of backgrounds of the Board of Commissioners and Board of Directors so as to provide a broad view in formulating strategic steps for the Company. Until the end of 2021, the Company does not have a specific policy that regulates the diversity of members of the Board of Commissioners and Board of Directors. The authority to appoint the Company's Board of Commissioners and Directors is the full right of the Shareholders through the GMS.

However, the Board of Commissioners and the Board of Directors composition is structures in such a way that the decision-making process can be enriched through various perspectives and backgrounds as well as experience and expertise.

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY

NAMA NAME	JABATAN POSITION	JENIS KELAMIN GENDER	USIA AGE	PENDIDIKAN TERAKHIR FINAL EDUCATION	KEAHLIAN EXPERTISE
Suwahyanto	Komisaris Utama President Commissioner	Laki-laki Male	56	S1 Bachelor's degree	Teknik, Manajemen Proyek Engineering, Project Management
Saefullah Mashum	Komisaris Commissioner	Laki-laki Male	61	S3 Doctorate	Otonomi & Pembangunan Lokal, Kesejahteraan Sosial Autonomy & Local Development, Social Welfare
Feri Yani	Direktur Utama President director	Laki-laki Male	55	S1 Bachelor's degree	Teknik, Manajemen Proyek Engineering, Project Management
Djoko Koen Soewito	Direktur Pengembangan Development Director	Laki-laki Male	57	S1 Bachelor's degree	Teknik, Manajemen Proyek Engineering, Project Management
Mulyono	Direktur Operasi Operations Director	Laki-laki Male	56	S1 Bachelor's degree	Teknik, Manajemen Proyek Engineering, Project Management
Sigit Hanggoro	Direktur Keuangan Finance Director	Laki-laki Male	56	S1 Bachelor's degree	Keuangan Finance

Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi

Perusahaan mendukung kebijakan terkait pelatihan dan peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dan Direksi (secara kolegal) dilakukan dengan mengacu kepada target *Key Performance Indicator (KeyPI)*. Penilaian kinerja baik secara kolegal maupun individual dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemegang Saham.

Kebijakan Nominasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan dan prosedur Nominasi sepenuhnya merupakan kewenangan dan sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemegang Saham.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui mekanisme keputusan RUPS berdasarkan Akta No. 29 tanggal 19 Desember 2019.

Training and Competency Development

The Company supports policies related to training and competency development of the Board of Commissioners and Board of Directors with the aim of increasing their insight and knowledge to support the implementation of their duties and responsibilities. A list of training and competency development activities for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021 can be found in the Company Profile chapter in this annual report.

Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assessment

The Board of Commissioners and Board of Directors (collegial) performance Assessment is carried out with reference to the Key Performance Indicator (KPI) targets. Performance appraisals, both collegial and individual, are carried out by the Shareholders.

Nomination Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Nomination policies and procedures are fully authorized and fully implemented by the Shareholders.

Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Procedure for Determining the Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Determination of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined through the GMS decision mechanism based on Deed No. 29 dated December 19, 2019.

Indikator Kinerja

Sebagai bagian dari Grup Pertamina, dalam menentukan besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, KPB mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN No.Per-04/Mbu/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Beberapa pertimbangan yang digunakan sebagai berikut:

1. Perbandingan dengan besaran remunerasi tahun sebelumnya.
2. Kenaikan kompleksitas operasional Perusahaan.
3. Perbandingan besaran remunerasi dengan perusahaan sejenis.

Komponen Remunerasi

Berdasarkan Akta No. 29 Tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Gaji Direksi dan Dewan Komisaris, ditetapkan komponen-komponen remunerasi sebagai berikut:

1. Gaji/Honorarium;
2. Tunjangan Perumahan (termasuk biaya utilitas);
3. Tunjangan Transportasi;
4. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK);
5. Asuransi Purna Jabatan;
6. Pajak ditanggung Perusahaan.

Penilaian Kinerja Organ Pendukung dan/atau Komite

Penilaian atas kinerja organ pendukung Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris. Secara umum, Dewan Komisaris memandang bahwa semua Komite telah menjalankan tugasnya masing-masing dengan efisien berdasarkan prinsip GCG dan tujuan Perusahaan. Sedangkan pada organ pendukung Direksi, yakni Sekretaris Perusahaan beserta pejabat Perusahaan yang setingkat di bawah Direksi, sepanjang tahun 2021, Direksi menilai bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ pendukung Direksi telah dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip GCG dan tujuan Perusahaan.

Performance Indicators

As part of the Pertamina Group, in determining the Remuneration for the Board of Commissioners and Directors, KPB refers to the Minister of SOEs Regulation No.PER-13/MBU/09/2021 dated September 24, 2021 as the Sixth Amendment to the Minister of SOEs Regulation No.Per-04/ Mbu/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of SOEs. The considerations include:

1. Comparison with the previous year's remuneration.
2. Increase in the complexity of the Company's operations.
3. Comparison of the amount of remuneration with similar companies.

Remuneration Components

Based on Deed No. 29 dated December 19, 2019 concerning the Determination of Salaries for the Board of Directors and the Board of Commissioners, the remuneration components are as follows:

1. Salary/Honorarium;
2. Housing Allowance (including utility costs);
3. Transportation allowance;
4. Religious Holiday Allowance (THRK);
5. Post-Service Insurance;
6. Taxes borne by the Company.

Performance Assessment of Supporting Organs and/or Committees

Performance Assessments of the Board of Commissioners supporting organs is carried out by the Board of Commissioners. Overall, the Board of Commissioners view is that all Committees have performed their respective duties efficiently based on GCG principles and the Company's objectives. Meanwhile, for the supporting organs of the Board of Directors, namely the Corporate Secretary and company officials who are at the same level as the Board of Directors, for 2021, the Board of Directors view is that the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors supporting organs has been carried out properly in accordance with the principles of GCG and objectives of the Company.

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Supporting Organs of The Board of Commissioners

Komite Audit

Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komite Audit dibentuk sebagai komitmen Perusahaan dalam mengimplementasikan GCG.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya yang termuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris KPB No.Kpts-001/DK-KPB/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Piagam Komite Audit di lingkungan Dewan Komisaris KPB.

Kriteria Anggota Komite Audit

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, menguasai keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya serta menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai bisnis Perseroan, keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan, proses audit dan manajemen risiko serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memiliki komitmen bekerja sungguh-sungguh dan menyediakan waktu dan tenaga untuk pelaksanaan tugasnya.
4. Bukan pejabat aktif Perseroan dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Pengurus Perseroan.
5. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perseroan.
6. Memberikan pernyataan tertulis untuk bekerja sesuai asas-asas GCG dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota Komite Audit.

Audit Committee

To support its supervisory function, the Board of Commissioners established an Audit Committee in accordance with the prevailing laws and regulations. The Audit Committee was formed as the Company's commitment to implementing GCG.

Audit Committee Charter

The Audit Committee has guidelines as a reference in carrying out its duties contained in the KPB Board of Commissioners Decree No.Kpts-001/DK-KPB/2021 dated August 9, 2021 concerning the Establishment and Stipulation of the Audit Committee Charter within the Board of Commissioners of KPB.

Criteria for Audit Committee Members

1. Have high integrity and dedication, the skills, knowledge and experience needed to carry out their duties and maintain the confidentiality of Company information.
2. Have adequate knowledge and understanding of the Company's business, finances, accounting and financial reporting, audit and risk management processes as well as the provisions of laws and regulations relating to the Company's activities.
3. Have a commitment to work seriously and provide time and energy to carry out their duties.
4. Is not an active official of the Company and has no blood or marriage relationships up to the second degree either in a straight line or a side line with the Management of the Company.
5. Does not have any personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company.
6. Has provided a written statement to work in accordance with GCG principles in carrying out their duties as a member of the Audit Committee.

Ketentuan Masa Jabatan

1. Masa tugas Anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Audit, sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai Anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Masa tugas Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Audit

Selama tahun 2021, susunan keanggotaan Komite Audit mengalami perubahan yang dapat disampaikan sebagai berikut.

Terms of Office

1. The term of office of a member of the Board of Commissioners who concurrently serves as a member of the Audit Committee is the same as the term of office for their appointment as a member of the Board of Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders.
2. The term of office for members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Structure, Number, Composition and Basis of Appointment of the Audit Committee

During 2021, the Audit Committee membership composition underwent changes which can be seen as follows.

NAMA NAME	JABATAN POSITION	PERIODE JABATAN TERM OF OFFICE	DASAR PENGANGKATAN BASIS OF APPOINTMENT
Saifullah Ma'shum	Ketua Chairman	25 Agustus – 31 Desember 2021 August 25 – December 31, 2021	Ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris No.Kpts-009/DK-KPB/2021 tanggal 25 Agustus 2021 Stipulated through Board of Commissioners Decree No. Kpts-009/DK-KPB/2021 dated August 25, 2021
Nahdiyani Hasbi	Anggota Member	25 Agustus – 31 Desember 2021 August 25 – December 31, 2021	Diangkat melalui SK Dewan Komisaris No.Kpts-006/DK-DKPB/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Appointed through Board of Commissioners Decree No. Kpts-006/DK-DKPB/2021 dated August 23, 2021
Syarief Hamdoen	Anggota Member	25 Agustus – 8 November 2021 August 25 – November 8, 2021	Diangkat melalui SK Dewan Komisaris No.Kpts-006/DK-DKPB/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Appointed through Board of Commissioners Decree No. Kpts-009/DK-DKPB/2021 dated August 25, 2021
M. Jasman Panjaitan	Anggota Member	8 November – 31 Desember 2021 November 8 – December, 2021	Diangkat melalui SK Dewan Komisaris No.Kpts-013/DK-DKPB/2021 tanggal 8 November 2021 Appointed through Board of Commissioners Decree No. Kpts-013/DK-DKPB/2021 dated November 8, 2021

Profil Anggota Komite Audit

Audit Committee Member Profiles

SAIFULLAH MA'SHUM

Ketua Komite Audit

Chairman of the Audit Committee

Profil Ketua Komite Audit Saifullah Ma'shum dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Chairman of the Audit Committee Saefulloh Mashum can be seen in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter in this Annual Report.

NAHDIYANI HASBI

Anggota Komite Audit

Audit Committee Member

Menjabat sejak 23 Agustus 2021, Periode jabatan ke-1
Served since August 23, 2021, 1st term of office



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place and date of birth	Usia 42 tahun, Kelahiran: Malang, 15 Juli 1979 42 years old, Birth: Malang, July 15, 1979
Domisili Domicile	Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
Riwayat Pendidikan Educational background	S2-Magister Business Administration – Institut Teknologi Bandung (2016) Master of Business Administration – Institut Teknologi Bandung (2016)
Pengalaman Kerja Work experience	<ul style="list-style-type: none"> • Chief Audit Executive PT Pertamina Hulu Rokan (2021 – sekarang) • Manager Financial Audit & Reporting PT Pertamina Hulu Energi (2020-2021) • Manager Internal Audit JBB PT Pertamina (Persero) (2019-2020) • Manager Internal Audit Kalimantan PT Pertamina (Persero) (2016-2019) • Chief Audit Executive at PT Pertamina Hulu Rokan (2021 – present) • Manager of Financial Audit & Reporting at PT Pertamina Hulu Energi (2020-2021) • Manager of Internal Audit JBB at PT Pertamina (Persero) (2019-2020) • Internal Audit Manager at PT Pertamina (Persero) Kalimantan (2016-2019)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Chief Audit Executive PT Pertamina Hulu Rokan (2021 – sekarang) Chief Audit Executive of PT Pertamina Hulu Rokan (2021 – present)

SYARIEF HAMDOEN

Anggota Komite Audit

Audit Committee Member

Menjabat sejak 23 Agustus – 8 November 2021, Periode jabatan ke-1
(Sejak 8 November 2021, dialihugaskan menjadi Anggota Komite Investasi)
Served from August 23 – November 8, 2021, 1st term of office
(Since November 8, 2021, reassigned to become a Member of the Investment Committee)



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place and date of birth	Usia 59 tahun, Kelahiran: Surabaya, 3 Mei 1962 Age 59 years, Birth: Surabaya, May 3, 1962
Domisili Domicile	Surabaya, Jawa Timur Surabaya, East Java
Riwayat Pendidikan Educational background	S2-Teknik Kimia – Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1989) Master's degree in Chemical Engineering – Institut Teknologi Surabaya (1989)
Pengalaman Kerja Work experience	<ul style="list-style-type: none"> • Manager Internal Audit JBT&Jatimbalinus (2015 – 2018) • Manager Refinery Internal Audit RU V&VII (2014-2015) • Assistant Manager Support & Evaluation (2012-2014) • Internal Audit Manager at JBT&Jatimbalinus (2015 – 2018) • Manager Refinery Internal Audit at RU V&VII (2014-2015) • Assistant Manager Support & Evaluation (2012-2014)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-

M. JASMAN PANJAITAN

Anggota Komite Audit

Audit Committee Member

Menjabat sejak 8 November 2021, Periode jabatan ke-1

Served since November 8, 2021, 1st term of office



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place and date of birth	Usia 65 tahun, Kelahiran: Pintu Batu, 6 September 1956 65 years old, Birth: Stone Door, September 6, 1956
Domisili Domicile	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational background	S3-Doktoral Hukum – Universitas Padjajaran (2014) Doctorate in Law – Universitas Padjajaran (2014)
Pengalaman Kerja Work experience	<ul style="list-style-type: none"> • Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI (Plt.) (2014 – 2016) • Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI (2013-2014) • Inspektur III Pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI (2013) • Deputy Attorney General for Supervision at the Indonesian Attorney General's Office (Plt.) (2014 – 2016) • Secretary to the Deputy Attorney General for Supervision at the Indonesian Attorney General's Office (2013-2014) • Inspector III for the Supervision at the Indonesian Attorney General's Office (2013)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-

Pernyataan independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit tidak ada yang memiliki jabatan rangkap di KPB.

Audit Committee independence statement

None of the members of the Audit Committee have concurrent positions in KPB.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Utama:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi.
3. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal.
4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
5. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan, terutama yang terkait dengan Laporan Keuangan Perseroan.
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lainnya dari Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities

Main Duties:

1. Assists the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditors' duties.
2. Assists the Board of Commissioners in researching and reviewing periodic reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors.
3. Assesses the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors.
4. Provides recommendations for improvements to the management control system and its implementation.
5. Ensures there is a satisfactory evaluation procedure for all information issued by the Company, especially those related to the Company's Financial Statements.
6. Identifies matters requiring the attention of the Board of Commissioners as well as other duties of the Board of Commissioners.

Tanggung Jawab/Kewenangan:

1. Komite Audit, atas perintah/ijin/mewakili Dewan Komisaris, berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas atas informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas, Komite Audit dapat bekerja sama dengan fungsi manajemen Perseroan yang terkait dengan bidang tugas Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat menggunakan tenaga ahli atau konsultan dari luar Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh Perseroan.

Rapat Komite Audit

1. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit melakukan rapat reguler yang diadakan sekurang kurangnya sekali setiap 1 (satu) bulan. Setiap rapat harus dibuatkan risalahnya secara tertulis.
2. Rapat Komite adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite.
3. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite atau salah satu anggota Komite yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Komite.

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah beberapa kali melaksanakan rapat internal komite dan ikut serta menghadiri rapat Dewan Komisaris.

Pelatihan dan Pengembangan

Di tahun 2021, Komite Audit belum melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Kebijakan dan Besaran Remunerasi bagi Komite Audit

Penetapan honorarium bagi Anggota Komite bukan berasal dari Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012, yaitu untuk Anggota Komite bukan berasal dari Dewan Komisaris ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari Gaji Direktur Utama, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Responsibilities/Authorities:

1. The Audit Committee, for orders/permissions/representing the Board of Commissioners, is authorized to have full, free and unrestricted access to information related to the execution of its duties.
2. In exercising the authority as mentioned above, the Audit Committee may cooperate with the Company's management functions related to the duties of the Audit Committee.
3. If necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the Audit Committee may use experts or consultants from outside the Company to assist in carrying out its duties, which is financed by the Company.

Audit Committee Meetings

1. In carrying out their duties, the Audit Committee holds regular meetings at least once every 1 (one) month. Minutes of each meeting must be made in writing.
2. Committee meetings are valid and have the right to make binding decisions if attended by more than 1/2 (one half) of the total members of the Committee.
3. Committee meetings are chaired by the Committee Chair or one of the Committee members appointed in writing by the Committee Chair.

Throughout 2021, the Audit Committee held internal committee meetings and participated in the Board of Commissioners meetings.

Training and Development

In 2021, the Audit Committee did not carried out any training and competency development.

Remuneration Policy and Amount for the Audit Committee

Determination of honorarium for non-Board of Commissioners committee members is based on the provisions contained in the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012, concerning Committee Members who are not from the Board of Commissioners, a maximum of 20% (twenty percent) of the President Director's Salary is set, provided the taxes are borne by the Company, and they are not allowed to receive other income other than the honorarium.

Ringkasan Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah menyelenggarakan aktivitas kegiatan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang diwujudkan dengan mengikuti rapat Dewan Komisaris, membuat *review*/kajian sesuai permintaan Dewan Komisaris, dan mengadakan peninjauan proyek melalui kegiatan Kunjungan Kerja.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Dalam tahun 2021, Perusahaan belum menetapkan secara khusus mengenai Tata Cara Penilaian Kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, namun telah dicantumkan dalam Piagam masing-masing Komite bahwa Ketua Komite dan/atau Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja dari setiap anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Referensi: Surat Keputusan Dewan Komisaris KPB No.Kpts-001/DK-KPB/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Piagam Komite Audit di lingkungan Dewan Komisaris KPB.

Komite Investasi

Dewan Komisaris Perusahaan telah membentuk Komite Investasi untuk membantu Perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan Perusahaan. Pembentukan Komite Investasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perusahaan untuk melaksanakan prinsip GCG.

Piagam Komite Investasi

Komite Investasi memiliki pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya yang termuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris KPB No.Kpts-002/DK-KPB/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Piagam Komite Investasi di lingkungan Dewan Komisaris KPB.

Kriteria Anggota Komite Investasi

1. Memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi, menguasai keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya serta menjaga kerahasiaan informasi Perseroan.
2. Memiliki komitmen bekerja sungguh-sungguh dan menyediakan waktu dan tenaga untuk pelaksanaan tugasnya.

Summary of Audit Committee Work Implementation in 2021

Throughout 2021, the Audit Committee organized activities to assist in the implementation of the Board of Commissioners duties, which were realized by attending Board of Commissioners meetings, making reviews/studies according to the requests of the Board of Commissioners, and conducting project reviews through Working Visits.

Audit Committee Performance Assessment

In 2021, the Company had not specifically determined a Procedure for Performance Assessment of the Committees under the Board of Commissioners, but it has been stated in the Charter of each Committee that the Chairman of the Committee and/or the Board of Commissioners evaluates the performance of each member of the Committee who is not a member of the Committee, in accordance with the applicable regulations. Reference: KPB Board of Commissioners Decree No. Kpts-001/DK-KPB/2021 dated August 9, 2021 concerning the Establishment and Stipulation of the Audit Committee Charter within the KPB Board of Commissioners.

Investment Committee

The Company's Board of Commissioners has established an Investment Committee to assist the Company in carrying out its supervisory duties and responsibilities of the Company. The Investment Committee is an integral part of the Company's efforts to implement GCG principles.

Investment Committee Charter

The Investment Committee has guidelines as a reference in carrying out its duties which are contained in the KPB Board of Commissioners Decree No. Kpts-002/DK-KPB/2021 dated August 23, 2021 concerning the Establishment and Stipulation of the Investment Committee Charter within the KPB Board of Commissioners.

Investment Committee Member Criteria

1. Have high integrity and dedication, the skills, knowledge and experience needed to carry out their duties, and maintain the confidentiality of Company information.
2. Have a commitment to work seriously and provide time and energy to carry out their duties.

3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan internal Anggota Komite, antara Anggota Komite, Dewan Komisaris, serta dengan fungsi-fungsi manajemen terkait.
4. Bukan pejabat aktif Perseroan dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan Pengurus Perseroan.
5. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Perseroan.
6. Memberikan pernyataan tertulis untuk bekerja sesuai asas-asas GCG dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota Komite Investasi.

Ketentuan Masa Jabatan

1. Masa tugas Anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Investasi, sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai Anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Masa tugas Anggota Komite Investasi yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Investasi

Selama tahun 2021, susunan keanggotaan Komite Investasi mengalami perubahan yang dapat disampaikan sebagai berikut.

NAMA NAME	JABATAN POSITION	PERIODE JABATAN TERM OF OFFICE	DASAR PENGANGKATAN BASIS OF APPOINTMENT
Suwahyanto	Ketua Chairman	24 Agustus – 31 Desember 2021 August 24 – December 31, 2021	Ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris No.Kpts-008/DK-KPB/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Stipulated through the Board of Commissioners Decree No. Kpts-008/DK-KPB/2021 dated August 24, 2021
Saifullah Ma'shum	Wakil Ketua Vice Chairman	24 Agustus – 31 Desember 2021 August 24 – December 31, 2021	Ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris No.Kpts-008/DK-DKPB/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Appointed through the Board of Commissioners Decree No.Kpts-008/DK-DKPB/2021 dated August 24, 2021
Supriadi Sinaga	Anggota Member	24 Agustus – 31 Desember 2021 August 24 – December 31, 2021	Diangkat melalui SK Dewan Komisaris No.Kpts-007/DK-DKPB/2021 tanggal 23 Agustus 2021 Appointed through the Board of Commissioners Decree No.Kpts-007/DK-DKPB/2021 dated August 23, 2021
Syarief Hamdoen	Anggota Member	24 Agustus – 31 Desember 2021 August 24 – December 31, 2021	Diangkat melalui SK Dewan Komisaris No.Kpts-010/DK-DKPB/2021 tanggal 8 November 2021 Appointed through the Board of Commissioners Decree No.Kpts-010/DK-DKPB/2021 dated November 8, 2021

3. Ability to communicate verbally and in writing with internal Committee Members, between Committee Members, the Board of Commissioners, as well as with related management functions.
4. Is not an active official in the Company and has no blood or marriage relationship up to the second degree either in a straight line or a side line with the Management of the Company.
5. Does not have any personal interests/relationships that can have a negative impact and conflict of interest on the Company.
6. Has provided a written statement to work in accordance with GCG principles when carrying out their duties as a member of the Investment Committee.

Terms of Office

1. The term of office of a member of the Board of Commissioners who concurrently serves as a member of the Investment Committee is the same as their term of office as a member of the Board of Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders.
2. The term of office for members of the Investment Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Structure, Number, Composition and Basis of Appointment of the Investment Committee

During 2021, the Investment Committee membership composition changed as follows.

Profil Anggota Komite Investasi

Investment Committee Member Profiles

SUWAHYANTO

Komisaris/Ketua Komite Investasi

Commissioner/Chairman of Investment Committee

Profil Ketua Komite Audit Suwahyanto dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of the Chairman of the Audit Committee Suwahyanto can be seen in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter in this Annual Report.

SAIFULLAH MA'SHUM

Anggota Komite Investasi

Investment Committee Member

Profil Anggota Komite Investasi Saifullah Ma'shum dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The Profile of the Investment Committee Member Saifulloh Mashum can be seen in the profile section of the Board of Commissioners in the Company Profile chapter in this Annual Report.

SUPRIADI SINAGA

Anggota Komite Investasi

Investment Committee Member

Menjabat sejak 23 Agustus 2021, Periode jabatan ke-1

Served since August 23, 2021, 1st term of office



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place and date of birth	Usia 48 tahun, Kelahiran: Medan, 4 September 1973 48 years old, Birth: Medan, September 4, 1973
Domisili Domicile	Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
Riwayat Pendidikan Educational background	S2- International Development Program (IDP) pada International University of Japan (IUJ), Japan Master's degree in International Development Program (IDP) from the International University of Japan (IUJ), Japan
Pengalaman Kerja Work experience	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Subdirektorat Penerimaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Anggaran (2012 – sekarang) • Tenaga Ahli Komisi Pengawas SKK Migas (2020 – sekarang) • Kepala Subdirektorat Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas, Direktorat Jenderal Anggaran (Persero) (2011–2012) • Head of Sub-directorate of Oil and Gas Natural Resources Revenue, Directorate General of Budget (2012 – present) • SKK Migas Supervisory Commission Expert (2020 – present) • Head of Sub-directorate of Geothermal and Downstream Oil and Gas Revenue, Directorate General of Budget (Persero) (2011–2012)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-

SYARIEF HAMDOEN

Anggota Komite Investasi

Investment Committee Member

Menjabat sejak 8 November 2021, Periode jabatan ke-1

Served since November 8, 2021, 1st term of office



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place and date of birth	Usia 59 tahun, Kelahiran : Surabaya, 3 Mei 1962 Age 59 years, Birth : Surabaya, May 3, 1962
Domisili Domicile	Surabaya, Jawa Timur Surabaya, East Java
Riwayat Pendidikan Educational background	S2-Teknik Kimia – Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1989) Master's degree in Chemical Engineering – Institut Teknologi Surabaya (1989)
Pengalaman Kerja Work experience	<ul style="list-style-type: none"> • Manager Internal Audit JBT&Jatimbalinus (2015 – 2018) • Manager Refinery Internal Audit RU V&VII (2014-2015) • Assistant Manager Support & Evaluation (2012-2014) • Internal Audit Manager JBT&Jatimbalinus (2015 – 2018) • Manager Refinery Internal Audit RU V&VII (2014-2015) • Assistant Manager Support & Evaluation (2012-2014)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-

Pernyataan Independensi Komite Investasi

Seluruh anggota Komite Investasi tidak ada yang memiliki jabatan rangkap di KPB.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Utama :

1. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian investasi Perseroan.
2. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan investasi Perseroan dan terhadap tingkat risiko yang terukur dan selaras dengan strategi serta keekonomiannya.
3. Melakukan evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kerja sama lisensi, kontrak manajemen, penyewaan aset, kerja sama operasi dan perjanjian kerja sama lainnya dalam bidang usaha Perseroan.
4. Melakukan evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan:
 - a. penyertaan modal Perseroan dalam badan usaha lainnya;
 - b. pelepasan baik sebagian atau seluruhnya penyertaan modal Perseroan dalam badan usaha lainnya;
 - c. pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;
 - d. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan atau perusahaan patungan.

Investment Committee Independence Statement

None of the members of the Investment Committee have concurrent positions at KPB.

Duties and Responsibilities

Main Duties:

1. Assist the Board of Commissioners in supervising the planning, implementation and achievement of the Company's investment activities.
2. Evaluate the Company's investment planning and the level of risk that is measurable and in line with its strategy and economy.
3. Evaluate the plan and implementation of licensing cooperation, management contracts, asset leasing, joint operations and other cooperation agreements in the Company's line of business.
4. Evaluate the plan and implementation of:
 - a. the Company's equity participation in other business entities;
 - b. relinquish part or all of the Company's equity participation in other business entities;
 - c. establish subsidiaries and/or joint ventures;
 - d. merger, consolidation, acquisition, separation, and dissolution of subsidiaries or joint ventures.

5. Melakukan pemantauan pelaksanaan investasi Perseroan dan analisis hasil investasi.
6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lainnya dari Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab/Kewenangan :

1. Komite Investasi, atas perintah/izin/ mewakili Dewan Komisaris, berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas atas informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas, Komite Investasi dapat bekerja sama dengan fungsi manajemen Perseroan yang terkait dengan bidang tugas Komite Investasi.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Investasi dapat menggunakan tenaga ahli atau konsultan dari luar Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh Perseroan.

Rapat Komite Investasi

1. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Investasi melakukan rapat reguler yang diadakan sekurang-kurangnya sekali setiap 1 (satu) bulan. Setiap rapat harus dibuatkan risalahnya secara tertulis.
2. Rapat Komite adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite.
3. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite atau salah satu anggota Komite yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Komite.

Sepanjang tahun 2021, Komite Investasi telah beberapa kali melaksanakan rapat internal komite dan ikut serta menghadiri rapat Dewan Komisaris.

Pelatihan dan Pengembangan

Di tahun 2021, Komite Investasi belum melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi.

5. Monitor the implementation of the Company's investments and analyze investment returns.
6. Identify matters requiring the attention of the Board of Commissioners as well as other duties of the Board of Commissioners.

Responsibilities/Authorities:

1. The Investment Committee, on orders/ permissions/representing the Board of Commissioners, is authorized to have full, free and unrestricted access to information related to the execution of its duties.
2. In exercising the authorities mentioned above, the Investment Committee may cooperate with the Company's management functions related to the duties of the Investment Committee.
3. If necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the Investment Committee may use experts or consultants from outside the Company to assist in carrying out its duties, which are financed by the Company.

Investment Committee Meetings

1. In carrying out its duties, the Investment Committee holds regular meetings at least once every 1 (one) month. Minutes of each meeting must be made in writing.
2. Committee meetings are valid and have the right to make binding decisions if attended by more than 1/2 (one half) of the total members of the Committee.
3. Committee meetings are chaired by the Committee Chair or one of the Committee members appointed in writing by the Committee Chair.

Throughout 2021, the Investment Committee held internal committee meetings and participated in the Board of Commissioners meetings.

Training and Development

In 2021, the Investment Committee did not attend training and competency development.

Kebijakan dan besaran Remunerasi bagi Komite Investasi

Menetapkan honorarium bagi Anggota Komite bukan berasal dari Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012, yaitu untuk Anggota Komite bukan berasal dari Dewan Komisaris ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari Gaji Direktur Utama, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Ringkasan Pelaksanaan Kerja Komite Investasi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Komite Investasi telah menyelenggarakan aktivitas kegiatan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang diwujudkan dengan mengikuti rapat Dewan Komisaris, membuat *review/kajian* sesuai permintaan Dewan Komisaris, dan mengadakan peninjauan proyek melalui kegiatan Kunjungan Kerja.

Penilaian Kinerja Komite Investasi

Dalam tahun 2021, Perusahaan belum menetapkan secara khusus mengenai Tata Cara Penilaian Kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, namun telah dicantumkan dalam Piagam masing-masing Komite bahwa Ketua Komite dan/atau Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja dari setiap anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Referensi: Surat Keputusan Dewan Komisaris KPB No.Kpts-002/DK-KPB/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Piagam Komite Investasi di lingkungan Dewan Komisaris KPB.

Komite Remunerasi

Komite Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Piagam Komite Remunerasi

Komite Remunerasi memiliki pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya yang termuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris KPB No.Kpts-003/DK-KPB/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Piagam Komite Remunerasi di lingkungan Dewan Komisaris KPB.

Policy and amount of Remuneration for Investment Committee

The honorarium for non-Board of Commissioners members of the committee is determined based on the provisions in the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012, namely for non-Board of Commissioners Committee Members, a maximum of 20% (twenty percent) of the President Director's Salary, provided the taxes are borne by the Company, and they are not allowed to receive other income other than the honorarium.

Summary of Investment Committee Work Implementation in 2021

Throughout 2021, the Investment Committee organized activities to assist the implementation of the Board of Commissioners duties, which were realized by attending Board of Commissioners meetings, making reviews/studies according to the requests of the Board of Commissioners, and conducted project reviews through Working Visits.

Investment Committee Performance Assessment

In 2021, the Company has not specifically determined a Procedure for Performance Assessment of the Committees under the Board of Commissioners, but it has been stated in the Charter of each Committee that the Chairman of the Committee and/or the Board of Commissioners evaluates the performance of each member of the Committee who is not a member of the Board of Commissioners in accordance with the applicable regulations. Reference: KPB Board of Commissioners Decree No. Kpts-002/DK-KPB/2021 dated August 23, 2021 concerning the Establishment and Stipulation of the Investment Committee Charter within the KPB Board of Commissioners.

Remuneration Committee

The Remuneration Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners to assist in carrying out the Board of Commissioners duties and functions related to remuneration in accordance with applicable regulations.

Remuneration Committee Charter

The Remuneration Committee has guidelines as a reference in carrying out its duties, as contained in the KPB Board of Commissioners Decree No.Kpts-003/DK-KPB/2021 dated August 9, 2021 concerning the Establishment and Stipulation of the Remuneration Committee Charter within the KPB Board of Commissioners.

Kriteria Anggota Komite Remunerasi

1. Melakukan evaluasi atas perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan kebijakan Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
4. Memberikan telaahan dan saran strategis serta melakukan pemantauan tentang implementasi GCG di Perseroan dan hal-hal terkait kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lainnya dari Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

1. Masa tugas Anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai anggota Komite Remunerasi, sama dengan masa kerja penunjukannya sebagai Anggota Dewan Komisaris yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Masa tugas Anggota Komite Remunerasi yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Remunerasi

Di tahun 2021, Dewan Komisaris PT Kilang Pertamina Balikpapan belum mengangkat Anggota Komite Remunerasi.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Utama :

1. Melakukan evaluasi atas perencanaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan kebijakan Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.

Remuneration Committee Member Criteria

1. Evaluate the planning and monitoring of the implementation of the Company's Remuneration and Nomination activities.
2. Conduct studies and provide recommendations on the effectiveness of the Company's Remuneration and Nomination policies.
3. Provide recommendations regarding improvements to the management control system and its implementation.
4. Provide strategic reviews and suggestions as well as monitor the implementation of GCG in the Company and matters related to the Company's compliance with the provisions of the applicable laws and regulations.
5. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners as well as other duties of the Board of Commissioners.

Terms of Office

1. The term of office for a member of the Board of Commissioners who concurrently serves as a member of the Remuneration Committee is the same as the term of office as a member of the Board of Commissioners, as determined by the General Meeting of Shareholders.
2. The term of office for members of the Remuneration Committee who are not members of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time.

Composition, Nuber, Composition and Basis of Appointment of the Remuneration Committee

In 2021, the Board of Commissioners of PT Kilang Pertamina Balikpapan has not appointed members to the Remuneration Committee.

Duties and responsibilities

Main Duties:

1. Evaluate the planning and monitoring of the implementation of the Company's Remuneration and Nomination activities.
2. Conduct studies and provide recommendations on the effectiveness of the implementation of the Company's Remuneration and Nomination policies.
3. Provide recommendations regarding improvements to the management control system and its implementation.

4. Memberikan telaahan dan saran strategis serta melakukan pemantauan tentang implementasi GCG di Perseroan dan hal-hal terkait kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lainnya dari Dewan Komisaris.

Tanggung Jawab/Kewenangan:

1. Komite Remunerasi, atas perintah/ijin/mewakili Dewan Komisaris, berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas atas informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut di atas, Komite Remunerasi dapat bekerja sama dengan fungsi manajemen Perseroan yang terkait dengan bidang tugas Komite Remunerasi.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dapat menggunakan tenaga ahli atau konsultan dari luar Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugasnya yang dibiayai oleh Perseroan.

Rapat Komite Remunerasi

1. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Investasi melakukan rapat reguler yang diadakan sekurang-kurangnya sekali setiap 1 (satu) bulan. Setiap rapat harus dibuatkan risalahnya secara tertulis.
2. Rapat Komite adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite.
3. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite atau salah satu anggota Komite yang ditunjuk secara tertulis oleh Ketua Komite.

Sehubungan dengan belum diangkatnya anggota Komite Remunerasi, maka sepanjang tahun 2021, Komite Remunerasi belum menyelenggarakan rapat.

4. Provide strategic reviews and suggestions as well as monitor the implementation of GCG in the Company and matters related to the Company's compliance with the provisions of the applicable laws and regulations.
5. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners as well as other duties of the Board of Commissioners.

Responsibilities/Authorities:

1. The Remuneration Committee, on orders/permissions/representing the Board of Commissioners, is authorized to have full, free and unrestricted access to information related to the implementation of duties.
2. In carrying out the authorities mentioned above, the Remuneration Committee may cooperate with the Company's management functions related to the Remuneration Committee's duties.
3. If necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the Remuneration Committee may use experts or consultants from outside the Company to assist in carrying out its duties, which are financed by the Company.

Remuneration Committee Meetings

1. In carrying out its duties, the Investment Committee holds regular meetings at least once every 1 (one) month. Minutes of each meeting must be made in writing.
2. Committee meetings are valid and have the right to make binding decisions if attended by more than 1/2 (one half) of the total members of the Committee.
3. Committee meetings are chaired by the Committee Chair or one of the Committee members appointed in writing by the Committee Chair.

Due to the fact that the members of the Remuneration Committee have not yet been appointed, in 2021, the Remuneration Committee did not hold any meetings.

Kebijakan dan besaran Remunerasi bagi Komite Remunerasi

Menetapkan honorarium bagi Anggota Komite bukan berasal dari Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012, yaitu untuk Anggota Komite bukan berasal dari Dewan Komisaris ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari Gaji Direktur Utama, dengan ketentuan pajak ditanggung Perusahaan, dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.

Penilaian Kinerja Komite Remunerasi

Dalam tahun 2021 belum ditetapkan secara khusus mengenai Tata Cara Penilaian Kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, namun telah dicantumkan dalam Piagam masing-masing Komite bahwa Ketua Komite dan/atau Dewan Komisaris melakukan evaluasi atas kinerja dari setiap anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Referensi: Surat Keputusan Dewan Komisaris KPB No.Kpts-003/DK-KPB/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Pembentukan dan Penetapan Piagam Komite Remunerasi di lingkungan Dewan Komisaris KPB.

Remuneration policy and amount for the Remuneration Committee

Determine the honorarium for non-Board of Commissioners committee members is based on the provisions in the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012, namely for non-Board of Commissioners committee members, a maximum of 20% (twenty percent) of the President Director's Salary is set, provided the taxes are borne by the Company, and they are not allowed to receive other income other than the honorarium.

Investment Committee Performance Assessment

In 2021 a Procedure for Performance Assessment of the Committees under the Board of Commissioners has not been specifically stipulated, but it has been stated in the Charter of each Committee that the Chair of the Committee and/or the Board of Commissioners evaluates the performance of each member of the Committee who is not from the Board of Commissioners, in accordance with applicable regulations. Reference: KPB Board of Commissioners Decree No.Kpts-003/DK-KPB/2021 dated August 9, 2021 concerning the Establishment and Stipulation of the Remuneration Committee Charter within the KPB Board of Commissioners.

ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Supporting Organs of The Board of Directors

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung Direksi memiliki peran penting dalam mengarahkan memonitor, mengkoordinasikan dan mendukung penyusunan rencana kerja dan pelaksanaannya, meliputi relasi dengan pihak regulator, media, dan pemangku kepentingan, hubungan internal & eksternal, kredibilitas Perusahaan, komunikasi eksternal dan internal, *Corporate Social Responsibility (CSR)/Community Development (CD)/Community Relation (CR)*, dokumen dan literatur Perusahaan, aktivitas korporasi, serta *branding* Perusahaan sehingga menunjang penyelesaian proyek RDMP RU V dan meningkatkan citra Perusahaan dan mutu Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

1. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi relasi dengan pihak regulator, relasi dengan media, relasi dengan pemangku kepentingan.
2. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi kredibilitas Perusahaan.
3. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi komunikasi eksternal dan internal di Perusahaan.
4. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan CSR/CD/CR di Perusahaan.
5. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi dokumen dan literatur Perusahaan.
6. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi aktivitas korporasi.
7. Mengarahkan, memonitor, dan mengevaluasi *branding image* Perusahaan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan yang disetujui oleh Direktur Utama dan anggota Direksi Lainnya. Perusahaan mengangkat Reno Marina Shahputri berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts-015/HI0000/2020-S8 tentang Penugasan Perbantuan dari Direktur Utama PT Pertamina Hulu Indonesia.

Corporate Secretary

The Corporate Secretary as a supporting organ of the Board of Directors plays an important role in directing, monitoring, coordinating and supporting the preparation of work plans and their implementation, including relations with regulators, media, and stakeholders, internal & external relations, Company credibility, external and internal communication, Corporate Social Responsibility (CSR)/Community Development (CD)/Community Relations (CR), Company documents and literature, corporate activities, and corporate branding so as to support the completion of the RU V RDMP project and improve the Company's image and quality.

Duties and Responsibilities

The Corporate Secretary duties and responsibilities are as follows:

1. Directing, monitoring, and evaluating relations with regulators, relations with the media, relations with stakeholders.
2. Directing, monitoring, and evaluating the credibility of the Company.
3. Directing, monitoring, and evaluating external and internal communications in the Company.
4. Directing, monitoring, and evaluating CSR/CD/CR activities in the Company.
5. Directing, monitoring, and evaluating Company documents and literature.
6. Directing, monitoring, and evaluating corporate activities.
7. Directing, monitoring, and evaluating the Company's branding image.

Corporate Secretary Profile

The Corporate Secretary is appointed and dismissed in accordance with the Decree approved by the President Director and other members of the Board of Directors. The Company appointed Reno Marina Shahputri based on Decree No.Kpts-015/HI0000/2020-S8 concerning the Assignment of Assistance from the President Director of PT Pertamina Hulu Indonesia.

RENO MARINA SHAHPUTRI

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Menjabat sejak 3 Agustus 2020, Periode jabatan ke-1
Served since August 2020, 1st term of office



Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia Tempat Tanggal Lahir Age Place and date of birth	Usia 50 tahun, Kelahiran Jakarta, 14 Maret 1971 50 years old, born in Jakarta, March 14, 1971
Domisili Domicile	Jakarta, Indonesia
Riwayat Pendidikan Educational background	Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (1994) Bachelor's degree in Communication Science, Universitas Indonesia (1994)
Pengalaman Kerja Work experience	<ul style="list-style-type: none"> • Juni 2019–Juli 2020: Fungsi <i>Corporate Brand Management</i> di PT Pertamina (Persero) & <i>Public Relations and Support Manager</i> PT Pertamina Lubricants • Agustus 2018–Juni 2019: <i>Head of Communication & General Affair</i> di PT Pertamina Hulu Sanga–Sanga • Juni 2013–Juli 2018: <i>Head of Communication & General Affair</i> di VICO Indonesia • Berpengalaman lebih dari 20 tahun (1993–2013) di berbagai bidang sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Periklanan, Hubungan Masyarakat, Relasi Media. b. Hubungan Pemerintah. c. Pemetaan, Perencanaan, dan Strategi Hubungan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>). d. Strategi Pemasaran & Komunikasi Terintegrasi. e. Mengelola Acara dan Aktivitas Korporasi, dan Konferensi Pers. f. Pengembangan Ide Kreatif. g. Strategi & Perencanaan. h. Kampanye Media. • June 2019–July 2020: Corporate Brand Management Function at PT Pertamina (Persero) & Public Relations and Support of PT Pertamina Lubricants • August 2018–June 2019: Communication & General Affair at PT Pertamina Hulu Sanga–Sanga • June 2013–July 2018: Communication & General Affair at VICO Indonesia • More than 20 years of experience (1993–2013) in the following fields: <ul style="list-style-type: none"> a. Advertising, Public Relations, Media Relations. b. Government Relations. c. Mapping, Planning, and Strategy for Stakeholder Relations. d. Integrated Marketing & Communication Strategy. e. Managing Corporate Events and Activities, and Press Conferences. f. Creative Idea Development. g. Strategy & Planning. h. Media Campaign.
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Beliau tidak memiliki jabatan lain di luar KPB She does not have other positions outside of KPB

Pelatihan dan Pengembangan

Dalam Tahun 2021 telah mengikuti beberapa kali *workshop* dan seminar internal Pertamina Group.

Ringkasan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan RUPS & Pembuatan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSSS) KPB:
 1. Januari-Februari 2021: Membantu Corporate Secretary KPI untuk pembuatan KPSSS KPB mengenai Pengangkatan Komisaris KPB (Saifullah Ma'shum), berkoordinasi dengan KPI, dan Fungsi-Fungsi lain di KPB. Berkoordinasi dengan Fungsi Legal & Compliance untuk pembuatan Akta Notaris terkait.
 2. Maret 2021: Membantu Corporate Secretary KPI untuk pembuatan KPSSS KPB mengenai Penggantian Direktur Utama (Feri Yani menggantikan Narendra Widjajanto). Berkoordinasi dengan Fungsi Legal & Compliance untuk pembuatan Akta Notaris terkait.
 3. Mei-Juni 2021: Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan (*Annual Report*) KPB Tahun 2020, bekerja sama dengan Konsultan Inmarks.
 4. 30 Juni 2021: Memfasilitasi Penyelenggaraan Pra RUPS dan RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan KPB Tahun 2020. Berkoordinasi dengan Fungsi Legal & Compliance untuk pembuatan Akta Notaris terkait.
 5. Maret-Agustus 2021: Memfasilitasi penyusunan RKAP 2020 Revisi dan RKAP 2021, pembuatan KPSSS KPB mengenai Persetujuan RKAP 2020 Revisi dan RKAP 2021, berkoordinasi dengan KPI, dan Fungsi lain di KPB.
 6. Juni-Juli 2021: Memfasilitasi pembuatan KPSSS KPB mengenai Penyertaan Modal KPI di KPB, berkoordinasi dengan KPI, dan Fungsi lain di KPB.
 7. Oktober 2021: Membantu Corporate Secretary KPI untuk pembuatan KPSSS KPB mengenai Pengangkatan Direktur Keuangan KPB (Sigit Hanggoro), berkoordinasi dengan KPI, dan Fungsi-Fungsi lain di KPB. Berkoordinasi dengan Fungsi Legal & Compliance untuk pembuatan Akta Notaris terkait.

Training and Development

The training and competency development of the Corporate Secretary can be seen in the Company Profile chapter in this Annual Report.

Summary of Duties Implemented in 2021

In 2021, the Corporate Secretary carried out the following duties and functions:

- A. Organized the KPB GMS & Circular Decision Making of Shareholders (KPSSS):
 1. January-February 2021: Assisted the Corsec of KPI for preparing the KPB KPSSS concerning the Appointment of the Commissioner of KPB (Saifullah Mashum), in coordination with KPI, and other functions in KPB. Coordinated with the Legal & Compliance Function for preparing the related Notary Deed.
 2. March 2021: Assisted the Corsec KPI for preparing the KPSSS KPB concerning the Replacement of the President Director (Feri Yani replaces Narendra Widjajanto). Coordinated with the Legal & Compliance Function for preparing the related Notary Deed.
 3. May-June 2021: Coordinated the preparation of the 2020 KPB Annual Report, in collaboration with Inmarks Consultants.
 4. June 30, 2021: Facilitated the Pre-GMS and Annual GMS Ratification of KPB's 2020 Annual Report. Coordinated with the Legal & Compliance Function for preparing the related Notary Deed.
 5. March-August 2021: Facilitated the preparation of the Revised 2020 RKAP and 2021 RKAP, preparing KPB's KPSSS concerning Approval of the Revised 2020 RKAP and 2021 RKAP, coordinating with KPI, and other functions at KPB.
 6. June-July 2021: Facilitated the preparation of KPB's KPSSS concerning KPI's Equity Participation in KPB, in coordination with KPI, and other functions in KPB.
 7. October 2021: Assisted the Corsec KPI for the preparation of KPB's KPSSS concerning the Appointment of the Director of Finance of KPB (Sigit Hanggoro), coordinated with KPI, and other functions at KPB. Coordinated with the Legal & Compliance Function for preparing the related Notary Deed.

B. Pelaksanaan Kegiatan *Management Walk Through* (MWT) & Kunjungan Kerja *Stakeholders*

1. 5 Februari 2021: Direksi KPB ke Lawe-Lawe & Balikpapan.
2. 26-28 Februari 2021: Direktur Operasi & Direktur Keuangan KPI melakukan site visit ke lokasi Kilang RU V dan proyek RDMP Kilang Balikpapan di Balikpapan dan Lawe-Lawe.
3. 14 Apr 2021: *Sponsor Meeting* & MWT Dewan Komisaris KPI, Dewan Komisaris & Direksi KPB
4. 19-22 Mei 2021: Komisaris Utama & Direksi KPI, serta Direksi KPB.
5. 4-5 Juni 2021: SVP Infrastructure Integration & Optimization PT Pertamina (Persero) beserta Rombongan.
6. 15 September 2021: Direktur Operasi & Direktur Pengembangan KPB bersama JO RDMP.
7. 27 Setember 2021: Komisaris Utama & Wakil Komisaris Utama beserta Anggota Komite PT Pertamina (Persero), Direktur Utama KPI.
8. 7-8 Oktober 2021: Direktur Integrated Logistic & Infrastructure PT Pertamina (Persero) beserta rombongan.
9. 14-15 Oktober 2021: Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) beserta rombongan.
10. 4-5 November 2021: Direktur Proyek Infrastruktur KPI & Tim Media (Editor).
11. 15-17 November 2021: Tim Kementerian Perindustrian.
12. 2-3 Desember 2021: Direktur SPPU PT Pertamina (Persero) & Tim Manajemen.
13. 4 Desember 2021: Direktur Proyek Infrastruktur & Tim Manajemen KPI.
14. 4-5 Desember 2021: Corporate Secretary KPI dan Tim Media.
15. 7-8 Desember 2021 : Tim Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
16. 27-28 Desember 2021 : SVP Corporate Finance PT Pertamina (Persero), Direktur Keuangan, Direktur Proyek Infrastruktur, VP Financing & Treasury KPI, BOD-BOD KPB, serta Grup Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang terdiri dari perwakilan BRI, Mandiri, BNI, BTN, & BSI.

B. Organized Management Walk Through (MWT) Activities & Stakeholder Working Visits

1. February 5, 2021: Directors of KPB to Lawe-Lawe & Balikpapan.
2. February 26-28, 2021: Director of Operations & Director of Finance of KPI site visit to the the RU V Refinery and the Balikpapan Refinery RDMP project in Balikpapan and Lawe-Lawe.
3. April 14, 2021: Sponsor Meeting & MWT KPI Board of Commissioners, KPB Board of Commissioners & Board of Directors
4. May 19-22, 2021: President Commissioner & Board of Directors of KPI, and Board of Directors of KPB.
5. June 4-5, 2021: SVP Infrastructure Integration & Optimization of PT Pertamina (Persero) and entourage.
6. September 15, 2021: Director of Operations & Director of Development of KPB with JO RDMP.
7. September 27, 2021: President Commissioner & Deputy President Commissioner with Committee Members of PT Pertamina (Persero), President Director of KPI.
8. October 7-8, 2021: Director of Integrated Logistics & Infrastructure of PT Pertamina (Persero) and entourage.
9. October 14-15, 2021: Business Support Director of PT Pertamina (Persero) and entourage.
10. November 4-5, 2021: KPI Director of Project Infrastructure & Media Team (Editor).
11. November 15-17, 2021: Ministry of Industry Team.
12. 2-3 December 2021: Director of SPPU PT Pertamina (Persero) & Management Team.
13. December 4, 2021: KPI Director of Project Infrastructure & Management Team.
14. December 4-5, 2021: KPI Corsec and Media Team.
15. 7-8 December 2021: Coordinating Ministry for Economic Affairs Team.
16. December 27-28, 2021: SVP Corporate Finance of PT Pertamina (Persero), Director of Finance, Director of Project Infrastructure, VP of Financing & Treasury of KPI, BOD-BOD KPB, and the Himbara Group (State-Owned Bank Association) consisting of BRI representatives from Mandiri, BNI, BTN, & BSI.

C. Pembuatan Video Progress/Video Kegiatan/
Dokumentasi Kegiatan

1. 15-17 Maret 2021 : dokumentasi salah satu unit besar yang diturunkan dari kapal dan langsung diangkut ke lokasi untuk instalasi adalah *Heat Recovery Steam Generator (HRSG)*, dan beberapa *column* yang berukuran cukup besar.
2. 18 Maret 2021 : pertemuan dengan masyarakat di Kantor Kelurahan Kampung Baru Tengah terkait Keluhan warga Kampung Baru Tengah terkait truk pengangkut material, sirtu, & batu agregat untuk keperluan JO RDMP yang melalui jalan perkampungan Kampung Baru Tengah.
3. Pembuatan Video Progress Proyek RDMP Balikpapan Status s.d. awal Agustus 2021. Sudah di-*upload* di Medsos, KPB KPI dan Pertamina.
4. Pembuatan Video Progress Proyek RDMP Balikpapan Status s.d. Mid Agustus 2021 (*English Version*).
5. Pembuatan Video Progress Proyek RDMP Lawe-Lawe Status s.d. Mid Agustus 2021.
6. Pembuatan Video *Hauling* dan Instalasi C053 *Splitter*.
7. Pembuatan Video *Hauling Heavy Equipment* yang termasuk *Long Lead Item*, berupa *Stripper/Disengager & Regenerator*.
8. Pembuatan Video *Weekly Progress* Proyek RDMP Balikpapan.
9. Update Video Progress Proyek RDMP Balikpapan (*English Version*) untuk digunakan oleh Dirut KPI untuk *Exhibition* di Dubai.

D. Pembuatan Release Media

1. Februari 2021:
 - *Hauling & Installation Boiler*, serta *Gas Turbine Generator (GTG)*.
 - Penyerahan Bantuan Masker bagi Pemkot Balikpapan dalam rangka HUT Kota Balikpapan.
2. April 2021: Sosialisasi Relokasi *Flare* Balikpapan-II.
3. Mei 2021:
 - Pemberian Bantuan Paket Idul Fitri 1442H bagi masyarakat sekitar di Balikpapan & Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
 - Penyerahan Perpustakaan Digital di Pemukiman Atas Air.
 - Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan & Pengobatan Gratis.

C. Making a Progress Videos/Activity Videos/
Activity Documentation

1. March 15-17, 2021: documentation on one of the large units unloaded from the ship and immediately transported to the location for installation is the Heat Recovery Steam Generator (HRSG), and several large columns.
2. March 18, 2021: meeting with the community at the Kampung Baru Tengah Sub-District Office regarding complaints from the residents of Kampung Baru Tengah regarding trucks transporting materials, gravel, & aggregate stones for the purposes of JO RDMP passing through the Kampung Baru Tengah village road.
3. Making a Video on the Progress of Balikpapan RDMP Project Status up to early August 2021. It has been uploaded on Social Media, KPB KPI and Pertamina.
4. Making a Video on the Progress of Balikpapan RDMP Project Status up to Mid August 2021 (*English Version*).
5. Making a Video on the Progress of RDMP Lawe-Lawe Project Status up to. Mid August 2021.
6. Making a Video on Hauling and C053 Splitter Installation.
7. Making a Video on Heavy Equipment Hauling including Long Lead Items, in the form of Stripper/Disengager & Regenerator.
8. Making Weekly Progress Videos on the Balikpapan RDMP Project.
9. Updating Video on the Progress of the Balikpapan RDMP Project (*English Version*) to be used by the President Director of KPI for Exhibition in Dubai.

D. Preparing Media Releases

1. February 2021:
 - Hauling & Boiler Installation, and Gas Turbine Generator (GTG).
 - Handing over of Masks to the City Government of Balikpapan in the context of the anniversary of the City of Balikpapan.
2. April 2021: Socialization of the Balikpapan-2 Flare Relocation.
3. May 2021:
 - Providing Eid Packages for the surrounding community in Balikpapan & North Penajam Paser District (PPU).
 - Handing over Digital Library in Settlement Over Water.
 - Organizing Free Health Checkups & Treatment.

4. Juni 2021: Pelaksanaan RUPS Tahunan Pengesahan Laporan Tahunan KPB Tahun 2020.
 5. Juli 2021: Penyerahan Kurban di Balikpapan & Kab. PPU.
 6. Agustus 2021:
 - *Delivery to site Unit Disengager/Stripper, & Regenerator.*
 - *Alkylation Reactor Transportation & Installation.*
 - *Zero Accident Award* dari Kementerian Tenaga Kerja bagi KPB.
 - Kegiatan Vaksinasi Gotong Royong Pertamina.
 - Pelaksanaan Antigen Rutin di KPB dan pelaksanaan Tes GenNose di KPB.
 7. September 2021:
 - Kunjungan Kerja Komisaris Utama & Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) beserta Tim.
 - *Giant Crane & Ringer Crane.*
 - *Peresmian New HSSE & Fire Station.*
 8. Oktober 2021:
 - MWT Direktur Integrated Logistic & Infrastructure PT Pertamina (Persero) beserta Tim.
 - MWT Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero) beserta Tim.
 - *Lifting & Instalasi 'Column Propane' atau 'Propylene Splitter'.*
 9. November 2021: Kunker Tim Kemenperin.
 10. Desember 2021:
 - Kunker Tim Kemenperin.
 - MWT Direktur SPPU PT Pertamina (Persero).
 - MWT SVP Corporate Finance PT Pertamina (Persero) dan Tim Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
 - *Lifting & Instalasi Catalyst Hopper.*
- E. Program Bantuan/*Charity/Donasi*
1. 7 Januari 2021, memberikan Bantuan Logistik Untuk Kegiatan Donor Darah *Plasma Convalescent* oleh Kodim VI/Mulawarman.
 2. 12 Januari 2021, memberikan Bantuan untuk Acara HUT LVRI ke-64.
 3. 12 Februari 2021, mengadakan kunjungan informal ke Kampung Atas Air untuk mendapatkan gambaran kondisi sosial masyarakat sekitar.
 4. April 2021: Kegiatan Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim menjelang Ramadhan 1442H.
4. June 2021: Organizing the Annual GMS Ratification of KPB's 2020 Annual Report.
 5. July 2021: Delivering Qurban in Balikpapan & Kab. PPU.
 6. August 2021:
 - Delivering to site Disengager/Stripper, & Regenerator Units.
 - Transportation & Installation of Alkylation Reactor.
 - Zero Accident Award from the Ministry of Manpower for KPB.
 - Pertamina's Mutual Cooperation Vaccination Activities.
 - Organizing Routine Antigen at KPB and Organizing GenNose Tests at KPB.
 7. September 2021:
 - Organizing Working Visit for the President Commissioner & Deputy President Commissioner of PT Pertamina (Persero) and Team.
 - Giant Cranes & Ringer Cranes.
 - Inauguration of New HSSE & Fire Station.
 8. October 2021:
 - MWT Director of Integrated Logistics & Infrastructure of PT Pertamina (Persero) and Team.
 - MWT Business Support Director of PT Pertamina (Persero) and Team.
 - Lifting & Installation of 'Column Propane' or 'Propylene Splitter'.
 9. November 2021: Ministry of Industry Team Work Visit.
 10. December 2021:
 - Ministry of Industry Team Work Visit.
 - MWT Director of SPPU PT Pertamina (Persero).
 - MWT SVP Corporate Finance of PT Pertamina (Persero) and Himbara Team (State Owned Bank Association).
 - Catalyst Hopper Lifting & Installation.
- E. Aid/*Charity/Donation Program*
1. January 7, 2021, provided Logistical Assistance for Convalescent Plasma Blood Donor Activities by Kodim VI/Mulawarman.
 2. January 12, 2021, provided assistance for the 64th LVRI Anniversary Event.
 3. February 12, 2021, held an informal visit to Kampung Atas Air to get an overview of the social conditions of the surrounding community.
 4. April 2021: Joint Prayer and Compensation Activities for Orphans ahead of Ramadhan 1422H.

5. 10–11 April 2021: Pemberian Bantuan Paket Idul Fitri 1442H bagi Masyarakat Ring-1 Proyek RDMP Balikpapan & Kab. PPU.
 6. 29 Mei 2021: Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan & Pengobatan Gratis bagi warga Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat.
 7. Jun 2021: Bantuan Bagi Korban Kebakaran di Kampung Bugis Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat
 8. Juli 2021: Bantuan Kegiatan Bakti Sosial DPC Gardasikat.
 9. Des 2021: Bantuan bagi korban Kebakaran di Daerah Gunung Polisi Kelurahan Balikpapan Ilir Belakang Apartemen Pertamina Balikpapan.
- F. Dukungan Kegiatan Protokoler BOC & BOD KPB
1. 8 Februari 2021 : Audiensi Direksi KPB ke Walikota Balikpapan.
 2. 10 Februari 2021 : Upacara Peringatan Hari Jadi Kota Balikpapan ke-124 di Kantor Walikota Balikpapan.
 3. 28 April 2021 : Audiensi Direksi KPB ke Kapolda Kaltim.
 4. 29 April 2021 : Audiensi Direksi KPB ke Pangdam VI Mulawarman.
 5. 30 April 2021 : Audiensi Direksi KPB ke Bupati Penajam Paser Utara di Hotel Platinum Balikpapan.
 6. 19 Mei 2021 : Kegiatan HalalbiHalal dan Syukuran HUT KPB ke-2 di GH54.
 7. 15 Sep 2021 : mendukung kegiatan Direksi menghadiri Peresmian New HSSE Office & Fire Station, sekaligus serah terima dari KPB ke RU V.
 8. 29 Sep 2021 : Penandatanganan MOU Pedoman Kerja Teknis KPB – Polda Kaltim.
 9. 2 Des 2021 : Audiensi Direktur Pengembangan ke Pangdam VI Mulawarman.
- G. Stakeholders Engagement
1. 17 Februari 2021: Mengikuti Rapat Koordinasi dengan Tim Kemenko Polhukam di Hotal Jatra.
 2. 15 Maret 2021: Menghadiri pertemuan dengan Lembaga Adat Paser (LAP) dilaksanakan di Lamin Penajam Paser Utara, yang dihadiri oleh Ketua DPRD PPU & Ketua Komisi I DPRD PPU, Kepala LAP didampingi oleh Ketua & perwakilan dari 11 LSM, dan Perwakilan Disnaker PPU.
5. April 10–11, 2021: Provided Eid Package Assistance for the Ring-1 Community of the Balikpapan & Kab. PPU.
 6. May 29, 2021: Free Health Checkup & Treatment for residents of Baru Ulu Village, West Balikpapan District.
 7. Jun 2021: Assistance for Fire Victims in Bugis Village, Baru Ilir Sub-district, West Balikpapan District
 8. July 2021: DPC Gardasikat Social Service Activities Assistance.
 9. Dec 2021: Assistance for fire victims in the Gunung Polisi area, Balikpapan Ilir Sub-district, behind Pertamina Balikpapan Apartment.
- F. Support for KPB BOC & BOD Protocol Activities
1. February 8, 2021: Audience of the Directors of KPB with the Mayor of Balikpapan.
 2. February 10, 2021: 124th Anniversary of Balikpapan City Anniversary Ceremony at the Balikpapan Mayor's Office.
 3. April 28, 2021: Audience of the Directors of KPB with the Kapolda Kaltim.
 4. April 29, 2021: Audience of the Directors of KPB with Pangdam VI Mulawarman.
 5. April 30, 2021: Audience of the Directors of KPB with the Regent of North Penajam Paser at the Platinum Balikpapan hotel.
 6. May , 2021: HalalbiHalal and Celebration of KPB's 2nd Anniversary at GH54.
 7. September 15, 2021: supported the activities of the Board of Directors attending the Inauguration of the New HSSE Office & Fire Station, as well as the handover from KPB to RU V.
 8. September 29, 2021: Signing of MOU on Technical Work Guidelines for KPB – Polda Kaltim.
 9. December 2, 2021: Director of Development Audience with Pangdam VI Mulawarman.
- G. Stakeholder Engagement
1. February 17, 2021: Participated in a Coordination Meeting with the Coordinating Ministry for Political, Legal and Security Affairs Team at Hotal Jatra.
 2. March 15, 2021: Attended a meeting with the Paser Customary Institution (LAP) held at Lamin Penajam Paser Utara, attended by the Chairperson of the PPU DPRD & Chair of Commission I DPRD PPU, the Head of LAP accompanied by the Chair & representatives from 11 NGOs, and PPU Manpower Representatives.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Maret-April 2021: Kegiatan Sosialisasi antara lain untuk Relokasi <i>Flare</i> Balikpapan-II, <i>Reroute</i> Jalan Minyak, Pemasangan Pipa 20" <i>Onshore</i> di PPU. 4. 26 Jun – 3 Agt 2021: Mendukung pelaksanaan kegiatan vaksin pertama bagi pekerja KPB di Kantor RU V dan vaksin kedua di RSPB tanggal 26 Juli 2021. 5. 11 Agt 2021: Mendukung pelaksanaan kegiatan vaksin Polda di Dome. 6. 12-19 Agustus 2021: Mendukung kegiatan Pekan Vaksin Gotong Royong bagi Pertamina Group di Pantai Kilang Mandiri. 7. 16 Agustus 2021 – dst: Mendukung kegiatan Tes Antigen Rutin di NSO, setiap 2 minggu sekali. 8. September 2021: Mendukung persiapan Pengoperasian dan Pengisian Perdana Tangki D320-12. 9. September 2021: Mendukung Kegiatan Sosialisasi Pekerjaan Pemasangan Pipa 20" <i>offshore</i> di Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. 10. 15 Sep 2021: Mendukung Lanjutan Vaksin Gotong Royong (Dosis kedua) di Pantai Kilang Mandiri. 11. Okt 2021: Berkoordinasi dengan PT Biofarma untuk Penyediaan Vaksin Gotong Royong bagi Pekerja JO SHRP di Balikpapan. 12. Nov-Des 2021: Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk <i>Work Permit</i> bagi Pekerja JO yang dari Luar Negeri. 13. Agustus – Desember 2021 : mendukung Tim Construction Lawe-Lawe terkait klaim warga yang merasa tanahnya yang merupakan jalur pipa adalah milik mereka. Pihak Legal koordinasi dengan Fungsi Aset Zona 9 (PEP Tanjung) untuk mendapatkan dokumen pendukung yang sah. <p>H. Administrasi/Dokumen Resmi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Draft Awal dokumen kelengkapan perangkat GCG perusahaan, berupa <i>Board Manual</i>, <i>Code of Conduct</i>, dan <i>Code of Corporate Governance</i>. 2. Menyiapkan Draft Surat Keputusan Dewan Komisaris : <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Komite dan Penetapan Piagam Komite-Komite di Lingkungan Dewan Komisaris, untuk Komite Audit, Komite Investasi, & Komite Remunerasi. | <ol style="list-style-type: none"> 3. March-April 2021: Outreach activities including, the Relocation of the Balikpapan-II Flare, Reroute to Oil Roads, Installation of 20" Onshore Pipes at PPU. 4. June 26, –August 3, 2021: Supported the implementation of the first vaccine activity for KPB workers at the RU V Office and the second vaccine at the RSPB on July 26 2021. 5. August 11, 2021: Supported the implementation of Polda's vaccine activities at the Dome. 6. August 12-19, 2021: Supported the Mutual Cooperation Vaccine Week activities for Pertamina Group at Pantai Kilang Mandiri. 7. August 16, 2021 – etc.: Supported Routine Antigen Test activities at NSO, once every 2 weeks. 8. September 2021 : Supported preparation for Operation and Initial Filling of the D320-12 Tank. 9. September 2021: Supported Socialization of the 20" offshore Pipe Installation Work in Penajam Village, North Penajam Paser Regency. 10. September 15, 2021: Supported Continuation of Vaccine Gotong Royong (second dose) at Pantai Kilang Mandiri. 11. October 2021: Coordinated with PT Biofarma for the Provision of Gotong Royong Vaccines for JO SHRP Workers in Balikpapan. 12. November-December 2021: Coordinated with the Ministry of SOEs for Work Permits for JO Workers from Overseas. 13. August – December 2021: Supported the Lawe-Lawe Construction Team regarding the claims of residents who feel that the land used for a pipeline is theirs. The Legal Party coordinated with the Zone 9 Asset Function (PEP Tanjung) to obtain legal supporting documents. <p>H. Administration/Official Documents</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prepared the Initial Draft of documents for the completeness of the Company's GCG tools, in the form of a Board Manual, Code of Conduct, and Code of Corporate Governance. 2. Prepared a Draft Decision Letter for the Board of Commissioners: <ul style="list-style-type: none"> • Established Board of Commissioners Committees and Charters, for the Audit Committee, Investment Committee, & Remuneration Committee. |
|--|---|

- Penetapan Pedoman Remunerasi Anggota Komite yang bukan dari Dewan Komisaris.
 - Penetapan Pedoman Tata Kerja di Lingkungan Dewan Komisaris.
 - Pengangkatan Anggota Komite Audit & Komite Investasi.
 - Penetapan Susunan Organisasi Komite Audit dan Komite Investasi.
 - Pedoman Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris dan Sekretariat Dewan Komisaris.
 - Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris.
3. Terkait dengan rencana pendanaan/project financing KPB, berkoordinasi dengan pihak internal KPB, terutama dengan Fungsi Finance, Fungsi Legal & Compliance, dan Fungsi HSSE, serta melaksanakan koordinasi dengan pihak eksternal berupa supporting dokumen/data untuk :
- Assessment oleh *Environmental Resources Management* (ERM) Singapore.
 - *Knowing-Your-Customer* (KYC) dengan HSBC, Mizuho, SMBC, Aon, Korea Exim, US Exim.
- I. Kegiatan Rutin berupa Penyelenggaraan Rapat BOD dan Rapat BOC-BOD KPB
Di tahun 2021, penyelenggaraan rapat berhasil dilaksanakan sebanyak 9 kali rapat BOC-BOD dan 47 kali rapat BOD. Corporate Secretary KPB berperan sebagai Moderator dan Notulis seluruh Rapat tersebut, serta melakukan monitoring tindak lanjut hasil rapat. Sementara untuk rapat BOC-BOD, bertugas juga untuk meng-*compile* materi presentasi.
- Determined Remuneration Guidelines for Committee Members who are not from the Board of Commissioners.
 - Determined Work Procedure Guidelines for the Board of Commissioners.
 - Appointed members of the Audit Committee & Investment Committee.
 - Determined Organizational Structure of the Audit Committee and the Investment Committee.
 - Guidelines for the Remuneration of the Secretary to the Board of Commissioners and the Secretariat of the Board of Commissioners.
 - Appointed the Secretary to the Board of Commissioners.
3. Regarding the funding plan/project financing of KPB, coordinated with KPB internal parties, especially with the Finance Function, Legal & Compliance Function, and HSSE Function, as well as coordinated with external parties in the form of supporting documents/data for:
- Assessment by *Environmental Resources Management* (ERM) Singapore.
 - *Knowing-Your-Customer* (KYC) with HSBC, Mizuho, SMBC, Aon, Korea Exim, US Exim.
- I. Routine Activities in the form of Organizing BOD Meetings and KPB BOC-BOD Meetings
In 2021, 8 BOC-BOD meetings and 46 BOD meetings were held. KPB's Corsec acted as Moderator and Notated the entire Meeting, as well as monitored the follow-up to the results of the meeting. For the BOC-BOD meetings, the duties also includes compiling presentation materials.

BULAN MONTH	BOC – BOD (TANGGAL) BOC – BOD (DATE)	BOD (TANGGAL) BOD (DATE)
Januari January	29 (1)	5, 12, 19, 26 (4)
Februari February	25 (1)	2, 5, 9, 16, 23 (5)
Maret March	-	2, 9, 26, 30 (4)
April	-	6, 14, 21, 27 (4)
Mei May	-	4, 11, 18 (3)
Juni June	2 (1)	8, 15, 22, 29 (4)
Juli July	9, 27 (2)	6, 13, 21, 27 (4)
Agustus August	27 (1)	3, 10, 18, 26 (4)
September	3 (1)	15, 22 (2)
Oktober October	1 (1)	7, 27 (2)
November	-	3, 10, 26 (3)
Desember December	27 (1)	8, 15, 22, 29 (4)
TOTAL	9 kali 9 times	47 kali 47 times



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Company Information and Data

Sebagai komitmen dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keterbukaan informasi, Perusahaan senantiasa menyampaikan informasi yang akurat mengenai kinerja operasional dan keuangan kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut disampaikan dalam bentuk laporan berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk Perusahaan sendiri telah mengatur mengenai akses informasi dan data ke pihak eksternal melalui SK Direktur Pengembangan No.Kpts.003/KPB1000/2020-S0 Tanggal 30 April 2020 tentang Protokol Komunikasi. KPB memberikan akses informasi bagi publik dan pemangku kepentingan lainnya melalui kantor domisili/korespondensi Perusahaan yaitu:

As a commitment to upholding the principles of transparency and information disclosure, the Company always conveys accurate information regarding operational and financial performance to its stakeholders. The information is submitted in the form of periodic reports in accordance with the provisions of the applicable laws. For the Company, access to information and data to external parties is regulated through the Director of Development Decree No.Kpts.003/KPB1000/2020-S0 dated April 30, 2020 concerning Communication Protocols. KPB provides access to information for the public and other stakeholders through the Company's head office, though:

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
Patra Jasa Office Tower Lantai 2
Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 32-34
Setiabudi, Kuningan, Kode Pos 12950
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

Kebijakan penunjukan Akuntan Publik

KPB menetapkan akuntan publik melalui mekanisme RUPS. Pemegang Saham memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternal yang bertugas untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Kilang Pertamina Balikpapan selama periode tahun buku 2021 yang terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2021.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS, Dewan Komisaris Perusahaan menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) sebagai auditor eksternal yang independen dan profesional untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Penetapan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam 3 (tiga) tahun terakhir. KAP yang dimaksud telah melakukan aktivitas audit yang serupa di tahun 2019 & 2020.

Hasil opini KAP atas audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk periode 1 Januari - 31 Desember 2021 adalah "wajar dalam semua hal yang material dan laporan audit telah disampaikan kepada Perusahaan".

Daftar Akuntan Publik 3 (Tiga) Tahun Terakhir 2019-2021

1. Audit Laporan Keuangan 2019: KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited).
2. Audit Laporan Keuangan 2020: KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited).
3. Audit Laporan Keuangan 2021: KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited).

Public Accountant Appointment Policy

KPB determines the public accountants through the GMS mechanism. Shareholders authorized the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (KAP) as an external auditor tasked with auditing the Financial Statements of PT Kilang Pertamina Balikpapan during the fiscal year 2021 period from January 1 to December 31, 2021.

Based on the authority granted by the Shareholders through the GMS mechanism, the Company's Board of Commissioners appointed the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) as an independent and professional external auditor to audit the Company's Financial Statements for the period January 1 to December 31 2021. This determination was the third time in the last 3 (three) years. The KAP in question carried out similar audit activities in 2019 & 2020.

The KAP's opinion on the audit of the Company's Financial Statements for the period January 1 - December 31, 2021 was "fair in all material respects and the audit report has been submitted to the Company".

List of Public Accountants for the Last 3 (Three) Years 2019-2021

1. 2019 Financial Statement Audit: KAP Purwantono, Sungkono & Surja (Ernst & Young Global Limited).
2. 2020 Financial Statement Audit: KAP Purwantono, Sungkono & Surja (Ernst & Young Global Limited) with a contract fee of Rp.381,500,000,-.
3. 2021 Financial Statement Audit: KAP Purwantono, Sungkono & Surja (Ernst & Young Global Limited) with a contract fee of IDR 556,990,000.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Kegiatan operasional KPB tidak terlepas dari berbagai risiko yang harus dikelola untuk mencapai tujuan usaha dan memastikan proyek selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran dan menghasilkan kualitas yang diharapkan. Pengelolaan risiko yang diterapkan dengan cara mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dari kegiatan Perusahaan. Berikut disampaikan risiko tahun 2021 dan upaya mitigasinya:

KPB's operational activities are inseparable from various risks that must be managed to achieve the business goals and ensure the projects are completed on time within budget and produce the expected quality. Risk management is implemented by identifying, measuring, monitoring and controlling risks that may arise from the Company's operational activities. The following shows the business risks in 2021 and their mitigation efforts:

NO	JENIS RISIKO TYPE OF RISK	MITIGASI RISIKO RISK MITIGATION
RISIKO TEKNIS OPERASIONAL OPERATIONAL TECHNICAL RISK		
1	<p>Belum siapnya tangki timbun untuk menampung produk pada saat <i>on-stream</i> pasca Operational Acceptance Proyek EPC ISBL-OSBL.</p> <p>The stockpile tank is not ready to accommodate the product at the time of on-stream after the Operational Acceptance of the ISBL-OSBL EPC Project.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitoring & controlling progress</i> pekerjaan EPC Modifikasi Tangki <i>weekly</i> basis • Mapping dan memprioritaskan penyelesaian tangki sesuai skenario operasional pasca <i>start-up</i> dan <i>interface</i> proyek. • Koordinasi dengan RU V terkait komitmen rilis tangki • Mengambil alih pembelian material yang mengalami <i>dispute</i> dengan Kontraktor (akibat kerja tambah) untuk mempercepat pekerjaan di lapangan. • Monitor & control the progress of Modified EPC work weekly base tank • Map and prioritize tank completion according to post-start-up operational scenarios and project interfaces. • Coordinate with RU V regarding tank release commitments • Take over the purchase of materials that are in dispute with the Contractor (due to additional work) to speed up work in the field.
2	<p>Keterlambatan Mobilisasi <i>to site</i> dan Instalasi <i>Heavy Lift Crane (Ringer)</i> untuk <i>lifting equipment</i> RFCC.</p> <p>Delay in mobilization to site and installation of Heavy Lift Crane (Ringer) for RFCC lifting equipment.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengirimkan surat permohonan dukungan kepada Instansi terkait (Kementerian BUMN, BKPM, dan Dirjend Imigrasi). • <i>Monitoring & updating readiness heavy crane</i> sejalan dengan <i>construction execution plan</i> dan <i>reforecast schedule</i> RDMP BPN JO. • Send letters of request for support to relevant agencies (Ministry of BUMN, BKPM, and Director General of Immigration). • Monitor & update the readiness of heavy cranes in line with the construction execution plan and reforecast schedule for RDMP BPN JO.
3	<p>Level 3 <i>Schedule</i> tidak di-<i>update</i> secara <i>proper</i> oleh kontraktor JO SHRP.</p> <p>Level 3 <i>Schedule</i> is not properly updated by the JO SHRP contractor..</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Workshop Schedule</i> untuk membahas <i>re-forecast L3 Schedule</i> untuk mendapatkan target penyelesaian proyek yang <i>proper</i>. • Menginstruksikan JO SHRP untuk memfinalkan <i>reforecast L3 schedule</i> hasil <i>wokshop</i> dengan mengakomodir seluruh <i>comment</i> dari <i>Owner</i>. • <i>Workshop Schedule</i> to discuss re-forecast L3 <i>Schedule</i> to get a proper project completion target. • Instruct the JO SHRP to finalize the reforecast L3 schedule of the workshop results by accommodating all comments from the Owner.

NO	JENIS RISIKO TYPE OF RISK	MITIGASI RISIKO RISK MITIGATION
4	<p>Keterlambatan Proyek TBBM Tanjung Batu (Fasilitas tambahan untuk menampung produk setelah <i>revamping</i>) di luar Kendali KPB. Delays in the Tanjung Batu TBBM Project (Additional facilities to accommodate products after <i>revamping</i>) outside of KPB's control.</p>	<p>Monitoring progres proyek TBBM Tanjung Batu yang dilaksanakan MOR VI secara berkala. Monitor the progress of the Tanjung Batu TBBM project carried out by MOR VI on a regular basis.</p>
5	<p>Keterlambatan Proyek Pipa Gas Senipah sebagai pemasok bahan bakar gas GTG untuk kebutuhan listrik kilang pada saat operasi kilang, <i>Black Start-Up</i>, dan <i>post-revamping</i>. Delay in the Senipah Gas Pipeline Project as a supplier of GTG gas fuel for the electricity needs of the refinery during refinery operations, <i>Black Start-Up</i>, and <i>post-revamping</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring progress proyek pipa gas Senipah. • Menyiapkan skenario/alternatif lain untuk pasokan gas saat <i>Black Start-Up</i>. • Monitor the progress of the Senipah gas pipeline project. • Prepare other scenarios/alternatives for current gas supply <i>Black Start-Up</i>.
6	<p>Keterlambatan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Proyek EPC ISBL OSBL RDMP RU V Balikpapan. Delay in Engineering Design Details (DED) for the EPC ISBL OSBL RDMP RU V Balikpapan Project.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akselerasi <i>recovery plan engineering</i> untuk penyelesaian GAP Pre-FEED dan Gap FEED. • Akselerasi desain dan eksekusi <i>civil work</i> (<i>stone column/piling</i>) unit <i>Gasoline Block</i> yang dilakukan paralel dengan pekerjaan <i>engineering</i>. • <i>Review detailed engineering design secara online</i>. • Accelerate recovery plan engineering for completion of GAP Pre-FEED and Gap FEED. • Accelerate design and execution of civil work (<i>stone column/piling</i>) of the Gasoline Block unit carried out in parallel with engineering work. • Review detailed engineering design online.
7	<p>Keterlambatan penyelesaian EPC RFCC (<i>Unit Critical Path</i>). EPC RFCC (<i>Unit Critical Path</i>) completion delay.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Weekly meeting</i> dan info ke kontraktor potensi LD jika <i>delay</i> terjadi. • Koordinasi dengan kontraktor untuk perbaikan <i>contracting strategy</i> (pergantian sub kontraktor). • Monitoring dan <i>expediting progres manufacturing</i> dari masing-masing <i>vendor</i>. • Weekly meeting and information to potential LD contractors if delays occur. • Coordinate with contractors to improve contracting strategy (sub-contractor replacement). • Monitor and expedite the manufacturing progress of each vendor.
<p>RISIKO EKONOMI ECONOMIC RISK</p>		
8	<p>Penambahan biaya pengadaan peralatan akibat pemberlakuan Regulasi TKDN pada Proyek EPC Lawe-Lawe <i>Project</i> (Penggunaan barang Wajib Dalam Negeri pada Proyek untuk mengurangi Impor) Additional equipment procurement costs due to the implementation of TKDN Regulations on the Lawe-Lawe EPC Project (Use of Domestic Mandatory goods on the Project to reduce Imports).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan instansi terkait dan asosiasi manufaktur. • Evaluasi <i>Change Order</i> yang timbul (Analisa kontraktual) dan Negosiasi harga dengan kontraktor. • Mengarahkan kontraktor untuk mematuhi Regulasi Pemerintah terkait penggunaan barang wajib untuk meningkatkan TKDN Proyek • Coordinate with related agencies and manufacturing associations. • Evaluate Change Orders that arise (Contractual analysis) and Negotiate prices with contractors. • Direct contractors to comply with Government Regulations related to the use of mandatory goods to increase the Project

NO	JENIS RISIKO TYPE OF RISK	MITIGASI RISIKO RISK MITIGATION
9	Belum adanya basis tabel <i>unit rates</i> di dalam kontrak untuk <i>scope</i> tambahan (<i>change orders</i>). There is no basic unit rates table in the contract for additional scope (change orders).	Menyiapkan tabel harga <i>unit rate scope</i> tambahan yang selanjutnya digunakan sebagai basis harga dan evaluasi Perubahan. Prepare an additional unit rate scope price table to be used as the basis for pricing and evaluation of Changes.
10	Keterlambatan Pencairan Penyertaan Modal Pertamina ke KPI untuk KPB. Delay in Disbursement of Pertamina's Equity Participation to KPI for KPB.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendaftarkan KPB dalam program <i>Notional Pooling</i>. • Monitoring persetujuan pemegang saham atas persetujuan penyertaan modal dari Pertamina ke KPI untuk KPB. • Register KPB in the Notional Pooling program. • Monitor shareholder approval for capital participation from Pertamina to KPI for KPB.
11	Penambahan biaya proyek sehingga menyebabkan penambahan CAPEX di atas 10%. Increase in project costs causes CAPEX to go above 10%.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan usulan re-FID dengan Strategi meningkatkan keekonomian Proyek (diversifikasi pemilihan <i>crude</i>, Skenario <i>Outsourcing</i> menurunkan CAPEX). • Menyesuaikan <i>manpower</i> Tim kontrak sesuai kapasitas proyek yang dikelola untuk percepatan evaluasi klaim; dan Pengelolaan <i>Change Order</i> sesuai dengan TKO yang baru. • Submit re-FID proposal with a Strategy to improve the Project's economy (diversification of crude selection, Outsourcing Scenario to reduce CAPEX). • Adjust the contract team manpower according to the project capacity being managed to accelerate the evaluation of claims; and manage Change Orders in accordance with the new TKO.
RISIKO SOSIAL & HEALTH SAFETY SECURITY AND ENVIRONMENT (HSSE) SOCIAL & HEALTH SAFETY SECURITY AND ENVIRONMENT (HSSE) RISK		
12	<i>Project Delay</i> akibat Pandemi COVID-19. (sosial & lingkungan) Project Delay due to the COVID-19 Pandemic. (social & environmental)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menerapkan <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) dan Protokol COVID-19 untuk seluruh kegiatan Proyek. • Menjalankan <i>Rapid Test</i> berkala, <i>Pool PCR Test</i>, <i>Contact Tracing and quarantine</i> untuk seluruh pekerja KPB dan kontraktor. • Percepatan Vaksinasi untuk seluruh pekerja dan kontraktor. • Monitoring status <i>procurement Main Equipment</i> dan LLI Proyek EPC ISBL-OSBL dan EPC Lawe-Lawe. • Develop and implement a Business Continuity Plan (BCP) and COVID Protocols for all Project activities. • Conduct periodic Rapid Tests, Pool PCR Tests, Contact Tracing and quarantine for all KPB workers and contractors. • Accelerate Vaccinations for all workers and contractors. • Monitor the procurement status of Main Equipment and LLI for the EPC ISBL OSBL and EPC Lawe Lawe Projects.
13	Potensi <i>Oil Spill</i> dan <i>Collision</i> pada kegiatan <i>Pipe Line Installation Offshore Pipeline</i> sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transferline Pipe 20" Penajam</i> - Balikpapan • <i>Transferline Pipe 52" SPM</i> - Tanjung Jumalai Potential Oil Spills and Collisions in the Pipe Line Installation Offshore Pipeline activities including: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transferline Pipe 20" Sharpening</i> - Balikpapan • <i>Transferline Pipe 52" SPM</i> - Tanjung Jumalai 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pre-Engineering Survey</i> kondisi bawah laut. • Penentuan <i>Anchor Pattern</i> yang disetujui MWS dan KSOP. • Pengurusan Ijin gerak kapal ke Syahbandar. • Inspeksi <i>Marine Spread</i> dan <i>Pipe Lay Barge</i>. • Melakukan <i>Emergency Drill</i>. • Pre-Engineer Survey of underwater conditions. • Determine Anchor Pattern approved by MWS and KSOP. • Manage ship movement permits to Syahbandar. • Inspect marine Spread and Pipe Lay Barge. • Conduct Emergency Drills.

NO	JENIS RISIKO TYPE OF RISK	MITIGASI RISIKO RISK MITIGATION
14	Terjadinya Insiden dan <i>accident</i> di area kerja Proyek RDMP RU V Balikpapan dan Lawe-Lawe Incidents and accidents occur in the RU V Balikpapan and Lawe-Lawe RDMP Project work areas	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan observasi pengukuran tingkat kepatuhan CLSR (<i>Compliance Corporate Life Saving Rules</i>). • Pelaksanaan dan monitoring implementasi Pertamina <i>Safety Culture/Incident Injury Free</i> (IIF) sebagai upaya peningkatan budaya HSSE kepada semua pekerja. • Implementasi <i>reward & punishment</i>. • Pelaksanaan <i>Management Walkthrough</i> (MWT), <i>Safety Walk and Talk</i> (SWAT), Program Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA) secara rutin. • Pelaksanaan training kepada pekerja sebelum bekerja dan refreshment terkait aspek HSE. • Sosialisasi terkait aspek HSSE, <i>lesson learn</i>, dan <i>safe work method</i> secara rutin khususnya pada saat <i>Safety Talk/Tool Box Meeting</i> (TBM)/Sidak, serta implementasi Surat Izin Kerja Aman (SIKA)/<i>Job Safety Assessment</i> (JSA)/<i>Work Method Statement</i> (WMS). • Pelaksanaan SIDAK/Site Patrol terhadap kepatuhan regulasi dan prosedur yang berlaku. • Pelaksanaan <i>Joint Survey/inspection</i> untuk rencana pekerjaan yang akan dilakukan serta dilakukannya koordinasi secara rutin antar pekerja dan pengawas. • Mensyaratkan kepada Kontraktor/Vendor untuk penyediaan pekerja yang tersertifikasi. • Pelaksanaan <i>Emergency Drill</i> khususnya untuk setiap pekerjaan kritical dan non-kritical yang akan dilakukan • Socialize and observe measurement of compliance with CLSR (<i>Compliance Corporate Life Saving Rules</i>). • Implement and monitor the implementation of Pertamina <i>Safety Culture/Incident Injury Free</i> (IIF) in an effort to improve the HSSE culture for all workers. • Implement rewards & punishments. • Implement <i>Management Walkthrough</i> (MWT), <i>Safety Walk and Talk</i> (SWAT), <i>Work Safety Observation Program</i> (PEKA) on a regular basis. • Implement training for workers before work and refreshment related to HSE aspects. • Socialize HSSE aspects, lessons learned, and safe work methods on a regular basis, especially during the <i>Safety Talk/Tool Box Meeting</i> (TBM)/Sidak, as well as implement the <i>Safe Work Permit</i> (SIKA)/<i>Job Safety Assessment</i> (JSA)/<i>Work Method Statement</i> (WMS). • Implement SIDAK/Site Patrol to comply with applicable regulations and procedures. • Implement <i>Joint Surveys/inspections</i> for planned work to be carried out as well as regular coordination between workers and supervisors. • Request <i>Contractors/Vendors</i> provide certified workers. • Implement <i>Emergency Drills</i>, especially for every critical and non-critical work carried out

Pernyataan atas Kecukupan Manajemen Risiko Perusahaan

Semua Risiko KPB dikumpulkan dalam suatu *Risk Register* yang dimonitor upaya mitigasinya secara periodik, dengan tujuan untuk menekan atau meminimalisir dampak dan probabilitas dari masing-masing risiko tersebut. Sistem ini sudah berjalan dengan baik.

Statement on the Adequacy of the Company's Risk Management

All KPB Risks are recorded in a Risk Register and the mitigation efforts are monitored periodically, with the aim of suppressing or minimizing the impact of each of these risks. To date, this system has worked properly.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal ditujukan untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik sehingga tercipta kegiatan operasi yang sehat dan aman. Penerapan sistem pengendalian internal di Perusahaan dijalankan dengan memastikan transaksi keuangan berjalan sesuai dengan prinsip Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku. Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal melalui kebijakan, prosedur, dan pendelegasian wewenang/otorisasi secara ketat, konsisten, dan berkesinambungan. Penerapan kerangka sistem pengendalian internal diharapkan membuat aktivitas operasional Perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Pernyataan atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan

Pada tahun 2021, KPB belum memiliki Unit yang menjalankan sistem pengendalian internal. Unit Internal Audit telah dimasukkan dalam Struktur Organisasi KPB, dan telah mengangkat Head of Internal Audit pada tahun 2022.

The Internal Control System is intended to manage and control risks properly so as to create healthy and safe operations. The internal control system in the Company is carried out by ensuring that financial transactions run in accordance with the principles of the applicable Financial Accounting Standards Guidelines (PSAK). The Company implements an internal control system through policies, procedures, and delegation of strict, consistent, and continuous authority/authorization. The internal control system framework is expected to make the Company's operational activities more effective and efficient.

Legal Matters and Administrative Sanctions

Throughout 2021, KPB did not receive any administrative sanctions and was also not involved in legal issues that could affect the Company's performance.

PERKARA HUKUM DAN SANKSI ADMINISTRASI

Legal Matters And Administrative Sanctions

Sepanjang tahun 2021, KPB tidak menerima sanksi administratif dan juga tidak terlibat dalam permasalahan hukum yang dapat mempengaruhi kinerja Perusahaan.

Throughout 2021, KPB did not receive any administrative sanctions and was also not involved in legal issues that could affect the Company's performance.

KODE ETIK PERUSAHAAN

Corporate Code of Conduct

Pada akhir tahun 2021 sudah disiapkan draft kode etik Perusahaan, saat ini masih dalam proses finalisasi.

At the end of 2021, the Company was preparing a Company Code of Conduct, which is currently still in the process of being finalized.

MEKANISME WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System Mechanism

Sebagai komitmen dalam menerapkan prinsip akuntabilitas serta menciptakan iklim usaha yang kondusif, Perusahaan mengikuti mekanisme *whistleblowing system* (WBS) yang berlaku di Grup Pertamina.

As a commitment to implementing the principle of accountability and creating a conducive business climate, the Company follows the whistleblowing system (WBS) mechanism that applies in the Pertamina Group.

Sistem WBS yang berlaku di Perusahaan terintegrasi dengan PT Pertamina (Persero) melalui surat elektronik pertaminaclean@tipoffs.com.sg. Perusahaan akan menjaga kerahasiaan identitas untuk memberikan kenyamanan dan keamanan setiap pelapor atas laporan yang disampaikan. Perusahaan tidak mendapatkan laporan terkait adanya pelanggaran terhadap aktivitas usaha ataupun para insan KPB di sepanjang tahun 2021.

The WBS system applicable in the Company is integrated with PT Pertamina (Persero) via electronic mail pertaminaclean@tipoffs.com.sg. The Company will maintain the confidentiality of identity to provide comfort and security for each reporter of reports submitted. The Company did not receive any reports related to violations of business activities or KPB personnel throughout 2021.

MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

Mechanism of Procurement of Goods and Services

Merujuk pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa No. A5-001/I00100/2019-S9 Revisi ke-0, KPB menjalankan proses bisnis pengadaan barang dan jasa mulai dari permintaan pembelian hingga penerimaan atau pemakaian sesuai kebutuhan. Guna menjalankan proses tersebut, Perusahaan memiliki mekanisme proses pengadaan sebagai berikut:

1. PR (*Purchase Requisition*) – Rencana Pembelian dari fungsi pengguna (*user*)
2. RFQ (*Request For Quotation*) – Permintaan Penawaran, proses *bidding* dan penetapan pemenang
3. PO/*Contract* – Perikatan dua pihak dengan vendor, PO (material), Kontrak (*Service/Jasa*)
4. SA (*Service Acceptance*)/GR (*Goods Received*) – Persetujuan telah *supply*, SA untuk jasa, GR untuk barang
5. *Settlement* – Penyelesaian pembayaran *invoice* vendor
6. *Closed* – Penutupan proses pengadaan di sistem

KPB runs the business process of procuring goods and services starting from purchase requests to receipt or use as needed. In order to carry out this process, the Company has the following procurement process mechanism:

1. PR (*Purchase Requisition*) – Purchase plan from user function (*user*)
2. RFQ (*Request For Quotation*) – Request for Quote, bidding process and determination of winner
3. PO/*Contract* – Two-party engagement with vendor, PO (material), Contract (*Service*)
4. SA (*Service Acceptance*)/GR (*Goods Received*) – Approval has been supplied, SA for services, GR for goods
5. *Settlement* – Settlement of vendor invoice payments
6. *Closed* – Closing of the procurement process in the system



Selain itu, dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal, KPB juga memiliki *Project System* yang menjadi solusi bisnis MySAP PS untuk memenuhi kebutuhan proses bisnis Perusahaan. Dalam bidang *Financial and Controlling*, KPB menggunakan konfigurasi dan master data *financial accounting* yang meliputi *master data General Ledger (GL)*, *Vendor/Account Payable (AP)*, *Customer/Account Receivable (AR)*, *Asset Accounting (AM)*, dan *Bank Accounting*.

In addition, to support the Internal Control System, KPB also has a Project System called MySAP PS business solutions, to meet the needs of the Company's business processes. In the area of *Financial and Controlling*, KPB uses financial accounting configuration and master data including *General Ledger (GL)* master data, *Vendor/Account Payable (AP)*, *Customer/Account Receivable (AR)*, *Asset Accounting (AM)*, and *Bank Accounting*.

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Gratification Policy

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan dalam aktivitas operasional Perusahaan, KPB mewujudkannya melalui upaya untuk menjauhi segala tindakan yang bersifat gratifikasi, Dewan Komisaris dan Direksi PT Kilang Pertamina Balikpapan berpedoman pada Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/Cenderamata dan Hiburan Nomor A-002/N00010/2012-S0 yang diterbitkan oleh PT Pertamina (Persero) selaku induk usaha, yang berisikan:

- a. Menolak pada kesempatan pertama apabila ditawarkan dan/atau diberikan hadiah/cenderamata dan hiburan secara sopan dan santun serta melaporkannya kepada UPG Pertamina;
- b. Dilarang menerima gratifikasi dari pihak ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Dilarang memberi gratifikasi kepada pihak ketiga, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa adanya permintaan dari pihak ketiga tersebut;
- d. Seluruh Wajib Laport Gratifikasi diwajibkan membuat laporan atas penolakan, penerimaan dan pemberian gratifikasi melalui atau disampaikan secara dengan mengisi Formulir Gratifikasi dan menyerahkannya kepada UPG Pertamina.

Tujuan dari penyusunan pedoman gratifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan acuan bagi Perwira Pertamina, termasuk Kilang Pertamina Balikpapan mengenai gratifikasi;
2. Memberikan arah dan acuan bagi Perwira Pertamina, termasuk Kilang Pertamina Balikpapan mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan gratifikasi untuk perlindungan dirinya sendiri maupun keluarganya dari peluang dikenakannya tuduhan tindak pidana suap;
3. Membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik gratifikasi sehingga prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan operasional dan bisnis sehari-hari semakin terimplementasi.

In applying the principles of GCG consistently and sustainably in the Company's operational activities, KPB realizes efforts to avoid all acts of gratification, the Board of Commissioners and Board of Directors of PT Kilang Pertamina Balikpapan are guided by the Guidelines for Gratification, Rejection, Acceptance, Giving Gifts/Souvenirs and Entertainment Number A-002/N00010/2012-S0 issued by PT Pertamina (Persero) as the holding company, which contains:

- a. Refusal at the first opportunity if offered and/or given gifts/souvenirs and entertainment in a polite and courteous manner and report such to UPG Pertamina;
- b. It is prohibited to accept gratification from third parties either on their own initiative or by others, either directly or indirectly;
- c. It is prohibited to give gratification to third parties, either directly or indirectly with or without a request from the third party;
- d. All Gratification Reporters are required to make a report on the rejection, acceptance and granting of gratification through, or submitted by filling out the Gratification Form and submitting it to UPG Pertamina.

The objectives for preparing the gratification guidelines are as follows:

1. Provides direction and reference for Pertamina Officers, including Kilang Pertamina Balikpapan regarding gratification;
2. Provides direction and reference for Pertamina Officers, including the Pertamina Balikpapan Refinery regarding the importance of compliance in reporting gratification to protect themselves and their families from being charged with bribery;
3. Establish an environment of agencies/organizations that are aware and controlled in handling gratification practices so that the principles of transparency and accountability in carrying out daily operational and business activities are increasingly implemented.

Pertamina membantu Insan Pertamina termasuk karyawan Kilang Pertamina Balikpapan untuk menentukan jenis-jenis gratifikasi yang termasuk Tindak Pidana Korupsi dengan mengklasifikasikan gratifikasi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- Gratifikasi yang dianggap suap
Adalah pemberian yang diberikan kepada Insan Pertamina yang dilakukan secara berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugas dari Insan Pertamina yang bersangkutan, khususnya para Wajib Laport Gratifikasi. Gratifikasi jenis ini termasuk ke dalam Tindak Pidana Korupsi;
- Gratifikasi dalam kedinasan
Adalah gratifikasi (hadiah/fasilitas resmi) dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada Insan Pertamina sebagai wakil resmi Perseroan dalam suatu kegiatan tertentu. Gratifikasi jenis ini termasuk ke dalam Tindak Pidana Korupsi;
- Bukan Gratifikasi
Adalah setiap pemberian yang diterima oleh Insan Pertamina berdasarkan perjanjian yang sah atau karena Insan Pertamina yang bersangkutan meraih prestasi tertentu. Gratifikasi jenis ini tidak termasuk ke dalam Tindak Pidana Korupsi.

Jika terdapat pelanggaran, maka Perusahaan akan memberikan sanksi yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan tindak pidana suap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertamina assists Pertamina Personnel including Kilang Pertamina Balikpapan employees to determine the types of gratification included in the Corruption Crime by classifying gratification into 3 (three) types, namely:

- Gratifikasi yang dianggap suap
Is a gift given to Pertamina Personnel which is carried out contrary to the obligations and/or duties of the Pertamina Personnel concerned, in particular the Gratification Reporting Obligations. This type of gratification included in the Corruption Crime;
- Gratifikasi dalam dinas
Is a gratification (gift/official facility) from the organizer of the activity given to Pertamina Personnel as the Company's official representatives in a certain activity. This type of gratification is included in the Corruption Crime;
- Bukan Gratifikasi
It is any gift received by Pertamina Personnel based on a valid agreement or because the Pertamina Personnel concerned achieves certain objectives. This type of gratification is not included in the Corruption Crime.

If there is a violation, the Company will impose sanctions that apply to the Company and potentially be subject to a criminal act of bribery in accordance with the applicable laws and regulations.

PEDOMAN PERUSAHAAN TERKAIT AKTIVITAS POLITIK DAN SOSIAL

Company Guidelines Related to Political and Social Activities

Sikap Perusahaan terhadap aktivitas sosial dan politik diatur dalam Peraturan Pedoman Perilaku PT Pertamina (Persero) dan Peraturan PT Kilang Pertamina Balikpapan. Perusahaan mengakui hak setiap karyawan dan tidak memaksa atau membatasi hak individu untuk menyalurkan aspirasi politiknya, namun Perusahaan memiliki kebijakan bahwa setiap aspirasi politik setiap karyawan merupakan pilihan dan risiko yang bersangkutan secara pribadi. Perusahaan melarang karyawan untuk menggunakan aset atau atribut Perusahaan dalam segala aktivitas politik. Perusahaan juga tidak memberikan sumbangan dalam bentuk apa pun kepada organisasi politik.

The Company's attitude towards social and political activities is regulated in the PT Pertamina (Persero) Code of Conduct Regulation and PT Kilang Pertamina Balikpapan Regulations. The Company recognizes the rights of every employee and does not force or limit the rights of individuals to express their political aspirations, however the Company has a policy that every political aspiration of each employee is a personal choice and risk. The Company prohibits employees from using Company assets or attributes for political activities. The Company also does not make donations of any kind to political organizations.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Anti-Corruption Policy

Seluruh Insan Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang adil, sportif dan profesional. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dengan menghindari segala bentuk tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan serta tendensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

All Company personnel must uphold fair, sportive and professional competition. The Company is committed to creating a healthy business climate by avoiding all forms of actions or behavior that can lead to conflicts of interest and a tendency towards corruption, collusion and nepotism (KKN).

Perusahaan senantiasa memperhatikan kebijakan anti korupsi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menanamkan nilai-nilai serta semangat anti korupsi ke benak para pekerja melalui sosialisasi budaya kerja dan nilai-nilai Perusahaan yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas.

The Company always pays attention to anti-corruption policies as written in Law No.20 of 2001 concerning Amendments to Law No.31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, and instills the anti-corruption values and spirit into the minds of employees through socialization of work culture and corporate values that uphold integrity and professionalism.

PAKTA INTEGRITAS

Integrity Pact

Seluruh Insan Pertamina, termasuk Kilang Pertamina Balikpapan memiliki komitmen untuk menjaga integritas. Seluruh karyawan harus bertindak dan berperilaku dengan benar dan sesuai dengan nilai moral, hukum dan etika dalam setiap situasi sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga reputasi Perusahaan. Dengan integritas, akan tumbuh rasa saling percaya yang menjadi landasan untuk menghindari tindakan yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan bisnis Kilang Pertamina Balikpapan.

All Pertamina personnel, including the Kilang Pertamina Balikpapan, are committed to maintaining integrity. All employees must act and behave properly and in accordance with moral, legal and ethical values in every situation as a form of responsibility to maintaining the Company's reputation. With integrity, mutual trust will grow, which is the basis for avoiding actions that have a negative impact on the business continuity of the Kilang Balikpapan Pertamina.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

State Officials' Wealth Report (LHKPN)

Sebagai anak perusahaan dari BUMN, Perusahaan berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengikat, salah satunya mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilandasi semangat pemberantasan korupsi.

As a subsidiary of a state-owned company, the Company is obliged to comply with binding laws and regulations, one of which is the State Officials' Wealth Report (LHKPN) which is based on the spirit of eradicating corruption.

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No.KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

LHKPN is a list of all State Officials' assets as outlined in the LHKPN form determined by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in KPK Decree No.KEP 07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Examination and Announcement of State Officials' Wealth Reports.

Perusahaan melaksanakan pelaporan terkait LHKPN kepada para pejabat Perusahaan yang termasuk wajib lapor. Para wajib lapor telah melakukan laporan rutin tahunan LHKPN dan laporan gratifikasi bulanan melalui aplikasi Pertamina.

The Company carries out Company officials' LHKPN reports for those required to report. Mandatory Reporters prepare routine annual LHKPN reports and monthly gratification reports through the Pertamina application.

Hingga akhir tahun 2021, seluruh pejabat Perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Wajib Lapor LHKPN telah menyampaikan laporan.

At the end of 2021, all Company officials who have met the criteria as LHKPN Reporting Obligations have submitted their reports.





TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Social and Environmental
Responsibility

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Social and Environmental Responsibility Governance



Penyerahan Perpustakaan Digital kepada Masyarakat Ring 1 di Pemukiman Atas Air
Handing over the Digital Library to the Ring 1 Community in the Upper Water Settlements

Sebagai perusahaan yang tengah melaksanakan proyek pengembangan kilang *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Balikpapan & Lawe-Lawe, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional yang dijalankan. Sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*), KPB berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) melalui program TJSL dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional Perusahaan.

Meski masih menjalankan kegiatan dalam bentuk aktivitas proyek, KPB telah melaksanakan kegiatan TJSL yang mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 74 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dimana TJSL adalah komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan serta dalam

As a Company currently implementing the Balikpapan & Lawe-Lawe Refinery Development Master Plan (RDMP) refinery development project, PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) is fully aware that the Social and Environmental Responsibility (TJSL) program activities being executed are an integral part of operational activities, As a good corporate citizen, KPB is committed to contributing to realizing the Sustainable Development Goals (SDG) through the SER program in order to provide the maximum benefit to stakeholders, especially the community and the environment around the Company's operational areas.

Although still carrying out project activities, KPB has carried out SER activities that refer to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in Article 74 concerning Social and Environmental Responsibility (SER). Where SER is a limited liability company's commitment to participate in sustainable economic development

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Adapun kegiatan program TJSL Perusahaan mengacu pada pilar kemandirian dan lingkungan hidup yang berfokus pada kegiatan jangka pendek dan jangka panjang, baik dalam bentuk donasi serta perbaikan sarana dan prasarana sosial, serta dalam bentuk program yang sifatnya berkelanjutan dalam upaya mendorong kemandirian masyarakat di sekitar area Ring-1 operasional Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan komitmen Perusahaan untuk dapat berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat yang dapat bermanfaat, baik bagi KPB, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan program CSR yang dilakukan Perusahaan, bertujuan untuk dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat khususnya di sekitar lingkungan operasi.

Melalui kegiatan program CSR Perusahaan yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan, Perusahaan berupaya memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat di sekitar area operasi untuk dapat membina hubungan baik melalui penciptaan nilai (*creating shared value*).

Sampai dengan saat ini, KPB masih dalam tahapan penyelesaian proyek, dan belum memiliki *Revenue*. Mengingat pemahaman bahwa alokasi dana CSR merupakan bagian dari *Profit*, maka KPB belum melaksanakan program CSR yang bersifat *sustainable*, namun saat ini telah melaksanakan program yang bersifat bantuan/*charity*/donasi, khususnya yang ditujukan kepada para *stakeholder* di wilayah Ring-1 Proyek.

in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general.

The Company's SER program activities refer to the independence and the environment pillars that focus on short-term and long-term activities, both in the form of donations and improvement of social facilities and infrastructure, as well as programs that are sustainable in nature in an effort to encourage community independence around the Ring-1 area Company operations.

Corporate Social Responsibility

Corporate social responsibility (CSR) is the Company's commitment to participate in sustainable economic development to improve the quality of society that can be beneficial, both for KPB, the local community, and society in general. The CSR program carried out by the Company aims to deliver a positive impact on people's lives, especially those living around the operating environment.

Through the Company's CSR program activities that are managed by the Corporate Secretary, the Company strives to pay special attention to the needs of the community around the operational area to foster good relations by creating shared value.

Until now, KPB is still in the project completion stage, and does not yet have revenue. Given the understanding that the allocation of CSR funds is part of profit, KPB has not implemented a sustainable CSR program, but currently it has implemented assistance/*charity*/donation programs, especially aimed at stakeholders in the Ring-1 Project area.

Sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah melaksanakan beberapa kegiatan CSR antara lain terdiri dari:

- 6 kegiatan bantuan donasi langsung kepada masyarakat;
- 1 kegiatan dukungan logistik bagi kegiatan Kodam VI/Mulawarman Kaltim; dan
- 1 kegiatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga.

In 2021, the Company carried out several CSR activities, including:

- 6 direct donation activities to the community;
- 1 logistical support activity for the activities of Kodam VI/Mulawarman East Kalimantan; and
- 1 activity in the form of free health checks for residents.

Bakti Sosial Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis di Kel. Baru Ulu – Kilang Pertamina Balikpapan Peduli

Social Service Free Examination and Medical Treatment at Baru Ulu village – Kilang Pertamina Balikpapan Cares



Bantuan Sosial Sembako Idul Fitri 1442 H

Social Aid for Foodin Idul Fitri 1442 H



Bantuan Sosial Voucher Belanja Idul Fitri 1442 H Kelurahan di Wilayah Ring I

Social Aid for Shopping Vouchers for Eid Al-Fitri 1442 H, for Villages in the Ring I Region



Bantuan Sosial Sembako Korban Kebakaran

Social Aid for Basic Food for Fire Victims



Vaksinasi Gotong Royong

Gotong Royong Vaccinations



Qurban pada Hari Raya Idul Adha 1442 H

Qurban on Eid al-Adha 1442 H



Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup

Perusahaan selalu berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap kegiatan operasional yang dilakukan. Perusahaan menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan, tidak serta merta hanya berfokus pada pencapaian target operasional, tetapi juga beriringan dengan memperhatikan lingkungan sekitar daerah operasi. Perusahaan senantiasa berperan aktif dalam memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup mengingat pentingnya lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Perusahaan menyadari bahwa lingkungan hidup menjadi salah satu indikator dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan operasional. Setiap kebijakan terkait pelestarian lingkungan senantiasa di evaluasi dengan melakukan identifikasi, kontrol dan menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan atau alat-alat dalam kegiatan operasional Perusahaan yang dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan.

Komitmen ini telah dijalankan Perusahaan berdasarkan pengembangan semua aspek yang berorientasi pada skala global, termasuk penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Perusahaan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Regulator, dalam hal ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perusahaan juga senantiasa melakukan pemantauan dampak lingkungan atas kegiatan operasi yang dilakukan, sebagai bentuk kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku, dan senantiasa menyampaikan laporan per semester kepada DLH/KLH atas hasil pemantauan dampak lingkungan.

Corporate Responsibility for the Environment and Occupational Health and Safety (EOHS)

Corporate Responsibility for the Environment

The Company strives to preserve the environment in all operational activities it carries out. The Company realizes that every activity carried out does not necessarily only focus on achieving operational targets, but also takes into account the environment around the operational area. The Company always plays an active role in maintaining and preserving the environment by considering the importance of the environment for future generations.

The Company realizes that the environment is one of the indicators in the implementation of sustainable development. To that end, the Company always pays attention to the balance of the environment, by prioritizing the precautionary principle in carrying out every operational activity. Every policy related to environmental preservation is evaluated by identifying, controlling and avoiding or minimizing the use of materials or tools in the Company's operational activities that can have a negative impact on the environment.

This commitment has been carried out by the Company based on the development of all aspects oriented on a global scale, including the use of efficient and environmentally friendly energy. The Company complies with the provisions set by the Regulator, in this case the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). The Company also continuously monitors the environmental impact of its operational activities, as a form of the Company's compliance with applicable regulations, and always submits a semi-annual report to DLH/KLH on the results of environmental impact monitoring.

Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perusahaan menyadari pentingnya peran dari seluruh Insan Perusahaan, maka dari itu Perusahaan memiliki kewajiban untuk tetap memperhatikan segenap Insan Perusahaan terutama terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja. Perusahaan memaknai K3 sebagai hal strategis yang menjaga eksistensi Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan senantiasa menghormati hak para pekerja untuk bekerja di lingkungan yang sehat dan aman dengan menjalankan program K3 di semua wilayah operasinya. Oleh karena itu, Perusahaan menempatkan aspek K3 sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan kerja, khususnya dalam upaya untuk mewujudkan *Zero Accident* (kecelakaan nihil) pada setiap unit kerja.

Perusahaan mengembangkan semua aspek yang meliputi kepemimpinan efektif, termasuk standar keamanan kerja berskala global (*world class safety*), dan penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Upaya ini dilakukan Perusahaan melalui berbagai langkah yaitu:

- Mempersiapkan tenaga kerja KPB mengikuti Program *Top Talent Development Program (TTDP) Catalyser*
- *Project Management*
- Implementasi *Pertamina Safety Culture*
- Penerapan *International Sustainability Rating System (ISRS) level 5 (Physical Condition Tours/PCT 71%)*

Pelaksanaan K3 di lingkungan operasional Perusahaan membuat setiap kegiatan yang dijalankan Perusahaan di tahun 2021 berjalan dengan kondusif. Dimana setiap peraturan dan prosedur K3 yang terdapat di Perusahaan mampu memberikan rasa aman bagi setiap pekerja untuk bekerja secara optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan operasional yang dijalankan memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen untuk memberikan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman kepada seluruh pekerja. Perusahaan telah membentuk budaya kerja aman bagi seluruh pekerja, serta kehandalan sarana dan fasilitas, juga sistem/prosedur kerja yang memadai di seluruh lini.

Corporate Responsibility for Occupational Health and Safety (OHS)

In carrying out its operational activities, the Company realizes the importance of the role of all Company Personnel, therefore the Company has an obligation to continue to pay attention to all Company Personnel, especially related to the Occupational Safety and Health (OHS) of employees. The Company interprets OHS as a strategic matter that maintains the existence of the Company. For this reason, the Company always respects the rights of employees to work in a healthy and safe environment by implementing OHS programs in all of its operational areas. Therefore, the Company places the OHS aspect as a top priority in every work activity, especially in an effort to realize *Zero Accident* (zero accidents) in all work units.

The Company develops all aspects including effective leadership, global work safety standards (*world class safety*), and efficient and environmentally friendly energy use. These efforts are carried out by the Company through the following steps

- Prepares the KPB workforce to take part in the *Catalyser's Top Talent Development Program (TTDP)*
- *Project Management*
- Implementation of *Pertamina Safety Culture*
- Implementation of the *International Sustainability Rating System (ISRS) level 5 (Physical Condition Tours/PCT 71%)*

The implementation of OHS in the Company's operational environment allowed all activities carried out by the Company in 2021 to run conductively. All OHS regulations and procedures in the Company provides a sense of security for all employees to work optimally and in accordance with the targets set.

The Company understands the operational activities carried out carry a high risk. Therefore, the Company is committed to providing a healthy, safe, and comfortable work environment to all employees. The Company has established a safe work culture for all employees, as well as the reliability of amenities and facilities, and adequate work systems/procedures in all lines.

Perusahaan juga telah memiliki kebijakan terkait program jaminan kecelakaan kerja, sesuai dengan komitmen Perusahaan untuk memenuhi hak-hak kerja karyawan.

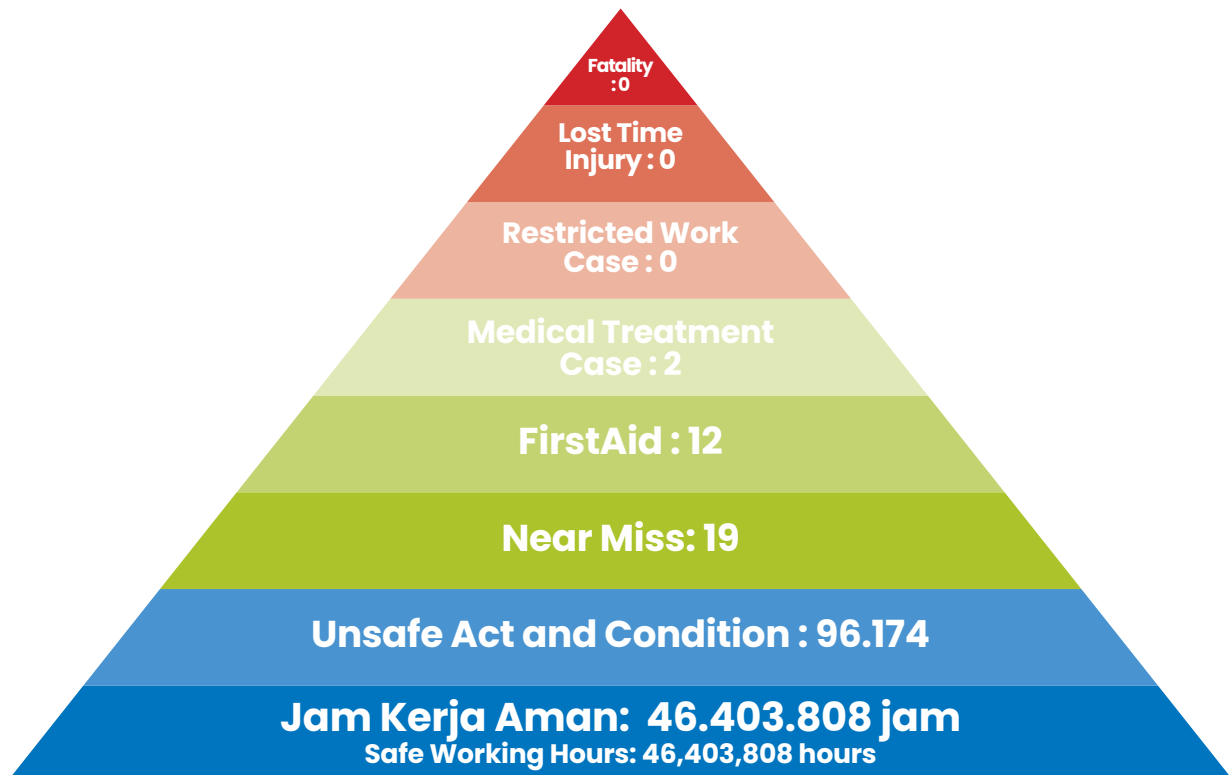
The Company also has a policy concerning the work accident insurance program, in accordance with the Company's commitment to fulfill employee rights.

Perusahaan selalu melengkapi pakaian dan peralatan yang dikenakan pekerja untuk mendukung penerapan K3. Hal ini juga sejalan dengan penggunaan tenaga kerja yang sehat baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga dapat bekerja secara optimal untuk pencapaian target Perusahaan. Upaya ini menjadi satu kesatuan dengan komitmen K3 Perusahaan yang tercakup dalam HSSE (*Health-Safety-Security-Environment*), terkait pencapaian ISRS (*International Sustainability Rating System*).

The Company always supplies the clothing and equipment worn by employees to support the implementation of OHS. This is also in line with the use of a healthy workforce, both physically, mentally, and socially, so that they can work optimally for the achievements of the Company. This effort is an integral part of the Company's OHS commitments covered by the HSSE (*Health-Safety-Security-Environment*), related to the achievement of ISRS (*International Sustainability Rating System*).

Berikut disampaikan HSSE Performance RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe di tahun 2021.

The HSSE Performance for RDMP Balikpapan and Lawe-lawe in 2021 is shown below.



Pengelolaan program tanggung jawab Perusahaan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pekerja, terbilang cukup berhasil. Hal tersebut tercermin dari berbagai penghargaan yang berhasil diperoleh Perusahaan di sepanjang tahun 2021. Sementara itu, pada bulan Agustus 2021, Perusahaan mendapatkan Penghargaan Kecelakaan Nihil (*Zero Accident Award*) dari Kementerian Ketenagakerjaan RI atas prestasi dalam melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan mencapai 17.911.002 jam kerja aman tanpa kecelakaan kerja, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2018 s.d. 31 Desember 2020.

Perusahaan juga berhasil meraih Penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama Keselamatan Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diberikan pada bulan September 2021, dengan kategori tanpa kehilangan jam kerja sebagai akibat kecelakaan selama 3 (tiga) tahun hingga mencapai 27.369.267 jam kerja. Adapun per 31 Desember 2021, Perusahaan mampu mencapai 46.403.808 jam kerja aman.

The management of the Company's responsibility program for employees' Occupational Health and Safety (OHS) has been successful. This is reflected in the various awards the Company received throughout 2021. In August 2021, the Company received a Zero Accident Award from the Indonesian Ministry of Manpower for implementing its Occupational Health and Safety (OHS) Program, by achieving 17,911,002 safe working hours without work accidents, from July 25, 2018 until December 31, 2020.

The Company also received the Patra Nirbhaya Karya Utama Oil and Gas Safety Award from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) in November 2021, in the category no lost working hours due to accidents for a 3 (three) year period, with 41,652,287 working hours. As of December 31, 2021, the Company achieved 46,403,808 safe working hours.

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN

STATEMENT OF ACCOUNTABILITY OF
2021 ANNUAL REPORT OF PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan 2021 PT Kilang Pertamina Balikpapan telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the signatories, hereby stated that all information in the 2021 Annual Report of PT Kilang Pertamina Balikpapan has been comprehensively presented and we are fully accountable for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



Suwahyanto
Komisaris Utama
President Commissioner



Saifullah Ma'shum
Komisaris
Commissioner

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS



Feri Yani
Direktur Utama
President Director



Djoko Koen Soewito
Direktur Pengembangan
Development Director



Mulyono
Direktur Operasi
Operations Director



Sigit Hanggoro
Direktur Keuangan
Finance Director



LAPORAN KEUANGAN

Financial Statements

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)

22. INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT ARUS KAS

22. ADDITIONAL INFORMATION RELATED TO CASH FLOWS

a. Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas

a. Activities that do not affect cash flows

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	(318.586.850)	(578.152.184)	<i>Addition of fixed assets through trade payables</i>
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset tetap	(1.465.534)	-	<i>Capitalization of borrowing costs to fixed assets</i>

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

b. Reconciliation of liabilities from financing activities

			Perubahan non-kas/ Non-cash changes			
	31 Des 2020/ Dec 31, 2020	Arus kas/ Cash flows	Pergerakan valas/ Foreign exchange	31 Des 2021/ Dec 31, 2021		
Uang muka untuk modal saham	685.190.812	900.000.000	-	1.585.190.812		<i>Advance for share capital</i>
Utang bank jangka pendek	-	(1.378.629)	1.378.629	-		<i>Short-term bank loan</i>
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	685.190.812	898.621.371	1.378.629	1.585.190.812		Total liabilities from financing activities

			Perubahan non-kas/ Non-cash changes			
	31 Des 2019/ Dec 31, 2019	Arus kas/ Cash flows	Pergerakan valas/ Foreign exchange	31 Des 2020/ Dec 31, 2020		
Uang muka untuk modal saham	-	685.190.812	-	685.190.812		<i>Advance for share capital</i>
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	-	685.190.812	-	685.190.812		Total liabilities from financing activities

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

21. PERJANJIAN DAN KOMITMEN SIGNIFIKAN

Pada tanggal 30 Maret 2020 telah ditandatangani novasi kontrak, yang berlaku efektif 15 hari setelah ditandatanganinya novasi tersebut. Novasi kontrak tersebut mengalihkan hak dan kewajiban atas kontrak EPC ISBL/OSBL dari PT Pertamina (Persero) ke PT Kilang Pertamina Balikpapan. Berdasarkan novasi kontrak tersebut, atas biaya sehubungan dengan proyek EPC ISBL/OSBL atas *New Unit* dan *Additional Unit* yang telah dibayarkan dan telah dikapitalisasi ke *Asset Under Construction* (AUC) oleh PT Pertamina (Persero) kemudian ditagihkan kembali ke PT Kilang Pertamina Balikpapan. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah mencatat beban akrual atas biaya tersebut diantaranya beban akrual atas uang muka (*Advance Payment*) dan AUC (Catatan 5 dan 6).

Selain kontrak EPC, pada tanggal 30 April 2020 telah ditandatangani dan berlaku efektif atas novasi kontrak Project Management Consultant Services dari PT Pertamina (Persero) ke PT Kilang Pertamina Balikpapan, atas kontrak-kontrak lainnya yang berlaku efektif pada 1 Mei 2020, juga telah diterminasi dari PT Pertamina (Persero) dan dibuat kontrak baru dengan PT Kilang Pertamina Balikpapan. Perjanjian dan kontrak-kontrak tersebut mengatur mengenai antara lain harga, masa perjanjian dan juga syarat dan ketentuan lain yang berlaku.

21. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

On March 30, 2020 a novation contract was signed, which is effective 15 days after signing the novation. The contract Novation transferred the rights and obligations to the ISBL/OSBL EPC contract from PT Pertamina (Persero) to PT Kilang Pertamina Balikpapan. Based on the contract novation, the costs associated with the EPC ISBL/OSBL project for *New Units* and *Additional Units* that have been and have been capitalized into *Asset Under Construction* (AUC) by PT Pertamina (Persero) are then charged back to PT Kilang Pertamina Balikpapan. As of December 31, 2020, the Company has recorded accrual expenses for these expenses, such as accrual expenses on advances (*Advance Payment*) and AUC (Note 5 and 6).

In addition to the EPC contract, on April 30, 2020, the novation of the Project Management Consultant Services Contract from PT Pertamina (Persero) to PT Kilang Pertamina Balikpapan was signed and become effective. Other contracts effective on May 1, 2020, have also been terminated from PT Pertamina (Persero) and made a new contract with PT Kilang Pertamina Balikpapan. The agreements and contracts discuss, among others, the price, the term of the agreement and also other applicable terms and conditions.

Para pihak/ Parties	Tanggal kontrak/ Contract date	Berakhirnya kontrak/ End of contract	Jenis kontrak/ Type of contract
RDMP Balikpapan JO	10/12/2018	27/07/2023	New Unit & SRU HMU (KPB Scope)
PT Worley SEA Indonesia	03/08/2018	03/08/2023	Project Management Consultant
Greengate LLC	07/01/2020	30/06/2022	Lenders' Financial Model Advisor
Allen and Overy	11/11/2019	30/06/2022	Lenders' Legal Counsel
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	01/11/2021	30/06/2022	Koordinator ECA atas Lenders/ Lenders' ECA Coordinator
PT Prima Armada Raya	01/11/2021	01/03/2023	Jasa Sewa Kendaraan/ Transportation Rental Service
PT Pertamina Training & Consulting	01/04/2021	01/10/2022	Jasa Penyediaan TKPP/ TKPP Service

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Manajemen risiko permodalan (lanjutan)

Dewan Direksi secara berkala melakukan reuiu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari reuiu ini, Direktur juga mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

e. Risiko pasar

Karena Perusahaan saat ini tidak memiliki kegiatan operasional, Perusahaan tidak terekspos terhadap risiko nilai tukar dan suku bunga potensial yang dapat mempengaruhi Perusahaan. Risiko nilai tukar yang akan mengekspos Perusahaan terkait Biaya masih harus dibayar dan Kas dan kas bank masing-masing dalam mata uang selain Dolar AS sebesar US\$57.294.199.

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang dimiliki Perusahaan di denominasikan dalam Rupiah. Apabila terjadi peningkatan/penurunan nilai tukar mata uang Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 1%, maka rugi sebelum pajak akan menurun/meningkat sebesar US\$393.150. Manajemen tidak melakukan lindung nilai atas risiko mata uang ini.

20. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan mengklasifikasikan kas dan kas di bank sebesar US\$150.959.048 sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan mengklasifikasikan utang usaha - pihak ketiga dan utang usaha - pihak berelasi, masing-masing sebesar US\$171.764.606 dan US\$349.920.733, sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan yang diamortisasi.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

d. Capital risk management (continued)

The Company's Board of Directors periodically review the capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risk.

e. Market risk

Since the Company currently has no operational activities, the Company is not exposed to potential exchange rate and interest rate risks that could affect the Company. Exchange rate risk that would expose the Company to Accrued Expenses and Cash and bank cash denominated in currencies other than US Dollar, respectively, amounting to US\$57,294,199.

As of December 31, 2021, monetary assets and liability held by the Company are denominated in Rupiah. If there is a strengthening/weakening of the US Dollar exchange rate as of December 31, 2021 by 1% loss before tax will decrease/increase by US\$393,150. Management did not hedge this foreign exchange risk.

20. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As of December 31, 2021, the Company classified cash and cash in banks of US\$150,959,048 as financial assets at amortized cost.

As of December 31, 2021, the Company classified of trade payables - third parties and trade payables - related parties, amounting to US\$171,764,606 and US\$349,920,733, respectively, as financial liabilities at amortized cost.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko likuiditas (lanjutan)

Sesuai dengan Persetujuan Direksi PT Pertamina (Persero) No. RRD-067/C00000/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Persetujuan Perubahan Jumlah Penyertaan Modal Kepada PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Kilang Pertamina Balikpapan Tahun 2021 dan persetujuan Direksi PT Kilang Pertamina Internasional No. RRD-037/KPI00000/2021-SO tanggal 17 Desember 2021 perihal Penyertaan Modal PT Kilang Pertamina Internasional untuk Perusahaan dalam rangka Proyek RDMP RU V Balikpapan, Perusahaan akan mendapatkan penambahan penyertaan modal sebesar ekuivalen US\$1.851.140.044 (atau US\$1.107.915.622 dan Rp10.582.029.321.097), dimana sejumlah US\$900.000.000 telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 21 Desember, 2021.

c. Estimasi nilai wajar

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan diharapkan akan dapat direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dekat. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Nilai wajar pinjaman ditentukan menggunakan diskonto arus kas masa depan pada suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati saat ini untuk instrumen dengan jangka waktu dan jatuh tempo yang sama.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya.

d. Manajemen risiko permodalan

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, laba ditahan dan komponen ekuitas lainnya.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Liquidity risk (continued)

In accordance with the Approval of the Board of Directors of PT Pertamina (Persero) No. RRD-067/C00000/2021 dated July 29, 2021 regarding the Approval of Changes in Equity Ownership in PT Kilang Pertamina International and PT Kilang Pertamina Balikpapan in 2021 and the approval of the Board of Directors of PT Kilang Pertamina International No. RRD-037/KPI00000/2021-SO dated December 17, 2021 regarding Equity Ownership in PT Kilang Pertamina Balikpapan by PT Kilang Pertamina International in relation to the RDMP RU V Balikpapan Project, the Company will receive an additional equity ownership amounting to equivalent US\$1,851,140,044 (or US\$1,107,915,622 and Rp10,582,029,321,097), in which some of US\$900,000,000 has been received by the Company on December 21, 2021.

c. Fair value estimation

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

The Company's current financial assets and liabilities are expected to be realised or settled in the near term. Therefore, their carrying amounts approximate their fair value.

The fair values are determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms and remaining maturities.

Management considers that the carrying amounts of interest bearing financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost in the financial statements approximate their fair values.

d. Capital risk management

The Company manages capital risk to ensure that the Company will be able to continue going on, in addition to maximizing shareholder returns through optimizing debt and equity balances. The Company's capital structure consists of the equity of the parent shareholders, which consists of issued capital, retained earnings and other equity components.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko *counterparty* gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian/keuntungan bagi Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2021, total maksimal eksposur dari risiko kredit adalah US\$150.959.048.

Risiko kredit terutama berasal dari kas pada bank dan piutang lain-lain. Untuk transaksi kas dan bank, Perusahaan telah menempatkan dananya pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik terlihat penempatan dana pada bank berperingkat "Baa2" dari lembaga pemeringkat Moody's.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan bank untuk penempatan kas. Pemilihan bank dilakukan dengan mempertimbangkan peringkat kredit dari lembaga eksternal.

b. Risiko likuiditas

Untuk mengatur risiko likuiditas, Perusahaan memonitor dan menjaga kecukupan kas dan kas di bank untuk mendanai kegiatan operasional Perusahaan dan mengurangi pengaruh fluktuasi dalam arus kas. Manajemen juga secara rutin memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

Total kewajiban jangka pendek sebesar US\$528.418.221, sementara saldo kas sebesar US\$150.959.048. Terdapat kekurangan sebesar US\$377.459.173, kewajiban jangka pendek yang tidak cukup dipenuhi dari saldo kas pada 31 Desember 2021. Perusahaan yakin dapat menyelesaikan liabilitas Perusahaan pada saat jatuh tempo yang diharapkan akan terjadi dalam satu tahun karena Perusahaan memperoleh dukungan penuh dari pemegang saham, untuk terus menyediakan bantuan yang memungkinkan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya pada saat kewajiban tersebut terjadi dan jatuh tempo, dan untuk melanjutkan operasinya.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a gain/loss to the Company. As of December 31, 2021, the total maximum exposure to credit risk was US\$150,959,048.

Credit risk arises from cash in banks and other receivables. For cash in bank, the Company has placed its bank balances and time deposits in banks which have good credit quality as evidenced by placement of funds in banks which are ranked "Baa2" based on Moody's.

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure to credit risk, since the Company has clear policies on the selection of bank for cash placement. The selection is performed by considering the available external credit rating.

b. Liquidity risk

To manage its liquidity risk, the Company monitors its level of cash on hand and cash in bank, and maintains these at a level deemed adequate to finance the Company's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flow. The Company's management also regularly monitors projected and actual cash flow, including loan payables and maturity profiles, and continuously assesses the financial markets for opportunities to raise funds.

Total current liabilities amounted to US\$528,418,221, while the cash balance was US\$150,959,048. There is a shortfall of US\$377,459,173, a short-term liability that was not sufficiently fulfilled from the cash balance as of December 31, 2021. The Company believes it will be able to settle the Company's liabilities when they become due, which should be within a year, since the Company has fully support from the shareholder to provide support to enable the Company to meet its obligation as and when they fall due and to enable it to continue its operations.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

18. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

18. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)

c. Hubungan dengan pihak berelasi

c. Relationships with related parties

Sifat dari hubungan pihak berelasi yang mengadakan transaksi sebagai berikut:

The nature of relationships with the related parties are as follows:

Pihak-pihak yang berelasi/ Related parties	Hubungan/ Relationship	Sifat transaksi/ Transactions
PT Pertamina (Persero)	Pemegang saham/ <i>shareholders</i>	Modal saham/ <i>share capital</i>
PT Kilang Pertamina Internasional	Pemegang saham/ <i>Shareholders</i>	Modal saham/ <i>share capital</i>
PT Pertamina Pedeve Indonesia	Pemegang saham/ <i>Shareholders</i>	Modal saham/ <i>share capital</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas di bank/ <i>Placement of cash in bank</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas di bank/ <i>Placement of cash in bank</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas di bank/ <i>Placement of cash in bank</i>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.p	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	Penempatan kas di bank/ <i>Placement of cash in bank</i>
PT Patra Badak Arun Solusi	Entitas Asosiasi/ <i>Associates</i>	Pengadaan tenaga kerja jasa penunjang/ <i>Manpower supply service</i>
PT Pertamina Training & Consulting	Entitas Asosiasi/ <i>Associates</i>	Pengadaan tenaga kerja jasa penunjang/ <i>Manpower supply service</i>
PT Mitra Tours & Travel	Entitas Asosiasi/ <i>Associates</i>	Pengadaan jasa travel/ <i>Travel agency</i>
PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	Entitas Asosiasi/ <i>Associates</i>	Pembayaran asuransi jiwa/ <i>Life Insurance</i>
PT Patra Jasa	Entitas Asosiasi/ <i>Associates</i>	Sewa Gedung Kantor/ <i>Office rent</i>
PT Prima Armada Raya	Entitas Asosiasi/ <i>Associates</i>	Sewa Kendaraan/ <i>Vehicle Rent</i>
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	Entitas Asosiasi/ <i>Associates</i>	Pembayaran asuransi asset/ <i>Asset Insurance</i>

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko kredit dan risiko likuiditas, dan risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga). Tujuan dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan.

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: credit risk, liquidity risk, and market risk (including the effects of foreign currency exchange rates risk, and interest rate risk). The objectives of the Company's risk management are to identify, measure, monitor and manage basic risks in order to safeguard the Company's long-term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Company.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)

17. PENDAPATAN/(BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH

	31 Desember/ December 31, 2021
Selisih kurs - neto	1.592.492
Lain-lain	(30.788)
Jumlah	1.561.704

17. OTHER INCOME/(EXPENSE) - NET

	31 Desember/ December 31, 2020	
	(1.594.914)	Foreign exchange - net
	(4.574)	Others
Jumlah	(1.599.488)	Total

18. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG BERELASI

a. Kas dan kas di bank

	31 Desember/ December 31, 2021
Kas di bank	
Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	40.267.910
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	16.610.486
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	169.810
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	245.993
Subjumlah	57.294.199
Dolar AS	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	88.426.007
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	5.190.128
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	48.714
Subjumlah	93.664.849
Jumlah (Catatan 4)	150.959.048

18. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS

a. Cash on hand and cash in bank

	31 Desember/ December 31, 2020	
Cash in banks		
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.989.990	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	180.713.432	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Subtotal	182.703.422	Subtotal
US Dollar		US Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	5.533.351	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	313.449.137	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Subtotal	318.982.488	Subtotal
Total (Note 4)	501.685.910	Total (Note 4)

b. Utang usaha

	31 Desember 2021/ December 31, 2021
PT Kilang Pertamina Internasional	346.224.271
PT Pertamina Training & Consulting	2.155.686
PT Prima Armada Raya	544.628
PT Patra Jasa	383.056
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	287.819
PT Mitra Tours & Travel	122.322
PT Pertamina (Persero)	72.282
Lain-lain (masing-masing dibawah US\$70.000)	130.669
Jumlah (Catatan 8)	349.920.733

b. Trade payables

	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
PT Kilang Pertamina Internasional	-	PT Kilang Pertamina Internasional
PT Pertamina Training & Consulting	2.322.031	PT Pertamina Training & Consulting
PT Prima Armada Raya	118.532	PT Prima Armada Raya
PT Patra Jasa	-	PT Patra Jasa
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	-	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
PT Mitra Tours & Travel	-	PT Mitra Tours & Travel
PT Pertamina (Persero)	561.261.220	PT Pertamina (Persero)
Others (each below US\$70.000)	5.925.743	Others (each below US\$70.000)
Total (Note 8)	569.627.526	Total (Note 8)

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

14. UANG MUKA UNTUK MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada 31 Desember 2020, atas pencatatan uang muka untuk modal saham yang dicatat pada tahun 2019 telah diaktakan dengan akta No. 9 Tanggal 26 Mei 2020. Berdasarkan akta tersebut, atas pencatatan uang muka modal saham tersebut pada tahun 2020, telah diakui sebagai modal saham. Pada 31 Desember 2020, berdasarkan Surat Persetujuan Permintaan Proses Pembayaran atas Penyertaan Modal Pertamina (PMP) kepada PT Kilang Pertamina Internasional untuk PT Kilang Pertamina Balikpapan Tahun 2020 No. 098/KPI00000/2020-S4 tanggal 14 Agustus 2020, Perusahaan mencatat penerimaan uang muka untuk modal saham dari PT Kilang Pertamina Internasional sebesar Rp3.889.481.162.095 (nilai penuh) setara dengan US\$271.241.143 (nilai penuh) dan US\$413.949.669 (nilai penuh).

Pada 31 Desember 2019, berdasarkan Memo Penyertaan Modal PT Kilang Pertamina Internasional untuk PT Kilang Pertamina Balikpapan (Proyek Refinery Development Master Plan Unit Pengolahan V Balikpapan) dan Modal Kerja No. 050/KPI0000/2019-S0 tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan mencatat penerimaan uang muka untuk modal saham dengan rincian PT Kilang Pertamina Internasional sebesar Rp59.589.700.650 (nilai penuh) setara dengan US\$4.273.195 (nilai penuh) dan US\$80.262.646 (nilai penuh) dan PT Pertamina Pedeve Indonesia sebesar Rp59.649.350 (nilai penuh) setara dengan US\$4.291 (nilai penuh) dan US\$80.342 (nilai penuh).

14. ADVANCE FOR SHARE CAPITAL (continued)

As of December 31, 2020, the registration of advances for share capital recorded in 2019 was notarized under deed No. 9 Dated 26 May 2020. Based on the deed, the recording of advance for share capital in 2020 has been recognized as share capital. As of December 31, 2020, Based on the Approval Letter for the Payment Process Request for Pertamina Equity Participation (PMP) to PT Kilang Pertamina Internasional for PT Kilang Pertamina Balikpapan Year 2020 No. 098/KPI00000/2020-S4 dated August 14, 2020, the Company recorded receipt of advances for share capital from PT Kilang Pertamina Internasional amounting to Rp3,889,481,162,095 (full amount) equivalent to US\$271,241,143 (full amount) and US\$413,949,669 (full amount).

As of December 31, 2019, based on the Memo of Participation of PT Kilang Pertamina Internasional for PT Kilang Pertamina Balikpapan (Refinery Development Master Plan of Refinery Unit V Balikpapan Project) and Working Capital No. 050/KPI0000/2019-S0 dated December 20, 2019, the Company recorded advance payments for share capital with details of PT Kilang Pertamina Internasional amounting to Rp59,589,700,650 (full amount) equivalent to US\$4,273,195 (full amount) and US\$80,262,646 (full amount) and PT Pertamina Pedeve Indonesia in the amount of Rp59,649,350 (full amount) equivalent to US\$4,291 (full amount) and US\$80,342 (full amount).

15. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	31 Desember/ December 31, 2021
Kewajiban imbalan pasca kerja	(669.995)
Pajak bunga	(399.889)
Pajak ditanggung Perusahaan	(40.598)
BPJS Kesehatan dan Asuransi	(1.982)
Jumlah	(1.112.464)

15. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE

	31 Desember/ December 31, 2020	
	(397.558)	Past service liability expense
	(78.124)	Interest taxes
	(19.682)	Tax borne by the Company
	(287)	Employee insurance
Jumlah	(495.651)	Total

16. PENDAPATAN KEUANGAN

	31 Desember/ December 31, 2021
Bunga bank	2.147.020
Jumlah	2.147.020

16. FINANCE INCOME

	31 Desember/ December 31, 2020	
	445.671	Interest income
Jumlah	445.671	Total

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

13. SALDO LABA DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Amandemen Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007 mengharuskan pembentukan cadangan wajib dari laba ditahan sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Pada 31 Desember 2021, Perusahaan belum melakukan pencadangan saldo laba sebagai cadangan wajib.

13. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

An amendment to the Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007, issued in August 2007 requires the establishment of a statutory reserve for retained earnings amounting to at least 20% of a company's issued and paid up capital.

At December 31, 2021, the Company had not set up appropriated retained earnings.

14. UANG MUKA UNTUK MODAL SAHAM

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Kilang Pertamina Balikpapan pada tanggal 28 April 2020, bahwa pemegang saham Perusahaan setuju untuk menambah modal ditempatkan dan disetor dengan rincian sebagai berikut:

14. ADVANCE FOR SHARE CAPITAL

Based on the Circular Shareholders' Decree of PT Kilang Pertamina Balikpapan on April 28, 2020, that the Company's shareholders agreed to increase the issued and paid up capital with the details as follows:

31 Desember/December 31, 2021

Pemegang saham	Jumlah lembar ditempatkan dan disetor/ Total issued and paid-up share	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Uang muka setoran modal (nilai penuh)/ Advance for share issued (full amount)	Shareholders
PT Kilang Pertamina Internasional	226.446.515	100,00%	1.585.190.812	PT Kilang Pertamina Internasional
PT Pertamina Pedeve Indonesia	-	0,00%	-	PT Pertamina Pedeve Indonesia
Jumlah	226.446.515	100,00%	1.585.190.812	Total

31 Desember/December 31, 2020

Pemegang saham	Jumlah lembar ditempatkan dan disetor/ Total issued and paid-up share	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Uang muka setoran modal (nilai penuh)/ Advance for share issued (full amount)	Shareholders
PT Kilang Pertamina Internasional	98.115.515	100,00%	685.190.812	PT Kilang Pertamina Internasional
PT Pertamina Pedeve Indonesia	-	0,00%	-	PT Pertamina Pedeve Indonesia
Jumlah	98.115.515	100,00%	685.190.812	Total

Pada 31 Desember 2021, berdasarkan Surat Persetujuan Permintaan Proses Pembayaran atas Penyertaan Modal Pertamina (PMP) kepada PT Kilang Pertamina Internasional untuk PT Kilang Pertamina Balikpapan Tahun 2021 No. 030/KPI00000/2021-S4 tanggal 21 Desember 2021, Perusahaan mencatat penerimaan uang muka untuk modal saham dari PT Kilang Pertamina Internasional sebesar US\$900.000.000 (nilai penuh).

As of December 31, 2021, based on the Letter of Approval of The Payment Process Request for Pertamina Capital Participation (PMP) to PT Kilang Pertamina International for PT Kilang Pertamina Balikpapan Year 2021 No. 030 /KPI00000/2021-S4 dated December 21, 2021, the Company recorded a down payment receipt for share capital from PT Kilang Pertamina International of US\$900,000,000 (full amount).

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

**11. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

d. Asumsi-asumsi aktuarial (lanjutan)

Durasi rata-rata tahun liabilitas manfaat pascakerja di akhir periode pelaporan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PAP	28,93	-
Pemulangan	30,46	-
MPPK	31,08	-
UTD	19,66	-

Nilai kewajiban yang dihitung oleh PT Pertamina (Persero) dan dialokasikan ke Anak Perusahaan dihitung berdasarkan:

- Rumusan imbalan yang berlaku di PT Pertamina (Persero)
- Data dan asumsi aktuarial yang digunakan dalam pelaporan PSAK 24 PT Pertamina (Persero).
- Terkait disclosure lengkap pekerja perbantuan telah dihitung dan diungkapkan dalam laporan PSAK 24 PT Pertamina (Persero)

Alokasi kewajiban ini meliputi seluruh imbalan kerja yang berlaku di persero - yaitu:

- Dana Pensiun Pertamina ("DPP").
- Penghargaan Atas Pengabdian ("PAP").
- Kesehatan Pasca Pensiun.

12. MODAL SAHAM

Modal saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah lembar ditempatkan dan disetor/ Total issued and paid-up share	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Modal ditempatkan dan disetor (nilai penuh)/ Issued and paid-up capital (full amount)	Shareholders
PT Kilang Pertamina Internasional	11.763.205	99,90%	84.605.682	PT Kilang Pertamina Internasional
PT Pertamina Pedeve Indonesia	11.810	0,10%	84.703	PT Pertamina Pedeve Indonesia
Jumlah	11.775.015	100,00%	84.690.385	Total

11. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

d. Actuarial assumptions (continued)

The average duration years of the Company's defined benefits plan obligation at the end of the reporting period are as follows:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020
PAP	28,93	-
Repatriation	30,46	-
Pre-Retirement Benefit	31,08	-
Service Anniversary	19,66	-

The liability value calculated by PT Pertamina (Persero) and allocated to Subsidiaries is calculated based on:

- The formulation of the benefits applicable to PT Pertamina (Persero)
- Actuarial data and assumptions used in PT Pertamina (Persero)'s SFAS 24 reporting.
- Regarding the complete disclosure of seconded employee, it has been calculated and disclosed in the SFAS 24 report of PT Pertamina (Persero).

This liability allocation covers following benefits:

- Dana Pensiun Pertamina ("the DPP").
- Penghargaan Atas Pengabdian ("PAP").
- Post Retirement Healthcare.

12. SHARE CAPITAL

The Company's share capital as of December 31, 2021 and 2020 were as follows:

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

**11. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

11. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

d. Asumsi-asumsi aktuarial (lanjutan)

d. Actuarial assumptions (continued)

	31 Des / Dec 2021	31 Des / Dec 2020	
Tingkat diskonto:			<i>Discount rate:</i>
Program imbalan pasti dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina	6,65% per tahun/annum	6,15% per tahun/annum	<i>Defined benefits plan administered by Dana Pensiun Pertamina</i>
PAP	7,56% per tahun/annum	7,83% per tahun/annum	<i>Annual leave</i>
Tunjangan kesehatan pascakerja	7,60% per tahun/annum	7,70% per tahun/annum	<i>Post-retirement healthcare benefits</i>
Biaya pemulangan	7,55% per tahun/annum	7,83% per tahun/annum	<i>Repatriation cost</i>
MPPK	7,55% per tahun/annum	7,83% per tahun/annum	<i>MPPK</i>
Ulang tahun dinas	7,59% per tahun/annum	7,41% per tahun/annum	<i>services anniversary</i>
Tingkat inflasi emas per tahun	8,00% per tahun/annum	8,00% per tahun/annum	<i>Annual Gold inflation rate</i>
Kenaikan gaji per tahun:	8,22% per tahun/annum	9,50% per tahun/annum	<i>Annual salary increases:</i>
Tren biaya kesehatan tahunan:	8,00% per tahun untuk seterusnya/per annum afterwards	8,00% per tahun untuk seterusnya/per annum afterwards	<i>Annual medical expense trend:</i>
Faktor demografis:			<i>Demographic factors:</i>
Tingkat kematian:	Tabel Mortalita Indonesia 4-2019 ("TMI 4" 2019)	Tabel Mortalita Indonesia 4-2019 ("TMI 4" 2019)	<i>Mortality:</i>
Tingkat cacat:	0,75% TMI 4	0,75% TMI 4	<i>Disability:</i>
Pengunduran diri:	1%	1%	<i>Resignation:</i>
Sampai usia 25 (per tahun)	berkurang secara linear ke 0% di usia 56 dan setelahnya/ <i>reducing linearly to 0% at age 56 and thereafter</i>	berkurang secara linear ke 0% di usia 56 dan setelahnya/ <i>reducing linearly to 0% at age 56 and thereafter</i>	<i>To 25 years of age (annually)</i>
Usia 26 - 45 (per tahun)			<i>Ages 26 - 45 (annually)</i>
Pensiun:	100% pada usia pensiun normal/ 100% at normal retirement age	100% pada usia pensiun normal/ 100% at normal retirement age	<i>Pension:</i>
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	<i>Normal retirement age</i>
Biaya operasional program pensiun:	8% dari biaya jasa dan 2,11% dari pembayaran manfaat/ 8% of service cost and 2,11% of benefit payments	8% dari biaya jasa dan 2,11% dari pembayaran manfaat/ 8% of service cost and 2,11% of benefit payments	<i>Operational costs of the pension plan:</i>

Analisis sensitivitas kualitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The qualitative sensitivity analysis for significant assumptions as of December 31, 2021 is as follows:

	Kenaikan tingkat diskonto 1%/1% increase in discount rate	Penurunan tingkat diskonto 1%/1% decrease in discount rate	
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti - naik (turun)	(227)	302	<i>Effect on defined benefit obligation - increase (decrease)</i>
	Kenaikan tingkat upah 1%/1% increase in salary rate	Penurunan tingkat upah 1%/1% decrease in salary rate	
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti - naik (turun)	222	(169)	<i>Effect on defined benefit obligation - increase (decrease)</i>

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam US Dollar,
 kecuali dinyatakan lain)

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2021
 (Expressed in US Dollar,
 unless otherwise stated)

11. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

11. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

c. Perubahan nilai kini dari liabilitas imbalan kerja dan aset program (lanjutan)

c. Changes in present value of post-employment benefit obligations and fair value of plan assets (continued)

(i) Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

(i) Post-employment benefit obligations (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021

	MPPK	Uang tahun dinas/Service anniversary	Jumlah/Total	
Saldo awal	-	-	-	Beginning balance
Biaya jasa kini	7.248	7.152	14.400	Current service cost
Bunga neto	36	34	70	Interest cost
Pengakuan (keuntungan)/kerugian aktuarial	(1.836)	348	(1.488)	Recognition of actuarial (gain)/loss
Saldo akhir	5.448	7.534	12.982	Ending balance

Mutasi pendapatan komprehensif lain untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Movements in the other comprehensive income for the years ended December 31, 2021, and 2020 are as follows:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/for the year ended December 31, 2021	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/for the year ended December 31, 2020	
Saldo awal tahun	-	-	Balance at the beginning of the year
Keuntungan aktuarial	(21.749)	-	Actuarial gain
Saldo akhir tahun	(21.749)	-	Balance at the end of the year

d. Asumsi-asumsi aktuarial

d. Actuarial assumptions

Asumsi-asumsi aktuarial signifikan yang diterapkan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk Perusahaan adalah sebagai berikut:

The significant actuarial assumptions that are applied in the calculation of the post-employment benefits and other long-term employee benefits for the Company are as follows:

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)

11. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

11. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

c. Perubahan nilai kini dari liabilitas imbalan kerja dan aset program

c. Changes in present value of post-employment benefit obligations and fair value of plan assets

Tabel berikut ini merangkum komponen biaya manfaat bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya dan status pendanaan serta jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk masing-masing manfaat untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

The following tables summarise the components of net benefit expense recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the funded status and amounts recognised in the statement of financial position for the respective plans for the years ended December 31, 2021 are as follows:

(i) Liabilitas imbalan pascakerja

(i) Post-employment benefit obligations

31 Desember 2021/December 31, 2021

	PAP/PAP	Biaya pemulangan/ Repatriation Cost	Jumlah/Total	
Saldo awal	-	-	-	<i>Beginning balance</i>
Biaya jasa kini	86.796	994	87.790	<i>Current service cost</i>
Beban bunga (pendapatan bunga) perbantuan	441	5	446	<i>Interest expense (Interest income) employee benefits</i>
Sub-jumlah yang diakui dalam laporan laba-rugi	87.237	999	88.236	<i>Sub-total amounts recognized in profit or loss</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial atas:				<i>Actuarial (gain) loss arising from:</i>
Perubahan asumsi ekonomi	(21.199)	61	(21.138)	<i>Changes in financial assumptions</i>
Penyesuaian pengalaman	(600)	(11)	(611)	<i>Experience adjustments</i>
Sub-jumlah biaya (penghasilan) diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(21.799)	50	(21.749)	<i>Sub-total Expense (income) recognized in comprehensive income</i>
Saldo akhir	65.438	1.049	66.487	<i>Ending balance</i>

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)

11. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)

11. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

b. Provisi imbalan kerja karyawan

b. Provision for employee benefits

Taksiran kewajiban imbalan kerja Perusahaan dan sebagian besar entitas anaknya per tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dihitung berdasarkan laporan penilaian dari Kantor Konsultan Aktuaria Steven dan Mourits. Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar kewajiban imbalan kerja sebagaimana tercatat pada laporan keuangan:

The estimated employee benefits obligations of the Company and most of its Subsidiaries as of December 31, 2021 and 2020 were determined based on the valuation reports from Kantor Konsultan Aktuaria Steven and Mourits. The table below presents a summary of the employee benefits obligations reported in the statements of financial position:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Karyawan			PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Kilang Pertamina Balikpapan			- Direct hire
PAP	65.438	-	PAP
Tunjangan Sebelum Masa Pensiun	5.448	-	Pre-Retirement Benefit
Tunjangan Ulang Tahun Dinas	7.534	-	Service Anniversary
Pemulangan	1.049	-	Repatriation
Jumlah	79.469	-	Total
Karyawan Perbantuan			PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina (Persero)			- Secondee
PAP	551.447	236.998	PAP
Pasca Kerja	53.127	19.940	Post Employment Benefit
Tunjangan Sebelum Masa Pensiun	-	40.550	Pre-Retirement Benefit
Tunjangan Ulang Tahun Dinas	-	2.939	Service Anniversary
Tunjangan Kesehatan Setelah Pensiun	218.591	65.515	Post Retirement Healthcare Benefit
Pemulangan	-	1.738	Repatriation
Jumlah	823.165	367.680	Total
Karyawan Perbantuan PT Badak LNG			PT Badak LNG - Secondee
PAP	30.803	-	PAP
Tunjangan Kesehatan Setelah Pensiun	10.529	-	Post Retirement Healthcare Benefit
Jumlah	41.332	-	Total
Jumlah liabilitas imbalan kerja	943.966	367.680	Total employee benefits liabilities

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

**11. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

- a. Program imbalan pascakerja dan imbalan kerja lainnya (lanjutan)
2. Program imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Karyawan tetap Perusahaan

Kelompok ini terdiri dari seluruh karyawan permanen yang direkrut secara langsung oleh Perusahaan ("Direct Hire").

Imbalan kerja

Imbalan kerja karyawan yang dihitung dalam laporan aktuarial meliputi:

1. Imbalan pascakerja (PEB), yang dibayarkan langsung oleh Perusahaan, terdiri dari penghargaan atas pengabdian, biaya pemulangan dan selisih pesangon;
2. Imbalan Jangka Panjang Lainnya ("IJPL"), yang terdiri atas ulang tahun dinas

Alokasi kewajiban dari Pertamina untuk karyawan perbantuan Pertamina

Sesuai dengan kebijakan Pertamina, Perusahaan harus mengakui sejumlah alokasi kewajiban terkait imbalan-imbalan yang diberikan oleh Pertamina kepada karyawan *seconded* Pertamina yang diperbantukan di anak perusahaan.

Kebijakan ini baru diberlakukan oleh Pertamina, di tahun 2020. Sebelumnya, anak perusahaan Pertamina (termasuk Perusahaan) hanya dibebankan sejumlah alokasi beban.

Hal ini merupakan pengaturan pembagian kewajiban antara Pertamina dan anak perusahaan terkait periode (atau masa kerja) perbantuan karyawan di anak perusahaan.

11. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

- a. Post-employment benefit plans and other employee benefits (continued)
2. Other long-term employee benefits plan (continued)

Company's permanent employees

This group consists of all permanent employees who are directly hired by the Company ("the Direct Hire").

Employee benefits

The employee benefits covered in actuarial report are as follows:

1. Post employment benefits ("PEB") that are paid directly by the Company, consist of penghargaan atas pengabdian, biaya pemulangan (repatriation) and severance payment;
2. Other Long-term Employee Benefits ("OLTEB") that consist of Jubelium

Liability allocation from Pertamina for seconded Pertamina employees

Based on Pertamina's policies, the Company should recognize a number of liability allocation in relation to the benefits provided by Pertamina to the *seconded* Pertamina employees who are *seconded* at the subsidiaries companies.

This policy is just implemented by Pertamina in 2020. Previously, the Company were only charged a certain amount of the allocation of expenses.

This liability sharing arrangement between Pertamina and the subsidiaries companies in relation to *seconded* period (or services) of the employees at the subsidiaries companies.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

**11. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

a. Program imbalan pascakerja dan imbalan kerja lainnya (lanjutan)

1. Program imbalan pascakerja (lanjutan)

(ii) Tunjangan kesehatan pascakerja

Tunjangan kesehatan pascakerja meliputi para pensiunan Perusahaan dan pasangannya yang telah menyelesaikan masa kerja minimum 15 tahun dan usia minimum 46 tahun.

(iii) Penghargaan atas pengabdian ("PAP")

Manfaat PAP terdiri dari imbalan tambahan yang diberikan pada saat karyawan memasuki usia pensiun dan dalam hal mengalami cacat tetap, meninggal, atau mengundurkan diri secara sukarela.

2. Program imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk tunjangan Masa Persiapan Purnakarya ("MPPK"), biaya pemulangan, tunjangan cuti, Program Asuransi Mandiri Guna I dan ulang tahun dinas, kecuali untuk program asuransi.

Kelompok karyawan

Kelompok karyawan yang tercakup dalam laporan ini adalah:

Karyawan perbantuan Pertamina

Kelompok ini terdiri dari karyawan permanen yang ditempatkan/diperbantukan di Perusahaan oleh Pertamina (karyawan perbantuan).

11. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

a. Post-employment benefit plans and other employee benefits (continued)

1. Post-employment benefit plans (continued)

(ii) Post-retirement healthcare benefits

The post-retirement healthcare benefits involve the Company's retired employees and their spouses that had minimum 15 years of services and minimum 46 years old.

(iii) Severance and service pay ("PAP")

PAP benefits consist of additional benefits for employees to which they are entitled when they enter the pension age and in the event of permanent disability, death, or voluntary resignation.

2. Other long-term employee benefits plan

The Company provides other long-term employee benefits in the form of pre-retirement benefits ("MPPK"), repatriation costs, annual leave, the Mandiri Guna I Insurance Program and service anniversaries, except for the insurance program benefit.

Employee groups

Group of employees that are included in this report are as follows:

Pertamina's secondees

This group consists of permanent employees who are placed/seconed at the Company by Pertamina (seconded employees).

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak tangguhan (lanjutan)

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan" yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu; dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dari semula 10% menjadi 11% yang akan berlaku mulai dari 1 April 2022, dan akan menjadi 12% yang akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

Aset pajak tangguhan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 telah memperhitungkan tarif pajak yang berlaku untuk setiap periode yang terkait.

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan tersebut di atas dapat dipulihkan melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

11. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

a. Program imbalan pascakerja dan imbalan kerja lainnya

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu menyelenggarakan program imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya sebagai berikut:

1. Program imbalan pascakerja

(i) Program imbalan pasti dikelola Dana Pensiun Pertamina

Perusahaan dan entitas anak tertentu telah menerima persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Pengesahan No. S-190/MK.6/1977 tanggal 15 Juli 1977 untuk mendirikan dana pensiun terpisah, Dana Pensiun Pertamina, dimana seluruh pekerja, setelah memenuhi periode bakti tertentu, berhak atas imbalan pasti saat pensiun, cacat atau kematian, serta imbalan kesehatan pascakerja. Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") ini berlaku bagi pekerja yang direkrut sebelum tahun 2005.

10. TAXATION (continued)

e. Deferred tax (continued)

On October 29, 2021, the Government issued a Law of the Republic of Indonesia Number 7 Year 2021 about Harmonization of Tax Regulations which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income taxpayers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% starting in fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria; and increase of the value added tax rate from previously 10% to become 11% effective from April 1, 2022 and become 12% no later than January 1, 2025.

Deferred tax assets as of December 31, 2021 have been calculated taking into account the applicable tax rates for each respective period.

Management is of the opinion that the above deferred tax assets can be fully recovered through future taxable income.

11. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

a. Post-employment benefit plans and other employee benefits

The Company and certain Subsidiaries have post-employment benefit plans and provide other long-term employee benefits as follows:

1. Post-employment benefit plans

(i) Defined benefit plan managed by Dana Pensiun Pertamina

The Company and certain Subsidiaries received approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. S-190/MK.6/1977 dated July 15, 1977 to establish a separate pension fund, Dana Pensiun Pertamina, from which all employees, after serving a qualifying period, are entitled to defined benefits upon retirement, disability or death, and also post-employment medical benefits. The Defined Benefit Plans ("PPMP") cover employees who were hired before year 2005.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

d. Pajak kini (lanjutan)

d. Current taxes (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan Perusahaan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the Company's income tax expense and the theoretical tax amount on the profit before income tax is as follows:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan	2.596.260	(1.649.468)	Profit/(loss) before income tax
Pajak penghasilan dihitung dengan rata-rata tarif pajak <i>statutory</i>	571.177	(362.883)	Tax calculated at weighted average statutory tax rates
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	125.203	35.931	Non-deductible expenses
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(472.344)	(98.048)	Interest income subject to final tax
Rugi fiskal yang tidak diakui	-	351.950	Unrecognized tax loss
Utilisasi rugi fiskal tahun lalu	(343.163)	-	Utilization tax loss carry forward
Penyesuaian tarif pajak	(6.641)	6.641	Tax rate adjustment
Manfaat pajak penghasilan	(125.768)	(66.409)	Income tax benefit

e. Pajak tangguhan

e. Deferred tax

	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Penambahan dari bisnis kombinasi/ Additions from business combination	Dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif lain/ Charged to OCI	Dibebankan pada laporan laba rugi/ Charged to profit or loss	Penyesuaian perubahan tarif pajak pada laporan penghasilan komprehensif lain/ Adjustments for changes in tax rates on OCI	Penyesuaian perubahan tarif pajak pada laporan laba rugi/ Adjustments for changes in tax rates on profit or loss	31 Desember 2021/ December 31, 2021	
Aset pajak tangguhan	60.433	-	(12.854)	119.127	(597)	6.641	172.750	Deferred tax assets
Imbalan kerja karyawan	60.433	-	(12.854)	119.127	(597)	6.641	172.750	Employee benefits
Jumlah aset pajak tangguhan	60.433	-	(12.854)	119.127	(597)	6.641	172.750	Total deferred tax assets

	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Penambahan dari bisnis kombinasi/ Additions from business combination	Dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif lain/ Charged to OCI	Dibebankan pada laporan laba rugi/ Charge to profit or loss	Penyesuaian perubahan tarif pajak pada laporan penghasilan komprehensif lain/ Adjustments for changes in tax rates on OCI	Penyesuaian perubahan tarif pajak pada laporan laba rugi/ Adjustments for changes in tax rates on profit or loss	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Aset pajak tangguhan	-	-	(5.976)	66.409	-	-	60.433	Deferred tax assets
Imbalan kerja karyawan	-	-	(5.976)	66.409	-	-	60.433	Employee benefits
Jumlah aset pajak tangguhan	-	-	(5.976)	66.409	-	-	60.433	Total deferred tax assets

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in Lieu of the Republic of Indonesia Law No. 1 of 2020 which stipulates, among other things, a reduction in the income tax rate of domestic corporate taxpayers and permanent business forms from the original 25% to 22% for the 2020 and 2021 tax year, as well as a further reduction of the tax rate of 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Tax payable

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Pajak lain-lain:			<i>Other taxes:</i>
- PPh Pasal 4 (2)	5.445.697	753.302	<i>Article 4(2) -</i>
- PPh Pasal 21	139.293	157.148	<i>Article 21 -</i>
- PPh Pasal 23	4.624	2.349	<i>Article 23 -</i>
- PPh Pasal 26	-	6.079	<i>Article 26 -</i>
- PPN	4.000	25.336	<i>VAT payable -</i>
Jumlah	5.593.614	944.214	Total

c. Manfaat pajak penghasilan

c. Income tax benefit

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Manfaat pajak tangguhan	125.768	66.409	<i>Deferred income tax benefit</i>
Jumlah	125.768	66.409	Total

d. Pajak kini

d. Current taxes

Perhitungan antara laba (rugi) sebelum pajak pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan etsimasi laba (rugi) fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, adalah sebagai berikut:

Reconciliation between profit (loss) before income tax, as presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income, and at the estimated fiscal income (loss) for the years ended December 31, 2021 is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Laba/(rugi) sebelum beban pajak penghasilan	2.596.260	(1.649.468)	<i>Profit/(loss) before income tax expense</i>
Perbedaan temporer:			<i>Temporary differences:</i>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	541.491	332.043	<i>Employee benefit liabilities</i>
Perbedaan permanen:			<i>Temporary differences:</i>
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	569.104	163.322	<i>Non-deductible expenses</i>
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(2.147.020)	(445.671)	<i>Interest income subject to final tax</i>
Jumlah perbedaan temporer dan permanen	(1.036.425)	49.694	<i>Total temporary and permanent differences</i>
Laba/(rugi) fiskal	1.559.835	(1.599.774)	<i>Taxable income/(loss)</i>
Rugi pajak 2020	(1.599.774)	-	<i>Taxable loss 2020</i>
Akumulasi sisa rugi pajak	(39.939)	(1.599.774)	<i>Accumulated tax loss carry forward</i>

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

8. UTANG USAHA (lanjutan)

Utang usaha kepada pihak ketiga merupakan utang terkait dengan *Asset Under Construction* (AUC) pekerjaan EPC ISBL/OSBL di PT Kilang Pertamina Balikpapan sejak adanya novasi kontrak dari PT Pertamina (Persero).

8. TRADE PAYABLE (continued)

Trade payable to third party represents payables in relation to *Asset Under Construction* (AUC) EPC ISBL/OSBL at PT Kilang Pertamina Balikpapan post contract novation from PT Pertamina (Persero).

9. UTANG SEWA

Pembayaran minimum sewa

Akun ini merupakan pembayaran sewa minimum Perusahaan di masa yang akan datang dari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan sewa kendaraan.

9. LEASE LIABILITIES

Future minimum of lease payment

This account represents The Company's minimum rental payment in the future from transactions related to vehicle rental.

Pembayaran sewa minimum masa akan datang pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Future minimum lease payments as of December 31, 2021 is as follows:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
Dalam 1 tahun	1.170.829	-	<i>Within 1 year</i>
Dalam 1 - 5 tahun	221.548	-	<i>Within 1 - 5 years</i>
Total pembayaran minimum sewa	1.392.377	-	<i>Total future minimum lease payments</i>
Total biaya bunga	(52.906)	-	<i>Total interest expense</i>
Nilai wajar pembayaran minimum sewa	1.339.471	-	Present value of minimum lease payments
Jangka pendek	1.139.268	-	<i>Short-term</i>
Jangka panjang	200.203	-	<i>Long-term</i>
Total pembayaran minimum sewa	1.339.471	-	Total future minimum lease payments

10. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

Pada 31 Desember 2021, PPN Masukan diperoleh atas pembelian dan/ penyerahan yang didominasi oleh Jasa Kena Pajak (JKP) sehubungan dengan konstruksi pembangunan kilang dengan nilai yang signifikan.

10. TAXATION

a. Prepaid taxes

As of December 31, 2021, Prepaid Taxes VAT-In was obtained on purchases and/deliveries which were dominated by taxable services (JKP) in connection with the construction of the refinery with a significant value.

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
PPH Pasal 21	477	325	<i>Article 21</i>
PPH Pasal 22	2.650.814	-	<i>Article 22</i>
PPN	206.463.589	54.165.700	<i>Value added tax</i>
Jumlah	209.114.880	54.166.025	Total

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)

7. ASET HAK GUNA

7. RIGHT OF USE ASSETS

31 Desember/December 31, 2021					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset sewa pembiayaan: HBM bergerak	-	1.635.495	-	1.635.495	Finance lease assets: Movable assets
Jumlah harga perolehan	-	1.635.495	-	1.635.495	Total acquisition cost
Akumulasi penyusutan Perolehan langsung: HBM bergerak	-	(286.282)	-	(286.282)	Accumulated depreciation Direct acquisition: Movable assets
Jumlah Akumulasi Penyusutan	-	(286.282)	-	(286.282)	Total accumulated Depreciation
Jumlah Nilai Buku	-	1.349.213	-	1.349.213	Net book values

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan memiliki aset hak guna terdiri dari sewa kendaraan. Seluruh beban penyusutan atas aset hak guna dikapitalisasi menjadi aset dalam penyelesaian karena digunakan untuk kegiatan proyek konstruksi.

On December 31, 2021, the Company has right of use assets consist of rented vehicles. All depreciation expense on right of use assets are capitalized into asset under construction since they are used for construction project activities.

8. UTANG USAHA

8. TRADE PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2021	31 Desember/ December 31, 2020	
Pihak berelasi:			Related parties:
Dolar AS	215.944.140	359.939.436	US Dollar
Rupiah	133.976.593	209.688.090	Rupiah
Sub jumlah (Catatan 18b)	349.920.733	569.627.526	Sub total (Note 18b)
Pihak ketiga:			Third party:
Dolar AS	102.348.938	115.981.426	US Dollar
Rupiah	69.415.668	61.267.912	Rupiah
Lain-lain	-	198.758	Others
Sub jumlah	171.764.606	177.448.096	Sub total
Jumlah	521.685.339	747.075.622	Total

Utang usaha kepada pihak berelasi merupakan pengakuan utang atas Asset Under Construction (AUC) pekerjaan EPC ISBL/OSBL yang telah dibayarkan oleh PT Pertamina (Persero) sebelum novasi kontrak ke PT Kilang Pertamina Balikpapan (Catatan 21). Namun dikarenakan adanya aksi korporasi berupa pemindahan hak dan kewajiban PT Pertamina (Persero) kepada PT Kilang Pertamina Internasional maka pengakuan atas utang tersebut menjadi utang kepada PT Kilang Pertamina Internasional.

Trade payable to related parties represent the recognition accrual amount in relation to Asset Under Construction (AUC) EPC ISBL/OSBL that previously paid by PT Pertamina (Persero) prior to contract novation to PT Kilang Pertamina Balikpapan (Note 21). But due to the corporate action in the form of transfer of rights and obligations of PT Pertamina (Persero) to PT Kilang Pertamina Internasional, the recognition of the debt becomes a debt to PT Kilang Pertamina Internasional.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

5. BIAYA DIBAYAR DIMUKA (lanjutan)

Uang muka kerja pekerja merupakan penggunaan uang muka kerja oleh pekerja Perusahaan untuk kebutuhan operasional fungsi masing-masing yang dimulai sejak Juni 2020.

5. PREPAYMENTS (continued)

Employee working advance represent used of advances taken by the Company's employees for the operational needs of their respective functions starting from June 2020.

6. ASET TETAP

6. FIXED ASSET

31 Desember/December 31, 2021

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengalihan/ Transfer	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset dalam penyelesaian	823.374.570	1.015.683.484	-	1.839.058.054	Asset under construction
Jumlah	823.374.570	1.015.683.484	-	1.839.058.054	Total

31 Desember/December 31, 2020

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengalihan/ Transfer	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset dalam penyelesaian	23.168	475.606.843	347.744.559	823.374.570	Asset under construction
Jumlah	23.168	475.606.843	347.744.559	823.374.570	Total

Pada 31 Desember 2021, aset tetap yang dimiliki Perusahaan merupakan aset tetap yang berasal dari kapitalisasi biaya atas progres pekerjaan EPC ISBL/OSBL, Project Management Consultant, serta biaya lainnya pada fase konstruksi Proyek RDMP Balikpapan. Novasi kontrak EPC ISBL/OSBL dari Pertamina-RDMP Balikpapan JO menjadi KPB - RDMP Balikpapan JO yang dilakukan pada bulan April 2020 serta *bipartite agreement* antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Kilang Balikpapan yang dilakukan pada Mei 2020 (Catatan 21) menyebabkan nilai aset tetap yang merupakan biaya konstruksi yang dikeluarkan dan sebelumnya diakui oleh PT Pertamina (Persero) dialihkan kepada PT Kilang Pertamina Balikpapan.

Bipartite agreement tersebut sedang dilakukan amandemen dan novasi dari PT Pertamina (Persero) kepada PT Kilang Pertamina Internasional sebagai dampak atas re-organisasi dan restrukturisasi holding dan sub-holding di PT Pertamina (Persero).

Pada 31 Desember 2021, penyelesaian atas proyek Refinery Development Mega Project (RDMP) Balikpapan dan Lawe-Lawe telah mencapai persentase sebesar 46,91% dan diestimasi akan selesai pada tahun 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset dalam penyelesaian pertanggungjawaban asuransinya masih dalam tanggung jawab kontraktor.

As of December 31, 2021, the fixed assets owned by the Company are fixed assets derived from the capitalization of costs on the progress of EPC ISBL/OSBL work, Project Management Consultant, and other costs in the construction phase of the Balikpapan RDMP Project. The novation EPC ISBL/OSBL contract from Pertamina-RDMP Balikpapan JO to KPB - RDMP Balikpapan JO conducted in April 2020 and *bipartite agreement* between PT Pertamina (Persero) with PT Kilang Balikpapan conducted in May 2020 (Note 21) result in the transfer of fixed asset amount which represent construction costs incurred and previously recognized by PT Pertamina (Persero) transferred to PT Kilang Pertamina Balikpapan.

Bipartite agreement is currently being amended and novated from PT Pertamina (Persero) to PT Kilang Pertamina International as an impact on re-organization and re-structuring holding and sub-holding at PT Pertamina (Persero).

As of December 31, 2021, the completion of project Refinery Development Mega Project (RDMP) Balikpapan and Lawe-Lawe have reach percentage amounted to 46.91% and is estimated to be completed in 2024.

As of December 31, 2021 and 2020, the insurance coverage is still under the responsibility of the contractor.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN KAS DI BANK

	31 Desember/ December 31, 2021
Kas di bank	150.959.048
Deposito berjangka	-
Jumlah	150.959.048

Rincian kas dan kas di bank berdasarkan mata uang dan masing-masing bank sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2021
Kas di bank	
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 18a)	
- Dolar AS	93.664.849
- Rupiah	57.294.199
Jumlah	150.959.048

Deposito berjangka dengan jatuh tempo tiga bulan atau kurang:

	31 Desember/ December 31, 2021
Deposito berjangka	
Entitas berelasi dengan Pemerintah	
- Dolar AS	-
Jumlah	-

5. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2021
Uang muka kepada pihak ketiga	-
Uang muka kerja	717
Lain-lain	8.605
Jumlah	9.322

Uang muka kepada pihak ketiga merupakan uang muka yang diberikan kepada RDMP Balikpapan JO oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan senilai 5,15% dari nilai kontrak. Pelunasan uang muka tersebut secara bertahap dengan mengurangi *progress* penagihan vendor sebanyak 19 kali (Catatan 21). Pada 31 Desember 2021, saldo uang muka kepada pihak ketiga adalah nihil dikarenakan telah dilunasi oleh vendor RDMP Balikpapan JO melalui mekanisme *set-off* tagihan pekerjaan kontraktor.

4. CASH ON HAND AND CASH IN BANK

	31 Desember/ December 31, 2020	
	501.685.910	Cash in banks
	25.000.000	Time deposit
Jumlah	526.685.910	Total

The details of cash on hand and cash in bank based on currency and by individual bank were as follows:

	31 Desember/ December 31, 2020	
Kas di bank		Cash in banks
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 18a)		Government-related entities (Note 18a)
- Dolar AS	318.982.488	US Dollar -
- Rupiah	182.703.422	Rupiah -
Jumlah	501.685.910	Total

Time deposits with original maturities of three months or less:

	31 Desember/ December 31, 2020	
Deposito berjangka		Time deposit
Entitas berelasi dengan Pemerintah		Government-related entities
- Dolar AS	25.000.000	US Dollar -
Jumlah	25.000.000	Total

5. PREPAYMENTS

	31 Desember/ December 31, 2020	
Uang muka kepada pihak ketiga	112.377.190	Advances to third parties vendor
Uang muka kerja	60.488	Employee working advance
Lain-lain	-	Others
Jumlah	112.437.678	Total

Advances to third parties vendor represent advances given to RDMP Balikpapan JO by PT Kilang Pertamina Balikpapan amounting to 5.15% of the contract value. Repayment of advance is made by way of reducing vendor billing progress by 19 times (Note 21). As of December 31, 2021, the balance of advance to third parties is nil because it has been repaid by the RDMP Balikpapan JO vendor through the contractor work bill set-off mechanism.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Mata uang fungsional

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan.

Perusahaan menyimpulkan Rupiah sebagai mata uang fungsional, dengan pertimbangan:

- Pendanaan dari setoran modal pemegang saham diperoleh sebagian besar dalam Dolar AS.
- Memiliki transaksi signifikan dalam Dolar AS.

Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan penyisihan modal dan pengurangan beban tertentu selama estimasi provisi pajak penghasilan untuk setiap Perusahaan dalam Perusahaan. Banyaknya transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam periode di mana penentuan pajak tersebut dibuat.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, provisi, dan perbedaan temporer, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan bergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini bergantung pada estimasi volume penjualan barang atau jasa, harga, biaya operasi, belanja modal, dan transaksi manajemen lainnya di masa depan.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Kantor Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Functional currency

In the process of applying of the Company's accounting policies, management has made judgment on the determination of functional currency of the Company.

The Company conclude that Rupiah is the Company's functional currency, because:

- Financing from shareholder capital injection is denominated in US Dollar.
- Significant transactions in US Dollars.

Income taxes

Judgements and assumptions are required in determining capital allowances and the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for the Company. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, these differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the period in which the determination is made.

Deferred tax assets, including those arising from unrecouped tax losses, provision and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of future sales volumes or sales of service, prices, operating costs, capital expenditure, and other future transactions.

All judgements and estimates taken by management, as discussed above, may be challenged by the Tax Office. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

i. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Pendapatan, beban dan aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- i. PPN yang timbul dari pembelian aset atau layanan yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item yang diterapkan untuk pengeluaran; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk jumlah PPN.

m. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas.

Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Perusahaan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut dimana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan dalam periode mendatang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

i. Taxation (continued)

Value Added Tax ("VAT")

Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- i. VAT arising from the purchase of assets or services that cannot be credited by the tax office, in this case VAT is recognized as part of the cost of the asset or as part of the item applied to expenses; and
- ii. Receivables and payables presented include the amount of VAT.

m. Share capital

Ordinary share are classified as equity.

Incremental cost directly attributable to the issuance of new share are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

The Company has identified the following critical accounting policies under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future periods.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

I. Perpajakan

Pajak final

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final diterapkan pada nilai bruto transaksi, bahkan ketika pihak yang melakukan transaksi mengalami kerugian.

Pajak penghasilan kini

Beban pajak penghasilan kini diakui berdasarkan penghasilan kena pajak untuk tahun berjalan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku.

Laba kena pajak berbeda dari laba yang dilaporkan dalam laba rugi karena tidak termasuk item pendapatan atau beban yang dapat dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun-tahun lainnya dan selanjutnya tidak termasuk item-item yang tidak pernah dikenakan atau dikurangkan pajak.

Amandemen terhadap kewajiban perpajakan dicatat ketika surat ketetapan pajak diterima atau, jika keberatan atau banding diajukan, ketika hasil keberatan atau banding ditetapkan.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas untuk perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun ketika aset tersebut dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau secara substantif diberlakukan pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan atas barang yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Taksiran pajak tangguhan diakui berkorelasi dengan transaksi yang mendasari baik dalam Penghasilan komprehensif lain maupun langsung dalam ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

I. Taxation

Final tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the party carrying out the transaction is incurring losses.

Current income tax

Current income tax expense is provided based on the taxable income for the current year measured at applicable tax rate.

Taxable profit is different from profit as reported in the profit or loss because it excluded items of income or expenses that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if an objection or appeal is filed, when the result of the objection or appeal is determined.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method for temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rate that is expected to apply to the year when the asset is recovered or the liability is settled based on the tax rates and applicable tax regulations or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax on goods recognized outside of profit or loss is recognized outside of profit or loss. Estimated deferred tax is recognized to correlate with underlying transactions in both the Other Comprehensive Income (OCI) and directly in equity.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

k. Program pensiun dan imbalan kerja (lanjutan)

(i) Kewajiban pensiun (lanjutan)

Beban yang diakui di laporan laba rugi termasuk biaya jasa kini, beban/pendapatan bunga, biaya jasa lalu dan keuntungan/kerugian penyelesaian. Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari program pensiun manfaat pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Pesangon pemutusan kontrak kerja terhutang ketika Perusahaan memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal atau ketika karyawan menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon.

Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal diantara:

- a) ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b) ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang melibatkan pembayaran pesangon.

(ii) Kewajiban pascakerja lainnya

Perusahaan memberikan imbalan kesehatan pascakerja bagi pekerja yang telah memasuki masa pensiun. Imbalan ini diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini terhutang selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

k. Pension plan and employee benefits (continued)

(i) Pension obligations (continued)

Expense charged to profit or loss includes current service costs, interest expense/income, past service cost and gains and losses on settlements. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from defined benefit retirement plans are recognized in OCI.

Termination benefits are payable when an employee's employment is terminated by the Company before the normal retirement date, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits.

The Company recognizes the termination benefits at the earlier of the following dates:

- a) when the Company can no longer withdraw the offer of those benefits; and*
- b) when the Company recognizes restructuring costs involving the payment of termination benefits.*

(ii) Other post-employment obligations

The Company provide "post-retirement" healthcare benefits to their retired employee. This benefit is eligible for the employee that remains working up to retirement age and approaching a minimum service period. The expected cost of this benefit is accrued over the period of employment using the projected unit credit method. This obligation is valued annually by independent qualified actuaries.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai pesewa

Ketika Perusahaan bertindak sebagai pesewa, Perusahaan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Sewa dimana Perusahaan tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

j. Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

k. Program pensiun dan imbalan kerja

(i) Kewajiban pensiun

Perusahaan harus menyediakan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang ("UU") Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau PKB adalah program imbalan pasti.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan keuangan dikurangi nilai wajar aset program.

Besarnya kewajiban imbalan pasti ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara tahunan menggunakan metode *projected unit credit*.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Leases (continued)

The Company as Lessor

When The Company acts as a lessee, The Company classifies each lease in either an operating lease or a finance lease.

Leases in which The Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases initial direct costs in caused in negotiating and arranging an operating leases are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis of rental income. Contingent rents are recognized as revenues on a straight-line basis over the lease term.

j. Expense recognition

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

k. Pension plan and employee benefits

(i) Pension obligations

The Company is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Labour Law No. 13/2003 or the Collective Labour Agreement ("the CLA"), whichever is higher. Since the Labour Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of pension benefits, in substance pension plans under the Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of the defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting date less the fair value of plan assets.

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the *projected unit credit method*.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Sewa (lanjutan)

Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi.
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut.
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i Leases (continued)

Modification of leases

The Company records lease modifications as separate leases if:

- modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- lease fees increase by an amount equivalent to a separate price for an increase in scope and an appropriate adjustment to that separate price to reflect certain contract conditions.

For lease modifications that are not recorded as separate leases, on the effective date of the lease modification, The Company:

- re-measuring and allocating compensation contract modifications;
- determine the lease period of the modified lease;
- re-measure lease liabilities by discounting revision fee payments using a revised discount rate based on the remaining life of the lease and remaining lease payments by making adjustments to the right-of-use asset. The revised discount rate is determined as the tenant's incremental loan interest rate on the effective date of modification.
- decrease the carrying amount of the right-of-use assets to reflect the partial or full termination of the lease for modification of the lease which decreases the scope of the lease. The Company recognizes in profit or loss any profit or loss relating to the partial or full termination of the lease.
- make adjustments related to right-of-use assets for all other lease modifications.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Pembayaran penalti karena penghentian sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna terpisah dari bagian "aset tetap" dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan.

Sewa jangka-pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Leases (continued)

The Company as Lessee (continued)

Lease payments included in the measurement of lease liabilities include the following payments:

- Fixed payments, including fixed payments that are substantially reduced by lease incentives receivables;
- Payment of variable leases that depends on the index or interest rate which is initially measured by using an index or interest rate at the start date;
- The amount expected to be paid by the lessee with a guaranteed residual value;
- The exercise price of the buy option if the lessee is certain enough to execute the option; and
- Penalty payments for termination of leases unless The Company is certain enough not to stop early.

Lease payments are allocated as a principal and financial cost. Financial costs are charged to profit or loss during the lease period so as to produce a constant periodic interest rate on the balance of the liability for each period.

The Company presents right-of-use assets separately from the "fixed assets" and lease liabilities section of the statement of financial position.

Short-term leases

The Company has decided not to recognize lease rights and lease assets for short-term leases that have a lease period of 12 months or less. The Company recognizes lease payments for leases as an expense on a straight-line basis over the lease period.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Pada tanggal insepisi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana bertindak sebagai penyewa, Perusahaan memutuskan untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dan mencatat komponen sewa dan non-sewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

Pada tanggal permulaan, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman sebagai suku bunga.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Leases (continued)

The Company as Lessee (continued)

On the date of the conception or on the revaluation of the contract containing a component of the lease, The Company allocates compensation in the contract to each component of the lease based on the relative price of the lease component and the aggregate price of the non-lease component. However, for supporting leases which act as tenants, The Company decides not to separate the non-leases component and records the lease and non-leased component as one lease component.

At the commencement date, The Company recognizes right-of-use assets and lease liabilities. Right-of-use assets are measured at cost, which includes the initial measurement of the lease liability adjusted for the lease payments made or before the commencement date, plus the initial direct costs incurred and the estimated costs to be incurred to dismantle and move the underlying assets or to restore underlying assets to required conditions and terms of the lease, less the leases incentives received.

The right-of-use assets are then depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier date between the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease period.

Lease liabilities are measured at the present value of the unpaid lease payments at the start date, discounted using the implicit interest rate in the lease or if the interest rate cannot be determined, then using an incremental loan interest rate. Generally, the Company uses loan interest rates as interest rates.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

i. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang diidentifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit, dan harus berbeda secara fisik atau secara substansial mewakili seluruh kapasitas aset yang berbeda secara fisik. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tidak teridentifikasi;
- Perusahaan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Perusahaan memiliki hak ini ketika memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kasus yang jarang terjadi di mana keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan ditentukan sebelumnya, Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset jika salah satu dari:
 - 1) Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 - 2) Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang dibuat, atau diubah, pada atau setelah 1 Januari 2021.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Leases (continued)

The Company as Lessee

At the commencement date of the contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, the lease. A contract is, or contains a lease if the contract gives the right to control the use of the identification asset for a period of time to be exchanged for compensation.

To assess whether the contract gives the right to control the use of identification assets, the Company must assess whether:

- The contract involves the use of the assets identified - this can be determined explicitly or implicitly, and must be physically diffeleases or substantially represent the entire capacity of the physically diffeleases assets. If the supplier has substantive substitution rights, then the asset is not identified;
- The Company has the right to obtain substantially all economic benefits from the use of assets during the period of use; and
- The Company has the right to direct the use of assets. The company has this right when it has the most relevant decision-making rights to change how and for what purpose the asset is used. In rare cases where a decision on how and for what purpose an asset is used is predetermined, the Company has the right to direct the use of the asset if one of:
 - 1) The Company has the right to operate the assets;
 - 2) The Company has designed the assets by determining in advance how and for what purpose the assets will be used during the period of use.

This policy applies to contracts made, or modified, on or after January 1, 2021.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Kas dan kas di bank

Kas dan kas di bank didefinisikan sebagai investasi jangka pendek, sangat likuid dan mudah dikonversi ke jumlah uang tunai yang diketahui.

g. Biaya dibayar dimuka dan uang muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode manfaat masing-masing biaya dibayar dimuka.

h. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap.

Masa manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan aset dikaji dan disesuaikan, jika diperlukan, setidaknya setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya penggantian komponen suatu aset dan biaya inspeksi yang signifikan diakui dalam jumlah tercatat aset jika memenuhi kriteria untuk diakui sebagai bagian dari aset.

i. Sewa

Mulai tanggal 1 Januari 2021, Perusahaan menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau, setelah 1 Januari 2021.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

f. Cash on hand and cash in bank

Cash on hand and cash in banks are defined as short-term investments, highly liquid and readily convertible to known amounts of cash.

g. Prepayments and advances

Prepayments are amortized on a straight-line basis over the estimated beneficial periods of the prepayments.

h. Fixed assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment loss. Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets.

Assets' useful lives, residual values and depreciation methods are reviewed and adjusted if appropriate, at least at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss, when the changes arise.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amounts of replaced parts are derecognised.

The cost of maintenance and repairs is charged to operations as incurred. Significant costs of replacing parts of assets and major inspection costs are recognised in the carrying amount of the assets if the recognition criteria are met.

i. Leases

Starting January 1, 2021, the Company applied SFAS 73 which requires the recognition of lease obligations relating to leases that were previously classified as 'operating leases'. This policy applies to contracts agreed upon or changed, on or after January 1, 2021.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition (continued)

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

(ii) Utang dan Akrua

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

(ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Perusahaan dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 71 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

The subsequent measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by SFAS 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in SFAS 71 are satisfied. The Company has not designated any financial liability as at FVTPL.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Perusahaan tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Perusahaan tidak memiliki instrumen utang.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment (continued)

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its trade and other receivables do not contain significant financing component, the Company applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Company established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVOCI, the Company has no debt instrument.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Perusahaan mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Perusahaan masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Perusahaan.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk membayar kembali.

Penurunan Nilai

Perusahaan mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Perusahaan, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition (continued)

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

Impairment

The Company recognizes an allowance for Expected Credit Loss ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Perusahaan diklasifikasikan secara takterbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan Perusahaan) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir, atau
- Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Company had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
- The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Instrumen utang Perusahaan yang diukur pada NWPKL termasuk investasi pada instrumen utang dengan kuota yang termasuk dalam aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas).

Pada pengakuan awal, Perusahaan dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR")

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at FVOCI (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

The Company's debt instruments at FVOCI includes investments in quoted debt instruments included under other non-current financial assets.

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

Upon initial recognition, the Company can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under SFAS 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- NWLR.

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Perusahaan mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

e. Financial instruments (continued)

Financial asset (continued)

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- FVTPL.

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Transaksi pihak berelasi (lanjutan)

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

e. Instrumen keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset keuangan

Pengakuan dan pengukuran awal

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

d. Transactions with related parties (continued)

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the financial statements are unrelated parties.

e. Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial asset

Initial recognition and measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under SFAS 72.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Penjabaran mata uang asing

c. Foreign currency translation

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

(i) Functional and presentation currency

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan disajikan dalam Dolar AS, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Perusahaan masih menunggu persetujuan dari Kantor Pajak terkait dengan perubahan mata uang fungsional Perusahaan.

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency). The financial statements are presented in US Dollar, which is the Company's functional currency. The Company awaiting approval from Tax Office related changes in functional currency.

(ii) Transaksi dan saldo

(ii) Transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berasal dari pembayaran atas transaksi-transaksi tersebut dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun diakui dalam laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of the transaction. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada periode 31 Desember 2021 dan kurs tengah pada periode 31 Desember 2020 yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

As of the statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) exchange rate for the period 31 December 2021 and the middle rates for the period 31 December 2020 published by Bank Indonesia, were as follows:

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	
1 Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS")	14.278	14.105	1 United States Dollar ("US Dollar")

d. Transaksi pihak berelasi

d. Transactions with related parties

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak berelasi.

The Company have transactions with related parties as defined in SFAS 7: Related party disclosures.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 18.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties. Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 18.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Perbaikan Tahunan 2021

Sebagai bagian dari pemeliharaan dan perbaikan PSAK, berikut adalah ringkasan informasi tentang penyempurnaan PSAK tahunan yang berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penyempurnaan PSAK tahunan pada dasarnya merupakan serangkaian amandemen lingkup sempit yang memberikan klarifikasi agar tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip yang ada atau prinsip-prinsip baru.

- PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan*, beberapa perubahan tentang pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.
- PSAK 13: *Properti Investasi*, tentang pengungkapan penerapan model nilai wajar telah dihapus.
- PSAK 48: *Penurunan Nilai Aset*, tentang ruang lingkup penurunan nilai aset dan menghapus perbedaan dengan IFRS pada IAS 36 paragraf 04(a).
- PSAK 66: *Pengaturan Bersama*, mengenai penyesuaian pada paragraf 25, PP11, PP33A(b) dan catatan kakinya, C12 dan C14 tentang referensi ke PSAK 71: *Instrumen Keuangan*.
- ISAK 16: *Pengaturan Konsesi Jasa*, Mengenai penyesuaian dalam beberapa paragraf dalam contoh ilustrasi agar konsisten dengan PSAK 72: *Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes in accounting principles
(continued)**

2021 Annual Improvements

As part of maintenance and improvement of SFAS, the following summary provides information on the annual improvements of SFAS that are effective for annual periods beginning on or after January 1, 2021. The annual improvements of SFAS are basically a set of narrow scope amendments that provide clarification so that there are no significant changes to existing principles or new principles.

- SFAS 1: *Presentation of Financial Statements*, some changes regarding consideration made by management in the process of applying accounting policies that significantly affect the amounts they recognize in the financial statements.
- SFAS 13: *Investment Property*, regarding disclosure of applying fair value model has been deleted.
- SFAS 48: *Impairment of Assets*, regarding the scope of impairment of assets and deletion of the difference with IFRS in IAS 36 paragraph 04(a).
- SFAS 66: *Joint Arrangement*, Regarding adjustments in paragraphs 25, PP11, PP33A(b) and its footnotes, C12 and C14 regarding reference to SFAS 71: *Financial instruments*.
- IFAS 16: *Service concession arrangement*, regarding adjustment in several paragraphs in illustrative example to be consistent with SFAS 72: *Revenue from Contracts with Customers*.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

**b. Changes in accounting principles
(continued)**

**Konsesi Sewa Terkait Covid-19 - Amandemen
PSAK 73, Sewa (lanjutan)**

**Covid- 19-Related Rent Concessions -
Amendments to SFAS 73, Leases
(continued)**

Cara praktis ini hanya dapat diterapkan untuk konsesi sewa yang merupakan akibat langsung dari pandemi COVID-19, dan hanya jika semua kondisi berikut terpenuhi:

This practical expedient is applied only to rent concessions occurring as a direct consequence of the COVID-19 pandemic, and only if all of the following conditions were met:

1. perubahan pembayaran sewa mengakibatkan imbalance sewa yang direvisi secara substansial sama dengan, atau kurang dari, imbalance sewa sesaat sebelum perubahan;
2. pengurangan pembayaran sewa hanya mempengaruhi pembayaran yang jatuh tempo pada atau sebelum 30 Juni 2021; dan
3. tidak ada perubahan substantif atas syarat dan ketentuan sewa lainnya.

1. *the change in lease payments resulted in a revised consideration for the lease that was substantially the same as, or less than, the consideration for the lease immediately preceding the change;*
2. *any reduction in lease payments affected only payments due on or before 30 June 2021; and*
3. *there was no substantive change to other terms and conditions of the lease.*

Sehubungan dengan pandemi yang terus berlangsung, amandemen tambahan diterbitkan pada bulan Maret 2021 untuk memperpanjang tanggal pada Butir 2 di atas dari tanggal 30 Juni 2021 menjadi tanggal 30 Juni 2022.

In light of the ongoing pandemic additional amendment was subsequently issued in March 2021 to extend the date in Point 2 above from 30 June 2021 to 30 June 2022.

Jika penyewa telah menerapkan cara praktis dalam amandemen Mei 2020, maka diharuskan untuk terus menerapkannya secara konsisten, untuk semua kontrak sewa dengan karakteristik serupa dan dalam keadaan serupa, menggunakan amandemen tersebut. Jika penyewa tidak menerapkan cara praktis dalam amandemen Mei 2020 untuk konsesi sewa yang memenuhi syarat, maka penyewa tidak dapat menerapkan cara praktis dalam amandemen Maret 2021.

If a lessee already applied the practical expedient in the May 2020 amendment, it is required to continue to apply the practical expedient consistently, to all lease contracts with similar characteristics and in similar circumstances, using the March 2021 amendment. If a lessee did not apply the practical expedient in the May 2020 amendment to eligible lease concessions, it is prohibited from applying the practical expedient in the March 2021 amendment.

Amandemen Maret 2021 diterapkan secara retrospektif, dengan mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amandemen tersebut sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada awal periode pelaporan tahunan di mana penyewa pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

The March 2021 amendment is to be applied retrospectively, recognizing the cumulative effect of initially applying that amendment as an adjustment to the opening balance of retained earnings at the beginning of the annual reporting period in which the lessee first applies the amendment.

Namun, Perusahaan belum menerima konsesi sewa terkait Covid-19, tetapi berencana untuk menerapkan cara praktis jika berlaku dalam periode aplikasi yang diizinkan.

However, the Company has not received Covid-19-related rent concessions but plans to apply the practical expedient if it becomes applicable within allowed period of application.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

**Amandemen PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62,
PSAK 71 dan PSAK 73 – Reformasi Acuan
Suku Bunga (Tahap 2) (lanjutan)**

Amandemen ini memberikan kelonggaran sementara yang membahas dampak pelaporan keuangan ketika suku bunga penawaran antarbank (*Interbank Offered Rate*) diganti dengan suku bunga alternatif yang hampir bebas risiko (SBB). Amandemen tersebut mencakup cara praktis berikut ini: (lanjutan)

- Mengizinkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi suku bunga acuan terhadap penetapan dan dokumentasi lindung nilai tanpa penghentian hubungan lindung nilai.
- Memberikan kelonggaran sementara kepada entitas dari keharusan memenuhi persyaratan yang dapat diidentifikasi secara terpisah ketika instrumen SBB ditetapkan sebagai lindung nilai dari suatu komponen risiko.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan. Perusahaan bermaksud untuk menggunakan cara praktis di periode mendatang jika dapat diterapkan.

**Konsesi Sewa Terkait Covid-19 - Amandemen
PSAK 73, Sewa**

Amandemen ini diterbitkan pada bulan Mei 2020 untuk memberikan kelonggaran kepada penyewa dari penerapan pedoman PSAK 73 tentang akuntansi modifikasi sewa untuk konsesi sewa yang terkait langsung dengan pandemi Covid-19. Sebagai cara praktis, penyewa dapat memilih untuk tidak mengevaluasi apakah konsesi sewa terkait Covid-19 dari pesewa merupakan modifikasi sewa. Penyewa yang mengambil opsi ini mengakui perubahan pembayaran sewa akibat konsesi sewa terkait Covid-19 dengan cara yang sama seperti entitas akan mengakui perubahan berdasarkan PSAK 73, jika perubahan tersebut bukan modifikasi sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**b. Changes in accounting principles
(continued)**

**Amendments to SFAS 55, SFAS 60, SFAS
62, SFAS 71 and SFAS 73 – Interest Rate
Benchmark Reform (Phase 2) (continued)**

The amendments provide temporary reliefs which address the financial reporting effects when an interbank offered rate (IBOR) is replaced with an alternative nearly risk-free interest rate (RFR). The amendments include the following practical expedients: (continued)

- Permit changes required by interest rate benchmark reform to be made to hedge designations and hedge documentation without the hedging relationship being discontinued.
- Provide temporary relief to entities from having to meet the separately identifiable requirement when an RFR instrument is designated as a hedge of a risk component.

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Company. The Company intends to use the practical expedients in future periods if they become applicable.

**Covid- 19-Related Rent Concessions -
Amendments to SFAS 73, Leases**

These amendments were issued in May 2020 to provide relief to lessees from applying SFAS 73 guidance on lease modification accounting for rent concessions arising as a direct consequence of the Covid-19 pandemic. As a practical expedient, a lessee may elect not to assess whether a Covid-19 related rent concession from a lessor is a lease modification. A lessee that makes this election accounts for any change in lease payments resulting from the Covid-19 related rent concession the same way it would account for the change under SFAS 73, if the change was not a lease modification.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan kas di bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi penting tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks, atau area di mana asumsi dan estimasi yang berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Perusahaan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, termasuk standar baru dan/atau yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan Perusahaan:

Amandemen PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71 dan PSAK 73 – Reformasi Acuan Suku Bunga (Tahap 2)

Amandemen ini memberikan kelonggaran sementara yang membahas dampak pelaporan keuangan ketika suku bunga penawaran antarbank (*Interbank Offered Rate*) diganti dengan suku bunga alternatif yang hampir bebas risiko (SBB). Amandemen tersebut mencakup cara praktis berikut ini:

- Cara praktis untuk syarat perubahan kontrak, atau perubahan arus kas yang secara langsung disyaratkan oleh reformasi (suku bunga acuan), untuk diperlakukan sebagai perubahan suku bunga mengambang, setara dengan pergerakan suku bunga pasar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES (continued)

a. Basis of preparation of financial statements (continued)

The statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash on hand and cash in bank classified into operating, investing and financing activities.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Changes in accounting principles

The Company made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2021, including the following new and/or revised standards that have affected the financial statements of the Company:

Amendments to SFAS 55, SFAS 60, SFAS 62, SFAS 71 and SFAS 73 – Interest Rate Benchmark Reform (Phase 2)

The amendments provide temporary reliefs which address the financial reporting effects when an interbank offered rate (IBOR) is replaced with an alternative nearly risk-free interest rate (RFR). The amendments include the following practical expedients:

- A practical expedient to require contractual changes, or changes to cash flows that are directly required by the (interest rate benchmark) reform, to be treated as changes to a floating interest rate, equivalent to a movement in a market rate of interest.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Susunan dewan komisaris dan direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>
Komisaris Utama	Suwahyanto
Komisaris	Syaifullah Ma'shum
	<u>31 Desember 2021/ December 31, 2021</u>
Direktur Utama	Feri Yani
Direktur Pengembangan	Djoko Koen Soewito
Direktur Operasi	Mulyono
Direktur Keuangan	Sigit Hanggoro

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Perusahaan memiliki karyawan tetap dan perbantuan masing-masing sebanyak 116 (2020:40) dan 84 (2020:8) karyawan (tidak diaudit).

c. Penerbitan laporan keuangan

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 10 Maret 2022.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

1. GENERAL (continued)

b. Boards of commissioners and directors

As of December 31, 2021, the Boards of Commissioners and Directors of the Company were as follows:

	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
	-	President Commissioner
	Suwahyanto	Commissioner
	<u>31 Desember 2020/ December 31, 2020</u>	
	Narendra Widjajanto	President Director
	Djoko Koen Soewito	Development Director
	Mulyono	Operations Director
	-	Finance Director

As of December 31, 2021 and 2020, the Company has direct hire and seconded employee of 116 (2020: 40) and 84 (2020:8) employees (unaudited), respectively.

c. Issuance of financial statements

The Company's financial statements were completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on March 10, 2022.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES

a. Basis of preparation of financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by the Financial Accounting Board of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.

The financial statements, except statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies for those accounts.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Kilang Pertamina Balikpapan ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris dari Marianne Vincentia Hamdani, S.H., No. 12 tanggal 7 Mei 2019. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0025280.AH.01.01 tanggal 18 Mei 2019, dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan yang terakhir berdasarkan Akta No. 9, tanggal 26 Mei 2020 dari Notaris Marianne Vincent's Hamdani S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0041618.AH.01.02, tanggal 18 Juni 2020.

Jenis kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. 12, tanggal 7 Mei 2019 dari Notaris Marianne Vincent's Hamdani S.H. adalah sebagai berikut:

- a. Industri produk pengilangan minyak bumi.
- b. Industri bahan bakar dan minyak pelumas hasil pengilangan minyak bumi.
- c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara.
- d. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu.

Perusahaan berdomisili di Patra Jasa Office Tower, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Kilang Pertamina Balikpapan (the "Company") was established by Notarial Deed No. 12 of Marianne Vincentia Hamdani, S.H., dated May 7, 2019. The Company's Deed of Establishment has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree Number AHU-0025280.AH.01.01 dated May 18, 2019 and has been published in State Gazette of the Republic of Indonesia.

The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest amendment based on Notarial Deed No.9 by Notary Marianne Vincent's Hamdani S.H., dated on May 26, 2020, were approved by the Minister of Law and Human Rights through Decision Letter No. AHU-0041618.AH.01.02 dated June 18, 2020.

The Company's business activities based on Notarial Deed No. 12, dated May 7, 2019 by Notary Marianne Vincent's Hamdani S.H. were as follows:

- a. Petroleum refining products industry.*
- b. Fuel and lubricating oil industry from petroleum refineries.*
- c. Organic basic chemical industry sourced from petroleum, natural gas and coal.*
- d. Large-scale trade in solid, liquid and gas fuels and products that related with those.*

The Company is domiciled at Patra Jasa Office Tower, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34, Setiabudi, Kuningan, South Jakarta, Indonesia.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

	2021	Catatan/ Notes	2020	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga	2.147.020	16	445.671	Interest income
Penerimaan kas dari aktivitas operasi lainnya	36.025		100.343	Cash receipt from other operating activity
Pembayaran premi asuransi dan klaim lainnya	(14.099)		(416.609)	Payment for insurance premium
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	2.168.946		129.405	Net cash flows provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(1.273.783.285)	6,22a	(245.222.385)	Acquisition of fixed assets
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(1.273.783.285)		(245.222.385)	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan uang muka modal saham	900.000.000	14,22b	685.190.812	Proceed from advance for share capital
Penerimaan pinjaman jangka pendek	301.626.926	22b	-	Proceeds from short-term loans
Pembayaran pinjaman jangka pendek	(303.005.555)	22b	-	Payments of short-term loan
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	898.621.371		685.190.812	Net cash flows provided by financing activities
KENAIKAN NETO KAS DAN KAS DI BANK	(372.992.968)		440.097.832	NET INCREASE IN CASH ON HAND AND CASH IN BANK
Dampak perubahan valuta asing terhadap kas dan setara kas	(2.733.894)		1.891.129	Effect of fluctuation of foreign exchange rate on cash and cash equivalents
KAS DAN KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	526.685.910		84.696.949	CASH ON HAND AND CASH IN BANK AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	150.959.048		526.685.910	CASH ON HAND AND CASH IN BANK AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended
December 31, 2021
(Expressed in US Dollar, unless otherwise stated)

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Uang muka untuk modal saham/ Advance for share capital	Saldo laba/Retained earnings		Penghasilan komprehensif lainnya/Other comprehensive income	Total ekuitas/ Total equity
				Dicadangkan/ Appropriated	Tidak dicadangkan/ Unappropriated		
Saldo 31 Desember 2019		69.911	84.620.474	-	11.833	-	84.702.218
Penambahan modal dari pemegang saham	14	-	685.190.812	-	-	-	685.190.812
Uang muka untuk modal saham		84.620.474	(84.620.474)	-	-	-	-
Rugi tahun berjalan		-	-	-	(1.583.059)	-	(1.583.059)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti - neto		-	-	-	-	23.903	23.903
Saldo 31 Desember 2020		84.690.385	685.190.812	-	(1.571.226)	23.903	768.333.874
Uang muka untuk modal saham	14	-	900.000.000	-	-	-	900.000.000
Rugi tahun berjalan		-	-	-	2.722.028	-	2.722.028
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti - neto		-	-	-	-	44.975	44.975
Saldo 31 Desember 2021		84.690.385	1.585.190.812	-	1.150.802	68.878	1.671.100.877

Balance as of December 31, 2019

Additional capital from shareholder
Advance for share capital
Loss for the year
Remeasurement of defined
benefit liability - net

Balance as of December 31, 2020

Advance for share capital
Loss for the year
Remeasurement of defined
benefit liability - net

Balance as of December 31, 2021

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar, kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

	31 Desember/ December 31, 2021	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	
Beban umum dan administrasi	(1.112.464)	2j, 15	(495.651)	<i>General and administrative expenses</i>
RUGI USAHA	(1.112.464)		(495.651)	OPERATING LOSS
Pendapatan keuangan	2.147.020	16	445.671	<i>Finance income</i>
Pendapatan/(beban) lain-lain - neto	1.561.704	17	(1.599.488)	<i>Other Income/(expense) - net</i>
LABA/(RUGI) USAHA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.596.260		(1.649.468)	GAIN/(LOSS) BEFORE INCOME TAX
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX BENEFIT
Manfaat pajak penghasilan	125.768	2i, 10c	66.409	<i>Income tax benefit</i>
LABA/(RUGI) TAHUN BERJALAN	2.722.028		(1.583.059)	GAIN/(LOSS) FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak): Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto	44.975	2k	23.903	<i>Item not to be reclassified to profit or loss in subsequent periods (net of tax): Remeasurement of net defined benefit liability</i>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK PENGHASILAN	44.975		23.903	OTHER COMPREHENSIVE INCOME AFTER INCOME TAX
TOTAL PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.767.003		(1.559.156)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS) FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)**

	31 Desember/ December 31, 2021	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham				Share capital
Modal dasar-10.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham				Authorised-10,000 ordinary share at par value of Rp1,000,000 (full amount) per share
Modal ditempatkan dan disetor penuh :				Issued and fully paid-
2020: 11.775.015 saham				2020: 11.775.015 share
2021: 11.775.015 saham	84.690.385	2m,12	84.690.385	2021: 11.775.015 share
Saldo (rugi)/laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	-	13	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	1.150.802		(1.571.226)	Unappropriated
Uang muka untuk modal saham	1.585.190.812	14	685.190.812	Advance for share capital
Komponen ekuitas lainnya	68.878		23.903	Other equity component
TOTAL EKUITAS	1.671.100.877		768.333.874	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.200.663.267		1.516.724.616	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam US Dollar,
kecuali dinyatakan lain)

PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021
(Expressed in US Dollar,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2021	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2020	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan kas di bank	150.959.048	2e,2f,4	526.685.910	Cash on hand and cash in bank
Pajak dibayar dimuka	209.114.880	2l,10a	54.166.025	Prepaid tax
Biaya dibayar dimuka	9.322	2g,5	112.437.678	Prepayments
Total aset lancar	360.083.250		693.289.613	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	172.750	2l,10e	60.433	Deferred tax asset
Aset tetap	1.839.058.054	2h,6,22a	823.374.570	Fixed asset
Aset hak guna	1.349.213	2i, 7	-	Right of use asset
Total aset tidak lancar	1.840.580.017		823.435.003	Total non-current assets
TOTAL ASET	2.200.663.267		1.516.724.616	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	349.920.733	2e,8,18b	569.627.526	Related parties
Pihak ketiga	171.764.606	2e,8	177.448.096	Third parties
Utang pajak	5.593.614	2l,10b	944.214	Taxes payable
Beban akrual	-	2j	3.226	Accrued expenses
Utang sewa - bagian lancar	1.139.268	2i,9	-	Lease liabilities - current portion
Total liabilitas jangka pendek	528.418.221		748.023.062	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				LONG-TERM LIABILITIES
Liabilitas imbalan kerja karyawan	943.966	2k,11	367.680	Employee benefit liabilities
Utang sewa - dikurangi bagian lancar	200.203	2i,9	-	Lease liabilities - net of current portion
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.144.169		367.680	Total long-term liabilities
TOTAL LIABILITAS	529.562.390		748.390.742	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00198/2.1032/AU.1/02/0702-3/1/III/2022 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Kilang Pertamina Balikpapan tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00198/2.1032/AU.1/02/0702-3/1/III/2022 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Kilang Pertamina Balikpapan as of December 31, 2021, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Widya Arianti

Registrasi Akuntan Publik No.AP.0702/Public Accountant Registration No. AP.0702

10 Maret 2022/March 10, 2022



00198

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00198/2.1032/AU.1/02/0702-3/1/III/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Kilang Pertamina Balikpapan

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Kilang Pertamina Balikpapan terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00198/2.1032/AU.1/02/0702-3/1/III/2022

*The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Kilang Pertamina Balikpapan*

We have audited the accompanying financial statements of PT Kilang Pertamina Balikpapan, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT
AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 54	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PT KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN**

Atas nama Direksi, kami, yang bertanda:
tangan di bawah ini

*On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned
below:*

1. Nama : Feri Yani
Alamat kantor : Patra Jasa Office Tower Lt.2
Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta
12950
Nomor telepon : 021 - 3815111
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Sigit Hanggoro
Alamat kantor : Patra Jasa Office Tower Lt.2
Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta
12950
Nomor telepon : 021 - 3815111
Jabatan : Direktur Keuangan

1. Name : Feri Yani
Office address : Patra Jasa Office Tower Lt.2
Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34
Jakarta 12950
Telephone number : 021 - 3815111
Position : President Director
2. Name : Sigit Hanggoro
Office address : Patra Jasa Office Tower Lt.2
Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34
Jakarta 12950
Telephone number : 021 - 3815111
Position : Finance Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Kilang Pertamina Balikpapan untuk tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut;
2. Laporan keuangan PT Kilang Pertamina Balikpapan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Kilang Pertamina Balikpapan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan keuangan PT Kilang Pertamina Balikpapan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Kilang Pertamina Balikpapan.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Kilang Pertamina Balikpapan as of December 31, 2021 and for the year then ended.*
2. *The financial statements of PT Kilang Pertamina Balikpapan have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the financial statements of PT Kilang Pertamina Balikpapan have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and*
b. *The financial statements of PT Kilang Pertamina Balikpapan do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;*
4. *We are responsible for the internal control system of PT Kilang Pertamina Balikpapan.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Jakarta, 10 Maret 2022/March 10, 2022

Atas nama dan mewakili Direksi/ *For and on behalf of the Board of Directors*



Feri Yani
Direktur Utama/President Director

Sigit Hanggoro
Direktur Keuangan/Finance Director

PT. KILANG PERTAMINA BALIKPAPAN
Patra Jasa Office Tower Lt 2
Jl Gatot Subroto Kav 32-34 Kuningan
Jakarta Selatan - Indonesia

PT Kilang Pertamina Balikpapan

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Financial statements as of December 31, 2021
and for the year then ended
with independent auditors' report*

Laporan Tahunan 2021
Annual Report 2021

Langkah Progresif Mewujudkan Kilang Kelas Dunia

Progressive Steps to Realize a World-Class Refinery



PT Kilang Pertamina Balikpapan

KANTOR DOMISILI | DOMICILE OFFICE

Patra Jasa Office Tower Lt. 2
Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 32-34,
Setiabudi, Kuningan,
Jakarta Selatan, Indonesia, 12950

